Pemerintah
Kabupaten Mappi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi

Tahun 2025 - 2029

Pemerintah
Kabupaten Mappi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Mappi

Tahun 2025-2029

BUPATI MAPPI
PROVINSI PAPUA SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAPPI
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MAPPI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAPPI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten

Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor … Tahun … tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor …);
20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor … Tahun … tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan Tahun…….(Lembaran Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor …);
21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor …. Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi

Papua Selatan Tahun 2025 Nomor …, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor …);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mappi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2012 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MAPPI

dan

BUPATI MAPPI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Mappi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bupati adalah Bupati Mappi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mappi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
9. Distrik adalah Distrik yang ada di wilayah Kabupaten Mappi.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 2O (dua puluh) tahun sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen yang memuat struktur dengan rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Pengendalian dan evaluasi adalah suatu proses pemantauan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target pembangunan Daerah.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

Pasal 2

(1) RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program

pembangunan Bupati yang disusun berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

(2) RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun.

(3) RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
   a. Bab I : Pendahuluan;
   b. Bab II : Gambaran Umum Daerah;
   c. Bab II : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
   d. Bab IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   e. Bab V : Penutup.

(2) Dokumen RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029.

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 lingkup Daerah mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029.

(4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat menjamin:
   a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif Renja Perangkat Daerah; dan
   b. tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

(5) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029.

(6) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mappi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila:

   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;

   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
   d. merugikan kepentingan Daerah dan nasional.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Merugikan kepentingan Daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan Daerah dan nasional.

(4) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.

(5) Perubahan RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

(6) Perubahan RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(7) Tata cara perubahan RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kepi
pada tanggal ...

BUPATI MAPPI,

KRISTOSIMUS YOHANES AGAWEMU

Diundangkan di Kepi
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAPPI,

FERDINANDUS KAINAKAIMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2025 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA SELATAN: ...

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAPPI

NOMOR ..... TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN MAPPI TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM/D), dan rencana kerja pemerintah (RKP/D) sebagai rencana tahunan.

RPJMD sebagai penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, merupakan komitmen kinerja (performance agreement) Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 sesuai periode. Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat

tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD).

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan perspektif masa depan daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi:

"Percepatan Pembangunan untuk perubahan Mappi lebih Religi, Mandiri, Bermartabat, Adil dan Makmur, Berkesinambungan dan Terintegrasi, serta Berkelanjutan guna menunjang terwujudnya kawasan baru ketahanan pangan di Provinsi Papua Selatan"

Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah, dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka disusunlah RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun maksud dari penyusunan dokumen Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Daerah, dan perumusan prioritas pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan, program, indikator kinerja, sasaran, lokasi, total kebutuhan, target kinerja, dan indikasi pendanaan selama Tahun 2025-2029.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2025 NOMOR .....

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun pada momentum yang sangat strategis bagi perjalanan pembangunan Kabupaten Mappi ke depan.

Sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama sebagai sentra produksi sagu, perikanan, dan kawasan ekosistem gambut yang vital, Kabupaten Mappi memiliki modal besar untuk maju. Namun, kita juga dihadapkan pada tantangan fundamental, yaitu ketergantungan fiskal yang masih tinggi pada dana transfer pemerintah pusat serta status sebagai daerah tertinggal yang memerlukan akselerasi pembangunan di segala bidang.

Oleh karena itu, RPJMD ini bukan sekadar dokumen perencanaan rutin, melainkan sebuah cetak biru transformasi yang akan mengarahkan Kabupaten Mappi dari ketergantungan fiskal menuju kemandirian ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal dan kelestarian lingkungan. Dokumen ini mengintegrasikan strategi-strategi transformatif yang dirumuskan dalam enam pilar utama, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemerataan akses pendidikan dan kesehatan.
2. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk membuka konektivitas dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Pengembangan Ekonomi Produktif dan Inklusif yang berbasis pada hilirisasi komoditas unggulan lokal seperti sagu dan perikanan.
4. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berkualitas dalam melayani.
5. Penguatan Kehidupan Sosial Budaya yang harmonis, religius, dan berlandaskan kearifan lokal.
6. Penjaminan Kelestarian Lingkungan Hidup, khususnya dalam melindungi ekosistem gambut sebagai aset ekologis nasional dan global.

Kami berharap RPJMD ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam mewujudkan visi:

“Percepatan Pembangunan untuk perubahan Mappi lebih Religi, Mandiri, Bermartabat, Adil dan Makmur, Berkesinambungan dan Terintegrasi, serta Berkelanjutan guna menunjang terwujudnya kawasan baru ketahanan pangan di Provinsi Papua Selatan”

Keberhasilan implementasi RPJMD ini memerlukan komitmen, kerja keras, dan kolaborasi sinergis dari seluruh pemangku kepentingan, baik jajaran pemerintah daerah, pihak swasta, maupun seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mappi. Mari bersama kita wujudkan Mappi yang lebih maju dan sejahtera.

Mappi, Agustus 2025

Bupati Mappi

Kristosimus Yohanes Agawemu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR xv
DAFTAR ISI xvii
DAFTAR TABEL xx
DAFTAR GAMBAR xxiii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 LATAR BELAKANG I-1
1.2 DASAR HUKUM I-4
1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA I-8
1.3.1 Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan RPJPD 2025-2045 Kabupaten Mappi I-9
1.3.2 Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029 ..... I-10
1.3.3 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 ..... I-11
1.3.4 Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Mappi I-12
1.3.5 Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Kabupaten Mappi I-12
1.3.6 Keterkaitan RPJMD dengan Renstra, RKPD, Renja dan APBD I-13
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN I-13
1.4.1 Maksud I-13
1.4.2 Tujuan I-14
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN I-15
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-1
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-46
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II-68
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-91
2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH II-119

2.2.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir (2020-2024) II-120
2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan (2026-2030) II-183
2.3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS II-205
2.3.1 Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah II-207
2.3.2 Permasalahan Pembangunan Daerah II-217
2.3.3 Isu Strategis II-228
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1 VISI III-1
3.2 MISI III-3
MISI 1 (SUMBER DAYA MANUSIA): MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS III-17
MISI 2 (INFRASTRUKTUR): MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERKUALITAS III-18
MISI 3 (EKONOMI): MEWUJUDKAN EKONOMI YANG PRODUKTIF DAN INKLUSIF BERBASIS POTENSI LOKAL III-18
MISI 4 (TATA KELOLA): MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS III-19
MISI 5 (SOSIAL BUDAYA): MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG HARMONIS, RELIGIUS, DAN BERBUDAYA III-20
MISI 6 (LINGKUNGAN): MEWUJUDKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP III-21
3.3 TUJUAN DAN SASARAN III-22
3.4 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-29
3.4.1 Strategi Penahapan Pembangunan III-29
3.4.2 Arah Pembangunan Kewilayahan dalam RPJMN III-34
3.4.3 Arah Kebijakan Daerah III-36
3.4.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah III-46
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1
4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 ..... IV-1

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-110
4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah IV-110
4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) IV-111
4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) IV-118
BAB V PENUTUP V-1
5.2 KESIMPULAN V-1
5.3 KAIDAH PELAKSANAAN.....V-2
5.4 PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH V-4

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sistematika Dokumen RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 ..... I-15

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Distrik di Kabupaten Mappi II-3
Tabel 2. 2 Luas Kawasan Hidrologis Gambut Kabupaten Mappi II-9
Tabel 2. 3 Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Mappi II-10
Tabel 2. 4 Potensi Luas Lahan Pertanian Terpetakan Menurut Distrik di Kabupaten Mappi II-10
Tabel 2. 5 Potensi Lahan Sagu Terpetakan Menurut Distrik di Kabupaten Mappi II-12
Tabel 2. 6 Luas Wilayah dengan Status Daya Dukung Air II-14
Tabel 2. 7 Luas Wilayah dengan Status Daya Dukung Pangan II-16
Tabel 2. 8 Capaian Indikator TPB Ketahanan Pangan Kabupaten Mappi 2019-2024. II-21
Tabel 2. 9 Pelayanan Ketenagalistrikan Kabupaten Mappi II-23
Tabel 2. 10 Daya Terpasang dan Produksi Listrik PT PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN menurut Kecamatan/Distrik di Kabupaten Mappi Tahun 2024 ..... II-24
Tabel 2. 11 Jumlah Pelanggan Listrik menurut Distrik di Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-25
Tabel 2. 12 Capaian Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Mappi Tahun 2019-2023 ..... II-26
Tabel 2. 13 Capaian Pelayanan Sanitasi Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-29
Tabel 2. 14 Rata-Rata Sampah yang Dihasilkan dan Rata-Rata Timbulan Sampah Menurut Kecamatan/Distrik di Kabupaten Mappi Tahun 2023 ..... II-30
Tabel 2. 15 Capaian Pelayanan Persampahan Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024. II-30
Tabel 2. 16 Indikator Kinerja Kebencanaan di Kabupaten Mappi II-31
Tabel 2. 17 *Sex Ratio* Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-35
Tabel 2. 18 Distribusi Penduduk Kabupaten Mappi Tahun 2024 ..... II-36
Tabel 2. 19 Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 ... II-43
Tabel 2. 20 Proyeksi Komposisi Umur dan Angka Ketergantungan di Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 ..... II-44
Tabel 2. 21 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-47

Tabel 2. 22 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-48
Tabel 2. 23 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Mappi Tahun 2021-2024 ..... II-49
Tabel 2. 24 PDRB per Kapita Kabupaten Mappi tahun 2020-2023 ..... II-53
Tabel 2. 25 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-54
Tabel 2. 26 Indeks Gini Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-55
Tabel 2. 27 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-56
Tabel 2. 28 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-64
Tabel 2. 29 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-73
Tabel 2. 30 Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Pertambangan dan Penggalian Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-74
Tabel 2. 31 Indeks Literasi Digital Kabupaten Mappi II-78
Tabel 2. 32 Pembentukan Modal Tetap Bruto (Juta Rupiah) Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-82
Tabel 2. 33 Net Ekspor Barang dan Jasa (Juta Rupiah) Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-83
Tabel 2. 34 Inflasi Bulanan Kabupaten Merauke Tahun 2020-2024 ..... II-91
Tabel 2. 35 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2020-2024 ..... II-93
Tabel 2. 36 Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2021-2024 ..... II-94
Tabel 2. 37 Indeks Integritas Nasional Kabupaten Mappi Tahun 2020-2023 ..... II-95
Tabel 2. 38 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Tahun 2020-2024 ..... II-96
Tabel 2. 39 Nilai Indeks SAKIP Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2020-2024 ..... II-98
Tabel 2. 40 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2021-2024 ..... II-106
Tabel 2. 41 Realisasi APBD Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-122
Tabel 2. 42 Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-126
Tabel 2. 43 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-148
Tabel 2. 44 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-169
Tabel 2. 45 Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-174
Tabel 2. 46 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030 ..... II-184
Tabel 2. 47 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2026-2030 ..... II-187

Tabel 2. 48 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2026-2030.....II-192
Tabel 2. 49 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2026-2030 .....II-197
Tabel 2. 50 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2026-2030.....II-201
Tabel 2. 51 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029.....II-209
Tabel 2. 52 Rumusan Permasalahan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Masih Perlu Ditingkatkan.....II-219
Tabel 2. 53 Rumusan Permasalahan Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup II-223
Tabel 2. 54. Rumusan Belum optimalnya Penyelenggaraan Tata Kekola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.....II-226
Tabel 2. 55 Rumusan Permasalahan Terciptanya Keamanan, Kedamaian dan Ketertiban Masyarakat yang Tangguh Masih Perlu Dioptimalkan.....II-228
Tabel 2. 56 Telaah Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041.....II-271
Tabel 2. 57 Telaah RTRW Kabupaten Mappi Tahun 2011-2031.....II-281
Tabel 2. 58 Isu Strategis RPJPD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2045.....II-290
Tabel 2. 59 Pemetaan Isu Strategis Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 ...II-294

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 .....III-22
Tabel 3. 2 Tema Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 disandingkan dengan RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 .....III-30
Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Daerah Kabupaten Mappi.....III-37
Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Daerah Kabupaten Mappi sesuai Transformasi Misi III-42
Tabel 3. 6 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 .....III-53

Tabel 4. 1 Program, Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030..... IV-2
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029..... IV-110
Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 ..... IV-112
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 ..... IV-119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Mappi I-3
Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan I-9

Gambar 2. 1 Peta Letak Wilayah Kabupaten Mappi II-2
Gambar 2. 2 Peran Strategis Kabupaten Mappi secara Regional II-5
Gambar 2. 3 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Mappi II-7
Gambar 2. 4 Kawasan Hidrologis Gambut Kabupaten Mappi II-8
Gambar 2. 5 Peta Sebaran Potensi Lahan Pertanian Kabupaten Mappi II-11
Gambar 2. 6 Peta Potensi Lahan Sagu Menurut Distrik di Kabupaten Mappi II-13
Gambar 2. 7 Peta Daya Dukung Air Kabupaten Mappi..... II-15
Gambar 2. 8 Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Mappi II-17
Gambar 2. 9 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Mappi II-19
Gambar 2. 10 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Mappi..... II-20
Gambar 2. 11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Mappi Tahun 2021-2024..... II-28
Gambar 2. 12 Piramida Penduduk Kabupaten Mappi Tahun 2024 ..... II-34
Gambar 2. 13 Proyeksi Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029..... II-39
Gambar 2. 14 Proyeks Kepadatan Penduduk Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029... II-40
Gambar 2. 15 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Produktif (Ribu Jiwa) Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 ..... II-42
Gambar 2. 16 Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029..... II-45
Gambar 2. 17 Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024..... II-50
Gambar 2. 18 Garis Kemiskinan Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024..... II-51
Gambar 2. 19 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-52
Gambar 2. 20 Usia Harapan Hidup di Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024..... II-57
Gambar 2. 21 Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama Sekolah di Kabupaten Mappi Tahun 2019-2023 ..... II-59

Gambar 2. 22 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua dan Indonesia 2021-2024 ..... II-63
Gambar 2. 23 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Mappi dan Daerah Sekitarnya Tahun 2023-2024 ..... II-65
Gambar 2. 24 Capaian Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, dan Nasional II-66
Gambar 2. 25 Capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, dan Nasional II-67
Gambar 2. 26 Capaian Indeks Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, dan Nasional II-68
Gambar 2. 27 Angka Ketergantungan Kabupaten Mappi Tahun 2019-2021 ..... II-69
Gambar 2. 28 PDRB Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-70
Gambar 2. 29 PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-71
Gambar 2. 30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-72
Gambar 2. 31 Indeks Pembangunan-TIK Provinsi Papua 2018-2023 sebagai Proksi Provinsi Papua Selatan II-76
Gambar 2. 32 Subindeks Provinsi Papua 2018-2023 sebagai Proksi Provinsi Papua Selatan II-77
Gambar 2. 33 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 ..... II-79
Gambar 2. 34 Nilai IMDI Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Selatan 2022-2024 ..... II-80
Gambar 2. 35 Nilai Pilar IMDI Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Selatan 2024 ..... II-81
Gambar 2. 36 Kondisi Jalan di Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-85
Gambar 2. 37 Data Kepemilikan Hunian Berdasarkan Rumah Tangga di Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-86
Gambar 2. 38 Indeks Kampung Membangun Kabupaten Mappi Tahun 2020-2021 ... II-87
Gambar 2. 39 Distribusi PDRB Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-89
Gambar 2. 40 Tingkat Inflasi Tahun 2018-2021 ..... II-90
Gambar 2. 41 Angka Kriminalitas dan Risiko Kejahatan di Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ..... II-99
Gambar 2. 42 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua Tahun 2018-2023 II-101

Gambar 2. 43 Kejadian Kriminalitas di Kabupaten Mappi Tahun 2018 – 2024 .....II-102
Gambar 2. 44 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, dan Indonesia Tahun 2024 .....II-104
Gambar 2. 45 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, dan Indonesia Tahun 2024 .....II-105
Gambar 2. 46 Pertumbuhan Pendapatan, Belanja, dan Surplus/Defisit Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 (Persen) II-124
Gambar 2. 47 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024.....II-128
Gambar 2. 48 Derajat Desentralisasi Fiskal (Kemandirian) Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024.....II-129
Gambar 2. 49 Rasio Ketergantungan (RK) Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024.....II-130
Gambar 2. 50 Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 .....II-132
Gambar 2. 51 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 .....II-133
Gambar 2. 52 Proporsi Komponen PAD, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024.....II-135
Gambar 2. 53 Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024.....II-137
Gambar 2. 54 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024.....II-139
Gambar 2. 55 Proporsi Komponen Pendapatan Transfer, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 .....II-141
Gambar 2. 56 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 .....II-143
Gambar 2. 57 Pertumbuhan Komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 .....II-145
Gambar 2. 58 Proporsi Komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 .....II-146
Gambar 2. 59 Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 .....II-150
Gambar 2. 60 Proporsi Komponen Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 .....II-152
Gambar 2. 61 Realisasi Komponen Belanja Operasi, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 .....II-154

Gambar 2. 62 Pertumbuhan Komponen Belanja Operasi, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 .....II-155
Gambar 2. 63 Proporsi Komponen Belanja Operasi, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 .....II-157
Gambar 2. 64 Realisasi Komponen Belanja Modal, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 .....II-159
Gambar 2. 65 Pertumbuhan Komponen Belanja Modal, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 .....II-160
Gambar 2. 66 Proporsi Komponen Belanja Modal, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024.....II-162
Gambar 2. 67 Realisasi Belanja Tak Terduga, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024.....II-163
Gambar 2. 68 Pertumbuhan Belanja Tak Terduga, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024.....II-164
Gambar 2. 69 Realisasi Komponen Belanja Transfer, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 .....II-165
Gambar 2. 70 Pertumbuhan Komponen Belanja Transfer, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 .....II-166
Gambar 2. 71 Pertumbuhan Komponen Pembiayaan Daerah dan SILPA, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 .....II-171
Gambar 2. 72 Rasio Likuiditas Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 ....II-176
Gambar 2. 73 Rasio Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 .II-179
Gambar 2. 74 Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024.....II-181
Gambar 2. 75 Megatrend Global 2045 .....II-229
Gambar 2. 76 Visi dan Misi RPJPN 2025-2045 .....II-247
Gambar 2. 77. Isu Strategis Transformasi Sosial RPJMN Tahun 2025-2029 .....II-254
Gambar 2. 78. Isu Strategis Ekonomi RPJMN Tahun 2025-2029 .....II-260
Gambar 2. 79. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola RPJMN Tahun 2025-2029 ..II-262
Gambar 2. 80. Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia RPJMN Tahun 2025-2029 .....II-264
Gambar 2. 81. Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi.....II-266
Gambar 2. 82 Visi Misi dan Sasaran RIPPP OTSUS Papua Tahun 2022-2041.....II-271
Gambar 2. 83 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Adat Anim Ha II-275

Gambar 3. 1 Misi Bupati dan Wakil Bupati dengan Transformasi Usulan Misi III-22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan daerah. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan proses perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Definisi ini dikembangkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Perencanaan dimaknai sebagai proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Proses perencanaan dalam pembangunan daerah memiliki peran yang sentral dan strategis bagi efektivitas pembangunan daerah melalui pengelolaan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah saat era otonomi daerah saat ini. Perencanaan pembangunan daerah juga merupakan manifestasi maupun pengejawantahan atas ruang interaksi yang terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah dalam konteks pemerintahan yang berjejaring dan *good governance*.

Perencanaan pembangunan daerah sendiri memiliki dua pendekatan utama yang masing-masing diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Kedua pendekatan tersebut masing-masing adalah pendekatan berorientasi proses dan pendekatan berorientasi hasil. Pendekatan berorientasi proses terdiri dari:

a. Pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
b. Pendekatan partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
c. Pendekatan politis, yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD; dan
d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yaitu hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan/distrik daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Adapun pendekatan perencanaan berorientasi hasil di antaranya adalah:

a. Pendekatan holistik-tematik, yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
b. Pendekatan integratif, yaitu menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
c. Pendekatan spasial, yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah. RPJMD merupakan perencanaan yang bersifat jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan. RPJMD Kabupaten Mappi sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat berbagai ketentuan seperti visi, misi, dan program Kepala Daerah. Ketiga aspek ini dijabarkan melalui berbagai komponen perencanaan seperti tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan

daerah, serta program perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah. RPJMD Kabupaten Mappi juga memuat kerangka pendanaan pembangunan daerah yang bersifat indikatif dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Mappi disusun dengan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 memiliki beberapa tahapan yang perlu dilalui. Dokumen RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 bertujuan untuk menjabarkan secara lebih rinci dari perencanaan-perencanaan lain yang perlu diacu dalam proses perencanaan pembangunan daerah jangka menengah, di antaranya adalah RPJPD, RTRW, dan dokumen perencanaan lain yang relevan. Secara umum, berikut merupakan proses tahapan penyusunan RPJMD yang akan dilalui hingga penetapannya:

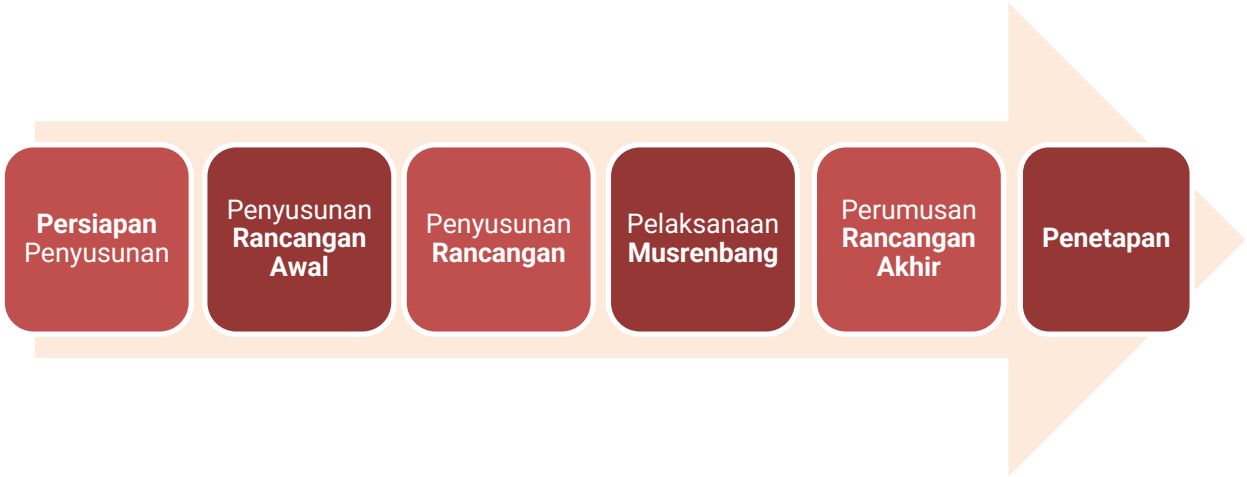

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Mappi

Berakhirnya periode perencanaan jangka menengah Kabupaten Mappi sebelumnya, yaitu RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2021-2026 mendorong dibutuhkannya perencanaan pembangunan jangka menengah yang baru. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2021-2026 yang dimulai dengan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang), perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2021-2026 disusun dengan memerhatikan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang akan

direspon melalui rumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas daerah. Substansi dari ketetapan-ketetapan yang telah termuat dalam RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2021-2026 menjadi acuan dasar bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi dalam merumuskan kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2021-2026 memiliki peran yang penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara umum.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan;
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20025-2045.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180)
26. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 845);
31. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);

32. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 845).
33. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2018-2022;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Dokumen RPJMD Kabupaten Mappi sebagai bagian dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional menganut sistem yang terintegrasi antara pusat dan daerah, serta antar jangka waktu perencanaan. Hal ini sebagaimana definisi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

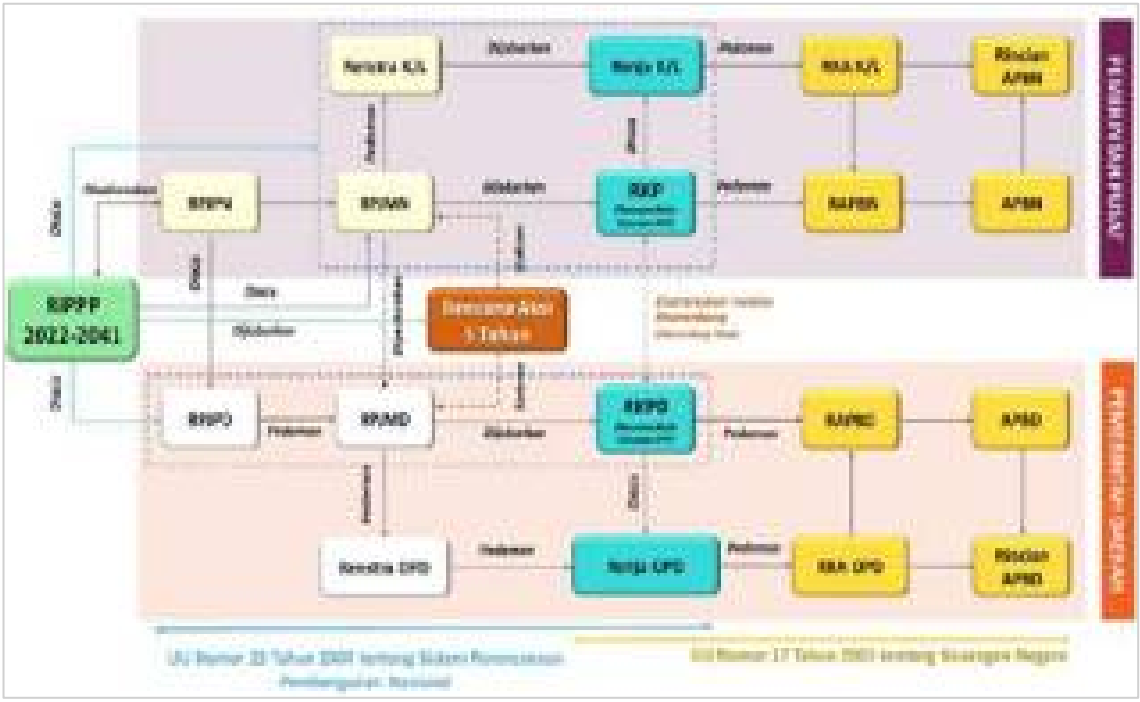

Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber: UU No. 25 Tahun 2004, diolah

Sistem perencanaan pembangunan nasional memiliki tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. RPJMD sebagai satu kesatuan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan demikian harus membangun keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya. Substansi keterkaitan antar dokumen perencanaan sebagai berikut:

1.3.1 Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan RPJPD 2025-2045 Kabupaten Mappi

Penyusunan dokumen RPJMD harus memiliki keterkaitan dengan RPJPD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2045 dimulai dengan menelaah berbagai muatan substantif dari RPJPD, yang selanjutnya akan dijabarkan secara mendetail ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029. Muatan substantif

RPJPD antara lain berupa isu jangka panjang yang menjadi salah satuan acuan penetapan isu strategis jangka menengah, telaah visi dan misi, serta telaah arah kebijakan dan sasaran pokok beserta target indikator kinerja periode pertama.

Pembangunan jangka menengah Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 merupakan tahapan penting untuk mewujudkan visi jangka panjang **"Kabupaten Mappi Maju dan Sejahtera Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berkelanjutan dan Berbudaya".**

Periode pertama memiliki arah kebijakan untuk memperkuat fondasi transformasi pembangunan. RPJMD ini akan menelaah isu strategis jangka panjang sebagai acuan untuk merumuskan isu strategis jangka menengah. Substansi berikutnya dari RPJPD yang ditelaah berupa arah kebijakan periode pertama setiap misi, rumusan arah kebijakan transformasi dan *game changers*, serta sasaran visi, sasaran pokok dan indikator. Telaah berbagai muatan RPJPD tersebut dalam rangka merumuskan indikasi proritas pembangunan periode pertama dari RPJMD. Dengan demikian, diharapkan dapat semakin memberikan gambaran yang jelas bagi Kepala Daerah untuk mewujudkan visi, misi dan program prioritas di dalam periode pembangunan 2025-2029.

1.3.2 Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Mappi memiliki kesesuaian waktu dengan penyusunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Papua Selatan. Kesamaan ini menjadi momentum untuk memperkuat keterkaitan dan sinergi antar dokumen perencanaan jangka menengah. Substansi rencana pembangunan jangka menengah nasional dan provinsi yang perlu ditelaah dan dijabarkan mendetail terkait isu strategis dan agenda prioritas pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mappi 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk memastikan adanya keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dengan agenda nasional. RPJMN, yang menjabarkan visi Presiden "**Bersama Indonesia Maju: Menuju Indonesia Emas 2045**", menetapkan arah kebijakan strategis seperti hilirisasi untuk peningkatan nilai tambah, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, serta pengembangan ekonomi hijau.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mappi dirancang selaras untuk mendukung agenda nasional tersebut. Fokus utama Mappi untuk menjadi kawasan baru ketahanan pangan secara langsung mendukung misi nasional dalam melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi di sektor pertanian dan perikanan. Demikian pula, upaya untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, adil, dan makmur merupakan implementasi dari misi nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, prinsip pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh Mappi sejalan dengan prioritas nasional dalam mengembangkan ekonomi hijau. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Mappi tidak hanya menjadi rencana pembangunan lokal, tetapi juga merupakan kontribusi strategis daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

1.3.3 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041

Seluruh wilayah Papua memiliki perencanaan khusus yang diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan dan kesejahteraan Papua, yaitu Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi instrumen strategis untuk menelaah dan menjabarkan RIPPP ke dalam pembangunan daerah. RIPPP memiliki visi **"Terwujudnya Papua Mandiri, Adil dan Sejahtera"**. Visi tersebut dicapai melalui pelaksanaan tiga misi, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju **Papua Sehat**; memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju **Papua Cerdas**; dan meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju **Papua Produktif**. Kabupaten Mappi merupakan bagian dari Wilayah Adat Anim Ha yang memiliki arah kebijakan pembangunan pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan Wilayah Adat Anim Ha sebagai sentra pangan, perikanan, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, dan ekowisata berkelanjutan.

1.3.4 Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Mappi

RPJMD sebagai perencanaan makro jangka menengah dan lintas sektor harus membangun keselarasan dengan RTRW. Hal ini agar pembangunan fisik maupun sosial budaya sesuai dengan peruntukkan tata ruang dan menjamin prinisp pembangunan berkelanjutan. RTRW Tahun 2012-2032 memiliki tujuan untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Mappi dengan optimalisasi potensi sumberdaya alam berbasiskan agroforestry dan perikanan dalam meningkatkan daya saing kabupaten dalam mendukung ketahanan pangan Pulau Papua secara berkelanjutan.

Tujuan RTRW tersebut memiliki kesalarasan dengan tema pembangunan Provinsi Papua Selatan di dalam RPJMN tahun 2025-2029. Tujuan RTRW ditopang dengan kebijakan penataan ruang berupa pengembangan kegiatan perikanan dan *agroforestry*, secara terpadu dan berkelanjutan dalam sistem minapolitan dan agropolitan; pengembangan agroindustri dan pariwisata dengan memperhatikan ekonomi kerakyatan; peningkatan kualitas pelayanan prasarana wilayah meliputi transportasi, energi, sumber daya air, telekomunikasi dan prasarana perkotaan dalam mendukung kemandirian serta kesejahteraan masyarakat; pengembangan dan peningkatan kawasan budidaya yang memperhatikan harmonisasi lingkungan alam dan lingkungan buatan serta mempertimbangkan mitigasi bencana; pemantapan pelestarian dan peningkatan fungsi kawasan lindung secara berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dan menjunjung kearifan lokal; penataan wilayan pesisir dan kelautan; dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

1.3.5 Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Kabupaten Mappi

Keterkaitan dokumen RPJMD dengan KLHS akan mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan yang kemudian akan menjadi salah satu landasan bagi perumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah. Selain itu, seluruh rekomendasi pembangunan berkelanjutan dari KLHS akan menjadi landasan dan diintegrasikan ke dalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD. Dengan demikian, Integrasi dokumen KLHS di dalam dokumen RPJMD untuk memastikan tujuan pembangunan berkelanjutan

(*Sustainable Development Goals*) telah menjadi landasan di dalam perencanaan pembangunan.

1.3.6 Keterkaitan RPJMD dengan Renstra, RKPD, Renja dan APBD

RPJMD Kabupaten Mappi 2025-2029 menjadi acuan utama bagi penyusunan berbagai dokumen perencanaan teknis lainnya, seperti Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Renstra 2025-2029 yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah mengacu pada visi, misi, serta program prioritas yang tertuang dalam RPJMD. Tidak hanya itu, RKPD Kabupaten Mappi sebagai dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah turut memperdalam RPJMD pada tahun pertama Kabupaten Mappi. Kemudian, RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, yang menguraikan program dan kegiatan yang lebih spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Dalam konteks APBD sebagai instrumen penganggaran, disusun untuk mendukung implementasi kebijakan yang telah direncanakan dalam RPJMD, RKPD, dan Renja. Seluruh dokumen perencanaan disusun dengan terpadu sehingga diharapkan pembangunan di Kabupaten Mappi dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan efektif untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029, yaitu untuk memberikan arahan perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan. RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mappi.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen yang memuat gambaran kinerja pembangunan dan kondisi keuangan daerah yang aktual;
2. Tersedianya dokumen yang memuat pemetaan masalah berbasis capaian kinerja dan rumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
3. Sebagai dasar perumusan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kabupaten Mappi selama lima tahun kedepan;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama periode 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota sekitar, serta perencanaan sektoral;
6. Menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Mappi periode 2025-2029;
7. Sebagai tolok ukur untuk penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;
8. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mappi; dan
9. Menjadi pedoman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Sistematika Dokumen RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029

Sistematika	Muatan
Bab 1 Pendahuluan	Gambaran umum RPJMD yang memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
Bab 2 Gambaran Umum Daerah	Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat: a. Aspek geografi dan demografi; b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat; c. Aspek Daya Saing Daerah; d. Aspek Pelayanan Umum. Subbab Gambaran Keuangan Daerah, memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020- 2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis memuat permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis daerah.
Bab 3 Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, serta Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
Bab 4 Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Subbab Program Perangkat Daerah memuat: a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat: a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan

Sistematika	Muatan
	sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD)
Bab 5 Penutup	Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dalam identifikasi karakteristik fisik dan keruangan wilayah, termasuk interaksi yang terjalin didalamnya. Aspek geografi membantu dalam memahami potensi dan permasalahan yang berkaitan dengan geografis wilayah seperti sumber daya alam, letak strategis, kebencanaan, dan infrastruktur kewilayahan. Aspek demografi menekankan pada identifikasi komposisi dan struktur kependudukan, termasuk distribusinya secara kewilayahan. Berikut ini disajikan informasi mengenai aspek geografi dan demografi Kabupaten Mappi yang bersumber dari data-data relevan dalam lima tahun terakhir.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

1. **Letak dan Posisi Wilayah Kabupaten Mappi**

Kabupaten Mappi merupakan salah satu wilayah administrasi di Provinsi Papua Selatan dengan cakupan wilayah mencapai 25.609,94 km^2. Kabupaten Mappi secara absolut terletak diantara 5°10’0” Lintang Utara – 7°30’0” Lintang Selatan dan 138°3’00” Bujur Barat – 141°0’0” Bujur Timur.

Gambar 2. 1 Peta Letak Wilayah Kabupaten Mappi

Sumber: Bapperida Kabupaten Mappi, 2025

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Mappi adalah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Asmat

Selatan : Kabupaten Merauke

Timur : Kabupaten Boven Digoel

Barat : Kabupaten Asmat dan Laut Arafura

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Distrik di Kabupaten Mappi

Distrik	Ibukota	Luas (Km^2)	Persentase Luas Wilayah
Nambioman Bapai	Mur	5.074,46	19,81%
Minyamur	Kabe	2.433,81	9,50%
Edera	Bade	1.392,69	5,44%
Venaha	Sahapikia	1.705,34	6,66%
Syachame	Asset	626,75	2,45%
Bamgi	Yeloba	747,28	2,92%
Yakomi	Yame	1.843,03	7,20%
Obaa	Kepi	2.224,21	8,68%
Passue	Kotiak	1.440,39	5,62%
Haju	Yagatsu	1.180,85	4,61%
Assue	Eci	2.422,93	9,46%
Citakmitak	Senggo	1.244,82	4,86%
Kaibar	Amasu	1.499,03	5,85%
Passue Bawah	Wonggi	1.190,40	4,65%
Ti-Zain	Kumaban	583,95	2,28%
Kabupaten Mappi	**Kepi**	**25.609,94**	**100,00%**

Sumber: BPS Kabupaten Mappi, 2025

Ibukota Kabupaten Mappi terletak di Distrik Obaa, sementara jumlah distrik berjumlah 15 dengan wilayah distrik terluas adalah Distrik Nambioman Bapai yaitu meliputi 5.074,46 km^2 atau mencakup sekitar 19,81 persen total luas wilayah. Beberapa distrik yang memiliki cakupan wilayah cukup luas diantaranya adalah Distrik Minyamur mencakup 9,50 persen, Distrik Assue mencakup 9,46 persen, dan Distrik Obaa dengan cakupan 8,68 persen. Sedangkan distrik dengan cakupan wilayah terkecil adalah Distrik Ti-Zain dengan persentase luas 2,28 persen, Distrik Syachame dengan persentase 2,45 persen, dan Distrik Bamgi dengan persentase 2,92 persen.

Kabupaten Mappi merupakan wilayah bertipologi pesisir dengan ekosistem lahan basah dan hutan tropis. Letak wilayah yang berada pada topografi datar pada Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) besar yaitu DAS Digoel menjadikan lanskap wilayah ini didominasi oleh lahan basah permanen.

Lahan basah menjadi habitat kunci di Pulau Papua bagian Selatan. Eksistensi lahan basah menyajikan fungsi pemurnian air, regulasi nutrisi tanah, dan krusial dalam simpanan karbon bawah permukaan.

2. **Peran Strategis Daerah**

Letak wilayah Kabupaten Mappi terjalin interaksi keruangan yang dapat dipandang dari dimensi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Wilayah Kabupaten Mappi bertopografi dataran rendah, dengan ekosistem lahan basah sangat luas memberikan fungsi ekosistem yang begitu besar bagi Kawasan mega-biodiversitas Papua Selatan. Interaksi antar ruang habitat masih sangat rapat dengan terhubungnya antar kantung-kantung ekosistem, memungkinkan penyediaan jasa lingkungan hidup terjaga lestari dan seimbang.

Sementara itu, interaksi dari dimensi sosial dan ekonomi terbangun dari konektivitas melalui jalur transportasi udara dan transportasi air. Kabupaten Mappi memiliki beberapa bandar udara yang tersebar pada beberapa distrik diantaranya seperti Bandara Kepi di Distrik Obaa, Bandara Bade di Distrik Edera, dan Bandar Udara Senggo di Distrik Citak-Mitak. Bandar udara ini dapat menjadi penghubung antar distrik dan dengan kabupaten di luar wilayah Kabupaten Mappi seperti Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Boven Digoel dalam regional Provinsi Papua Selatan. Sementara itu, transportasi jalur air dihubungkan melalui antar pelabuhan sungai. Wilayah dengan dataran fluvial yang relatif selalu tergenang hanya memungkinkan pergerakan melalui moda transportasi air. Konektivitas yang terbangun menciptakan interaksi untuk distribusi barang dan jasa.

Gambar 2. 2 Peran Strategis Kabupaten Mappi secara Regional
Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, wilayah Kabupaten Mappi memiliki peran strategis sebagai Kawasan Komoditas Unggul sentra produksi berbasis komoditas sagu; kawasan afirmasi daerah tertinggal dan Kawasan Afirmasi sebagai wilayah distrik perbatasan prioritas yaitu di distrik Minyamur. Penguatan sentra produsi berbasis komoditas sagu di Kabupaten Mappi melalui peningkatan produksi perkebunan dengan pembibitan, optimasi lahan, dan pengendalian hama; peningkatan kualitas sumberdaya manusia; peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan; dan pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasaran pendukung pertanian. Sebagai kawasan

pengembangan sentra komoditas sagu, Kabupaten Mappi akan berkontribusi sebagai pemasok hasil sagu secara kontinyu, potensi ini juga sudah tercermin dari produksi sagu mencapai 1.045,5 ton pada tahun 2024.

Saat ini, pemerataan infrastruktur menjadi konstrain utama dalam mengembangkan pertanian di Kabupaten Mappi. Jaringan konektivitas wilayah yang masih belum merata membatasi mobilitas dan perluasan akses pasar, menyebabkan meningkatnya biaya logistik. Dalam rangka peningkatan aksesibilitas di Provinsi Papua Selatan, dalam RPJMN 2025-2029 secara tegas mengintervensi melalui pembangunan dan peningkatan jalan trans Papua Merauke-Mappi, pengembangan fasilitas Pelabuhan Mur dan Pelabuhan Penyeberangan Bade di Kabupaten Mappi, serta pengembangan serta optimalisasi layanan bandara Kepi di Kabupaten Mappi. Selain infrastruktur perhubungan, Kabupaten Mappi merupakan wilayah dengan indikasi rasio elektrifikasi rendah dimana sumber penerangan utamanya listrik non PLN dan bukan listrik. Melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan dengan pemasangan sambungan baru listrik rumah tangga diharapkan dapat meningkatkan kualitas permukiman masyarakat.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam suatu wilayah tergantung pada karakteristik biofisik. Setiap sumber daya alam dimanfaatkan secara luas untuk mendukung tercapainya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi sumber daya alam berupaya untuk memetakan jenis SDA dan manfaat yang diperoleh bagi daerah. Berikut ini beberapa jenis SDA dan fungsinya di Kabupaten Mappi.

Gambar 2. 3 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Mappi

Sumber: Bapperida Kabupaten Mappi, 2025

Pola tutupan lahan Kabupaten Mappi dipetakan pada tahun 2020 sebagai data termutakhir. Terdapat 18 jenis tutupan lahan yang teridentifikasi berdasarkan klasifikasi pemetaan skala kecil-menengah. Jenis tutupan tersebut diantaranya hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa

sekunder, belukar rawa, hutan tanaman, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, rawa, savana, semak/belukar, tanah terbuka, tubuh air, permukiman, dan bandar udara. Kabupaten Mappi merupakan ekosistem lahan basah yang umumnya tergenang air sepanjang tahun, sehingga distribusi tutupan lahan dapat dibedakan dengan melihat asosiasi terhadap objek geografis sungai. Tutupan lahan dominan adalah hutan rawa yakni jenis hutan dengan vegetasi tegakan rawa dan belukar, tersebar merata di seluruh distrik dan berasosiasi dengan aliran sungai. Luasnya genangan air menjadi konstrain bagi budidaya lahan pertanian, akibat karakteristik tanah dan air yang kurang sesuai. Namun, terdapat lahan pertanian pada beberapa area terutama di distrik Obaa, Nambioman Bapai, Bamgi, dan Minyamur. Budidaya lahan untuk perkebunan lebih luas ditemui pada beberapa distrik meskipun berada di sekitar lahan rawa, jenis tanaman perkebunan yang dibudidayakan yaitu sagu.

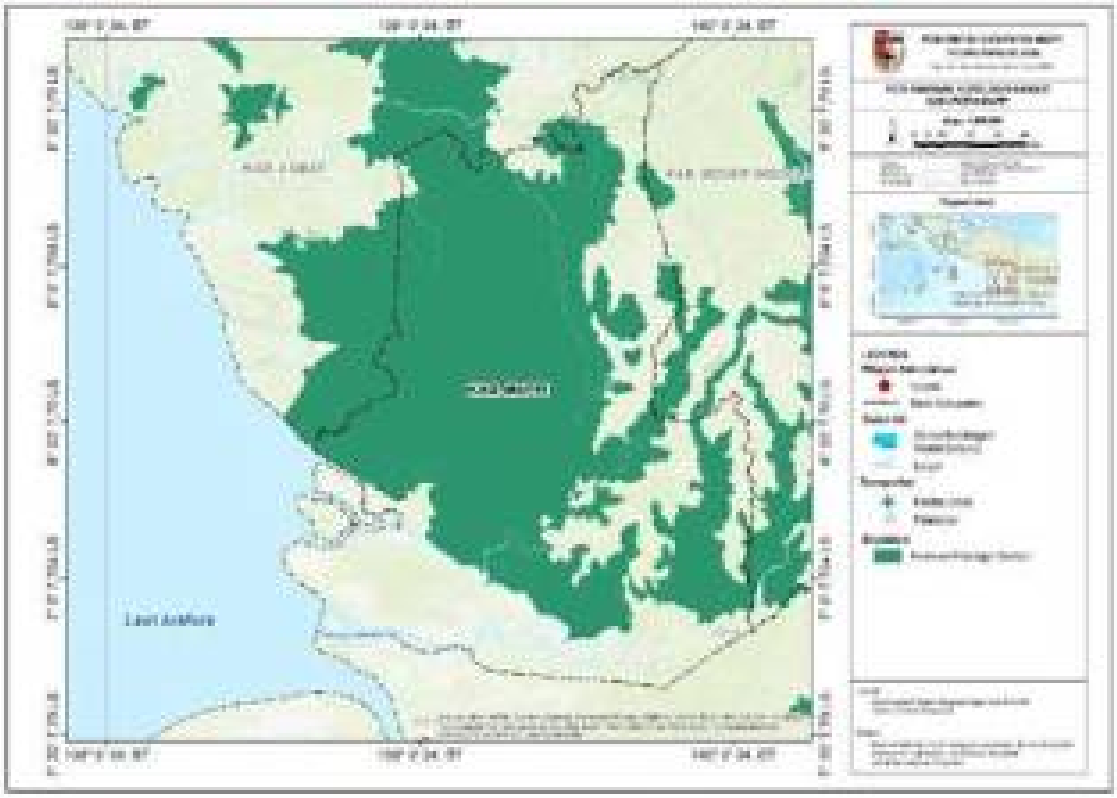

Gambar 2. 4 Kawasan Hidrologis Gambut Kabupaten Mappi

Sumber: Bapperida Kabupaten Mappi, 2025

Kabupaten Mappi memiliki cakupan wilayah rawa sangat luas mencakup1.379.537,77 hektar dengan rincian 66,37 persen dengan fungsi budidaya dan 33,63 persen dengan fungsi lindung.

Tabel 2. 2 Luas Kawasan Hidrologis Gambut Kabupaten Mappi

No.	Nama KHG	Status	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	KHG Sungai Buru Bagaram	Lintas Kabupaten/Kota	2.972,67	0,22%
2	KHG Sungai Buru Mappi - Sungai Buru Obaa	Lintas Kabupaten/Kota	374.686,00	27,16%
3	KHG Sungai Buru Mappi - Sungai Siakha Homo	Kabupaten/Kota	11.052,00	0,80%
4	KHG Sungai Buru Mappi I	Kabupaten/Kota	14.329,70	1,04%
5	KHG Sungai Buru Mappi II	Kabupaten/Kota	57,35	0,00%
6	KHG Sungai Buru Miyaman - Sungai Buru Mappi	Lintas Kabupaten/Kota	12.237,60	0,89%
7	KHG Sungai Buru Obaa - Sungai Buru Mappi	Kabupaten/Kota	97.473,00	7,07%
8	KHG Sungai Jaman Kawarga - Sungai Samaleki Digul	Kabupaten/Kota	116.067,00	8,41%
9	KHG Sungai Jo Dairam	Kabupaten/Kota	30.313,50	2,20%
10	KHG Sungai Ju Siret- Sungai Wade Assue	Kabupaten/Kota	1.916,41	0,14%
11	KHG Sungai Keeme - Sungai Bayeni	Lintas Kabupaten/Kota	27.013,80	1,96%
12	KHG Sungai Kuis - Sungai Bapai	Lintas Kabupaten/Kota	375.965,00	27,25%
13	KHG Sungai Udi Aifo - Sungai Buru Mappi	Kabupaten/Kota	3.276,51	0,24%
14	KHG Sungai Udi Edera - Sungai Samaleki Digul	Lintas Kabupaten/Kota	134.689,00	9,76%
15	KHG Sungai Wade Kowo - Sungai Buru Bayeni	Kabupaten/Kota	9.606,10	0,70%
16	KHG Sungai Wade Nanu - Sungai Wade Assue	Kabupaten/Kota	57.620,20	4,18%
17	KHG Sungai Wade Passue	Kabupaten/Kota	2.915,93	0,21%
18	KHG Sungai Wade Passue - Sungai Jo Dairam	Kabupaten/Kota	107.346,00	7,78%
Total			**1.379.537,77**	**100,00%**

Sumber: Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, 2021

KHG terluas di Kabupaten Mappi adalah KHG Sungai Kuis dan Sungai Bapai dengan persentase 27,25 persen, tersebar pada Distrik Assue, Haju, Nambioman Bapai, Minyamur, Obaa, Passue Bawah, dan Citak Mitak. Kemudian terdapat KHG Sungai Buru Mappi - Sungai Buru Obaa seluas 27,16 persen dari luas KHG total. Ekosistem gambut merupakan ekosistem focal dengan kapasitas penyimpanan karbon bawah permukaan mencapai 0.37 gigatonnes eCO_2 setiap tahun. Dengan demikian, ekosistem gambut Mappi berkontribusi dalam pengaturan iklim baik secara regional maupun nasional melalui simpanan karbon yang besar. Selain itu, ekosistem gambut sebagai eksositem focal bagi tanaman-tanaman endemic seperti gaharu *(Aquilaria sp.),* kulit kayu masoi (*Cryptocarya amassoy),* kulit kayu putih *(Endiandra fulva),* dan karet *(Havea brasiliensis),* Tumbuhan sagu *(Metroxylon sago Rottb)* yang bernilai ekonomis tinggi.

Tabel 2. 3 Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Mappi

Tanaman	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kelapa	-	-	117,9	117,9	117,9
Karet	-	-	-	708.487	581.849
Kopi	11	11	11	11	11
Sagu	428,5	612	834,5	960,5	1045,5

Sumber: BPS Kabupaten Mappi, 2025

Dari sektor pengelolaan lahan, potensi SDA Kabupaten Mappi berupa Perkebunan kelapa, karet, kopi, dan sagu. Produksi karet tercatat pada tahun 2023 dan 2024 mencapai 708 ton dan 581 ton. Selanjutnya produksi sagu mengalami peningkatan setiap tahunnya, menunjukkan tingginya potensi produksi sagu di Kabupaten Mappi.

Tabel 2. 4 Potensi Luas Lahan Pertanian Terpetakan Menurut Distrik di Kabupaten Mappi

No	Distrik	Potensi Luas Pertanian Terpetakan (Ha)	Persentase (%)
1	Citak Pitak	25.607,31	0,99%
2	Ti Zain	9.437,52	0,36%
3	Kaibar	5.895,64	0,23%
4	Assue	96.444,14	3,73%
5	Passue Bawah	55.652,02	2,15%
6	Passue	11.367	0,44%
7	Haju	507.482,48	19,61%
8	Obaa	333.572,87	12,89%
9	Veneha	142.741,11	5,52%
10	Syahcame	102.010,83	3,94%
11	Bamgi	108.124,76	4,18%
12	Nambioman Bapai	319.694,45	12,35%
13	Minyamur	427.124,90	16,50%
14	Edera	257.905,51	9,97%
15	Yakomi	184.884,01	7,14%
Kabupaten Mappi		**2.587.944,55**	**100,00%**

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Mappi 2025

Berdasarkan pemetaan potensi lahan pertanian, tercatat potensi luas lahan pertanian mencapai 2,5 juta hektar di Kabupaten Mappi. Distribusinya secara luas berada di Distrik Haju mencakup 19,61% dari total lahan dan Distrik Minyamur seluas 16,50% dari total lahan. Potensi pertanian yang terdata meliputi lahan singkong dan lahan sagu. Tingginya potensi lahan pertanian dapat menjadi

pendorong perekonomian dari sektor pertanian. Namun, tantangan dalam pengelolaannya adalah jenis tanah rawa yang cenderung asam belum mampu mendukung produktivitas secara optimal. Disamping itu, Masyarakat yang masih cenderung mengandalkan hasil hutan perlu mendapatkan dukungan pelatihan dalam pengelolaan lahan secara tepat dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah rawa gambut Kabupaten Mappi. Secara keruangan, senaran potensi lahan pertanian di Kabupaten Mappi disajikan pada peta berikut ini.

Gambar 2. 5 Peta Sebaran Potensi Lahan Pertanian Kabupaten Mappi

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Mappi

Selain potensi singkong dan jagung, Kabupaten Mappi memiliki potensi lahan sagu yang tersebar di seluruh distrik. Berikut ini adalah hasil pemetaan potensi lahan sagus berdasarkan distrik di Kabupaten Mappi.

Tabel 2. 5 Potensi Lahan Sagu Terpetakan Menurut Distrik di Kabupaten Mappi

No	Distrik	Potensi Luas Sagu Terpetakan (Ha)	Persentase (%)
1	Kaibar	619	0,24%
2	Ti Zain	852,00	0,33%
3	Passue	1.166,00	0,45%
4	Citak Mitak	2635	1,01%
5	Passue Bawah	5.630,00	2,16%
6	Assue	9.668,00	3,70%
7	Syahcame	9.993,00	3,83%
8	Bamgi	11.741,00	4,50%
9	Venaha	14.405,00	5,52%
10	Yakomi	17.804,00	6,82%
11	Edera	27.342,00	10,47%
12	Nambaioman Bapai	32.206,00	12,34%
13	Obaa	33.574,00	12,86%
14	Minyamur	43.244,00	16,56%
15	Haju	50.199,00	19,23%
Kabupaten Mappi		**261.078,00**	**100,00%**

Sumber: Bapperida Kabupaten Mappi, 2025

Terdapat lima distrik yang memiliki potensi lahan sagu terbesar diantaranya yaitu Distrik Haju dengan cakupan 19,23 persen, Distrik Minyamur menccakup 16,56 persen, Distrik Obaa seluas 12,86 persen, dan Distrik Nambioman Bapai dengan cakupan 12,34 persen. Sedangkan wilayah yang memiliki potensi sagu dengan luasan terkecil adalah Distrik Ti Zain seluas 0,33 persen, Distrik Kaibar seluas 0,24 persen, dan Distrik Citak Mitak hanya mencakup 1,01 persen.

Gambar 2. 6 Peta Potensi Lahan Sagu Menurut Distrik di Kabupaten Mappi

Sumber: Bapperida Kabupaten Mappi, 2025

Distrik dengan potensi sagu dan potensi pertanian sangat rendah merupakan daerah di hulu Sungai dengan akses mobilitas antar distrik yang relative rendah. Hal tersebut berpengaruh terhadap rendahnya akses pasar untuk menjangakau hasil pertanian. Untuk itulah, perlunya arah kebijakan yang

mendukung perluasan akses pasar pertanian yang menjangkau wilayah dengan potensi pertanian menjanjikan seperti beberapa wilayah yang terpetakan.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup tersusun atas komponen dan unsur materi yang menyusun seperangkat fungsi bagi berjalannya siklus ekologis termasuk penyediaan sumber daya alam, pengaturan dan pendukung ekosistem. Siklus ekologis berlangsung secara kontinyu, namun dalam konteks pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam cenderung mengubah atau menggeser fungsi ekologis. Penilaian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ditujukan untuk menguantifikasi dukungan fungsi lingkungan hidup dalam menyediakan sumber daya alam dan meregulasi dampak pembangunan. Dalam hal ini, DDDTLH pangan dan air dinilai sebagai sumber daya esensial.

1. **Daya Dukung Air**

Daya dukung air merupakan perbandingan antara ketersediaan sumber daya air terhadap kebutuhannya, baik secara domestik, industrial, maupun pengelolaan lahan.

Tabel 2. 6 Luas Wilayah dengan Status Daya Dukung Air

Distrik	Status Daya Dukung Air (Ha)		Total (Ha)
	Belum Terlampaui (Surplus)	Terlampaui (Defisit)	
Assue	240.817	693	241.510
Bamgi	69.489	3.227	72.716
Citak-Mitak	125.557		125.557
Edera	80.155	11.818	91.973
Haju	130.211	672	130.883
Kaibar	150.332		150.332
Nambioman Bapai	410.406	4.395	414.801
Minyamur	180.722	712	181.434
Obaa	221.314	4.111	225.425
Passue	144.114	114	144.228
Passue Bawah	117.364		117.364
Syahcame	60.666	2.562	63.228
Ti Zain	59.609	250	59.859
Venaha	169.164	22	169.186
Yakomi	141.978	3.643	145.621
Kabupaten Mappi	**2.301.898**	**32.219**	**2.334.117**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029

Berdasarkan penilaian dalam KLHS RPJMD, Kabupaten Mappi memiliki cakupan wilayah surplus air seluas 2,3 juta hektar, sedangkan wilayah yang defisit hanya sekitar 32 ribu hektar atau setara hanya 1,38 persen dari total luas wilayah. Jika dirinci secara keruangan, Distrik Edera memiliki cakupan defisit lebih luas yaitu 11.818 hektar. Pemanfaatan air di Distrik Edera digunakan untuk perkebunan sawit dan perkebunan karet dengan kebutuhan air mencapai 11.664 m^3/hektar/tahun.

Gambar 2. 7 Peta Daya Dukung Air Kabupaten Mappi

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2045

Secara keruangan, area dengan status defisit merupakan wilayah dengan pemanfaatan lahan lanjut untuk permukiman dan perkebunan. Tingginya daya dukung air mencerminkan tingkat ketersediaan air melimpah. Suplai air yang sangat tinggi tidak terlepas dari karakteristik fisik wilayah yang merupakan dataran rendah dengan karakteristik lahan basah (*wet land).* Sumber daya air dipasok secara kontinyu melalui siklus hidrologis, didalamnya terdapat komponen lingkungan yang mendukung fungsi imbuhan (*recharge*), distribusi, simpanan (*storage*), dan pemurnian. Fungsi imbuhan, distribusi, dan simpanan

tidak terlepas dari adanya sistem DAS yang mengatur siklus tersebut. DAS Kabupaten Mappi terdiri dari DAS besar diantaranya DAS Digoel mencakup 693.001 hektar, DAS Odamun seluas 718.017 hektar, DAS Eilanden seluas 750.764 hektar, dan DAS Juliana seluas 111.040 hektar. Wilayah hutan tertutup vegetasi hutan rawa dan semak belukar rawa memberikan fungsi pengaturan tata aliran dan pemurnian air. Sumber daya air di Kabupaten Mappi sangat melimpah, secara bersamaan kontrol vegetasi berperan focal dalam mengatur tata aliran air, sehingga pemanfaatan lahan diluar lahan hijau memerlukan pengukuran secara cermat terhadap dampaknya.

2. Daya Dukung Pangan

Lingkungan hidup menyediakan seperangkat fungsi untuk mendukung penyediaan sumber bahan makanan dalam bentuk serat dan energi. Bahan makanan diperoleh melalui pengelolaan tanaman pangan yang diusahakan, fungsi penyediaan air, nutrient tanah, dan pengaturan hama mendukung kultivasi pertanian. Selain itu, bahan makanan disediakan langsung oleh alam seperti sagu, madu hutan, dan lain sebagainya berasal dari hutan. Kebutuhan pangan sendiri berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk. Penilaian terhadap daya dukung pangan ditujukan untuk melihat bagaimana pengaruh pembangunan terhadap ketersediaan pangan yang dapat dipasok alam.

Tabel 2. 7 Luas Wilayah dengan Status Daya Dukung Pangan

Distrik	Status Daya Dukung Pangan (Ha)		Total
	Belum Terlampaui (Surplus)	Terlampaui (Defisit)	
Assue	239.937	1.573	241.510
Bamgi	72.355	360	72.715
Citak-Mitak	125.122	435	125.557
Edera	90.753	1.221	91.974
Haju	129.691	922	130.613
Kaibar	150.318	13	150.331
Nambioman Bapai	411.499	3.302	414.801
Minyamur	180.095	1.340	181.435
Obaa	222.906	2.519	225.425
Passue	144.170	58	144.228
Passue Bawah	117.362	2	117.364
Syahcame	62.156	1.072	63.228

Distrik	Status Daya Dukung Pangan (Ha)		Total
	Belum Terlampaui (Surplus)	Terlampaui (Defisit)	
Ti Zain	59.730	129	59.859
Venaha	168.777	409	169.186
Yakomi	145.327	294	145.621
Kabupaten Mappi	**2.320.198**	**13.649**	**2.333.847**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2045

Secara umum, daya dukung pangan Kabupaten Mappi berada dalam kondisi surplus dengan cakupan wilayah surplus pangan mencapai 2,3 juta hektar atau 99,4 persen luas wilayah. Artinya ketersediaan pangan di Kabupaten Mappi masih mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduk. Ketersediaan pangan diperkirakan mencapai 1.401.847.110.720 kkal. Sumber bahan pangan Kabupaten Mappi dapat berasal dari sawah, perkebunan, perikanan, dan hasil hutan dengan sumber karbohidrat utama yaitu sagu mencapai 1.396.259.730 kkal.

Gambar 2. 8 Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Mappi

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029

Hanya sebagian kecil wilayah yang berstatus terlampaui daya dukung pangan yakni 13 ribu hektar. Tingginya kebutuhan pangan pada beberapa area permukiman tidak dapat diimbangi dengan ketersediaan yang ada, hal ini juga disebabkan wilayah tersebut dikembangkan sebagai permukiman bukan sebagai wilayah kultivasi pertanian sehingga ketersediaannya cenderung lebih rendah. Meskipun daya dukung masih terjaga, Tingkat ketahanan pangan Kabupaten Mappi tergolong sangat rendah dengan nilai 35,44 poin pada tahun 2024. Daya dukung pangan menekankan bagaimana komponen lingkungan hidup memberikan seperangkat fungsi untuk menjaga keberlanjutan penyediaan sumber pangan baik berupa serat, protein, dan karbohidrat. Secara kewilayahan, fungsi tersebut terjaga dengan baik, namun akses masyarakat terhadap sumber pangan masih rendah, baik itu dipengaruhi oleh karakteristik wilayah rawa dan lahan basah dan kultivasi pertanian yang belum dilakukan secara luas oleh masyarakat.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Sub bagian ini menjelaskan kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan ini perlu dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per Kapita, serta Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum.

1. **Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan juga halal, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya domestik. Terdapat tiga indikator yang menjadi subsistem pada ketahanan pangan yaitu subsistem penyediaan pangan, distribusi, dan konsumsi yang ketiganya saling mempengaruhi secara berkesinambungan. Ketiga komponen tersebut berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kerawanan pangan menjadi isu

strategis di Kabupaten Mappi karena dapat memperburuk kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Ketahanan Pangan dapat menjelaskan ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini disusun dari tiga dimensi yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Berikut ini merupakan Indeks Ketahanan Kabupaten Mappi tahun 2020-2024. IKP Kabupaten Mappi pada tahun 2024 tergolong Sangat Rentan.

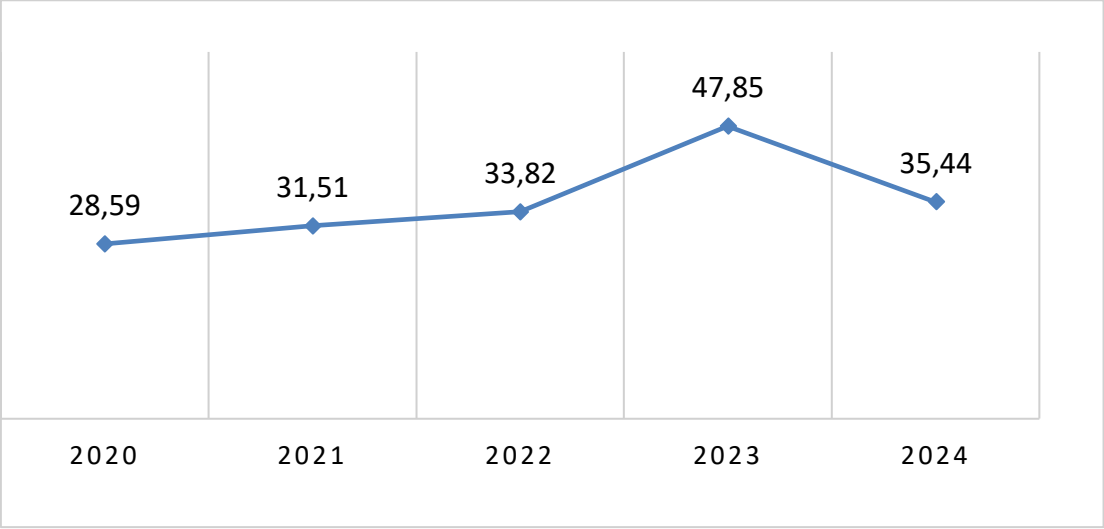

Gambar 2. 9 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Mappi
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2020-2024

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Mappi dari tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan dari 28,59 menjadi 47,85 poin. Kemudian pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 35,44 poin. Pada tahun 2024, jika dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Mappi memiliki posisi peringkat terendah pada tahun 2024. Provinsi Papua Selatan memiliki IKP 52,17 dan Kabupaten Merauke dengan IKP 84,07 tertinggi di wilayah tersebut. Kabupaten Asmat memiliki IKP 45,99 dan Kabupaten Boven Digoel dengan IKP 43,19.

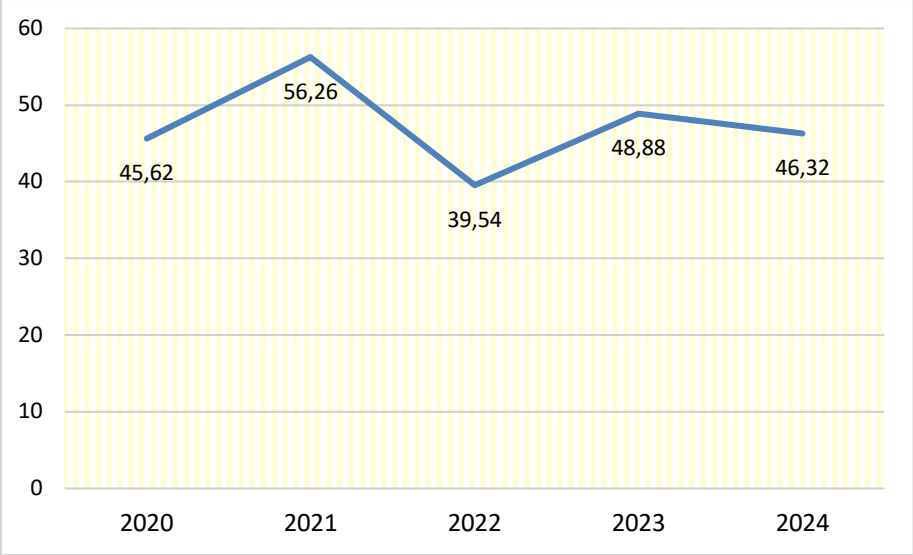

Gambar 2. 10 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Mappi

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2020-2024

Jumlah penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Mappi masih tergolong sangat tinggi (>35%). Kategori Pou Kabupaten Mappi tahun 2024 yaitu 46,32. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Mappi cenderung fluktuatif. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya, PoU Kabupaten Mappi memiliki posisi terendah pada tahun 2024.

Sumber pangan alami dan melimpah di Kabupaten Mappi adalah Sagu. Total indikatif luasan sagu di Kabupaten Mappi sebesar 261.078 ha dan tersebar merata di 11 distrik. Distrik Haju memiliki potensi Sagu terbesar yaitu 50.199 ha dan luas sagu terendah terdapat di distrik Kaibar seluas 619 ha. Sagu merupakan salah satu sumber karbohidrat yang dapat di manfaatkan sebagai sumber pangan dan sagu tumbuh sangat baik pada lahan basah seperti Kabupaten Mappi.

Meskipun memiliki luas lahan sagu yang potensial, namun pemanfaatan sagu sebagai sumber pangan alternatif masih sangat rendah. Data dari dinas Pertanian Mappi Tahun 2023 menunjukkan jika pemanfaatan sagu baru mencapai 460 ton atau memiliki proporsi 0,1% dari total produksi maksimal yang tersedia. Artinya bahwa lahan sagu masih di biarkan tanpa ada pengelolaan dan pemanfaatan yang maksimal. Beberapa faktor rendahnya pemanfaatan sagu sebagai pangan adalah infrastruktur, ketersediaan peralatan, dan tingginya biaya

produksi. Untuk menutupi kebutuhan pangan terutama sumber karbohidrat maka pemerintah melakukan impor pangan dari luar untuk menutupi defisit pangan. Komoditas pendukung keberlanjutan pangan lainnya adalah jagung, kedelai, terong, ubi jalar, ubi kayu dan kacang buah-buahan, padi, dan sayur sayuran.

Sektor perikanan dan kehutanan berperan besar dalam kehidupan penduduk. Kabupaten Mappi memiliki potensi besar hutan bakau yang tumbuh di sepanjang garis pantai dan di daerah aliran sungai bagian hilir. Hutan bakau memiliki fungsi penting dalam ekosistem, seperti tempat pemijahan, mencari makan, berlindung, dan pengasuhan bagi berbagai jenis biota.

Kabupaten Mappi memiliki potensi perikanan yang besar, baik di laut maupun di perairan umum. Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih belum optimal. Untuk meningkatkan produksi perikanan di Mappi, diperlukan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan infrastruktur, teknologi, sumber daya manusia, dan pengawasan. Dengan pengelolaan yang baik, sektor perikanan dapat menjadi salah satu penggerak utama perekonomian di Kabupaten Mappi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemerintah Indonesia memiliki rencana untuk mengembangkan food estate atau lumbung pangan di wilayah Papua Selatan, termasuk Kabupaten Mappi. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan. Total luas lahan yang direncanakan untuk food estate di Papua Selatan mencapai 2.684.680,68 ha. Kabupaten Mappi sendiri memiliki lahan potensial seluas 1.117.345 ha yang direncanakan untuk proyek ini. Lahan-lahan ini sebagian besar berada di kawasan hutan dan rawa-rawa.

Tabel 2. 8 Capaian Indikator TPB Ketahanan Pangan Kabupaten Mappi 2019-2024

Indikator	Target Nasional	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan		28,59	31,51	33,82	47,85	35,44
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun menjadi 4%	45,62	56,26	39,54	48,88	N/A

Indikator	Target Nasional	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).	Menurun menjadi 5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi 95.2 Kecukupan energi 2100 kkal/Kapita/hari	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029

Tabel diatas menunjukkan ada permasalahan yang dihadapi dalam mencukupi kebutuhan pangan di Kabupaten Mappi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya:

1. Rendahnya ketersediaan pangan yang disebabkan oleh rendahnya produksi tanaman pangan dari dalam Kabupaten Mappi,
2. Sulitnya akses distribusi pangan yang disebakan panjangnya rantai distribusi pangan ke berbagai distrik terpencil.
3. Belum adanya kontrol yang baik untuk menjaga keamanan pangan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:
    a. Terbatasnya sertifikasi layak konsumsi pangan dari dalam daerah;
    b. Proses distribusi pangan yang melalui tahapan panjang yang menyebabkan penurunan kualitas pangan;
    c. Rendahnya produksi pertanian/ perkebunan yang disebabkan oleh:
        i. Rendahnya kualitas sumber daya manusia petani;
        ii. Rendahnya kesuburan lahan pertanian/ perkebunan;
        iii. Kurangnya luas lahan pertanian/ perkebunan;
        iv. Belum optimalnya penerapan metode pertanian/ perkebunan modern;
        v. Masih kurangnya ketersediaan tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan;
        vi. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana usaha pertanian/ perkebunan;
        vii. Kurangnya bantuan permodalan;

viii. Kurangnya investasi di bidang pertanian/ perkebunan;

ix. Terbatasnya bantuan bibit komoditas unggul pertanian/ perkebunan;

d. Rendahnya kualitas produk pertanian/ perkebunan disebabkan oleh:

- Standarisasi produk pertanian masih rendah;
- Belum tingginya orientasi pasar untuk produk pertanian/ perkebunan;
- Rendahnya minat petani untuk meningkatkan nilai jual produk pertanian/ perkebunan; dan
- Rantai panjang produksi pertanian/ perkebunan.

2. Ketenagalistrikan

Ketersediaan energi listrik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Sektor ketenagalistrikan perlu pengelolaan yang benar dan terarah sebagai bagian dari sumber daya energi. Kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar salah satunya listrik dapat menghambat pengembangan ekonomi lokal dan kualitas hidup masyarakat. Kabupaten Mappi telah mengupayakan untuk meningkatkan akses listrik. Namun, masih banyak wilayah yang belum teraliri listrik atau hanya memiliki akses listrik terbatas.

Tabel 2. 9 Pelayanan Ketenagalistrikan Kabupaten Mappi

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Persen	74,89	89,38	88,03	N/A	N/A

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029

Sampai dengan tahun 2022, tercatat rasio elektrifikasi Kabupaten Mappi hanya sebesar 88,03 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian wilayah atau rumah tangga belum memiliki akses terhadap layanan listrik baik dari PLN dan bukan PLN. Target nasional yang meningkat menjadi 100% belum

tercapai di Kabupaten Mappi. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain membangun jaringan listrik dan fasilitas pembangkit energi terbarukan.

Listrik yang disediakan oleh PT PLN di Kabupaten Mappi pada tahun 2023 mengalami perkembangan signifikan. Perkembangan yang dimaksud yaitu peningkatan jumlah daerah di Kabupaten Mappi yang sudah tersedia listrik. Pada tahun sebelumnya listrik PLN hanya tersedia di 8 distrik dan pada tahun 2023 terdapat 13 distrik dari 15 distrik di Kabupaten Mappi yang telah tersedia listrik PLN. Beberapa daerah lainnya memiliki akses terhadap listrik yang tidak disediakan PLN seperti genset atau memang belum memiliki fasilitas penyedia listrik.

Besarnya daya listrik yang terpasang di Kabupaten Mappi pada tahun 2024 adalah sebesar 8.203 KW dengan daya produksi sebesar 11.916.926 KWh. Listrik yang terjual ada sebesar 10.220 KWh dengan jumlah pelanggan 1.771. berikut ini sebaran daya terpasang dan produksi listrik PT PLN (persero) menurut kecamatan/distrik di Kabupaten Mappi tahun 2024.

Tabel 2. 10 Daya Terpasang dan Produksi Listrik PT PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN menurut Kecamatan/Distrik di Kabupaten Mappi Tahun 2024

Kecamatan/Distrik	Daya Terpasang	Produksi Listrik
Nambioman Bapai	100	530
Minyamur	50	106
Edera	1.250	1.563
Venaha	180	415
Syachame	20	-
Bamgi	30	187
Yakomi	70	303
Obaa	5.840	5.352
Passue	60	199
Haju	25	-
Assue	100	288
Citak Mitak	368	765
Kaibar	40	221
Passue Bawah	30	291
Ti-zan	40	-
Kabupaten Mappi	**8.203**	**10.220**

Sumber: Kabupaten Mappi dalam Angka 2025

Sumber energi listrik yang berasal dan PLN di Kabupaten Mappi belum terdistribusi secara optimal. Masih terdapat distrik yang belum mendapatkan produksi listrik. Kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar seperti listrik ini dapat menghambat pengembangan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Sebagian besar penduduk masih bergantung pada metode tradisional dan sumber daya alam yang terbatas.

Tabel 2. 11 Jumlah Pelanggan Listrik menurut Distrik di Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Kecamatan/Distrik	2020	2021	2022	2023	2024
Nambioman Bapai	170	72	14	40	-
Minyamur	1	1	1	1	-
Edera	250	352	70	163	-
Venaha	-	397	15	1	-
Syachame	-	172	-	-	-
Bamgi	-	16	-	171	-
Yakomi	-	179	-	124	-
Obaa	713	468	578	766	-
Passue	-	136	59	4	-
Haju	-	-	-	-	-
Assue	135	69	40	35	-
Citak Mitak	22	23	37	260	-
Kaibar	-	187	-	34	-
Passue Bawah	-	62	-	55	-
Ti zAIN	-	-	-	117	-
Kabupaten Mappi	**1.291**	**2.134**	**814**	**1.771**	**-**

Sumber: Kabupaten Mappi dalam Angka 2025

Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Mappi tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021, jumlah pelanggan listrik mengalami kenaikan akan tetapi menurun pada tahun 2022. Berdasarkan data tersebut diatas, masih banyak distrik yang belum dapat menyalurkan listrik. Pemerataan akses listrik ke seluruh wilayah di Kabupaten Mappi masih perlu ditingkatkan. Selain itu, diperlukan pengembangan energi terbarukan untuk memenuhi ketersediaan tenaga listrik.

3. Pelayanan Air Bersih dan Air Minum

Penyediaan air bersih dalam kehidupan merupakan hal penting yang akan mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Air bersih yang mudah diakses juga menunjukkan telah terbangunnya sistem tata kelola kehidupan yang baik. Penggunaan air bersih dalam kehidupan tidak hanya ditentukan oleh kesadaran masyarakat, melainkan juga dalam hal kemudahan untuk memperolehnya. Kedua hal tersebut saling berpengaruh sehingga perlu diperhatikan secara bersamaan. Kabupaten Mappi memiliki infrastruktur air minum yang terbatas, terutama di daerah terpencil. Jaringan pipa belum menjangkau seluruh wilayah, dan sumber air yang ada seringkali tidak memenuhi standar kualitas.

Air bersih harus tersedia bagi semua rumah tangga namun ketersediaan air untuk mandi, cuci, kakus dan lain-lain dari sumber mata air terlindungi baru mencapai 16,19%, sedang sumber mata air yang tidak terlindungi rata-rata mencapai 45,75%, dan yang menggunakan air sungai, dan hujan rata-rata 21,47%. Penduduk yang menggunakan sumur bor rata-rata sebanyak 15,59%.

Tabel 2. 12 Capaian Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Mappi Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	%	29,79	23,58	48,66	49,69	N/A
Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	%	29,79	23,58	48,66	49,69	N/A
Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	%	N/A	N/A	35,1	35,1	39,98

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029

Persentase rumah tangga (RT) di Kabupaten Mappi yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Tahun 2019, sebanyak 29,79% rumah tangga memiliki akses terhadap sumber air minum layak, lalu terjadi penurunan ke 23,58% di Tahun 2020, dan kembali meningkat di Tahun 2021 dan Tahun 2022. Pada tahun 2023, mengalami sedikit kenaikan menjadi 49,69%. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani Rumah Tangga di Kabupaten Mappi selama periode 2021-2023 juga cukup rendah. Hal ini juga mengindikasikan kurangnya perhatian atau belum adanya infrastruktur yang memadai untuk menyediakan air baku bagi kebutuhan rumah tangga. keterbatasan penyediaan infrastruktur air bersih, pemeliharaan infrastruktur air bersih, dan penyediaan layanan air bersih perlu menjadi perhatian. Diperlukan pengembangan infrastruktur air minum, termasuk perluasan jaringan pipa dan pembangunan sumber air alternatif. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, seperti pompa air tenaga surya, dapat menjadi solusi untuk menyediakan air bersih di daerah terpencil.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Sub bagian ini menjelaskan kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penjelasan ini perlu dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, serta Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah.

1. Kualitas Lingkungan Hidup

Penurunan kualitas lingkungan hidup menjadi isu strategis di Kabupaten Mappi. Beberapa permasalahan lingkungan yang menyebabkan Banjir ketika musim hujan dengan frekuensi tinggi terutama pada distrik Obaa pada bulan Mei 2023. Dari kejadian ini terkonfirmasi bahwa 12 kampung ditetapkan dengan status darurat banjir. Isu penurunan kualitas lingkungan lainnya adalah Sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan pada beberapa sub DAS dan rawa. Pendangkalan ini menyebabkan beberapa kendala terutama pada akses transportasi mengingat wilayah Mappi merupakan wilayah dengan 70% adalah transportasi sungai. Kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan hidup, termasuk akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, dan udara yang bersih.

Kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu digambarkan dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan.

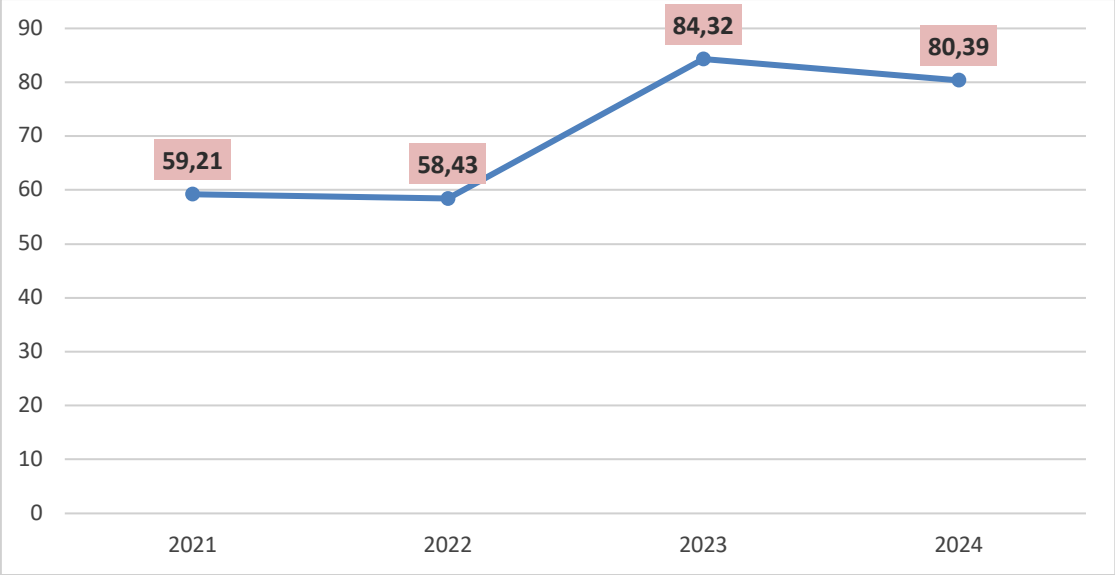

Gambar 2. 11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Mappi Tahun 2021-2024
Sumber: KLHK, 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Mappi mengalami fluktuasi dalam periode 2021–2024. Pada tahun 2021, nilai IKLH tercatat sebesar 59,21 dan sedikit menurun menjadi 58,43 di tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 25,89 angka hingga mencapai 84,32. Kondisi ini mencerminkan perbaikan kualitas lingkungan yang cukup drastis. Meski demikian, di tahun 2024 nilai indeks sedikit menurun menjadi 80,39, namun tetap berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dua tahun pertama. Perkembangan ini menunjukkan adanya upaya nyata dalam pengelolaan lingkungan hidup, meskipun masih diperlukan langkah berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan secara konsisten.

2. Pelayanan Sanitasi Rumah Tangga

Pengelolaan air limbah domestik erat kaitanya dengan peran Pemerintah Kabupaten Mappi untuk menyediakan sanitasi yang layak bagi rumah tangga. Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan baik oleh rumah tangga sendiri maupun bersama dengan rumah tangga lain tertentu yang dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL. Pada tahun 2022 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak

dan berkelanjutan di Kabupaten Mappi masih cukup rendah yaitu 38,11%, dimana tahun 2023 dan 2024 tidak ada data. Persentase ini cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Berikut data detail pencapaian akses sanitasi di Kabupaten Mappi.

Tabel 2. 13 Capaian Pelayanan Sanitasi Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	%	25,06	26,19	38,11	37,30	39,08

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak masih menjadi masalah di Kabupaten Mappi. Sistem Pembuangan Air Limbah (Sanitasi) yang terdiri dari Limbah rumah tangga, termasuk limbah kamar mandi dan dapur, harus dibuang dengan aman melalui sistem drainase atau septic tank, untuk menghindari pencemaran lingkungan. Kondisi di Kabupaten Mappi sebagian besar belum memiliki *septic tank*, kamar mandi dan dapur yang layak. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja pada tahun 2023 sebesar 7.444,71 rumah tangga atau 27%. Akses terhadap sanitasi layak tidak merata di seluruh Kabupaten Mappi. Wilayah-wilayah yang lebih terpencil dan sulit dijangkau seringkali menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur sanitasi, sehingga persentase rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi layak di area tersebut masih rendah. Keterbatasan dalam pembangunan infrastruktur dan tantangan logistik sering menjadi kendala dalam memperluas jangkauan sanitasi yang layak ke daerah-daerah terpencil. Upaya yang lebih intensif diperlukan untuk memastikan bahwa fasilitas sanitasi dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah yang lebih sulit diakses. Diperlukan peningkatan sanitasi melalui edukasi serta pembangunan fasilitas sanitasi yang layak dan berkelanjutan.

3. Pengelolaan Persampahan

Sarana pengelolaan sampah di Kabupaten Mappi belum dikelola secara baik. Berdasarkan data SIPSN Kabupaten Mappi belum memiliki TPA. Karakteristik wilayah Kabupaten Mappi yang sebagian besar merupakan daerah

rawa menimbulkan tantangan teknis dan lingkungan dalam penetapan lokasi TPA yang sesuai standar. Sampah masih dibuang di Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Rendahnya penanganan sampah di Mappi disebabkan oleh infrastruktur minim dan rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya SDM, anggaran terbatas, serta penegakan hukum yang lemah.

Tabel 2. 14 Rata-Rata Sampah yang Dihasilkan dan Rata-Rata Timbulan Sampah Menurut Kecamatan/Distrik di Kabupaten Mappi Tahun 2023

Kecamatan/Distrik	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rata-Rata Sampah yang Dihasilkan Per Hari (Kg)	Rata-Rata Timbulan Sampah Tahunan (Ton)
Nambioman Bapai	10.050	6.834	2.200,95
Minyamur	5.450	3.488	1.193,55
Edera	8.381	5.363,84	1.835,439
Venaha	2.470	1.580,8	540,93
Syachame	3.960	2.534,4	867,24
Bamgi	2.420	1.548,8	529,98
Yakomi	1.920	1.228,8	420,48
Obaa	34.360	21.990,4	7.524,84
Passue	7.000	4.480	1.533
Haju	10.680	6.835,2	2.338,92
Assue	10.200	6.528	2.233,8
Citak Mitak	5.480	3.507,2	1.200,12
Kaibar	1.518	1.619,2	554,07
Passue Bawah	2.980	1.907,2	652,62
Ti Zain	2.410	1.542,4	527,79

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJMD Tahun 2025-2045

Wilayah Mappi yang umumnya berupa rawa dan sungai. Sumber-sumber air ini rawan terhadap pencemaran air oleh sampah yang dihasilkan. Peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah yang cukup besar di Kabupaten Mappi. Timbulan sampah terbesar Kabupaten Mappi pada tahun 2023 terdapat pada Distrik Obaa dengan jumlah penduduk yang paling banyak. Rata-rata sampah yang dihasilkan per hari di Distrik Obaa sebesar 21.990,4 kg dengan rata-rata timbulan sampah tahunan 7.524,84 ton.

Tabel 2. 15 Capaian Pelayanan Persampahan Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase sampah perkotaan yang tertangani	%	2,9	2,87	3,78	4,29	4,55
Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mappi Tahun 2024

Pelayanan persampahan di Kabupaten Mappi masih sangat rendah. Meskipun pada rentang waktu tahun 2020 hingga 2024 persentase sampah perkotaan yang tertangani mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2024 terdapat 4,55 persen sampah perkotaan yang tertangani. Capaian ini meningkat 1,65 poin dari tahun 2020. Kabupaten Mappi belum melakukan daur ulang timbulan sampah yang dihasilkan. Sampah yang dibuang sembarangan dan tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan resiko penyakit pada masyarakat serta dapat menurunkan kualitas lingkungan. Pembuangan Akhir (TPA) sampah dan perlu diadakan sarana dan prasarana pengolahan sampah yang ramah lingkungan.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi merupakan kemampuan untuk kembali ke keadaan sebelum terjadinya bencana ataupun keadaan yang lebih baik sehingga ketika terjadi bencana yang sama, individu atau kelompok mampu untuk menghadapi bencana tersebut dengan pengalaman yang dimiliki dari bencana sebelumnya. Kabupaten Mappi perlu meningkatkan kemampuan dalam menghadapi bencana alam dan perubahan iklim, melalui pengembangan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Kabupaten Mappi termasuk ke dalam kawasan rawan bencana rawan banjir, cuaca ekstrim, erosi, dan gempa bumi. Sehingga jalur evakuasi harus disesuaian dengan potensi bencana yang ada. Diperlukan upaya pengurangan risiko kebencanaan khususnya bencana gempa bumi dan banjir melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana alam.

Tabel 2. 16 Indikator Kinerja Kebencanaan di Kabupaten Mappi

Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Angka	126,4	126,4	1264	126,4	126,4
Indeks risiko bencana pada pusat pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Angka	132,08	132,08	132,08	132,08	132,08
Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Sistem	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada

Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(PRB) tingkat nasional dan daerah						
Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Orang	34	1.761	0	693	N/A
Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Angka	0	0	0	0	N/A
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Juta	500	600	300	500	N/A
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Ribu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Ribu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Rantek RPJMD Kabupaten Mappi 2025-2029, Dokumen Induk KLHS RPJPD Kabupaten Mappi 2025-2045

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Mappi cenderung tidak mengalami perubahan sepanjang tahun 2020-2024 dengan nilai indeks sebesar 126,4 atau dalam kategori “sedang”. Indeks Risiko Bencana selalu tetap setiap tahunnya mengindikasikan kapasitas masih perlu ditingkatkan. Ancaman dan kerentanan bencana masih bersifat tetap setiap tahunnya karena tidak ada perubahan signifikan pada daerah rawan bencana di Kabupaten Mappi.

Perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan pola cuaca dan peningkatan suhu dapat mengganggu ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies. Salah satu dampak perubahan iklim terdapat pada sektor kesehatan seperti penyebaran penyakit malaria dan demam berdarah. Selain itu, Kabupaten Mappi sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air, cuaca ekstrim, dan kerusakan habitat rawa. Perubahan iklim menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada mata pencaharian masyarakat desa. Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan daerah.

2.1.1.7 Demografi

Demografi merupakan salah satu aspek fundamental dalam perencanaan pembangunan karena menyajikan gambaran mengenai karakteristik penduduk yang menjadi subjek sekaligus pelaku pembangunan. Sub-bab demografi mencakup data terkait jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, distribusi

penduduk, rasio penduduk, keberadaan masyarakat adat, dan proyeksi penduduk tahun 2025-2029. Data ini penting untuk memahami kebutuhan, potensi, dan tantangan yang dihadapi dalam perumusan kebijakan publik dan pengalokasian sumber daya secara efektif.

Dalam konteks perencanaan, analisis demografi digunakan untuk memetakan dinamika kependudukan yang berpengaruh terhadap sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pelayanan dasar. Pemahaman terhadap tren demografis, seperti urbanisasi, migrasi, dan perubahan struktur umur penduduk, juga menjadi dasar dalam merancang intervensi yang adaptif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, subbab ini menyajikan data dan analisis mengenai kondisi dan perkembangan demografi di Kabupaten Mappi yang menjadi pijakan dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan.

1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator utama dalam analisis demografi suatu wilayah. Jumlah penduduk mencerminkan besaran populasi yang menetap di suatu daerah pada periode tertentu, sedangkan laju pertumbuhan penduduk menggambarkan dinamika perubahan jumlah penduduk akibat kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk. Analisis terhadap kedua aspek ini penting untuk memahami perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan infrastruktur serta layanan publik di suatu wilayah. Dengan mengetahui tren pertumbuhan penduduk, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

Badan Pusat Statistik dalam laporan tahunan Kabupaten Mappi dalam Angka Tahun 2025 mencatat bahwa terdapat penduduk di Kabupaten Mappi sebanyak 114.153 jiwa pada tahun 2024. Angka ini terdiri dari 58.942 penduduk laki-laki dan 55.211 penduduk perempuan.

2. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk merujuk pada pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu, seperti aspek geografis, biologis, sosial, atau ekonomi. Komposisi penduduk di suatu

wilayah dapat dianalisis melalui kategori usia dan jenis kelamin. Komposisi penduduk memberikan gambaran mengenai berbagai aspek, seperti proporsi tenaga kerja produktif dan non-produktif, potensi bonus demografi, serta angka ketergantungan. Faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan penetapan kebijakan. Komposisi penduduk di Kabupaten Mappi pada tahun 2024, berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin disajikan dalam gambar di bawah ini.

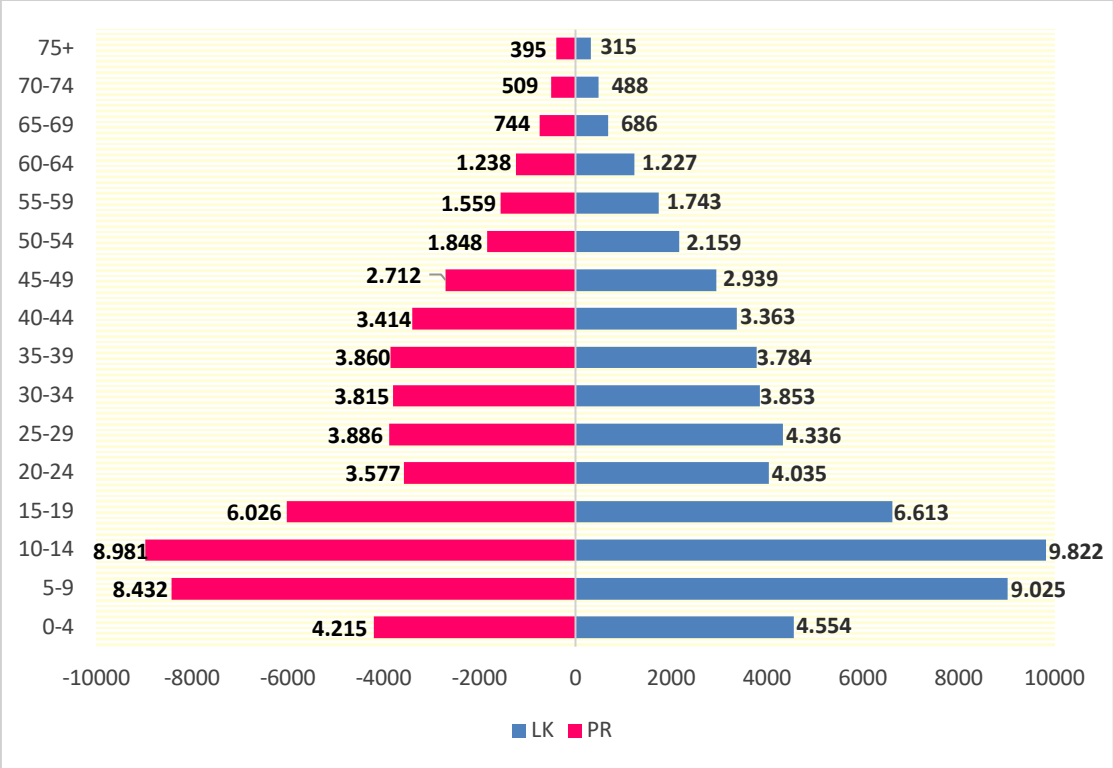

Gambar 2. 12 Piramida Penduduk Kabupaten Mappi Tahun 2024
Sumber: BPS Kabupaten Mappi, 2025

Struktur penduduk Kabupaten Mappi berdasarkan usia dan jenis kelamin pada tahun 2024 membentuk pola piramida ekspansif. Pola ini mencerminkan pertumbuhan penduduk yang relatif stabil antara kelompok usia produktif dan non-produktif. Mayoritas penduduk berada dalam usia produktif (15-64 tahun) mencapai 57,81 persen dari keseluruhan jumlah penduduk, dan terdiri dari 51,63 persen laki-laki dan 48,39 persen perempuan. Sementara itu, kelompok non-produktif didominasi oleh penduduk usia 0-14 tahun sebesar 39,45 persen, sedangkan penduduk lanjut usia hanya mencapai 2,75 persen.

Proporsi usia produktif yang lebih besar dibandingkan usia non-produktif menunjukkan bahwa Kabupaten Mappi sedang mengalami bonus demografi

yang diperkuat dengan angka ketergantungan sebesar 42,19 persen. Angka ketergantungan yang berada di bawah 45 persen dapat dikategorikan sebagai bonus demografi. Bonus demografi mengindikasikan adanya potensi sumber daya manusia yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan Kabupaten Mappi, tetapi bonus demografi juga perlu dikelola dengan baik karena akan memengaruhi kondisi di Kabupaten Mappi ke depannya, terutama melihat bahwa struktur penduduk Kabupaten Mappi didominasi oleh usia 5-9 tahun dan 10-14 tahun.

3. Rasio Penduduk

Rasio penduduk di Kabupaten Mappi dapat dianalisis melalui perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Penghitungan rasio ini berperan dalam memahami proporsi penduduk laki-laki dan perempuan, yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih terarah. Perbandingan jumlah penduduk ini tercermin dalam data *sex ratio* yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Tabel 2. 17 *Sex Ratio* Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
2020	N/A	N/A	108295	106,76
2021	N/A	N/A	109579	106,34
2022	56873	53418	110291	106,47
2023	56873	53418	110291	106,47
2024	58492	55211	114153	106,76

Sumber: BPS, Kabupaten Mappi dalam Angka Tahun 2021-2025

Data di atas menunjukkan bahwa sex ratio Kabupaten Mappi berada pada kisaran 106-107 selama periode tersebut yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Berdasarkan data kependudukan tahun 2024, jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 58.942 jiwa, sementara penduduk perempuan sebanyak 55.211 jiwa. Dari total tersebut, angka *sex ratio* Kabupaten Mappi adalah sebesar 106,76. Angka ini mengindikasikan bahwa komposisi penduduk di Kabupaten Mappi sedikit lebih dominan laki-laki, di mana terdapat sekitar 107 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan salah satu indikator demografi yang menggambarkan distribusi jumlah penduduk dalam suatu wilayah berdasarkan

luas area yang ditempati. Indikator ini berperan penting dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam aspek penyediaan infrastruktur, fasilitas umum, serta pengelolaan sumber daya. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi atau rendah dapat memengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan di suatu daerah. Oleh karena itu, analisis kepadatan penduduk menjadi faktor krusial dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 18 Distribusi Penduduk Kabupaten Mappi Tahun 2024

Distrik	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km^2/sq.km)	Kepadatan Penduduk per Km^2	Persentase Penduduk
Obaa	35.287	5.074,46	15,86	30,91
Nambioman Bapai	10.518	2.433,81	2,07	9,21
Citakmitak	5.648	1.392,69	4,54	4,95
Edera	8.490	1.705,34	6,1	7,44
Haju	11.023	626,75	9,33	9,66
Assue	10.480	747,28	4,33	9,18
Kaibar	2.601	1.843,03	1,74	2,28
Passue	7.383	2.224,21	5,13	6,47
Minyamur	5.727	1.440,39	2,35	5,02
Venaha	2.568	1.180,85	1,51	2,25
Syahcame	4.358	2.422,21	6,95	3,82
Yakomi	1.965	1.244,82	1,07	1,72
Bamgi	2.551	1.499,03	3,41	2,23
Passue Bawah	3.075	1.190,4	2,58	2,69
Ti Zain	2.479	583,95	4,25	2,17
Mappi	11.4153	25.609,22	4,46	100

Sumber: BPS, Kabupaten Mappi dalam Angka Tahun 2025

Distrik Obaa tercatat memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2024, dengan angka mencapai 15,86 jiwa per kilometer persegi, atau yang berarti setiap kilometer persegi wilayah tersebut dihuni oleh sekitar 16 jiwa. Sebaliknya, Distrik Yakomi memiliki kepadatan terendah, dengan hanya 1 hingga 2 jiwa per kilometer persegi. Perbedaan kepadatan yang mencapai 16 kali lipat ini disebabkan oleh perbedaan luas wilayah antara kedua Distrik tersebut. Selain faktor luas wilayah, distribusi kepadatan penduduk di Kabupaten Mappi juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi, lingkungan, geografis, politik, serta aksesibilitas.

Distrik Obaa berfungsi sebagai pusat ekonomi Kabupaten Mappi dan memiliki infrastruktur serta fasilitas yang lebih mudah diakses. Sementara itu, Distrik Yakomi memiliki akses yang lebih terbatas. Kondisi ini menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung perkembangan wilayah secara lebih seimbang.

5. Keberadaan Masyarakat Adat

Masyarakat adat merujuk pada kelompok atau komunitas yang tumbuh tak terpisahkan dan memiliki hubungan organik dengan lingkungannya. Masyarakat adat cenderung memiliki ikatan yang kuat antar anggota kelompoknya dan bersifat sukarela. Umumnya setiap anggota masyarakat adat memiliki hukum adat yang mengatur dan menjadi pedoman dalam penyelesaian berbagai macam persoalan yang terjadi pada lingkungan adat terkait.

Kabupaten Mappi sebagai bagian dari wilayah Provinsi Papua Selatan memiliki kekayaan budaya yang tercermin dalam keberadaan masyarakat adat yang hidup secara turun-temurun di wilayah ini. Masyarakat adat di Kabupaten Mappi memiliki sistem nilai, norma, hukum adat, serta kelembagaan sosial yang masih dijaga dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat adat tersebar di berbagai kampung dan distrik dengan identitas kultural yang kuat serta hubungan yang erat dengan wilayah adat dan sumber daya alam di sekitarnya. Tercatat ada enam suku besar di Kabupaten Mappi, yakni Suku Yaghai, Awyu, Koroway, Wiyagar, Asmat, dan Tamario.

Keberadaan masyarakat adat di Mappi tidak hanya menjadi bagian dari sejarah dan warisan budaya, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan harmoni sosial. Struktur adat seperti kepala suku, ondoafi, dan lembaga adat lainnya masih berfungsi aktif dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik di tingkat komunitas. Sistem pengelolaan tanah ulayat, hutan, dan sungai berbasis kearifan lokal juga menjadi bagian integral dari pola hidup masyarakat adat yang mendukung keberlanjutan ekologi.

Namun demikian, masyarakat adat juga menghadapi tantangan dalam bentuk perubahan sosial, tekanan pembangunan, serta potensi marginalisasi dalam sistem hukum dan administrasi formal. Oleh karena itu, pelibatan aktif

masyarakat adat dalam proses perencanaan pembangunan daerah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi, dan kontribusi mereka terhadap pembangunan berkelanjutan dapat terus diperkuat.

6. Proyeksi Demografi

Proyeksi demografi bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan dan perubahan jumlah penduduk berdasarkan berbagai kategori, seperti total populasi, tingkat kepadatan, serta distribusi penduduk menurut usia di Kabupaten Mappi. Analisis ini dilakukan secara mendalam untuk memahami berbagai aspek kependudukan, termasuk kondisi lanjut usia, jumlah penduduk usia sekolah, rasio ketergantungan, serta potensi bonus demografi. Berikut ini merupakan hasil proyeksi kependudukan di Kabupaten Mappi untuk periode 2025 hingga 2029.

a. Jumlah Penduduk

Analisis dinamika kependudukan memiliki peran penting sebagai dasar dalam perumusan kebijakan daerah. Beberapa aspek utama yang perlu dikaji meliputi jumlah penduduk, laju pertumbuhan, dan tingkat kepadatan. Masing-masing indikator ini memberikan perspektif berbeda mengenai kondisi kependudukan, namun saling melengkapi dalam memahami tren demografi secara menyeluruh. Proyeksi demografi Kabupaten Mappi didasarkan pada data kependudukan tahun 2020 sebagai acuan utama. Berikut ini merupakan hasil proyeksi terkait jumlah penduduk dan laju pertumbuhan di Kabupaten Mappi untuk periode 2025 hingga 2029.

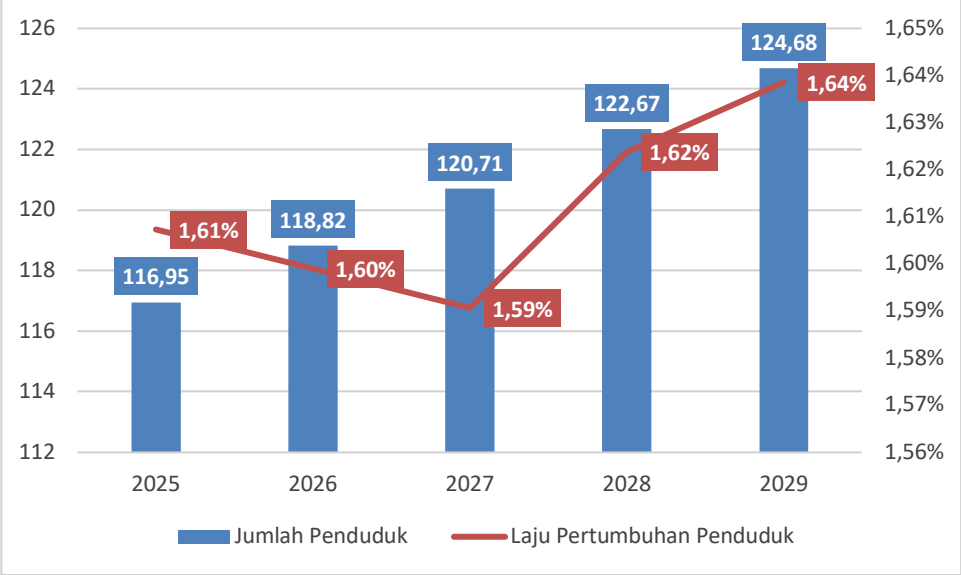

Gambar 2. 13 Proyeksi Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Papua Selatan 2020-2035 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Hasil proyeksi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Selatan menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk pada periode 2025 hingga 2029. Tren yang berbeda terjadi pada proyeksi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mappi yang mengalami fluktuasi pada periode yang sama. Laju Pertumbuhan Penduduk rata-rata di Kabupaten Mappi pada tahun 2025-2029 diproyeksikan sebesar 1,61 persen. Jumlah penduduk di Kabupaten Mappi diproyeksikan bertambah sebanyak 7,73 ribu jiwa selama periode 2025-2029. Hasil proyeksi yang demikian tetap mempertimbangkan *Total Fertility Rate* (TFR) yang berada pada angka 3,85 berdasarkan basis data tahun 2020 dan menjadi 3,55 pada tahun 2030. TFR mengindikasikan bahwa pada tahun 2025 hingga 2029, populasi di Kabupaten Mappi akan cenderung bertumbuh. Hal itu dikarenakan TFR menunjukkan jumlah anak secara rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada masa reproduksinya. Angka TFR 3,85 merujuk rata-rata seorang perempuan di Kabupaten Mappi melahirkan tiga hingga empat orang anak yang diharapkan mampu meneruskan keturunan sehingga menjaga laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mappi.

b. Kepadatan Penduduk

Proyeksi kepadatan penduduk merupakan estimasi mengenai distribusi jumlah penduduk dalam suatu wilayah berdasarkan luas area yang ditempati pada periode tertentu di masa mendatang. Analisis ini penting untuk memahami dinamika perubahan kepadatan yang dapat memengaruhi berbagai aspek, seperti kebutuhan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kapasitas wilayah. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti laju pertumbuhan penduduk, migrasi, serta perubahan penggunaan lahan, proyeksi kepadatan penduduk dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Melalui proyeksi ini, pemerintah daerah dapat mengantisipasi tantangan kependudukan dan merumuskan kebijakan yang mendukung pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tingkat kepadatan penduduk dilihat dari perbandingan kondisi demografi dengan geografis daerah. Berikut merupakan hasil proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Mappi tahun 2025-2029.

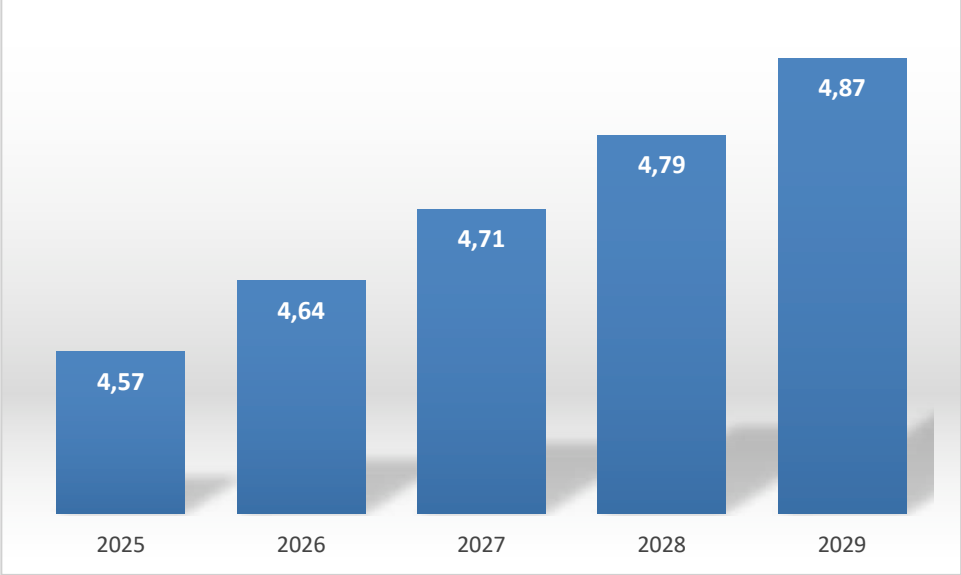

Gambar 2. 14 Proyeks Kepadatan Penduduk Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Papua Selatan 2020-2035 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Proyeksi kepadatan penduduk di Kabupaten Mappi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2025-2029 dengan selisih sekitar 0,3 jiwa per kilometer persegi dalam lima tahun. Kenaikan ini menandakan adanya pertumbuhan penduduk yang cukup stabil dan perlu dikelola agar tidak menimbulkan tekanan berlebih pada layanan dasar maupun ruang wilayah. Faktor yang mendukung tren ini antara lain tingginya angka kelahiran di wilayah pedalaman, perbaikan akses kesehatan yang menekan angka kematian, serta pergerakan penduduk akibat pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah. Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial juga berpotensi mendorong pertumbuhan permukiman baru.

c. Penduduk Usia Produktif

Penduduk usia produktif merupakan kelompok penduduk dalam rentang usia yang secara umum dianggap mampu berkontribusi secara aktif dalam kegiatan ekonomi, yaitu antara 15 hingga 64 tahun. Kelompok ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pembangunan di berbagai sektor. Proporsi penduduk usia produktif yang tinggi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi suatu wilayah. Jika dikelola dengan baik melalui kebijakan pendidikan, pelatihan, dan penciptaan lapangan kerja, bonus demografi yang dihasilkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, tanpa perencanaan yang tepat, tingginya jumlah penduduk usia produktif dapat menimbulkan permasalahan, seperti pengangguran, ketimpangan sosial, dan meningkatnya beban ekonomi bagi negara atau daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa penduduk usia produktif memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, serta kesempatan kerja yang sesuai. Dengan demikian, potensi mereka dapat dimanfaatkan secara optimal demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

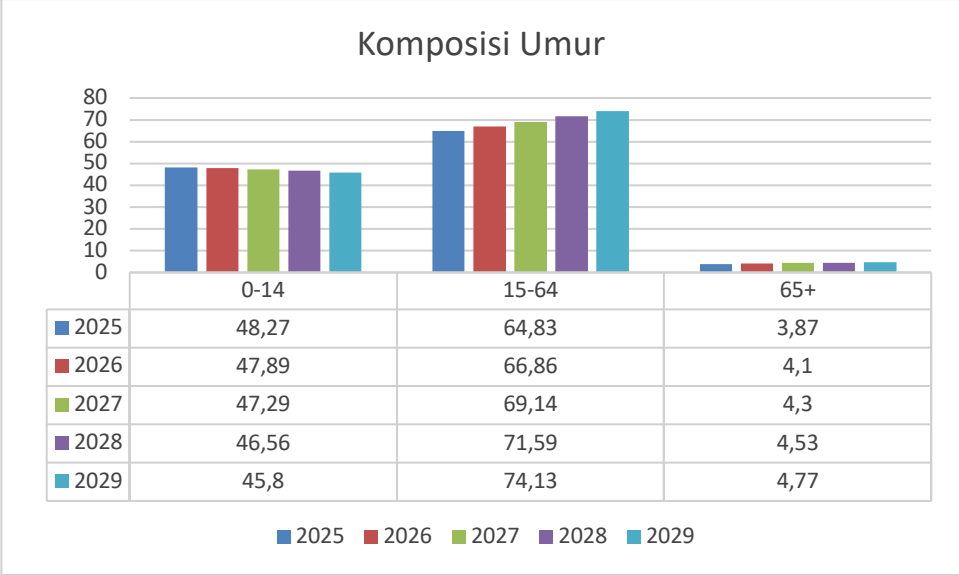

	0-14	15-64	65+
2025	48,27	64,83	3,87
2026	47,89	66,86	4,1
2027	47,29	69,14	4,3
2028	46,56	71,59	4,53
2029	45,8	74,13	4,77

Gambar 2. 15 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Produktif (Ribu Jiwa) Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Papua Selatan 2020-2035 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Grafik Komposisi Umur Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 memperlihatkan proyeksi struktur penduduk berdasarkan tiga kelompok usia, yakni 0-14 tahun yang merupakan usia muda dan masuk kategori non produktif, 15-64 tahun sebagai kelompok usia produktif, dan 65+ tahun merupakan usia lanjut yang juga termasuk dalam kategori non produktif. Proyeksi komposisi umur penduduk Kabupaten Mappi tahun 2025-2029 menunjukkan adanya pergeseran struktur demografi yang signifikan. Kelompok usia produktif terus meningkat dari 64,83 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 74,13 ribu jiwa pada tahun 2029. Sementara itu, proporsi usia muda menurun dari 48,27 ribu jiwa menjadi 45,8 ribu jiwa, dan kelompok usia lanjut perlahan naik dari 3,87 ribu jiwa menjadi 4,77 ribu jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya perubahan kecenderungan reproduksi dan perbaikan pada layanan kesehatan, terutama pada penduduk lanjut usia, sehingga juga meningkatkan harapan hidup yang dimiliki di Kabupaten Mappi.

Implikasi dari semakin banyaknya jumlah penduduk usia produktif yakni semakin banyak pula penduduk usia kerja yang ada di Kabupaten Mappi. Banyaknya penduduk usia produktif yang diproyeksikan

mencapai 74,13 ribu jiwa pada tahun 2029 dari total keseluruhan jumlah penduduk dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat tersebut dapat diperoleh apabila jumlah penduduk usia produktif yang tersedia juga memiliki kualitas yang baik dan mampu mengoptimalkan kesempatan yang ada pada aspek ketenagakerjaan. Perbaikan dari segi kualitas menjadi penting, terutama apabila banyaknya kuantitas dari penduduk usia produktif tidak sejalan dengan kualitas sumber daya manusia yang ada.

d. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan adalah indikator yang digunakan untuk membandingkan jumlah penduduk usia kerja dengan penduduk yang berada di luar kelompok usia produktif. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk berusia 0-14 tahun serta 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Angka ketergantungan mencerminkan besarnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif dalam membiayai kehidupan kelompok penduduk yang belum atau tidak lagi bekerja. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin besar beban yang dipikul oleh penduduk usia kerja, dan sebaliknya.

Tabel 2. 19 Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029

Komposisi Umur	2025	2026	2027	2028	2029
0-14	48,27	47,89	47,29	46,56	45,8
15-64	64,83	66,86	69,14	71,59	74,13
65+	3,87	4,1	4,3	4,53	4,77
Angka ketergantungan	80,43%	77,76%	74,62%	71,36%	68,22%

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Papua Selatan 2020-2035 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Proyeksi angka ketergantungan di Kabupaten Mappi selama 2025-2029 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, yakni berkurang 12,21 poin dari 80,43 pada tahun 2025 menjadi 68,22 pada 2029. Penurunan ini sejalan dengan bertambahnya proporsi penduduk usia produktif, sementara kelompok usia non-produktif cenderung menurun atau meningkat dalam jumlah yang relatif kecil. Tren penurunan ini

mencerminkan potensi bonus demografi, di mana beban tanggungan terhadap penduduk usia produktif semakin ringan. Mappi memiliki peluang untuk mengoptimalkan pembangunan daerah jika mampu memanfaatkan peningkatan jumlah tenaga kerja produktif secara tepat

e. Bonus Demografi

Bonus demografi merujuk pada kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk non-produktif, dengan proporsi lebih dari 60 persen dari total populasi atau saat angka ketergantungan berada pada angka 30 hingga 45 persen. Kondisi ini dapat dianalisis melalui proyeksi komposisi penduduk Kabupaten Mappi pada periode 2025-2029. Selain melihat struktur usia penduduk, keberadaan bonus demografi juga dapat ditentukan melalui angka ketergantungan. Berikut merupakan proyeksi komposisi umur dan angka ketergantungan di Kabupaten Mappi tahun 2025-2029.

Tabel 2. 20 Proyeksi Komposisi Umur dan Angka Ketergantungan di Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029

Komposisi Umur	2025	2026	2027	2028	2029
Nonproduktif	44,58%	43,74%	42,73%	41,64%	40,55%
Produktif	55,42%	56,26%	57,27%	58,36%	59,45%
Angka ketergantungan	80,43%	77,76%	74,62%	71,36%	68,22%

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Papua Selatan 2020-2035 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020, diolah

Hasil pengolahan data sensus penduduk tahun 2020 sebagai basis proyeksi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Selatan untuk Kabupaten Mappi menunjukkan bahwa Kabupaten Mappi belum memasuki fase demografi. Hal itu ditunjukkan dari proyeksi komposisi kelompok penduduk usia produktif yang masih berada di bawah 60 persen dari total keseluruhan. Apabila mengacu angka ketergantungan, Kabupaten Mappi juga belum memenuhi kriteria untuk dianggap memasuki bonus demografi karena proyeksi angka ketergantungan masih berada pada angka 80,43 pada tahun 2025, dan meskipun diproyeksikan mengalami penurunan hingga menjadi 68,22 pada tahun 2029. Idealnya, Kabupaten Mappi baru dapat dikatakan

mengalami bonus demografi apabila angka ketergantungannya berada di bawah 45 persen. Mengingat angka fertilitas (*total fertility rate*) Kabupaten Mappi yang masih berada di angka 3, hal ini dapat dimanfaatkan dengan persiapan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada, sehingga saat komposisi penduduk usia produktif sudah persentase bonus demografi, kuantitas yang tersedia juga memiliki kualitas yang mumpuni.

f. Penduduk Usia Lanjut

Perubahan struktur penduduk di Kabupaten Mappi berkontribusi pada meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia, yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kelahiran serta meningkatnya angka harapan hidup. Penduduk lanjut usia merujuk pada individu yang berusia 60 tahun ke atas.

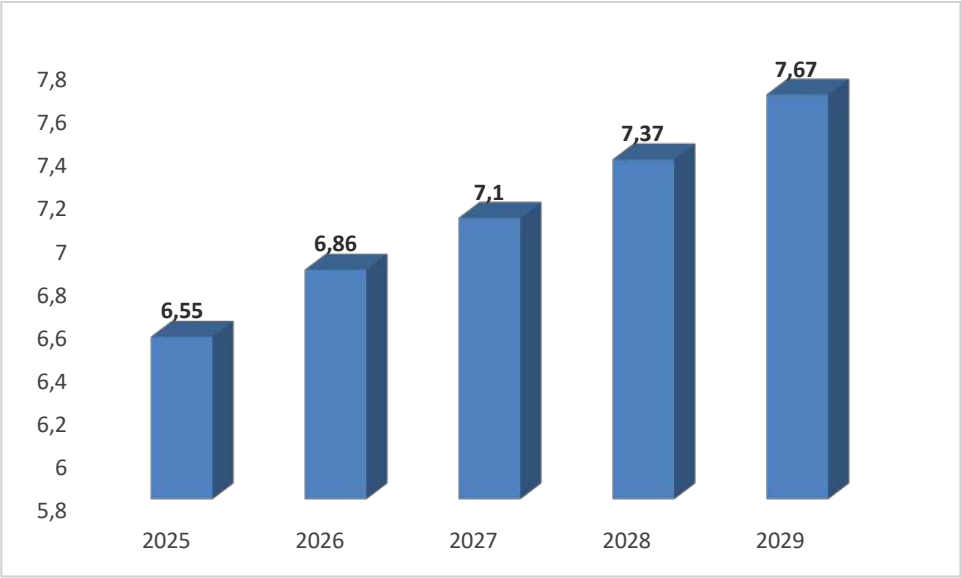

Gambar 2. 16 Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029
Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Papua Selatan 2020-2035 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Grafik tersebut menunjukkan proyeksi peningkatan penduduk usia lanjut (60 tahun ke atas) di Kabupaten Mappi selama periode 2025-2029. Jumlah penduduk lansia diperkirakan naik dari 6,55 persen pada tahun 2025 menjadi 7,67 persen pada tahun 2029. Kenaikan yang konsisten ini

mencerminkan adanya pergeseran struktur demografi menuju populasi yang lebih tua, yang dapat berdampak pada kebutuhan pelayanan kesehatan, jaminan sosial, serta strategi pembangunan daerah. Peningkatan penduduk lanjut usia ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbaikan layanan kesehatan yang meningkatkan harapan hidup, penurunan angka kelahiran yang mengubah komposisi penduduk, serta pola migrasi yang cenderung didominasi oleh kelompok usia produktif. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk mengantisipasi kebutuhan khusus lansia melalui kebijakan yang inklusif, mulai dari penyediaan fasilitas kesehatan masyarakat usia lanjut, program pemberdayaan ekonomi lansia yang masih produktif, hingga perlindungan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, proyeksi ini tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga peluang untuk membangun sistem kesejahteraan yang lebih responsif terhadap perubahan struktur penduduk.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi mencerminkan tingkat perkembangan ekonomi suatu daerah dan dapat menjadi indikator bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ekonomi daerah dan masyarakat Kabupaten Mappi dapat diukur melalui berbagai indikator makro, seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), angka kemiskinan, Indeks Gini, serta laju inflasi. Berikut ini adalah pemaparan berbagai data tersebut yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Mappi.

1. **Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan sebuah indikator makro pada rumpun perekonomian yang menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini berperan untuk menggambarkan tingkat pembangunan ekonomi suatu wilayah secara keseluruhan, dengan mengukur tingkat produktivitas suatu daerah dalam

menghasilkan nilai ekonomi secara umum. Berikut adalah gambaran LPE Kabupaten Mappi selama periode Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 21 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, dan Nasional Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Mappi	6,11	-1,26	2,23	2,57	1,98
Provinsi Papua Selatan	N/A	N/A	N/A	4,27	4,55
Nasional	2,07	3,07	5,31	5,05	5,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mappi memiliki tren fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024. Dimulai dengan pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2020 kemudian menurun hingga menjadi negatif 1,26 persen pada tahun 2021 akibat dampak dari Pandemi Covid-19 dan berhasil melakukan *bounce back* pada tahun berikutnya, meskipun mengalami fluktuasi hingga tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mappi tahun 2020-2024 sebesar 2,33 persen. Rata-rata pertumbuhan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Selatan sebesar 4,41 persen dan nasional sebesar 3,28 persen. Rata-rata capaian LPE Provinsi Papua Selatan lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Mappi dan nasional karena Provinsi Papua Selatan menjadi DOB pada tahun 2022, sehingga secara tidak langsung belum memiliki data terkait hal tersebut.

LPE yang lebih akurat dapat dilihat melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHK mencerminkan nilai tambah bruto seluruh sektor ekonomi setelah memperhitungkan inflasi. Analisis PDRB ADHK menurut lapangan usaha memberikan gambaran tentang struktur perekonomian daerah dan kontribusi masing-masing sektor, seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, serta jasa-jasa lainnya. Penelaahan perkembangan PDRB ADHK per lapangan usaha dapat berfungsi untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan, sektor potensial yang perlu dikembangkan lebih lanjut, serta sektor-sektor yang mengalami perlambatan dan membutuhkan intervensi kebijakan. Berikut merupakan PDRB ADHK menurut lapangan usaha di Kabupaten Mappi tahun 2020-2024.

Tabel 2. 22 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,73	20,51	19,65	19,06	18,36
B. Pertambangan dan Penggalian	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26
C. Industri Pengolahan	0,54	0,54	0,52	0,51	0,49
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0	0	0	0	0
F. Konstruksi	33,6	34,81	35,28	35,27	35,88
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,17	7,05	7,1	7,37	7,16
H. Transportasi dan Pergudangan	2,27	2,26	2,71	2,94	3,02
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,26	0,26	0,26	0,24	0,24
J. Informasi dan Komunikasi	0,56	0,56	0,56	0,55	0,56
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,51	0,51	0,56	0,59	0,62
L. Real Estate	1,94	1,89	1,85	1,87	1,85
M, N. Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	25,78	25,01	25,04	25,16	25,43
P. Jasa Pendidikan	2,69	2,62	2,58	2,49	2,43
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,61	2,66	2,56	2,62	2,64
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,94	0,93	0,93	0,96	0,94
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Mappi dalam Angka Tahun 2025

Distribusi ekonomi daerah Kabupaten Mappi menunjukkan beberapa sektor dominan daerah secara proporsi. Perekonomian Kabupaten Mappi secara umum didominasi oleh beberapa lapangan usaha di antaranya adalah: konstruksi, administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib dan, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lapangan usaha konstruksi menjadi sektor usaha dominan di Kabupaten Mappi dengan rata-rata distribusi sebesar 34,97 persen setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sektor selanjutnya yang cukup dominan di Kabupaten Mappi adalah sektor pertanian dan perikanan yang digambarkan oleh distribusi lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib dengan rata-rata distribusi sebesar 25,28 persen per tahun dalam waktu lima tahun terakhir. Lapangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan menjadi sektor dengan distribusi terbesar ketiga dengan rata-rata distribusi sebesar 19,66 persen setiap tahunnya.

2. Tingkat Kemiskinan

Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, dan Indonesia pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 23 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Mappi Tahun 2021-2024

Wilayah	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Mappi	26,05 %	26,04 %	25,72 %	25,7 %
Provinsi Papua Selatan	N/A	N/A	19,97 %	17,44 %
Nasional	9,71%	9,57%	9,36%	8,57%

Sumber: BPS, Kabupaten Mappi dalam Angka Tahun 2025

Tingkat kemiskinan Kabupaten Mappi dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun. Menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Mappi ini tercatat terjadi sebesar 0,35 poin. Capaian penurunan tingkat kemiskinan ini masih perlu ditingkatkan karena lebih lambat dari capaian nasional, yakni selisih 0,79 poin. Selain itu tingkat kemiskinan di Kabupaten Mappi juga paling tinggi dibandingkan dengan Provinsi Papua Selatan dan nasional. Capaian tingkat kemiskinan ini mengindikasikan bahwa intervensi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mappi belum optimal. Hal tersebut dapat juga dipengaruhi oleh sistem perlindungan sosial yang belum cukup optimal dalam menghadapi masa-masa krisis yang cenderung meningkatkan jumlah maupun tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Untuk mengetahui kondisi kemiskinan daerah secara lebih lanjut, berikut merupakan data mengenai jumlah penduduk miskin Kabupaten Mappi selama lima tahun terakhir.

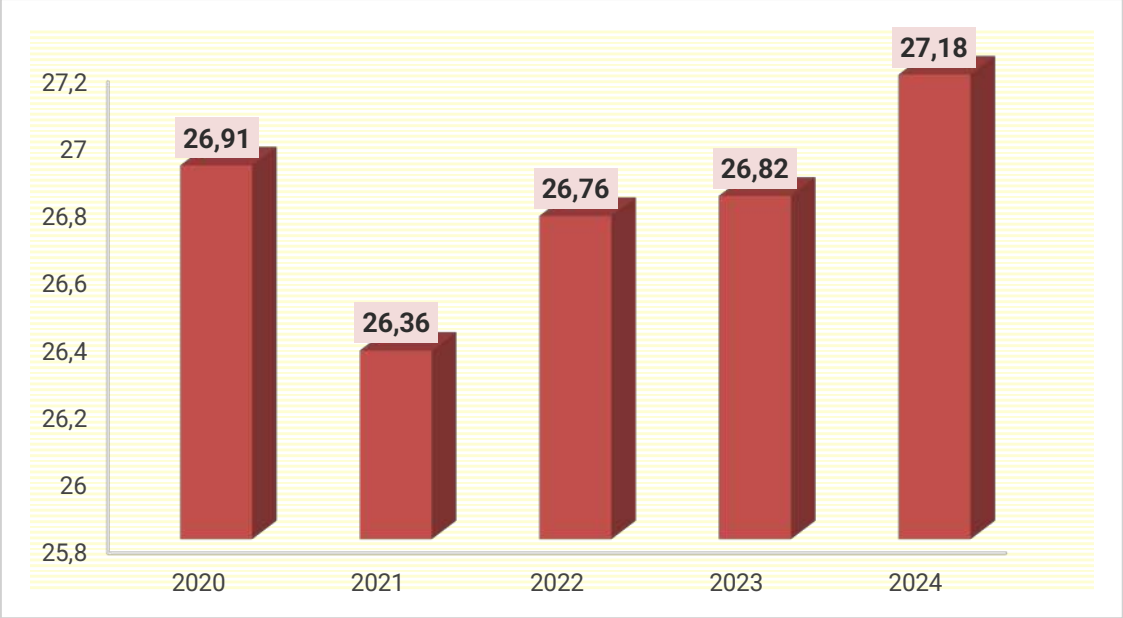

Gambar 2. 17 Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, Kabupaten Mappi dalam Angka Tahun 2025

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mappi dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat pada tahun 2020-2024. Dalam kurun waktu 2020-2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mappi meningkat sebesar 270 jiwa dibandingkan dengan angka pada tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk miskin Kabupaten Mappi ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti ketenagakerjaan di sektor pertanian, akses terhadap pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan, akses terhadap air bersih, pembangunan infrastruktur dan berbagai faktor yang berhubungan dengan isolasi geografis, kultural dan keterbatasan kemampuan dalam mengelola sumber daya alam. Berikut merupakan data mengenai garis kemiskinan daerah Kabupaten Mappi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

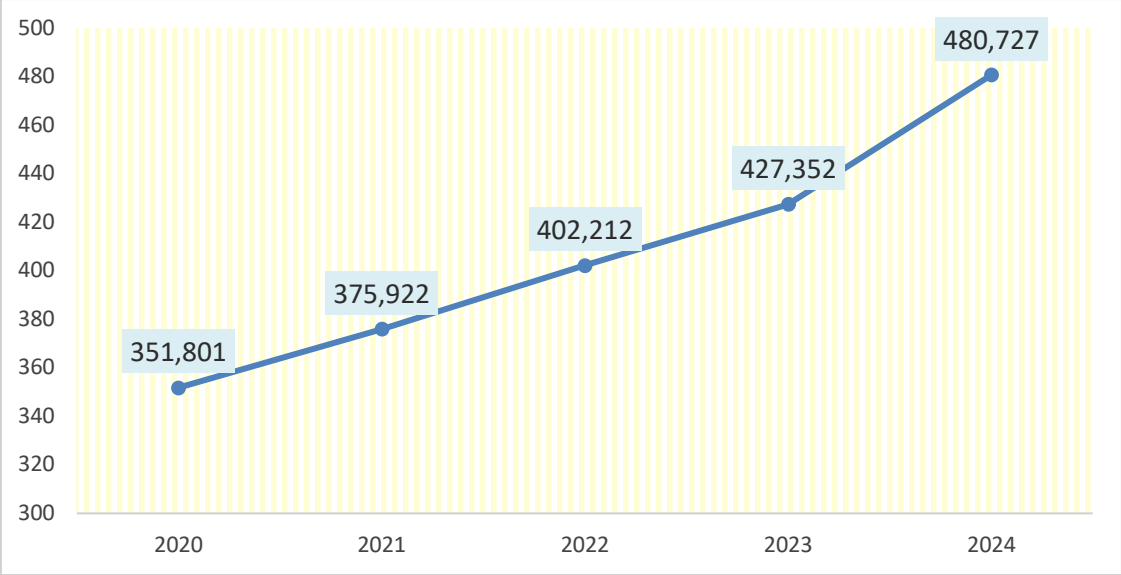

Gambar 2. 18 Garis Kemiskinan Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Mappi, 2025

Garis kemiskinan daerah Kabupaten Mappi dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Garis kemiskinan merupakan minimal pengeluaran yang menjadi ukuran seseorang dikategorikan sebagai masyarakat miskin atau sebaliknya. Peningkatan garis kemiskinan ini terjadi sebesar Rp128.926 atau dengan persentase peningkatan sebesar 26,82 persen dibandingkan dengan data tahun awal. Meningkatnya garis kemiskinan ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan barang pokok dan penting daerah yang menyebabkan pengeluaran minimum masyarakat yang diperlukan untuk tidak dikategorikan sebagai masyarakat miskin semakin meningkat. Meskipun demikian, meningkatnya garis kemiskinan daerah yang disertai dengan menurunnya tingkat dan jumlah kemiskinan daerah menunjukkan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang riil didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat secara umum. Untuk mengetahui kondisi ketimpangan antar masyarakat miskin, berikut merupakan data mengenai indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Mappi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

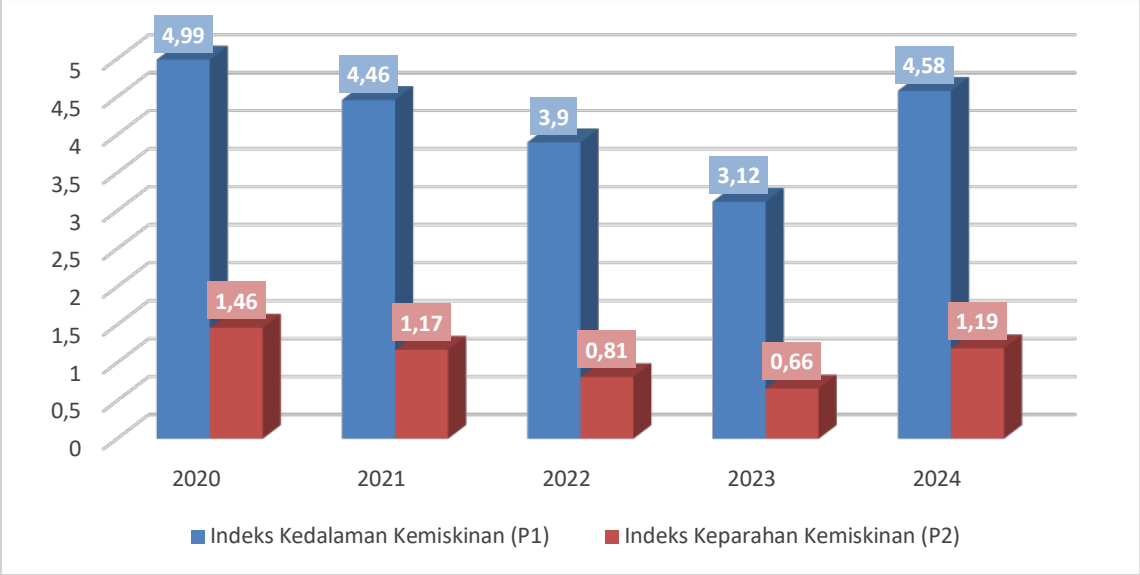

Gambar 2. 19 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Baik indeks kedalaman kemiskinan maupun indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Mappi menunjukkan tren yang menurun pada rentang tahun 2020-2024. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mappi mengalami penurunan sebesar 1,77 poin pada tahun 2020-2023, kemudian meningkat hingga 1,36 poin pada tahun 2024. Tren yang sama terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan, yakni mengalami penurunan sebesar 0,70 poin pada rentang tahun 2020-2023, lalu meningkat 0,43 poin pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa di antara masyarakat yang dikategorikan penduduk miskin, ketimpangan semakin melebar dan masyarakat miskin ekstrem memiliki kondisi yang lebih buruk dibandingkan pada tahun 2024. Hal ini perlu direspons melalui berbagai intervensi spesifik kepada masyarakat miskin ekstrem melalui pemberdayaan ekonomi, jaminan sosial menyeluruh, dan pemerataan akses dan kesempatan atas pendidikan dan pekerjaan yang layak untuk semua.

3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator makro yang dihitung dengan membagi total pendapatan ekonomi suatu daerah dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang bersangkutan. Di tingkat daerah di Indonesia, pendapatan per kapita biasanya direpresentasikan melalui proksi PDRB per kapita, yaitu hasil pembagian antara nilai PDRB dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita berfungsi untuk memberikan gambaran

umum mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mappi berdasarkan data makro yang mencerminkan nilai tambah ekonomi daerah dalam periode tertentu, yang kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut. Adapun data mengenai PDRB per kapita Kabupaten Mappi untuk periode 2020-2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 24 PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Mappi tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Mappi	17.240,00	17.270,00	17.830,00	17.990,00	18.040,00
Provinsi Papua Selatan	N/A	N/A	N/A	33.940,07	34.983,81
Nasional	39.778,68	40.780,75	42.471,45	44.139,37	45.881,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, 2025

Dalam lima tahun terakhir, PDRB ADHK per kapita Kabupaten Mappi menunjukkan tren pertumbuhan. Namun, laju pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan PDRB ADHB per kapita, karena PDRB ADHK per kapita telah disesuaikan dengan faktor inflasi, sehingga mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil.

Selama periode 2020-2024, PDRB ADHK per kapita Kabupaten Mappi meningkat sebesar 800 ribu rupiah dengan persentase pertumbuhan mencapai 4,64 persen. Secara umum, persentase pertumbuhan ini lebih rendah baik terhadap tingkat provinsi dan tingkat nasional. Dalam periode yang sama, PDRB ADHK per kapita di tingkat provinsi mengalami peningkatan sebesar 1.043,74 juta rupiah atau tumbuh 3,08 persen, sedangkan di tingkat nasional, pertumbuhannya mencapai 6,10 juta rupiah dengan peningkatan sebesar 15,34 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah masih belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan laju pertumbuhan PDRB per kapita jika dibandingkan dengan tingkat provinsi maupun nasional. Namun, dengan PDRB per kapita yang selalu tumbuh setiap tahunnya mengindikasikan adanya potensi untuk terus mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mappi di masa mendatang.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator makro kesejahteraan ekonomi yang mengukur proporsi antara jumlah angkatan

kerja dengan jumlah pengangguran suatu wilayah dalam tahun tertentu. Semakin rendah TPT suatu daerah tipikalnya mengindikasikan kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat wilayah yang semakin baik dengan asumsi masyarakat yang terserap dalam pasar kerja daerah memiliki tingkat pengupahan yang sesuai dengan regulasi pengupahan daerah yang berlaku. Dengan asumsi ini, penggambaran dan interpretasi atas data TPT harus dilakukan secara hati-hati, mengingat rendahnya TPT suatu wilayah belum secara pasti menggambarkan sejahteranya masyarakat suatu wilayah. Oleh karenanya, penyajian dan interpretasi atas data TPT harus dilakukan dengan melihat indikator-indikator lain yang relevan dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat, seperti tingkat kemiskinan dan indeks gini. Data tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 digambarkan sebagai berikut

Tabel 2. 25 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Mappi	5,77	4,11	2,34	4,22	4,1
Provinsi Papua Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	4,05
Nasional	7,07	6,49	5,32	5,32	4,91

Sumber: BPS Kabupaten Mappi, BPS Nasional, 2025

Dalam lima tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Mappi menunjukkan tren yang cukup fluktuatif meskipun secara keseluruhan mengalami penurunan. TPT di Kabupaten Mappi meningkat pada tahun 2023 hingga hampir dua kali lipat, sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2021, 2022, dan 2024. Secara keseluruhan, periode 2020-2024 mencatat penurunan TPT sebesar 1,77 poin atau setara dengan 43,06 persen.

Pada periode yang sama, TPT di tingkat nasional terus mengalami penurunan hingga sebesar 2,16 poin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja di Kabupaten Mappi masih belum optimal pada sektor ketenagakerjaan daerah dibandingkan dengan nasional.

Data ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Mappi belum cukup terserap oleh pasar kerja, hal tersebut mencerminkan bahwa belum adanya kesesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Faktor geografis dan budaya subsisten yang masih berlaku di Kabupaten Mappi juga

mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Mappi. Upaya lebih lanjut diperlukan guna mengoptimalkan kondisi ini sehingga tingkat pengangguran di Kabupaten Mappi dapat terus ditekan hingga mencapai tingkat yang lebih minimal.

5. Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, dengan rentang nilai antara 0 hingga 1. Indeks Gini sebesar 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang merata, di mana setiap individu memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya, nilai 1 mencerminkan ketimpangan sempurna, di mana seluruh pendapatan dikuasai oleh satu individu atau kelompok. Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga Indeks Gini agar mendekati 0, yang mencerminkan pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Perbandingan Indeks Gini antara Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, dan Indonesia pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 2. 26 Indeks Gini Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Mappi	0,427	0,384	0,403	0,42	N/A
Provinsi Papua Selatan	N/A	N/A	N/A	0,386	0,424
Nasional	0,385	0,381	0,381	0,388	0,381

Sumber: BPS Kabupaten Mappi, 2025

Ketimpangan ekonomi di Kabupaten Mappi dalam empat tahun terakhir secara umum mengalami fluktuasi. Data untuk indeks Gini Kabupaten Mappi tahun 2024 masih belum tersedia. Pada tahun 2021, indeks Gini mengalami penurunan cukup tinggi, yakni mencapai 0,043 poin, tetapi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan terus berlanjut hingga 2023. Secara keseluruhan, indeks Gini Kabupaten Mappi selama periode 2020-2023 mengalami penurunan sebesar 0,007 poin atau setara dengan 0,16 persen. Persentase penurunan ini tergolong belum optimal jika dibandingkan dengan tingkat ketimpangan di tingkat nasional.

Dalam periode yang sama, Indeks Gini di tingkat provinsi juga mengalami peningkatan, sedangkan Indeks Gini nasional cenderung stagnan tanpa

perubahan. Peningkatan Indeks Gini di tingkat provinsi tercatat sebesar 0,038 poin atau setara dengan 9,84 persen, sedangkan Indeks Gini nasional tidak menunjukkan perubahan yang berarti dibandingkan data awal dan terbaru. Data ini mencerminkan belum adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan di Kabupaten Mappi yang mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan ekonomi secara umum. Tren ini perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk mendorong pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Mappi pada masa mendatang.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat hasil pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah. IPM dihitung dengan didasarkan pada tiga dimensi yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut kemudian dikonversi menjadi Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan pengeluaran per kapita. AHH didasarkan pada umur panjang merupakan sesuatu yang dapat terwujud jika manusia mendapatkan nutrisi dan kesehatan yang baik. Sedangkan RLS dan HLS merupakan representasi dari kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan formal. IPM juga melihat dari pengeluaran per kapita yang mencerminkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah capaian IPM Kabupaten Mappi selama periode 2020-2024.

Tabel 2. 27 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Mappi	58,15	58,7	59,61	60,57	61,51
Provinsi Papua Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	54,87
Nasional	72,8	73,2	73,8	74,4	75

Sumber: BPS Kabupaten Mappi, BPS Nasional, 2025

Dalam lima tahun terakhir, pembangunan manusia di Kabupaten Mappi menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mappi selama periode 2020-2024 mengalami kenaikan sebesar 3,36 poin, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,78 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mappi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian nasional.

Di tingkat provinsi, IPM tidak menunjukkan adanya peningkatan karena belum tersedianya data IPM di Provinsi Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru, sedangkan di tingkat nasional, kenaikan IPM tercatat sebesar 2,20 poin dengan pertumbuhan 3,04 persen. Meskipun mengalami pertumbuhan yang cukup baik, IPM Kabupaten Mappi masih berada di bawah rata-rata nasional dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Mappi perlu dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik yang berkaitan dengan pengembangan SDM agar dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

Pembangunan di bidang kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya pembangunan kesehatan dilakukan melalui langkah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta dengan memperluas akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Salah satu tolok ukur untuk menilai kualitas kesehatan masyarakat adalah Usia Harapan Hidup (UHH), yang menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir pada tahun tertentu. UHH juga menjadi salah satu komponen dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi nilai UHH menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat yang semakin baik di suatu daerah. Berikut ini adalah data pencapaian UHH di Kabupaten Mappi.

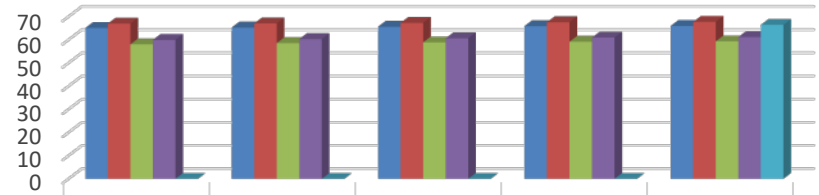

	2020	2021	2022	2023	2024
Mappi	65,11	65,31	65,66	65,9	66,01
Merauke	67	67,07	67,31	67,6	67,77
Asmat	58,05	58,59	58,9	59,19	59,36
Boven Digoel	59,97	60,32	60,64	60,97	61,21
Papua Selatan	0	0	0	0	66,45

Mappi Merauke Asmat Boven Digoel Papua Selatan

Gambar 2. 20 Usia Harapan Hidup di Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, 2025

Grafik Umur Harapan Hidup (UHH) memperlihatkan bahwa Kabupaten Mappi mengalami peningkatan sekitar 0,95 tahun sepanjang periode 2020-2024. Kenaikan ini relatif stabil, meskipun jika dibandingkan dengan Merauke yang mengalami kenaikan lebih dari 0,7 tahun dari posisi awal yang sudah lebih tinggi, terlihat bahwa Mappi masih tertinggal sekitar 1,7 tahun dari kabupaten tersebut. UHH Mappi dibandingkan dengan Asmat dan Boven Digoel lebih unggul sekitar 6-7 tahun, menunjukkan adanya gap yang cukup tinggi dalam kualitas hidup Mappi yang lebih baik. Sementara itu, Provinsi Papua Selatan yang mulai tercatat pada tahun 2024 sebagai DOB menempatkan posisinya sedikit di atas Mappi, dengan selisih tipis sekitar 0,4 tahun.

Capaian UHH dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya akses dan kualitas layanan kesehatan yang memadai, akses pemenuhan gizi, penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta pemenuhan infrastruktur lingkungan yang memadai seperti akses terhadap air bersih, sanitasi yang aman, dan pengelolaan sampah yang baik. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan peningkatan UHH yang lebih signifikan melalui kebijakan strategis, terutama dalam penguatan pelayanan kesehatan dasar, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta pengendalian penyakit menular maupun tidak menular. Dengan fokus pada aspek ini, Mappi memiliki peluang mempersempit kesenjangan dan mendorong percepatan pembangunan manusia.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Urusan pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam membangun sumber daya manusia. Urusan pendidikan sendiri menjadi salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator makro yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan manusia di suatu daerah. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan bidang pendidikan adalah Indeks Pendidikan.

Indeks Pendidikan merupakan salah satu indikator komposit yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan pemerintah dalam bidang pendidikan. indeks pendidikan dihitung dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Berikut

adalah capaian Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Mappi selama periode 2020 hingga 2023.

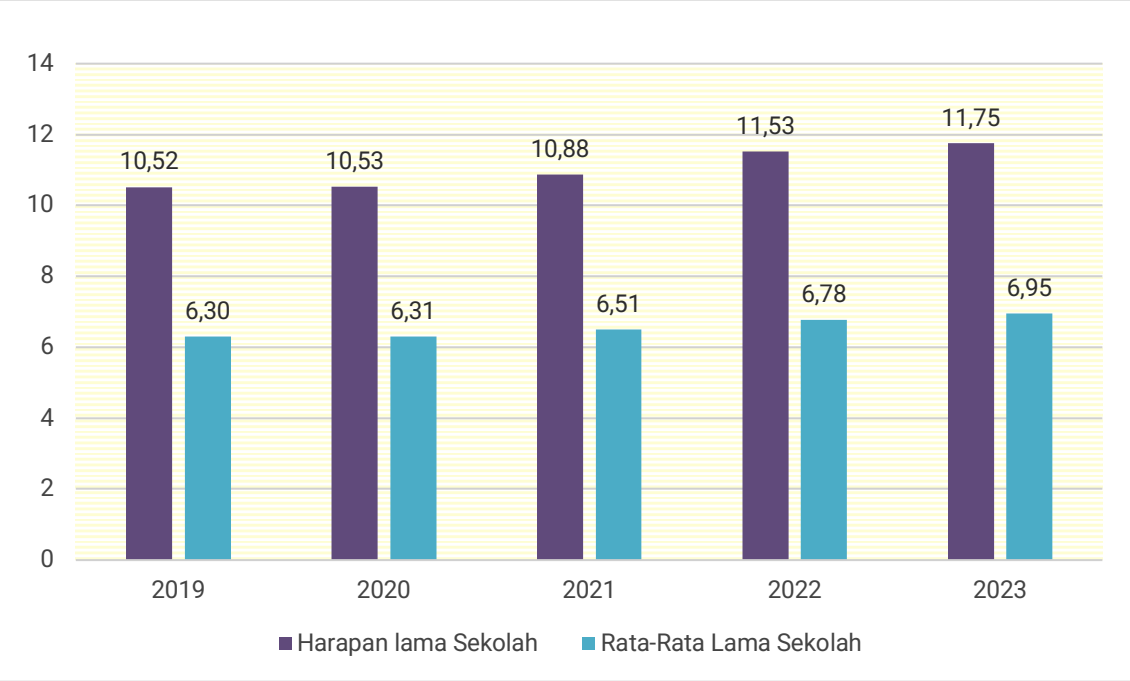

Gambar 2. 21 Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama Sekolah di Kabupaten Mappi Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Mappi, 2025

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Mappi mengalami tren yang meningkat selama periode 2019 hingga 2023. Dalam periode lima tahun terakhir, capaian HLS Kabupaten Mappi mengalami peningkatan sebesar 1,23 poin. Pada tahun 2023, harapan lama sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Mappi berada di angka 11,75 tahun atau setara dengan kelas 2 SMA sederajat. Upaya untuk meningkatan capaian HLS perlu untuk terus dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Kabupaten Mappi terutama dalam mendukung target nasional, yaitu Indonesia emas 2045.

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Mappi mengalami tren yang meningkat selama periode 2019 hingga 2023. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian RLS Kabupaten Mappi mengalami peningkatan sebesar 0,65 poin. Pada tahun 2023 RLS Kabupaten Mappi berada pada angka 6,95. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia sekolah di Kabupaten Mappi dapat merasakan pendidikan formal selama 6 tahun atau setara dengan kelas 6 SD. Upaya peningkatan partisipasi sekolah di Kabupaten Mappi perlu menjadi perhatian. Hal ini menjadi penting sebagai salah satu upaya untuk

meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Mappi.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial merupakan instrumen strategis dalam upaya mengurangi kemiskinan, mengurangi kerentanan kelompok rentan, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Dalam konteks dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berubah, pendekatan perlindungan sosial perlu bersifat adaptif, responsif, dan inklusif terhadap berbagai risiko dan tantangan, baik yang bersifat kronis maupun yang bersifat mendadak, seperti bencana alam, pandemi, atau gejolak ekonomi.

Perlindungan sosial yang adaptif merupakan penguatan sistem perlindungan sosial dengan menambahkan elemen ketangguhan terhadap risiko iklim, bencana, dan guncangan ekonomi. Sistem ini memadukan tiga pilar utama: bantuan sosial, asuransi sosial, dan program ketenagakerjaan aktif yang dirancang secara fleksibel dan terintegrasi dengan sistem peringatan dini, data kependudukan yang dinamis, serta mekanisme respons cepat. Dengan mengintegrasikan prinsip adaptif dalam perencanaan perlindungan sosial diharapkan kebijakan dan program yang dijalankan mampu meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap guncangan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial yang adaptif dapat dilihat melalui cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja mengacu pada jumlah atau persentase tenaga kerja yang terdaftar dan memperoleh perlindungan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dari berbagai risiko, seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan kehilangan pekerjaan. Cakupan kepesertaan dapat mencakup pekerja formal maupun informal. Semakin tinggi cakupan kepesertaan, semakin banyak tenaga kerja yang terlindungi dari risiko sosial ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Perlindungan sosial yang adaptif tidak hanya mencerminkan respons pemerintah terhadap dinamika risiko sosial dan ekonomi, tetapi juga menunjukkan komitmen dalam menjangkau kelompok-kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Penerapan prinsip perlindungan sosial yang adaptif di Kabupaten Mappi dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam memperluas cakupan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap guncangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kelompok ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis bantuan jangka pendek, tetapi juga upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui penguatan data terpadu kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas layanan sosial dasar, serta kolaborasi lintas sektor dan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mappi terus berupaya membangun sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan tanggap terhadap kebutuhan PMKS. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip adaptif dalam perlindungan sosial, di mana kebijakan dan program disesuaikan dengan perubahan kondisi dan risiko yang dihadapi oleh kelompok rentan di tingkat lokal.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju mencerminkan keseimbangan antara kehidupan beragama yang memberikan manfaat dan perkembangan budaya yang tetap menghormati nilai-nilai kearifan lokal sembari menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Beragama maslahat merujuk pada praktik keagamaan yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga berkontribusi positif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Kehidupan beragama yang demikian mendorong sikap toleransi, kepedulian, dan keharmonisan antarindividu serta kelompok dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, berkebudayaan maju menggambarkan budaya yang terus berkembang tanpa kehilangan identitas dan akar tradisinya. Kemajuan budaya mencakup kemampuan dalam menghargai warisan leluhur namun mampu beradaptasi dengan perubahan global. Sinergi antara nilai-nilai agama yang membawa maslahat dan budaya yang dinamis menciptakan masyarakat yang harmonis, berdaya saing, dan memiliki karakter kuat dalam menghadapi

tantangan zaman. Kondisi ini dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

1. **Indeks Kerukunan Umat Beragama**

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) merupakan ukuran tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama yang meliputi dimensi toleransi, kerjasama, dan kesetaraan.

Berdasarkan grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Provinsi Papua dan nasional dari tahun 2021 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2021, Indeks KUB Provinsi Papua tercatat sebesar 72,39, sedikit di bawah rata-rata nasional yang mencapai 72,79. Kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana Indeks KUB Provinsi Papua mencapai 73,09, sementara nasional meningkat menjadi 74,00. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, dengan Provinsi Papua mencapai 76,02 dan nasional mencapai 76,37. Akhirnya, pada tahun 2024, baik Indeks KUB Provinsi Papua maupun nasional menunjukkan stabilisasi pada angka 76,47.

Peningkatan skor Indeks KUB ini mengindikasikan bahwa toleransi, kerja sama, dan kesetaraan antarumat beragama di Provinsi Papua semakin membaik dan berada pada level yang tinggi, sejalan dengan capaian nasional. Implikasinya, kondisi ini sangat mendukung terciptanya harmoni sosial dan stabilitas di wilayah Papua. Predikat ini sangat berharga karena mencerminkan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

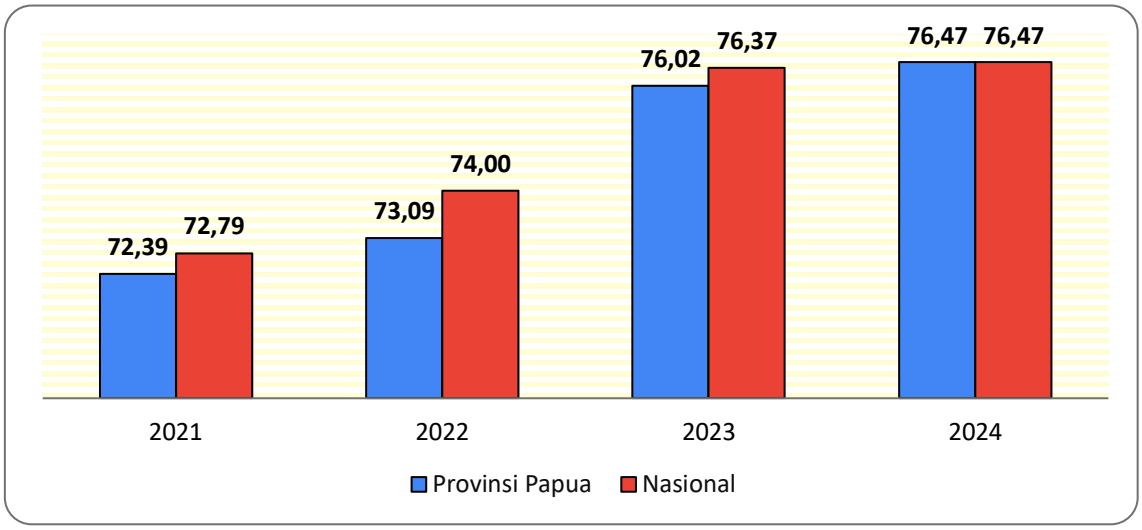

Gambar 2. 22 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua dan Indonesia 2021-2024

Sumber: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI (2025)

Meskipun data yang tersedia adalah untuk Provinsi Papua, Kabupaten Mappi, sebagai bagian dari wilayah yang baru dimekarkan dari Provinsi Papua (yaitu Papua Selatan), diasumsikan memiliki tren Indeks KUB yang sejalan dengan capaian provinsi induknya atau provinsi sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi Kabupaten Mappi untuk terus mempertahankan dan memperkuat capaian ini. Ke depan, Kabupaten Mappi perlu mengimplementasikan kebijakan dan program yang mendorong dialog antarumat beragama, mempromosikan inisiatif komunitas yang melibatkan berbagai kelompok agama, dan memastikan bahwa setiap kebijakan daerah senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan dan toleransi. Dengan demikian, Kabupaten Mappi dapat terus menjadi contoh dalam menjaga kerukunan umat beragama, sekaligus memastikan lingkungan yang damai dan stabil bagi seluruh penduduknya, yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan.

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan fondasi utama dalam membangun identitas, karakter, dan daya saing suatu bangsa. Kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai warisan yang harus dijaga, tetapi juga sebagai kekuatan yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur yang dapat menggambarkan sejauh mana kebudayaan berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) hadir sebagai instrumen untuk mengukur dan mengevaluasi capaian pembangunan kebudayaan secara komprehensif. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai kondisi kebudayaan suatu daerah serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Untuk Kabupaten Mappi, data yang tersedia saat ini merupakan proksi dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Papua. Berdasarkan data tersebut, capaian IPK menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 46,26, namun mengalami

penurunan pada tahun 2021 menjadi 41,87. Meskipun demikian, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2023, di mana IPK berhasil mencapai 48,05.

Tabel 2. 28 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
46.26	41.87	N/A	48.05	N/A

Sumber: Portal Data Pendidikan KEMDIKBUD (data.dikdasmen.go.id/dataset).

Catatan : Indikator ini adalah IPK Provinsi Papua (indikator level provinsi) Indikator tahun 2022 dan 2024 belum tersedia.

Perlu dicatat bahwa data untuk tahun 2022 dan 2024 belum tersedia. Tren ini mengindikasikan adanya tantangan sekaligus upaya pemulihan dalam pembangunan kebudayaan di tingkat regional yang menjadi acuan bagi Kabupaten Mappi.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif merupakan aspek untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, menciptakan lingkungan sosial yang adil, setara, dan mendukung semua individu tanpa diskriminasi. Beberapa indikator yang mencerminkan kondisi tersebut diantaranya indeks kualitas keluarga (IKK), indeks perlindungan anak (IPA), indeks ketimpangan gender (IKG), dan indeks pembangunan pemuda (IPP). Berikut capaian beberapa indikator terkait gender dan perlindungan anak di Kabupaten Mappi.

1. **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**

Indeks ketimpangan gender (IKG) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan kondisi yang setara antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat hidup lebih sejahtera. Indeks ketimpangan gender (IKG) diukur dari 3 dimensi dan 5 indikator. Dimensi kesehatan reproduksi diukur dari persetanse perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan persentase perempuan yang melahirkan berumur kurang dari 20 tahun. Dimensi pemberdayaan diukur dari persentase laki-laki dan perempuan usia 25 tahun ke atas lulus SMA ke atas dan persentase laki-laki dan perempuan menjadi anggota legislatif. Dimensi pasar tenaga kerja diukur dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan. IKG bernilai 0-1 dan bermakna negatif.

Semakin tinggi nilai IKG, maka semakin tinggi ketimpangan gender dan sebaliknya semakin rendah nilai IKG maka semakin rendah ketimpangan gender yang berarti semakin besar kesetaraan gender yang terwujud. Berikut capaian Indeks ketimpangan gender (IKG) Kabupaten Mappi dan daerah di sekitarnya.

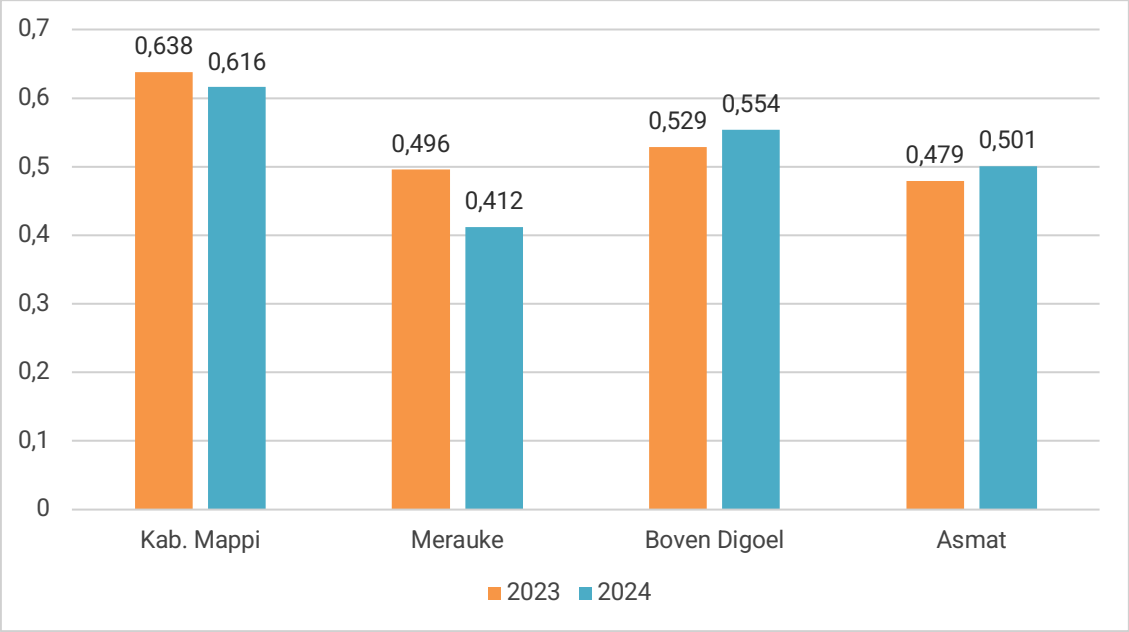

Gambar 2. 23 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Mappi dan Daerah Sekitarnya Tahun 2023-2024

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2025

Selama periode 2023-2024, capaian indeks ketimpangan gender (IKG) Kabupaten Mappi mengalami tren yang menurun. Dalam dua tahun terakhir IKG Kabupaten Mappi mengalami penurunan sebesar 0,022 poin. Hal tersebut menunjukkan kondisi yang positif, dimana tingkat ketimpangan gender di Kabupaten Mappi mengalami penurunan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan beberapa daerah di sekitarnya, angka ketimpangan gender di Kabupaten Mappi masih yang tertinggi di Provinsi Papua Selatan. Oleh karena itu, upaya perwujudan kesetaraan gender di Kabupaten Mappi masih perlu ditingkatkan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kesehatan perempuan dengan meminimalisir perempuan melahirkan dibawah usia 20 tahun dan perempuan yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan. Selain itu, mendorong akses dan partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam dunia pendidikan dan tenaga kerja

2. Indeks Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan bentuk upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak yang melekat padanya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Hak anak dirumuskan dalam Konvensi Hak Anak (UN-CRC) pada tahun 1989, meliputi hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak seperti kekerasan terhadap anak, pekerja dibawah umur, perkawinan anak, dan angka putus sekolah, serta kesehatan. Untuk mengukur capaian pembangunan daerah dalam penyelesaian isu tersebut dirumuskan indeks perlindungan anak. Berikut ini capaian IPA di Kabupaten Mappi dan perbandingannya dengan capaian provinsi dan nasional.

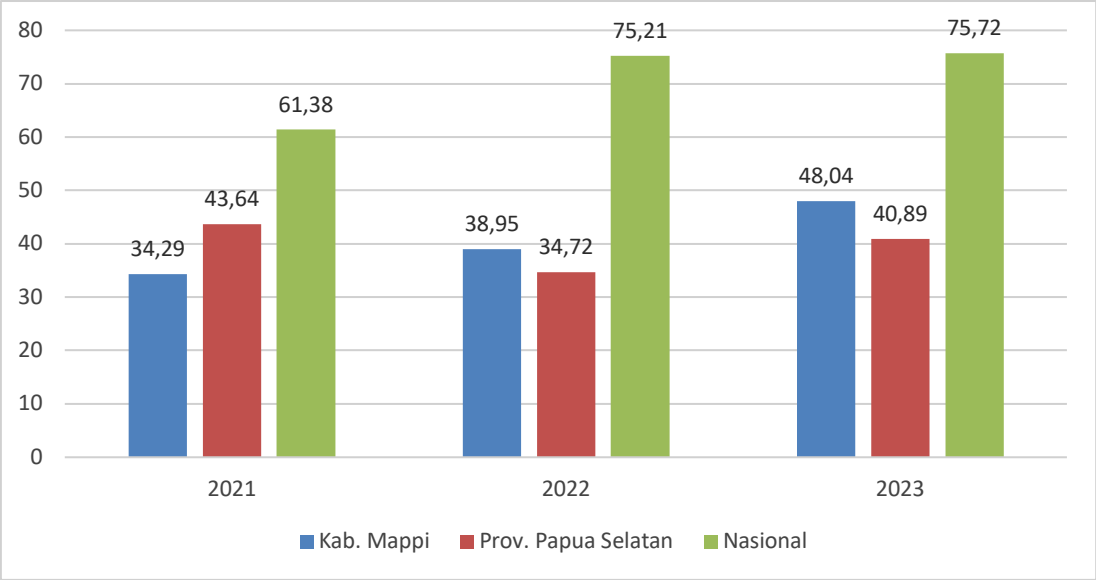

Gambar 2. 24 Capaian Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, dan Nasional

Sumber: KemenPPA, 2024

IPA mengaplikasikan perhitungan berdasarkan empat klaster berbeda yaitu klaster I meliputi hak sipil dan kebebasan; klaster II meliputi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster III meliputi kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan klaster IV meliputi pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan klaster V merupakan perlindungan khusus. Secara umum, capaian IPA Kabupaten Mappi masih berada dibawah capaian nasional. Namun capaiannya menunjukkan pertumbuhan positif, dimana mengalami peningkatan 4,61 poin

pada tahun 2023 menjadi 48,04 poin. Peningkatan tersebut memposisikan IPA Kabupaten Mappi 2,94 poin lebih tinggi dari capaian provinsi. Capaian pada skala provinsi melibatkan skor yang tercatat pada Provinsi Papua pada tahun 2021 dan 2022 sebagai provinsi induk dari Provinsi Papua Selatan. Penghitungan IPA melibatkan dua indikator berbeda yaitu Indeks Pemenuhan Hak Anak yang mengaplikasikan kluster I-IV, sedangkan kluster V merupakan penyusun untuk indeks perlindungan khusus anak (IPKA). Berikut ini capaian untuk IPHA dan IPKA di Kabupaten Mappi.

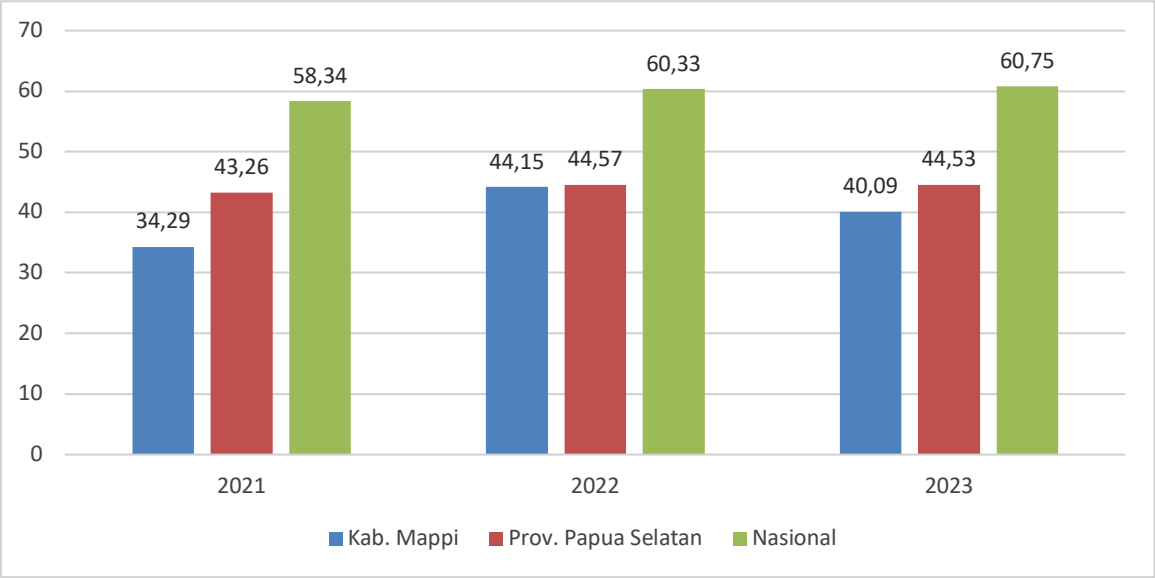

Gambar 2. 25 Capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, dan Nasional

Sumber: KemenPPA, 2024

Capaian IPKA Kabupaten Mappi mengalami fluktuasi selama tahun 2021-2023. Pertumbuhan positif terjadi pada tahun 2022 dengan peningkatan 9,86 poin, namun kemudian menurun sebesar -4,06 poin bergeser menjadi 40,09 poin di tahun 2023. Secara umum, capaian IPKA Kabupaten Mappi masih berada dibawah capaian Provinsi dan Nasional. Catatan data tersebut menggambarkan masih belum optimalnya upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Mappi. Beberapa kasus yang ditemui diantaranya adalah isu pernikahan anak, kekerasan terhadap anak, angka putus sekolah yang tinggi, dan pemenuhan gizi yang rendah.

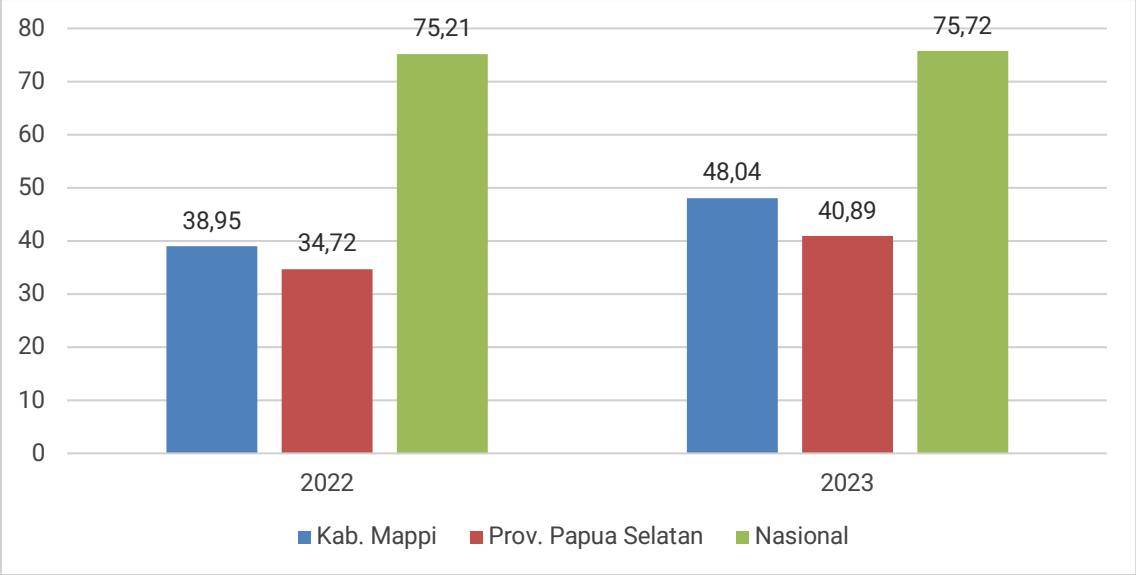

Gambar 2. 26 Capaian Indeks Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, dan Nasional

Sumber: KemenPPA, 2024

Capaian IPKA Kabupaten Mappi lebih tinggi dari capaian provinsi, namun masih dibawah capaian nasional selama periode tahun 2022-2023. Capaian IPKA Kabupaten Mappi memiliki tren positif, meningkat 9,09 poin dari tahun capaian tahun 2022 menjadi 48,04 di tahun 2023. Meskipun memiliki capaian positif, masih ada beberapa tantangan yang masih dihadapi Kabupaten Mappi dalam melindungi anak diantarnaya yaitu anak terlantar dan anak yang bekerja. Gambaran indikator capaian IPA, IPHA, dan IPKA merupakan data dasar untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Mappi kedepannya.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi faktor yang krusial dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing ekonomi di Kabupaten Mappi. Memiliki SDM yang berkualitas, baik dari segi pendidikan, keterampilan, maupun produktivitas berperan penting dalam menciptakan inovasi, mendorong investasi, maupun memperkuat sektor-sektor unggulan daerah. Kondisi Daya Saing Sumber Daya Manusia dapat diukur melalui Angka Ketergantungan. Berikut angka ketergantungan di Kabupaten Mappi selama tahun 2019 – 2021.

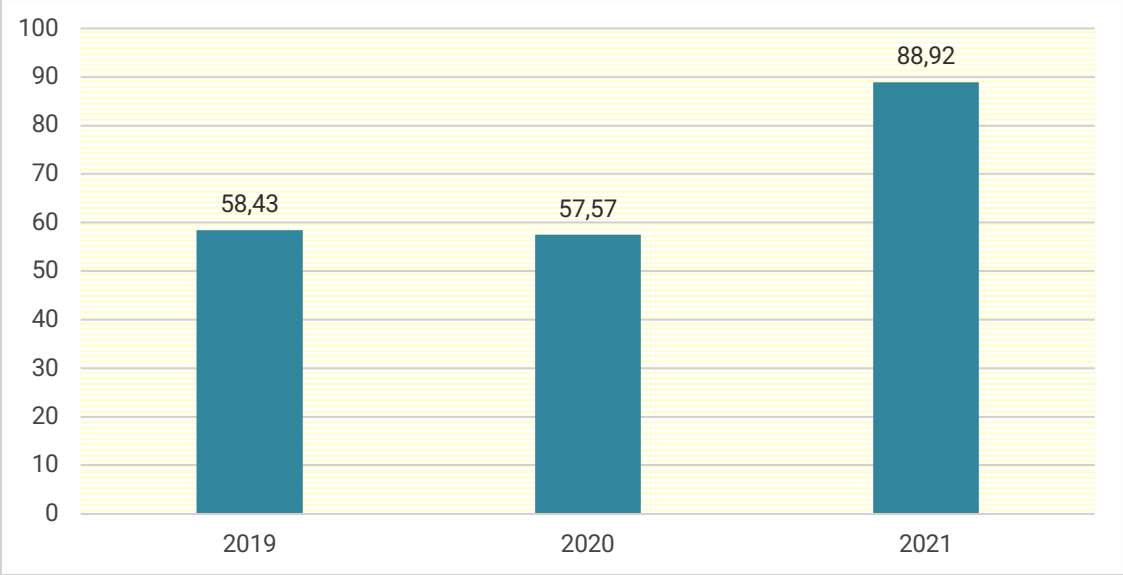

Gambar 2. 27 Angka Ketergantungan Kabupaten Mappi Tahun 2019-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2025

Capaian angka ketergantungan di Kabupaten Mappi selama periode 2019 hingga 2021 menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini mengindikasikasikan pada tahun 2021 setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung sekitar 88 orang usia tidak produktif (0-14 & 65+ tahun). Peningkatan angka ketergantungan ini mencerminkan bertambahnya jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) yang bergantung pada penduduk usia produktif (15-64 tahun). Hal ini dapat berdampak negatif terhadap perekonomian daerah karena beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif semakin berat. Selain itu, kondisi saat ini Kabupaten Mappi akan dihadapkan dengan potensi bonus demografi, yang jika tidak dikelola dengan kebijakan yang tepat, menjadi sebuah kerugian, mengingat hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mappi jika dapat dikelola dengan baik.

2.1.3.2 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Sub-bab ini menjelaskan kondisi tentang Iptek dan inovasi yang menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Rasio PDRB Industri Pengolahan, Rasio PDRB

Akomodasi Makan dan Minum, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Inovasi Daerah, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

1. **PDRB Industri Pengolahan**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Industri Pengolahan adalah salah satu indikator ekonomi yang mencerminkan kontribusi industri manufaktur dalam perekonomian suatu daerah. Sektor ini mencakup berbagai aktivitas produksi yang mengolah bahan mentah atau setengah jadi menjadi produk akhir yang memiliki nilai tambah, seperti industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, kimia, dan berbagai industri manufaktur lainnya. Berikut adalah data tentang PDRB industri pengolahan di Kabupaten Mappi.

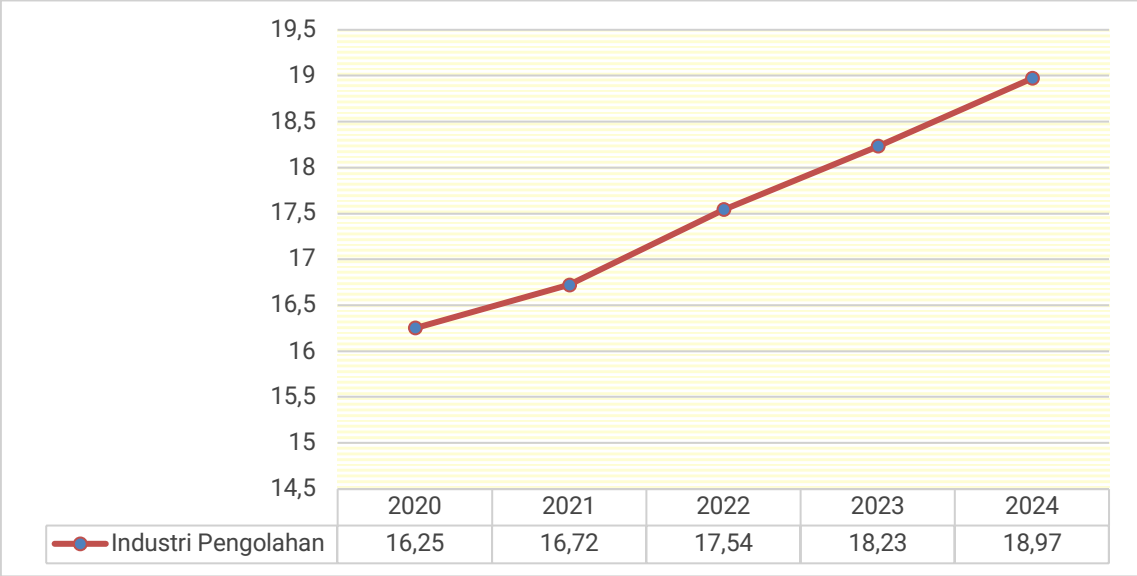

Gambar 2. 28 PDRB Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Mappi, 2025

PDRB industri pengolahan di Kabupaten Mappi menunjukkan peningkatan sebesar 2,72 miliar rupiah dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan nilai PDRB industri pengolahan ini berhubungan dengan beberapa faktor seperti kapasitas produksi industri, kualitas produk dan kapasitas pemasaran produk-produk industri. Perkembangan infrastruktur, stabilitas keamanan dan kualitas sumber daya manusia menjadi beberapa faktor pendukung peningkatan nilai PDRB industri pengolahan di Kabupaten Mappi.

2. PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan salah satu indikator ekonomi yang mencerminkan kontribusi industri perhotelan, restoran, kafe, serta usaha kuliner lainnya terhadap perekonomian suatu daerah. Sektor ini berperan penting dalam mendukung industri pariwisata, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat. Berikut adalah data tentang PDRB akomodasi makan dan minum di Kabupaten Mappi.

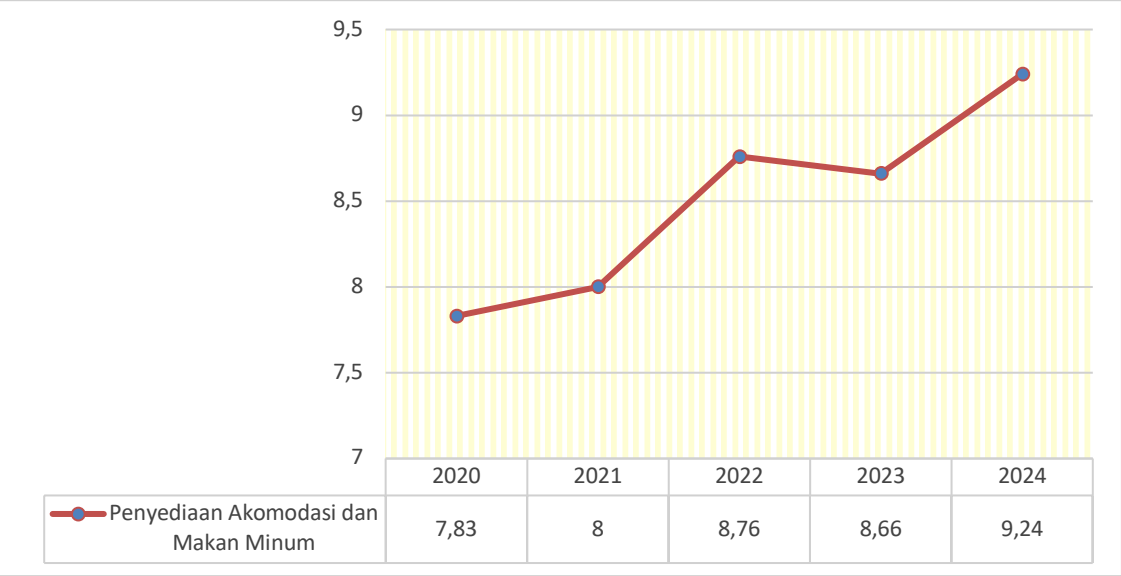

Gambar 2. 29 PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Mappi, 2025

PDRB akomodasi makan dan minum menunjukkan tren yang meningkat sebesar 1,41 miliar rupiah selama tahun 2020 hingga 2024. PDRB akomodasi makan dan minum dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah kunjungan wisatawan, daya beli masyarakat, kualitas layanan, serta inovasi dalam penyediaan akomodasi dan makanan. Dengan meningkatnya tren wisata kuliner dan gaya hidup modern, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama jika didukung dengan kebijakan yang mendukung investasi, pengembangan infrastruktur pariwisata, serta promosi yang efektif. Oleh karena itu, pemantauan dan pengembangan

sektor ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mappi.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja, dibandingkan dengan total populasi usia kerja dalam suatu wilayah. Indikator ini berperan penting dalam mengukur keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi serta potensi tenaga kerja yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Berikut data tentang TPAK di Kabupaten Mappi.

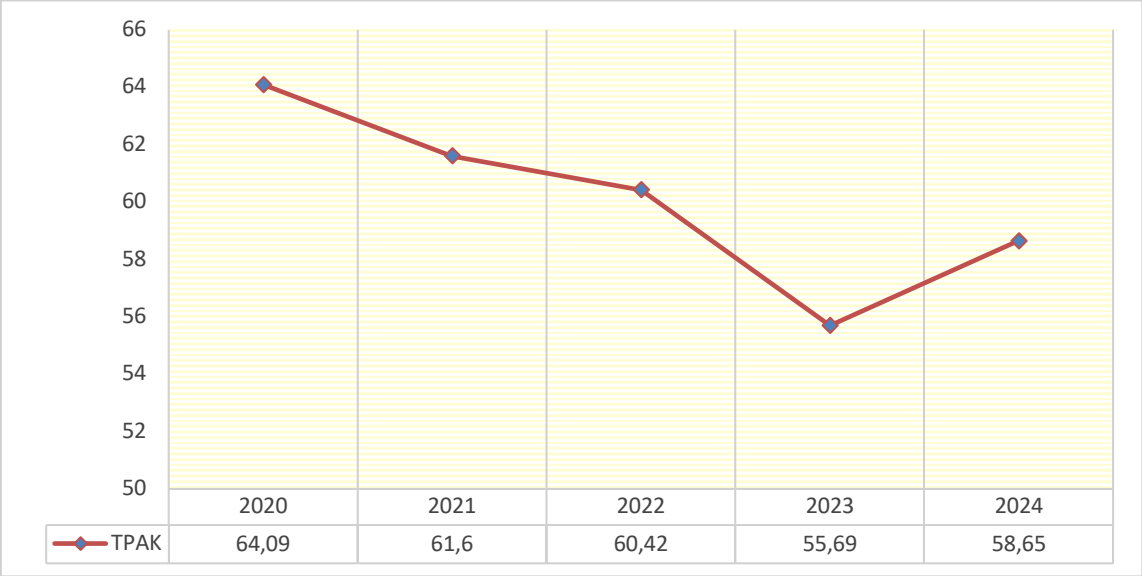

Gambar 2. 30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Mappi, 2025

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Mappi mengalami penurunan sebesar 5,44 persen. Penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Mappi bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan minat bekerja, migrasi penduduk, penurunan pertumbuhan sektor pertanian, pendidikan, infstruktur dan sosial budaya yang berkaitan dengan penurunan tingkat partisipasi kerja laki-laki dan perempuan di Kabupaten Mappi.

4. Indeks Inovasi Daerah

Perkembangan indeks inovasi daerah merupakan cerminan dari kemajuan dan efektivitas suatu daerah dalam mengembangkan serta menerapkan inovasi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, ekonomi, sosial, dan teknologi. Indeks ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menciptakan kebijakan, program, serta inisiatif yang mendorong perubahan dan peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, serta daya saing daerah dalam menghadapi tantangan global. Berikut adalah data tentang perkembangan indeks inovasi daerah di Kabupaten Mappi.

Tabel 2. 29 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Indikator	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	Skor	0	0	0	8,2	12,5
	Predikat	Tidak dapat dinilai	Tidak dapat dinilai	Tidak dapat dinilai	Kurang inovatif	Kurang inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Skor indeks inovasi daerah Kabupaten Mappi mengalami peningkatan sebesar 4,3 poin dari tahun 2023 hingga 2024. Indeks inovasi daerah Kabupaten Mappi saat ini masuk ke dalam kategori kurang inovatif. Kapasitas dan komitmen pemerintah daerah, infrastruktur dan teknologi, keterlibatan masyarakat dan sektor non-pemerintah, dokumentasi dan pelaporan inovasi dan dukungan anggaran perlu ditingkatkan untuk meningkatkan indeks inovasi daerah di Kabupaten Mappi.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa sektor pertambangan dan penggalian dapat digunakan sebagai *proxy* atau indikator ekonomi yang lebih ramah lingkungan karena mencerminkan aktivitas ekonomi yang tidak bergantung pada eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Dengan mengecualikan sektor pertambangan dan penggalian, indikator ini lebih menekankan pada sektor-sektor yang berkelanjutan, seperti industri manufaktur berbasis teknologi ramah lingkungan, jasa, pertanian berkelanjutan, serta energi terbarukan. Penggunaan PDRB tanpa pertambangan dan penggalian juga dapat membantu dalam perencanaan pembangunan yang berorientasi pada ekonomi

hijau, di mana pertumbuhan ekonomi tetap terjaga tanpa memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Berikut adalah data tentang distribusi PDRB non-pertambangan dan penggalian di Kabupaten Mappi.

Tabel 2. 30 Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Pertambangan dan Penggalian Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,73	20,51	19,65	19,06	18,36
C	Industri Pengolahan	0,54	0,54	0,52	0,51	0,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0	0	0	0	0
F	Konstruksi	33,6	34,81	35,28	35,27	35,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,17	7,05	7,1	7,37	7,16
H	Transportasi dan Pergudangan	2,27	2,26	2,71	2,94	3,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,26	0,26	0,26	0,24	0,24
J	Informasi dan Komunikasi	0,56	0,56	0,56	0,55	0,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,51	0,51	0,56	0,59	0,62
L	Real Estat	1,94	1,89	1,85	1,87	1,85
M, N	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	25,78	25,01	25,04	25,16	25,43
P	Jasa Pendidikan	2,69	2,62	2,58	2,49	2,43
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,61	2,66	2,56	2,62	2,64
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,94	0,93	0,93	0,96	0,94
Produk Domestik Regional Bruto		99,72	99,73	99,72	99,75	99,74

Sumber: BPS Kabupaten Mappi, 2025

PDRB tanpa pertambangan dan penggalian di Kabupaten Mappi mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan PDRB sektor konstruksi sebesar 2,28 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 0,75 persen, jasa keuangan dan

transportasi sebesar 0,11 persen serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,03 persen pada periode tahun yang sama. PDRB sektor lain mengalami pertumbuhan yang relatif stagnan, sedangkan PDRB sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 2,37 persen pada tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan produksi, kualitas produk dan kapasitas pemasaran produk pertanian perlu ditingkatkan untuk meningkatkan PDRB sektor pertanian secara berkesinambungan.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan TIK di suatu wilayah. Di era transformasi digital, TIK berperan strategis dalam meningkatkan produktivitas ekonomi serta mempercepat dan memperluas jangkauan pelayanan publik. Digitalisasi menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari, sehingga analisis terhadap IP-TIK menjadi krusial dalam memahami dinamika dan kesiapan digital suatu daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), IP-TIK disusun menggunakan 11 indikator yang dikelompokkan ke dalam tiga subindeks utama, yaitu akses dan infrastruktur, penggunaan, serta keahlian. Skala penilaiannya berkisar antara 0 hingga 10, di mana semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan pembangunan TIK yang semakin pesat. Indeks ini selaras dengan ICT Development Index (ICT-DI) yang dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU) dan digunakan secara global.

Data IP-TIK yang ditampilkan pada grafik berikut merupakan data Provinsi Papua, yang diproksikan sebagai representasi untuk Provinsi Papua Selatan. Hal ini disebabkan karena Provinsi Papua Selatan merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua pada tahun 2022, sehingga data historis IP-TIK secara spesifik untuk Papua Selatan belum tersedia. Oleh karena itu, penggunaan data Provinsi Papua dianggap relevan untuk menggambarkan kondisi pembangunan TIK di wilayah tersebut sebelum dan sesaat setelah pemekaran.

Dari grafik terlihat bahwa nilai IP-TIK Provinsi Papua (sebagai proksi Papua Selatan) mengalami fluktuasi dalam periode 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, nilai IP-TIK tercatat sebesar 3,30 dan sedikit menurun menjadi 3,29 pada tahun 2019. Kemudian terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2020 dan

2021, masing-masing mencapai nilai 3,35. Namun, pada tahun 2022, indeks mengalami penurunan ke angka 3,22, yang kemungkinan berkaitan dengan dampak transisi administratif pasca pemekaran wilayah. Meski demikian, pada tahun 2023, IP-TIK kembali menunjukkan tren positif dengan kenaikan cukup tajam menjadi 3,44, yang mencerminkan adanya upaya peningkatan infrastruktur dan kapasitas TIK di wilayah ini pascapemekaran.

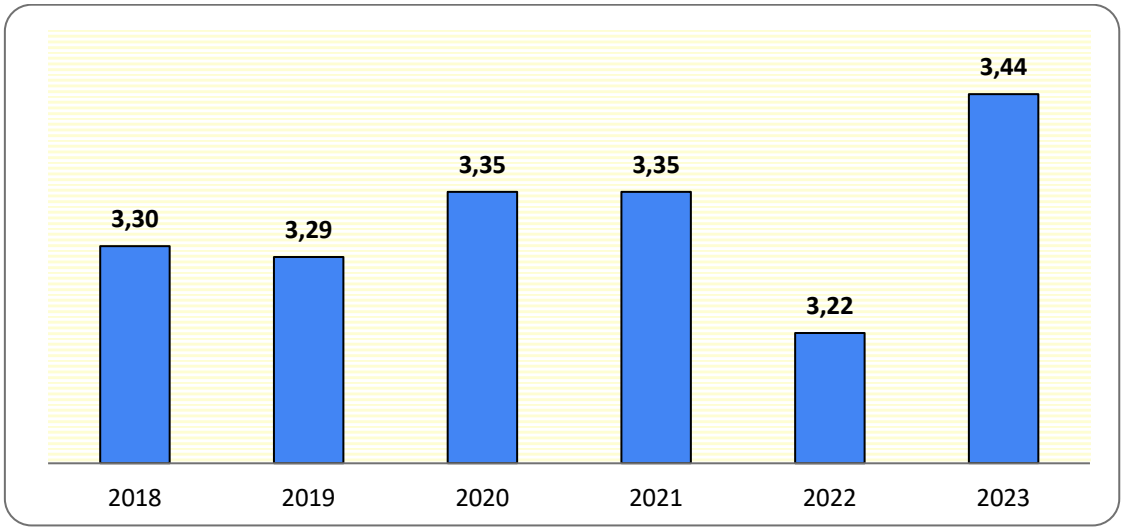

Gambar 2. 31 Indeks Pembangunan-TIK Provinsi Papua 2018-2023 sebagai Proksi Provinsi Papua Selatan

Sumber: BPS (2024)

Perkembangan ini memberikan gambaran bahwa meskipun terdapat tantangan, transformasi digital di wilayah bekas Provinsi Papua, termasuk Papua Selatan, menunjukkan arah yang positif dan berkelanjutan dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan ekonomi digital.

Jika dilihat dari subindeksnya, terlihat bahwa perkembangan subindeks IP-TIK di wilayah yang kini menjadi bagian dari Provinsi Papua Selatan mengalami tren yang relatif stabil dengan kecenderungan peningkatan pada beberapa aspek. Subindeks Akses dan Infrastruktur berada pada kisaran nilai 3,76 hingga 3,71 sepanjang tahun 2018 hingga 2021. Angka ini mengalami penurunan ke 3,38 pada tahun 2022, sebelum kembali naik menjadi 3,68 di tahun 2023. Sementara itu, subindeks Penggunaan menunjukkan tren peningkatan bertahap dari 2,15 pada tahun 2018 menjadi 2,47 pada tahun 2023, mencerminkan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Subindeks Keahlian juga menunjukkan capaian yang tinggi dan

stabil, dengan peningkatan dari 4,68 pada tahun 2018 menjadi 4,89 pada tahun 2023, mencerminkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penggunaan TIK.

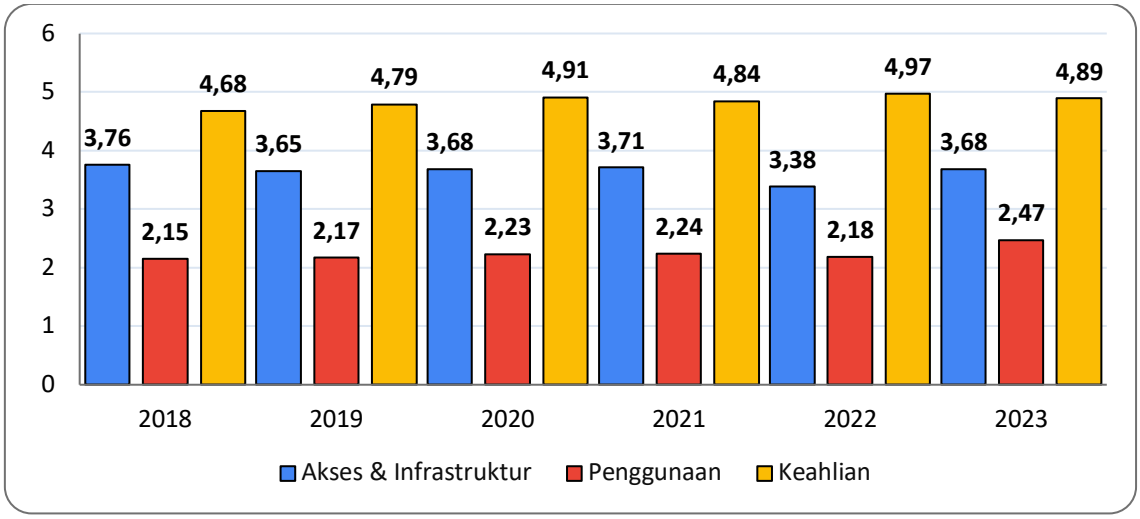

Gambar 2. 32 Subindeks Provinsi Papua 2018-2023 sebagai Proksi Provinsi Papua Selatan
Sumber: BPS (2024)

Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dinamika dan tantangan, upaya pembangunan TIK di wilayah yang kini menjadi Papua Selatan terus berlangsung secara konsisten. Peningkatan pada subindeks Penggunaan dan Keahlian menandakan bahwa masyarakat semakin terbiasa memanfaatkan teknologi informasi dan memiliki kompetensi yang makin baik dalam penggunaannya. Di sisi lain, meskipun subindeks Akses dan Infrastruktur sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, pemulihan di tahun 2023 menjadi indikasi bahwa pembangunan fisik dan jaringan digital tetap menjadi prioritas.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa proses digitalisasi di wilayah Papua Selatan terus mengalami kemajuan, meskipun masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk mempercepat penguatan infrastruktur digital, pemerataan akses, dan peningkatan kapasitas digital masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang sebelumnya tertinggal.

Sebagai pelengkap atas capaian-capaian tersebut, perkembangan Indeks Literasi Digital di Kabupaten Mappi memberikan gambaran lebih mendalam mengenai kemampuan dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital. Berdasarkan data, indeks ini menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten, meskipun data belum tersedia secara lengkap untuk

semua tahun. Pada tahun 2021, indeks literasi digital tercatat sebesar 4,84, kemudian mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 6,65 dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 7,34. Kenaikan ini mencerminkan bahwa secara bertahap masyarakat Mappi mulai memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi digital untuk berbagai keperluan, baik dalam konteks pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari.

Tabel 2. 31 Indeks Literasi Digital Kabupaten Mappi

2020	2021	2022	2023	2024
N/A	4,84	N/A	6,65	7,34

Sumber: BPS (2024)

Peningkatan ini menjadi indikasi positif bahwa berbagai upaya edukasi dan pengembangan kapasitas digital mulai menunjukkan hasil. Namun, angka yang masih berada pada kisaran di bawah 10 mengisyaratkan bahwa literasi digital belum merata dan masih perlu ditingkatkan secara lebih intensif. Implikasi dari capaian ini adalah perlunya penguatan strategi literasi digital yang lebih menyasar komunitas-komunitas akar rumput, termasuk melalui integrasi literasi digital dalam sistem pendidikan, pelatihan berbasis komunitas, serta peningkatan peran lembaga lokal dan sektor swasta. Kabupaten Mappi harus mampu memanfaatkan momentum ini untuk membangun budaya digital yang inklusif dan memberdayakan, agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga aktor aktif dalam ekosistem digital.

Salah satu instrumen lain yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan transformasi digital adalah Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI), yang mencerminkan tingkat literasi, infrastruktur, keterampilan, dan pemanfaatan digital oleh masyarakat di berbagai daerah.

Berdasarkan data IMDI tahun 2024, Provinsi Papua Selatan mencatatkan nilai indeks sebesar 40,11, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 37,09. Kenaikan ini menunjukkan adanya progres dalam pengembangan ekosistem digital di wilayah tersebut, meskipun masih berada pada kategori “cukup” dalam klasifikasi nasional.

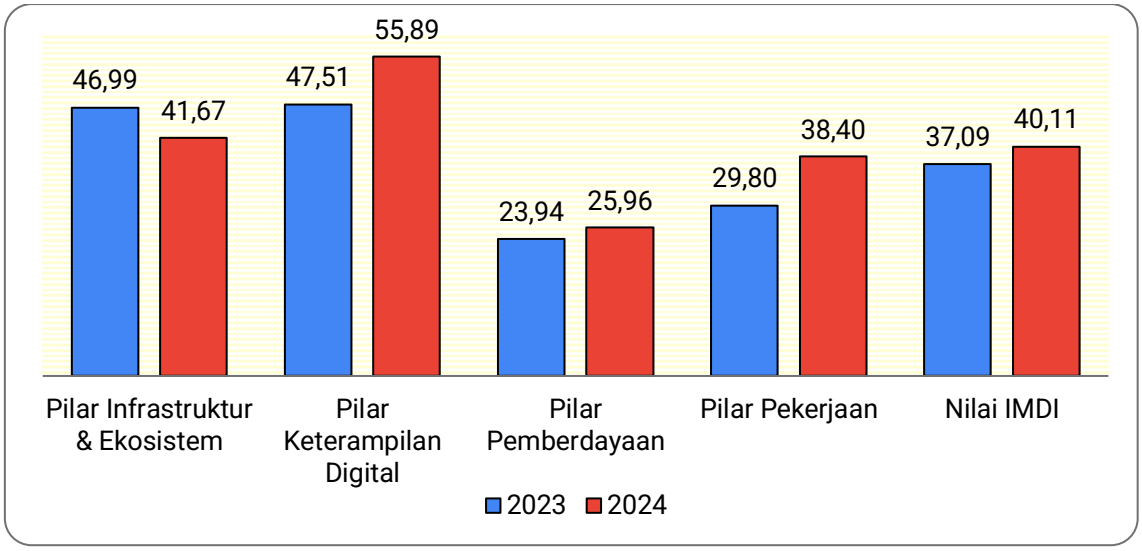

Gambar 2. 33 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital (2024)

Dalam rincian per pilar, terlihat bahwa Pilar Keterampilan Digital mengalami peningkatan signifikan dari 47,51 menjadi 55,89, menjadikannya sebagai pilar dengan nilai tertinggi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital secara produktif. Sebaliknya, Pilar Infrastruktur dan Ekosistem justru mengalami penurunan dari 46,99 pada tahun 2023 menjadi 41,67 pada tahun 2024, menandakan masih adanya tantangan dalam pemerataan akses dan fasilitas digital, khususnya di wilayah dengan hambatan geografis yang kompleks seperti Papua Selatan. Pilar Pemberdayaan, meskipun mengalami peningkatan dari 23,94 menjadi 25,96, tetap menjadi pilar dengan nilai terendah, mencerminkan masih terbatasnya pemanfaatan teknologi dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Pilar Pekerjaan meningkat dari 29,80 menjadi 38,40, menunjukkan tumbuhnya peluang kerja berbasis digital yang mulai dirasakan masyarakat. Secara keseluruhan, capaian ini mengindikasikan bahwa transformasi digital di Papua Selatan berjalan ke arah yang positif, namun masih memerlukan penguatan pada aspek infrastruktur dan pemberdayaan agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan sektor pertahanan dan keamanan, peningkatan literasi dan keterampilan digital masyarakat juga dapat menjadi faktor

pendukung dalam mewujudkan stabilitas dan ketahanan wilayah berbasis teknologi informasi.

Capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten di provinsi ini berada pada kategori "cukup", dengan skor berkisar antara 38,01 hingga 44,35. Kabupaten Mappi menjadi salah satu wilayah yang menunjukkan perkembangan positif dengan nilai IMDI sebesar 40,01, meningkat dari 37,84 pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di tengah masyarakat Mappi, sekaligus menunjukkan bahwa kabupaten ini memiliki fondasi yang cukup kuat untuk terus mengembangkan ekosistem digitalnya.

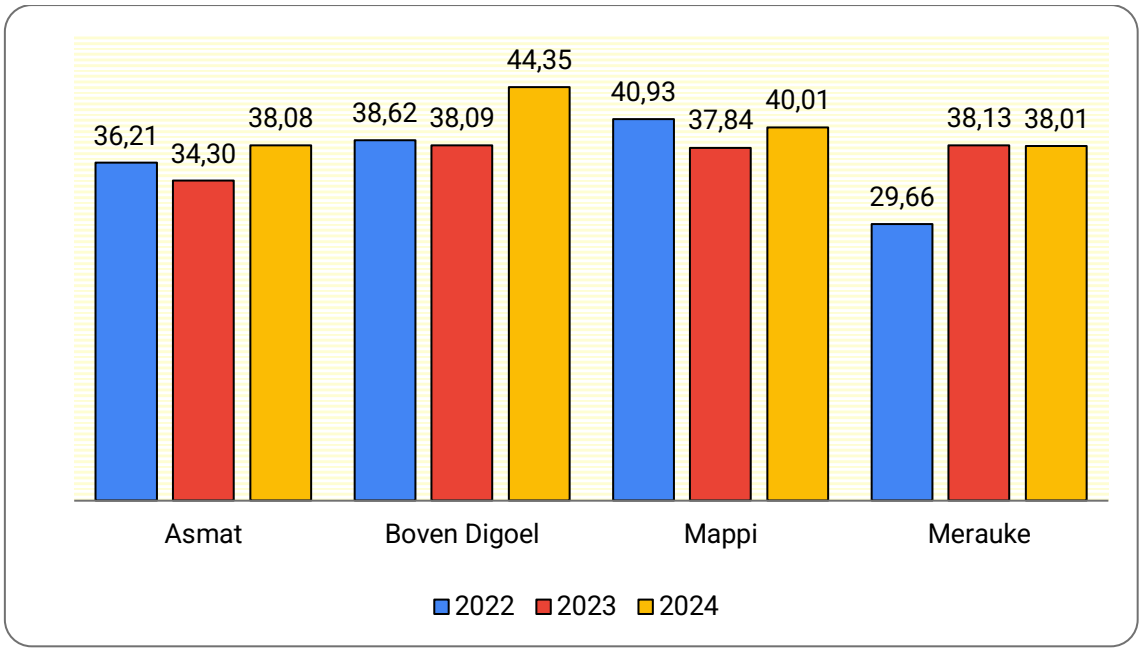

Gambar 2. 34 Nilai IMDI Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Selatan 2022-2024

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital (2024)

Secara khusus, Pilar Keterampilan Digital di Kabupaten Mappi mencapai skor 52,67, yang menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital mengalami kemajuan yang cukup baik. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Asmat (49,64) dan Kabupaten Merauke (54,88), namun masih tertinggal dari Kabupaten Boven Digoel yang mencatat skor tertinggi di provinsi ini, yaitu 66,36. Pilar Infrastruktur dan Ekosistem di Kabupaten Mappi juga mencatat skor relatif tinggi sebesar 43,81, sedikit di atas Kabupaten Boven Digoel (43,47) dan jauh di atas Asmat (39,48) serta Merauke

(39,93), yang menunjukkan ketersediaan infrastruktur dan jaringan digital yang cukup baik untuk mendukung konektivitas.

Namun demikian, Pilar Pemberdayaan masih menjadi tantangan utama bagi Kabupaten Mappi, dengan skor hanya 26,70. Angka ini lebih rendah dari Boven Digoel (27,78) dan Asmat (27,11), namun masih lebih tinggi dibanding Merauke yang mencatat skor terendah di pilar ini, yakni 22,23. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun akses dan keterampilan mulai tumbuh, pemanfaatan teknologi dalam aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi belum maksimal. Sementara itu, Pilar Pekerjaan di Kabupaten Mappi mencatat skor 38,56, yang menunjukkan potensi dan peluang kerja berbasis digital mulai terbuka. Nilai ini menempatkan Kabupaten Mappi di posisi menengah, lebih tinggi dibanding Asmat (37,58) dan Merauke (37,05), namun masih di bawah Boven Digoel (40,39).

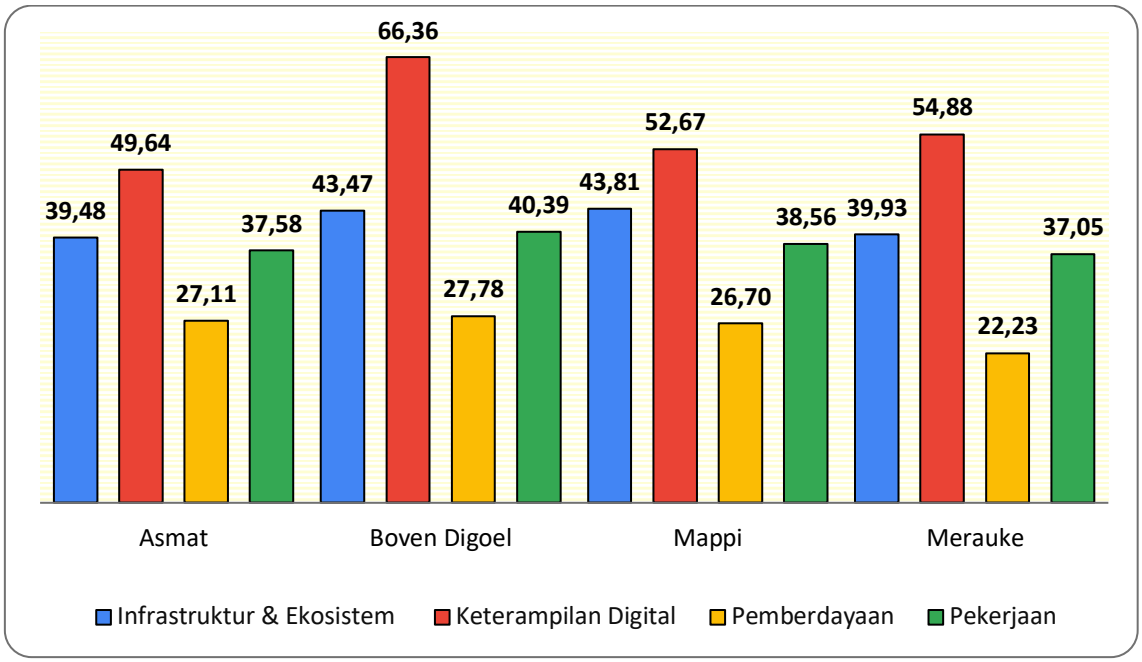

Gambar 2. 35 Nilai Pilar IMDI Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Selatan 2024

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital (2024)

Secara keseluruhan, nilai IMDI Kabupaten Mappi pada tahun 2024 adalah 40,01, menempatkannya di urutan kedua tertinggi dari empat kabupaten di Provinsi Papua Selatan, di bawah Boven Digoel (44,35) dan di atas Asmat (38,08) serta Merauke (38,01). Peningkatan ini menunjukkan tren yang positif

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan mencerminkan potensi Kabupaten Mappi dalam mempercepat transformasi digital di tingkat lokal.

Dengan capaian ini, Kabupaten Mappi memiliki peluang strategis untuk mendorong digitalisasi secara lebih inklusif, terutama dengan memperkuat aspek pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekosistem digital serta integrasi TIK dalam berbagai sektor pembangunan akan menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata. Data ini penting untuk dijadikan pijakan dalam pengambilan kebijakan ke depan, agar transformasi digital benar-benar mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Mappi secara menyeluruh.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Integrasi ekonomi domestik dan global dapat dijelaskan menggunakan dua indikator, yaitu pembentukan modal tetap bruto dan ekspor barang dan jasa. Berikut gambaran kedua indikator tersebut di Kabupaten Mappi.

1. **Pembentukan Modal Tetap Bruto**

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen utama dalam perhitungan produk domestik regional bruto (PDRB) yang mencerminkan tingkat investasi suatu negara dalam aset tetap yang digunakan untuk mendukung kegiatan produksi dalam jangka panjang. Investasi ini mencakup berbagai jenis barang modal tetap, seperti pembangunan gedung perkantoran, pabrik, dan perumahan, serta pengadaan mesin, peralatan, dan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya. PMTB berperan penting dalam meningkatkan kapasitas produksi suatu negara, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperkuat daya saing industri dan sektor usaha. Berikut adalah data tentang PMTB di Kabupaten Mappi.

Tabel 2. 32 Pembentukan Modal Tetap Bruto (Juta Rupiah) Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.409,70	1.565,62	1.721,87	1.837,42	1.923,18

Sumber: BPS Kabupaten Mappi, 2025

Pembentukan modal tetap bruto di Kabupaten Mappi mengalami peningkatan sebesar 513,48 juta rupiah. Beberapa faktor yang berhubungan dengan peningkatan PMTB di Kabupaten Mappi seperti peningkatan investasi infrastruktur, peningkatan belanja modal pemerintah, berkembangnya investasi swasta dan proyek nasional, kondisi stabilitas politik dan keamanan, dan berbagai faktor pendukung lainnya. PMTB harus ditingkatkan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mappi.

2. Net Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor barang dan jasa adalah selisih antara total ekspor dan total impor suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu. Net ekspor digunakan untuk menghitung kontribusi perdagangan regional terhadap PDRB. Net ekspor positif (surplus perdagangan) terjadi jika ekspor lebih besar daripada impor, berarti daerah tersebut memiliki surplus perdagangan, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat nilai mata uang. Net ekspor negatif (defisit perdagangan) terjadi jika impor lebih besar daripada ekspor, berarti daerah mengalami defisit perdagangan, yang dapat menyebabkan ketergantungan pada produk luar daerah dan melemahkan mata uang. Berikut adalah data net ekspor barang dan jasa di Kabupaten Mappi.

Tabel 2. 33 Net Ekspor Barang dan Jasa (Juta Rupiah) Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.731,50	-1.941,30	-2.092,28	-2.285,40	-2.470,90

Sumber: BPS Kabupaten Mappi, 2025

Net ekspor barang dan jasa di Kabupaten Mappi menunjukkan defisit perdagangan sebesar 739,4 juta rupiah. Kondisi ini disebabkan karena impor barang dan jasa ke dalam Kabupaten Mappi lebih besar jika dibandingkan dengan ekspor barang dan jasa ke luar Kabupaten Mappi. Net ekspor barang dan jasa harus dijaga dan diupayakan untuk kembali ke surplus perdagangan. Upaya

kebijakan ini penting dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kebocoran ekonomi regional di Kabupaten Mappi.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Aspek daya saing daerah selanjutnya dapat dilihat melalui kondisi wilayah *urban* dan *rural* di daerah tersebut, dalam hal ini adalah daerah perkotaan dan pedesaannya. Daerah dengan tingkat daya saing yang tinggi memiliki kondisi baik perkotaan dan perdesaan yang mumpuni, dengan perkotaan sebagai pusat aktivitas perdagangan dan sektor jasa sedangkan wilayah perdesaan sebagai daerah penghasil komoditas-komoditas pokok dan penting (*hiterland*). Bagian ini akan membahas lebih lanjut bagaimana perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terjadi di Kabupaten Mappi, dengan melihatnya melalui tiga indikator penting yang dijelaskan pada bagian di bawah ini.

1. **Kondisi Jalan Daerah**

Keberadaan infrastruktur secara prinsipnya bukan merupakan tujuan akhir dari pelayanan publik. Infrastruktur merupakan sarana dan prasarana pendukung aktivitas masyarakat dalam suatu daerah. Oleh karenanya, keberadaan infrastruktur perlu dilihat dari aspek kebermanfaatannya. Dalam hal ini, indeks kualitas layanan infrastruktur berusaha menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberadaan infrastruktur suatu daerah secara umum. Berikut merupakan kondisi jalan Kabupaten Mappi dalam beberapa tahun terakhir:

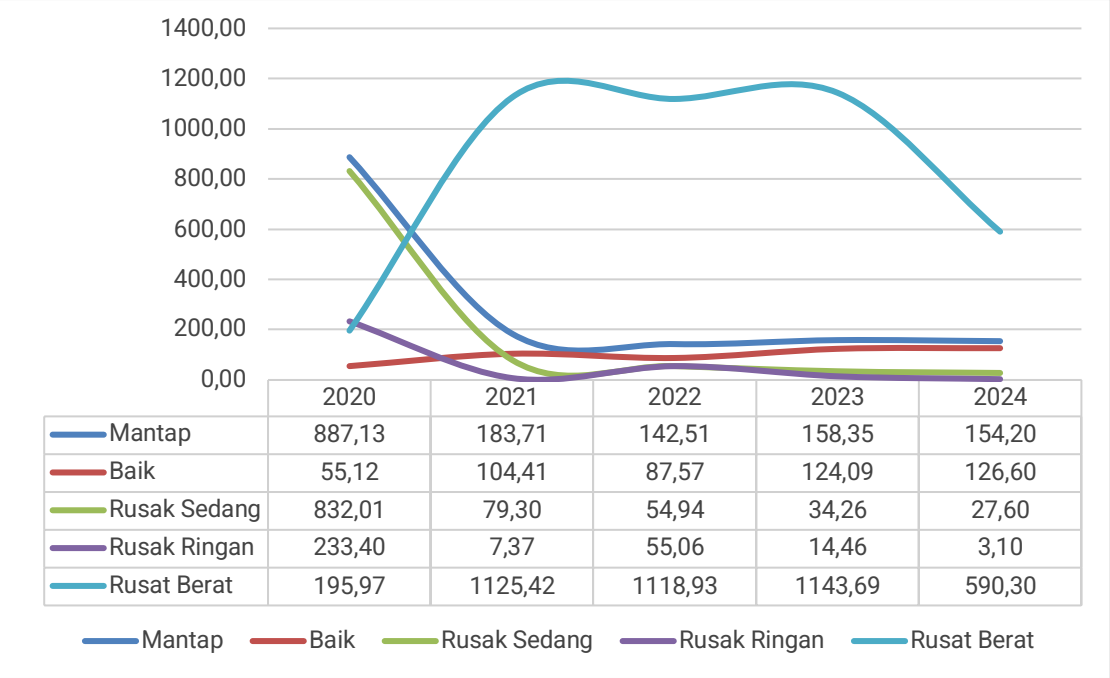

	2020	2021	2022	2023	2024
Mantap	887,13	183,71	142,51	158,35	154,20
Baik	55,12	104,41	87,57	124,09	126,60
Rusak Sedang	832,01	79,30	54,94	34,26	27,60
Rusak Ringan	233,40	7,37	55,06	14,46	3,10
Rusat Berat	195,97	1125,42	1118,93	1143,69	590,30

Gambar 2. 36 Kondisi Jalan di Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Mappi, 2025

Secara umum total panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten mengalami penurunan. Dari aspek kualitasnya, peningkatan tertinggi terjadi pada angka panjang jalan dengan kondisi rusak berat, dengan peningkatan sebesar 394,44 km atau persentase peningkatan sebesar 201,22 persen dibandingkan dengan data awal. Penurunan paling signifikan terjadi pada jalan dengan kondisi mantap dengan penurunan panjang jalan sebesar 732,93 km dengan persentase penurunan sebesar 82,62 persen dibandingkan dengan data awal. Hal ini menggambarkan kondisi infrastruktur jalan yang menurun secara aspek kualitas, dimana hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan untuk memastikan konektivitas yang optimal antar wilayah di Kabupaten Mappi, khususnya dalam rangka meningkatkan konektivitas antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan.

2. Kepemilikan Hunian

Rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan primer manusia dalam menjalani hidup yang layak. Oleh karenanya, rumah atau hunian layak merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat secara umum. Hunian layak merupakan hunian yang memenuhi beberapa standar dan kriteria yang diperlukan agar penghuninya dapat menjalani hidup dengan layak. Kondisi

hunian daerah dapat digambarkan melalui data mengenai kepemilikan hunian di daerah. Berikut merupakan data kepemilikan hunian di layak Kabupaten Mappi dalam beberap tahun terakhir:

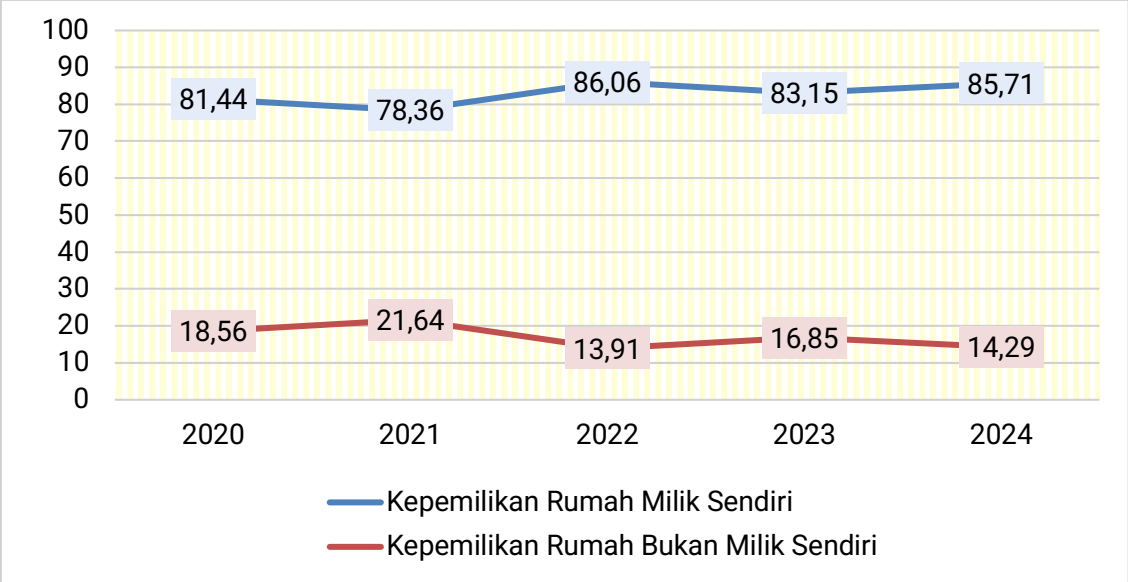

Gambar 2. 37 Data Kepemilikan Hunian Berdasarkan Rumah Tangga di Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

Secara umum kepemilikan rumah sendiri di Kabupaten Mappi dalam kurun waktu data mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi sebesar 4,27 poin atau dengan persentase peningkatan sebesar 5,24 persen. Peningkatan ini mengindikasikan semakin baiknya kondisi kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya status kepemilikan rumah sendiri. Meskipun demikian, capaian ini masih relatif tergolong belum optimal, dengan kurang lebih 1 dari 10 rumah tangga di Kabupaten Mappi masih belum memiliki rumah atau hunian sendiri. Hal ini perlu intervensi lebih lanjut dalam penyediaan hunian yang terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mappi di seluruh wilayah.

3. Indeks Kampung Membangun

Kampung merupakan unit kemasyarakatan dengan pemerintahan otonom terkecil di wilayah Papua, dengan desa sebagai padanannya di daerah lain. Kampung merupakan satuan unit sosial kemasyarakatan yang memiliki batas dan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan dengan unit lainnya. Kemandirian kampung menjadi penting dalam mewujudkan aspek daya saing suatu daerah. Dengan mandirinya suatu kampung, daerah tersebut dapat

berdaya melalui berbagai aktivitasnya yang dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri, bahkan dapat menghasilkan nilai tambah baik berupa komoditas maupun jasa. Berikut merupakan kondisi kampung mandiri di Kabupaten Mappi yang digambarkan melalui indeks kampung membangun di Kabupaten Mappi dalam beberapa tahun terakhir.

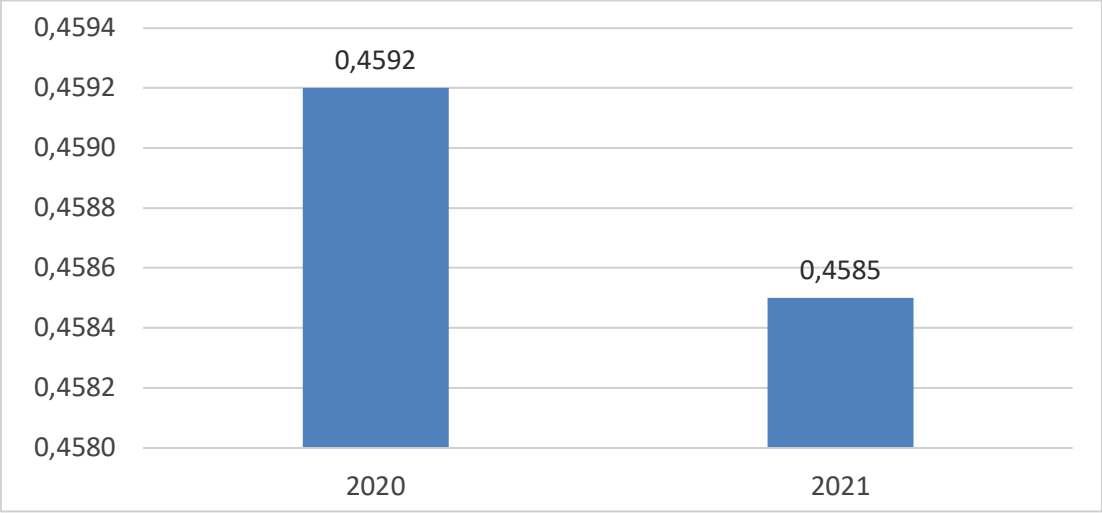

Gambar 2. 38 Indeks Kampung Membangun Kabupaten Mappi Tahun 2020-2021
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, 2025

Indeks kampung membangun Kabupaten Mappi dalam kurun waktu data menunjukkan penurunan. Penurunan terjadi sebesar 0,0007 poin atau dengan penurunan persentase sebesar -0,15 persen. Penurunan ini mengindikasikan kondisi kampung di Kabupaten Mappi yang menurun kemandirian dan keberdayaannya dalam berbagai sektor. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah kedepan mengingat peran penting kampung sebagai unit kemasyarakatan yang terkecil di daerah, yang mana lembaga kampung menjadi salah satu lembaga yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan menurunnya keberdayaan kampung berpotensi memberikan dampak lebih lanjut dalam penurunan kesejahteraan masyarakat kampung secara umum. Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu merumuskan berbagai intervensi dan kebijakan dalam rangka peningkatan keberdayaan kampung melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan penguatan kelembagaan kampung.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Bagian ini akan menguraikan kondisi stabilitas ekonomi makro yang bertujuan untuk menjamin kesinambungan fiskal serta menjaga keseimbangan dalam sektor moneter dan keuangan. Stabilitas ekonomi makro dapat dinilai melalui berbagai indikator, salah satunya adalah melalui rasio pajak terhadap PDRB maupun laju inflasi di daerah. Rasio pajak daerah terhadap PDRB daerah menggambarkan seberapa besar hasil ekonomi masyarakat yang menjadi pemasukan bagi pemerintah melalui pajak daerah. Laju inflasi daerah berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kestabilan harga-harga barang kebutuhan pokok serta barang-barang penting lainnya di masyarakat. Melalui indikator ini, dapat diketahui sejauh mana harga-harga tetap terjaga dalam mendukung kestabilan daya beli masyarakat. Pada bagian ini, akan disampaikan uraian lebih rinci mengenai perkembangan inflasi di Kabupaten Mappi sebagai salah satu aspek fundamental dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah ke depan.

1. **Rasio Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB**

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen dalam sistem neraca ekonomi daerah. Oleh karenanya, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib merupakan salah satu lapangan usaha yang dapat dilihat untuk mengukur tingkat stabilitas perekonomian suatu wilayah. Idealnya, semakin rendah kontribusi ekonomi daerah dari pemerintahan menandakan semakin baiknya kondisi ekonomi wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh aktivitas ekonomi wilayah yang lebih banyak didorong oleh sektor swasta yang berorientasi untuk memberikan nilai tambah terhadap perekonomian wilayah secara umum. Berikut merupakan data mengenai distribusi PDRB dari lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib Kabupaten Mappi selama kurun waktu 2023–2024:

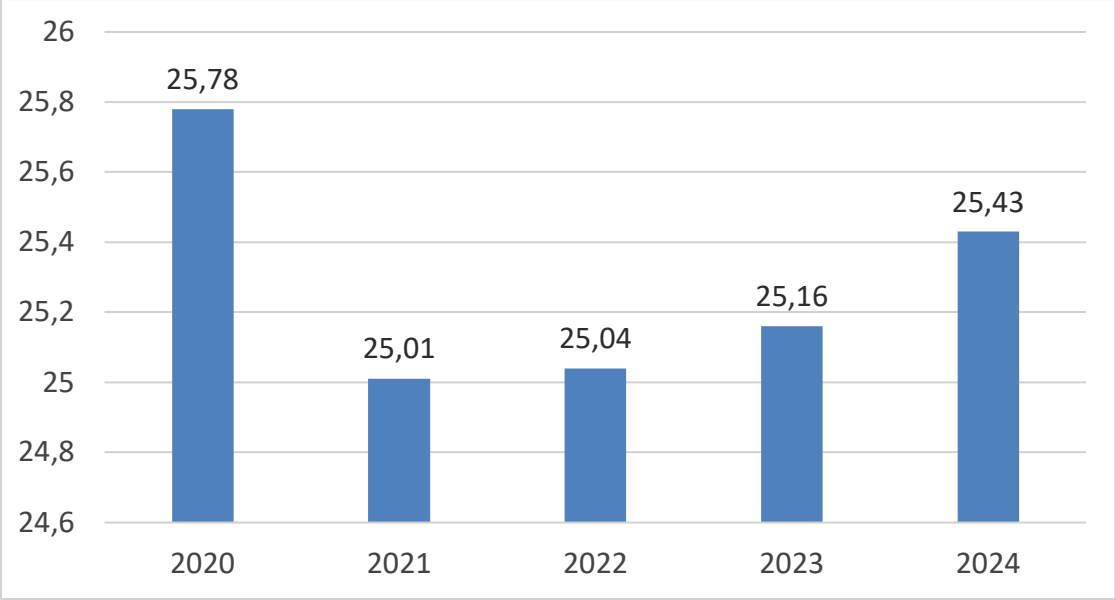

Gambar 2. 39 Distribusi PDRB Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Mappi, 2025

Secara umum porsi ekonomi dari pemerintah daerah terhadap perekonomian Kabupaten Mappi tergolong cukup tinggi. Sebagai lapangan usaha, ekonomi yang didorong oleh pemerintah mencakup satu per empat dari total aktivitas ekonomi secara umum. Hal ini menandakan bahwa perekonomian Kabupaten Mappi masih belum didorong oleh aktivitas perekonomian yang berorientasi terhadap produksi nilai tambah yang didorong oleh sektor-sektor non pemerintah. Pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan sektor swasta untuk meningkatkan stabilitas ekonomi daerah secara umum.

2. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi mencerminkan perubahan harga berbagai komoditas yang dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan penawaran di pasar, serta daya beli masyarakat. Bank Indonesia mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus-menerus dalam periode tertentu. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan inflasi sebagai peningkatan harga barang dan jasa secara menyeluruh, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, atau sebagai penurunan nilai daya beli mata uang suatu negara. Kenaikan harga pada satu atau dua jenis barang saja tidak dapat dikategorikan sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut meluas dan berdampak terhadap keseluruhan harga barang dan jasa.

Inflasi yang terjaga merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Pengendalian inflasi menjadi aspek yang sangat penting, sebab inflasi yang tinggi dan bergejolak dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi. Pertama, tingginya inflasi menyebabkan pendapatan riil masyarakat menurun, sehingga berdampak pada melemahnya daya beli dan menurunnya standar hidup. Kedua, inflasi yang tidak stabil menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pada bagian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai kondisi inflasi di Kabupaten Mappi serta pengaruhnya terhadap stabilitas ekonomi daerah. Berikut merupakan tingkat inflasi Kabupaten Mappi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dari data yang tersedia.

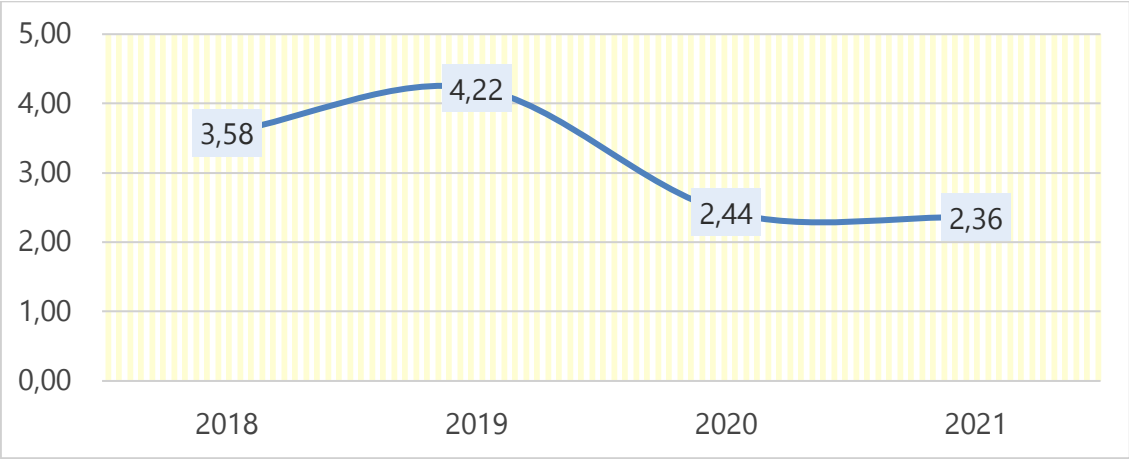

Gambar 2. 40 Tingkat Inflasi Tahun 2018-2021

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029

Tingkat Inflasi Kabupaten Mappi dalam kurun waktu tersebut secara umum cukup fluktuatif meskipun masih dalam rentang yang cukup terjaga di beberapa tahun. Secara rata-rata, tingkat inflasi Kabupaten Mappi dalam kurun data yang disajikan tercatat sebesar 3,15 persen per tahunnya. Mengikuti target inflasi nasional dengan angka 2 persen dengan deviasi kurang lebih satu persen, kondisi ini masih cukup kurang optimal. Peningkatan harga-harga di Kabupaten Mappi perlu dijaga secara lebih lanjut melalui berbagai intervensi stabilisasi harga, mulai dari pengadaan operasi pasar, penguatan distribusi barang pokok dan penting, dan penjagaan daya beli masyarakat secara umum. Untuk mendapatkan gambaran terkini, tingkat inflasi dapat dilihat dari daerah terdekat

dari wilayah yang ingin diukur tingkat inflasinya. Kabupaten Mappi sebagai bukan wilayah pengukuran inflasi menjadikan data terkininya belum tersedia. Oleh karenanya, dapat digunakan tingkat inflasi daerah sekitar, dalam hal ini adalah Kabupaten Merauke. Berikut merupakan tingkat inflasi Kabupaten Merauke:

Tabel 2. 34 Inflasi Bulanan Kabupaten Merauke Tahun 2020-2024

Bulan	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	1,95	-0,09	0,88	0,41	0,57
Februari	0,93	0,46	0,35	0,10	0,08
Maret	-1,53	0,85	1,86	0,90	-0,17
April	0,56	-0,04	0,74	1,05	0,33
Mei	0,70	0,09	-0,02	1,03	2,00
Juni	0,20	0,28	-0,19	1,09	-1,11
Juli	-0,48	0,04	0,58	-0,08	-0,92
Agustus	-0,64	-0,99	-0,85	-0,19	0,25
September	0,21	-0,75	0,07	-1,05	-0,74
Oktober	-0,61	0,49	0,12	0,28	0,01
November	0,66	-0,17	-0,05	0,30	0,26
Desember	0,66	1,53	1,33	0,78	1,24

Sumber: BPS Papua, 2025

Secara umum inflasi dari Kabupaten Merauke setiap bulannya dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan pergerakan harga-harga yang relatif stabil. Secara umum tahun 2022 menjadi tahun dengan rata-rata pergerakan inflasi tertinggi dengan rata-rata sebesar 0,40 persen setiap bulannya, dan tahun 2024 menjadi tahun dengan rata-rata inflasi terendah dengan rata-rata sebesar 0,15 persen setiap bulannya. Cukup stabilnya inflasi di Kabupaten Merauke dapat mengindikasikan beberapa hal diantaranya adalah stok cadangan barang pokok dan penting yang stabil, distribusi yang lancar, dan daya beli masyarakat yang cukup terjaga.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum berkaitan dengan tata kelola pemerintahan sebagai fondasi penyelenggaraan pembangunan daerah. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan, semakin tinggi potensi meraih keberhasilan pembangunan daerah. Adapun indikator dalam menganalisis aspek pelayanan umum mencakup, Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif, Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi

Substansial, serta Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif adalah program yang mendorong kualitas regulasi dan tata kelola pemerintahan bertransformasi menjadi lebih baik. Transformasi ini selanjutnya akan menjadi fondasi utama dalam menopang agenda pembangunan yang lainnya. Indikator yang mencerminkan capaian kinerja dari regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif mencakup indeks reformasi hukum, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, indeks pelayanan publik, dan indeks integritas nasional.

1. **Indeks Reformasi Hukum**

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas.

Indeks Reformasi Hukum ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang kemudian menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

2. **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan langkah penting dalam mengukur kematangan penerapan teknologi informasi dalam proses pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan utama dari pelaksanaan SPBE adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam proses evaluasinya, nilai Indeks SPBE diberikan berdasarkan tingkat kematangan penerapan SPBE yang

mencakup aspek tata kelola, layanan, serta kebijakan yang diterapkan oleh setiap instansi pemerintah. Penilaian ini dilakukan secara berkala dengan mengacu pada pedoman evaluasi nasional yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data yang didapat, Kabupaten Mappi menunjukkan capaian Indeks SPBE sebesar 1,59 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 1,73 pada tahun 2023-2024. Meskipun terjadi peningkatan, kedua nilai tersebut masih berada dalam kategori "Kurang", yang mencerminkan bahwa pelaksanaan SPBE di Kabupaten Mappi masih berada pada tahap awal dan memerlukan penguatan signifikan, baik dari sisi kebijakan maupun infrastruktur pendukung digitalisasi pemerintahan.

Tabel 2. 35 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Mappi	N/A	N/A	1.59 (Kurang)	1.73 (Kurang)	1.73 (Kurang)
Provinsi Papua Selatan	N/A	N/A	N/A	1.61 (Kurang)	1.61 (Kurang)
Provinsi Papua	N/A	N/A	1.87 (Cukup)	1.91 (Cukup)	2.03 (Cukup)

Sumber: KemenPAN RB (2023)

Sementara itu, Provinsi Papua Selatan yang baru terbentuk pada tahun 2022 memiliki capaian Indeks SPBE sebesar 1,61 pada tahun 2023-2024, juga dalam kategori "Kurang". Hal ini mencerminkan bahwa sebagai provinsi baru, Papua Selatan masih dalam proses pembangunan sistem pemerintahan digital yang memadai dan terintegrasi.

Sebagai pembanding dan proksi dalam mengevaluasi dinamika digitalisasi pemerintahan di Papua Selatan, data dari Provinsi Papua turut digunakan. Provinsi Papua mencatatkan nilai Indeks SPBE sebesar 1,87 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 1,91 pada tahun 2023, yang keduanya berada dalam kategori "Cukup". Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun belum optimal, Provinsi Papua telah berada pada jalur yang lebih matang dalam penerapan SPBE, dan pengalamannya dapat dijadikan rujukan strategis dalam mempercepat pembangunan sistem SPBE di Papua Selatan, termasuk di dalamnya Kabupaten Mappi. Dengan demikian, meskipun nilai SPBE di wilayah Papua Selatan masih rendah, terdapat potensi dan arah yang jelas untuk

peningkatan melalui *benchmarking*, pembelajaran, dan transfer praktik baik dari wilayah induk sebelumnya.

3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Berdasarkan data dari Portal Satu Data Kementerian PANRB tahun 2024, Kabupaten Mappi belum memiliki catatan IPP pada tahun 2021 dan 2022, yang mengindikasikan belum tersedianya data atau belum dilakukannya penilaian terhadap kualitas pelayanan publik di daerah tersebut pada periode tersebut. Baru pada tahun 2023 dan 2024, Kabupaten Mappi mulai mencatatkan nilai IPP, yaitu sebesar 2,7 untuk dua tahun berturut-turut. Nilai tersebut masih tergolong rendah jika mengacu pada standar nasional yang menetapkan angka di atas 3,5 sebagai kategori baik. Skor 2,7 mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mappi masih berada pada tingkat cukup, bahkan mendekati batas bawah. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi pelayanan publik di wilayah ini belum berjalan optimal dan belum ada peningkatan signifikan selama dua tahun terakhir. Minimnya kemajuan ini menjadi cerminan dari masih lemahnya tata kelola pelayanan publik serta perlunya perbaikan dalam sistem penyelenggaraan layanan, mulai dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur, hingga mekanisme evaluasi dan keterlibatan masyarakat. Kabupaten Mappi diharapkan dapat mendorong pembenahan menyeluruh dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar kualitas layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Tabel 2. 36 Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2021-2024

2021	2022	2023	2024
N/A	N/A	2.7	2.7

Sumber: Portal Satu Data Kementerian PAN RB, 2024

4. Indeks Intergritas Nasional

Indeks Integritas Nasional merupakan indikator penting dalam menilai tingkat risiko korupsi di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pengukuran indeks ini menggabungkan berbagai sumber data, seperti persepsi dan pengalaman masyarakat umum, masukan dari pengguna layanan,

serta informasi objektif dari pihak internal lembaga dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama dari pengukuran ini adalah untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, serta membangun budaya birokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Di Kabupaten Mappi, capaian Indeks Integritas Nasional menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pada tahun 2021, nilai indeks tercatat sebesar 66,59. Meskipun pada tahun 2022 tidak tersedia data yang dipublikasikan, capaian pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 67,40. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan persepsi publik terhadap integritas pelayanan publik, serta kemungkinan adanya peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan pemerintahan Kabupaten Mappi.

Tabel 2. 37 Indeks Integritas Nasional Kabupaten Mappi Tahun 2020-2023

2021	2022	2023
66.59	-	67.40

Sumber: Inspektorat Kabupaten Mappi, 2023

Kendati demikian, nilai indeks yang berada pada kisaran 60-an menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas birokrasi yang profesional, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, tetap menjadi kunci untuk memperkuat integritas lembaga publik di Kabupaten Mappi secara berkelanjutan.

Sebagai pelengkap dari upaya perbaikan tata kelola tersebut, capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di Kabupaten Mappi dan wilayah sekitarnya menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana reformasi struktural telah berjalan secara efektif. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan ukuran efektivitas dari reformasi birokrasi di lembaga pemerintah. Reformasi birokrasi sendiri adalah inisiatif untuk melakukan perubahan fundamental dalam sistem pemerintahan, terutama dalam hal organisasi kelembagaan, proses bisnis, dan sumber daya manusia.

IRB mencerminkan sejauh mana implementasi tata kelola pemerintahan telah berlangsung pada lembaga-lembaga pemerintah dengan tujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam manajemen tata pemerintahan, transparansi tanpa korupsi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai IRB, secara proporsional menunjukkan tingkat keberhasilan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dalam mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan, pencegahan korupsi, dan penyediaan layanan public yang bermutu.

Tabel berikut menggambarkan nilai IRB Pemerintah Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua pada kurun waktu 2020 hingga 2024, yang secara tidak langsung merefleksikan dinamika kelembagaan dan kapasitas tata kelola pasca pemekaran wilayah.

Tabel 2. 38 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Mappi	N/A	41.71 (C)	N/A	43.25 (C)	N/A
Provinsi Papua Selatan	N/A	N/A	N/A	41.97 (C)	41.97 (C)
Provinsi Papua	56 (CC)	56 (CC)	59 (CC)	55.87 (CC)	N/A

Sumber: Portal Satu Data Kementerian PAN RB, 2024

Pada tahun 2021, Kabupaten Mappi mencatatkan nilai IRB sebesar 41,71 dengan predikat “C” dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 43,25—masih dengan predikat “C”. Meskipun nilainya menunjukkan tren positif, skor ini masih berada pada kategori rendah. Ini menandakan bahwa proses reformasi birokrasi di Mappi masih pada tahap awal, dengan tantangan yang mencakup efektivitas kelembagaan, konsistensi pelaksanaan reformasi, serta kemampuan birokrasi dalam menyediakan pelayanan publik yang bersih dan berkualitas.

Sebagai perbandingan, Provinsi Papua Selatan yang menjadi wilayah administratif baru setelah pemekaran dari Provinsi Papua, memperoleh skor IRB sebesar 41,97 baik pada tahun 2023 maupun 2024, juga dengan predikat “C”. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan birokrasi tidak hanya dialami oleh Kabupaten Mappi sebagai kabupaten, tetapi juga terjadi secara lebih luas di tingkat provinsi. Di sisi lain, Provinsi Papua sebagai induk wilayah sebelum pemekaran menunjukkan skor IRB yang lebih tinggi: 56 pada 2021, meningkat menjadi 59 pada 2022, sebelum sedikit menurun menjadi 55,87 pada 2023, seluruhnya

dengan predikat “CC”. Meskipun belum ideal, capaian Provinsi Papua dapat dijadikan rujukan awal bagi Papua Selatan, termasuk Kabupaten Mappi, dalam merancang strategi reformasi yang lebih terarah.

Posisi Kabupaten Mappi ke depan memerlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahannya. Perluasan reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan perbaikan administratif, tetapi juga perlu mencakup penguatan sumber daya manusia, penyederhanaan proses layanan publik, serta integrasi sistem pengawasan dan evaluasi berbasis teknologi. Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan masyarakat sipil dan akademisi, perlu dioptimalkan untuk menciptakan birokrasi yang responsif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar reformasi birokrasi di Kabupaten Mappi tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi menjadi pijakan bagi transformasi layanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

5. Indeks SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan kerangka evaluatif yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja dalam rangka mendorong efisiensi penggunaan anggaran dan peningkatan hasil pembangunan. Nilai SAKIP menjadi indikator langsung atas kualitas tata kelola kinerja suatu instansi pemerintah, yang berimplikasi pada efektivitas birokrasi dalam mencapai outcome pembangunan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PAN-RB tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mappi memperoleh nilai SAKIP sebesar 53,13 dengan predikat “CC” untuk tahun 2023 dan 2024. Capaian ini mencerminkan bahwa sistem manajemen kinerja yang diterapkan masih berada pada tingkat cukup rendah, dengan kelemahan utama pada perumusan indikator kinerja, belum optimalnya pengukuran berbasis outcome, serta belum terbangunnya siklus evaluasi yang komprehensif. Nilai tersebut juga mengindikasikan lemahnya keterkaitan antara perencanaan strategis, penganggaran, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh.

Sebagai konteks pembanding, Provinsi Papua Selatan, yang secara administratif baru berdiri sejak tahun 2022, mencatat nilai 58,29 dengan predikat “CC” untuk dua tahun berturut-turut (2023–2024). Capaian ini, meskipun sedikit

lebih tinggi dari Kabupaten Mappi, masih menunjukkan adanya tantangan sistemik dalam penerapan manajemen kinerja di wilayah hasil pemekaran. Sementara itu, Provinsi Papua menunjukkan kinerja yang relatif lebih konsisten dengan nilai berkisar antara 62 hingga 66 dan predikat "B" selama lima tahun terakhir (2020–2024). Stabilitas nilai di Provinsi Papua menjadi proksi penting untuk menilai kapasitas kelembagaan sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

Tabel 2. 39 Nilai Indeks SAKIP Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Mappi	N/A	N/A	(C)	53.13 (CC)	53.13 (CC)
Provinsi Papua Selatan	N/A	N/A	N/A	58.29 (CC)	58.29 (CC)
Provinsi Papua	62 (B)	64 (B)	64 (B)	66 (B)	66 (B)

Sumber: Portal Satu Data Kementerian PAN RB, 2025

Secara teknis, kondisi Kabupaten Mappi merefleksikan adanya gap kelembagaan dalam membangun sistem akuntabilitas yang terstruktur dan berorientasi hasil. Minimnya capaian pada komponen perencanaan kinerja yang selaras dengan sasaran strategis, rendahnya kualitas pengukuran indikator outcome, serta belum optimalnya implementasi evaluasi kinerja berkala menjadi isu kunci yang perlu ditangani secara terintegrasi. Implikasi dari nilai "CC" ini cukup signifikan, antara lain: rendahnya efektivitas belanja publik, lemahnya fungsi pengawasan internal atas kinerja, dan terbatasnya kemampuan instansi dalam melakukan perbaikan berbasis data. Dalam konteks tata kelola daerah pasca-pemekaran, posisi Kabupaten Mappi mengharuskan adanya intervensi strategis untuk memperkuat ekosistem SAKIP, baik melalui penguatan kapasitas SDM aparatur, pembangunan sistem informasi kinerja yang terintegrasi, maupun perbaikan pada mekanisme pelaporan berbasis outcome.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Mappi perlu menjadikan penguatan SAKIP sebagai prioritas reformasi birokrasi daerah. Upaya tersebut harus diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan berbasis hasil, internalisasi budaya kinerja, serta keterpaduan antara dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Aspek hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi merupakan aspek yang menggambarkan kondusifitas daerah. Aspek ini dinilai dari Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Indeks Demokrasi Daerah. Adapun kinerja masing-masing indikator sebagai berikut.

1. **Angka Kriminalitas dan Risiko Kejahatan**

Berkenaan dengan hal tersebut, kondisi ketentraman dan ketertiban juga merupakan prasyarat utama dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Terkait aspek ini, situasi keamanan di Kabupaten Mappi selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian. Berikut adalah gambaran kondisi keamanan dan ketertiban berdasarkan data kriminalitas selama lima tahun terakhir. Data kriminalitas yang dilaporkan di Kabupaten Mappi menunjukkan adanya tren kenaikan selama periode 2020 hingga 2024. Tercatat, jumlah kejahatan meningkat dari 137 kasus pada tahun 2020 menjadi 155 kasus pada tahun 2024. Kenaikan jumlah kasus ini menjadi indikator penting dalam menganalisis kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan.

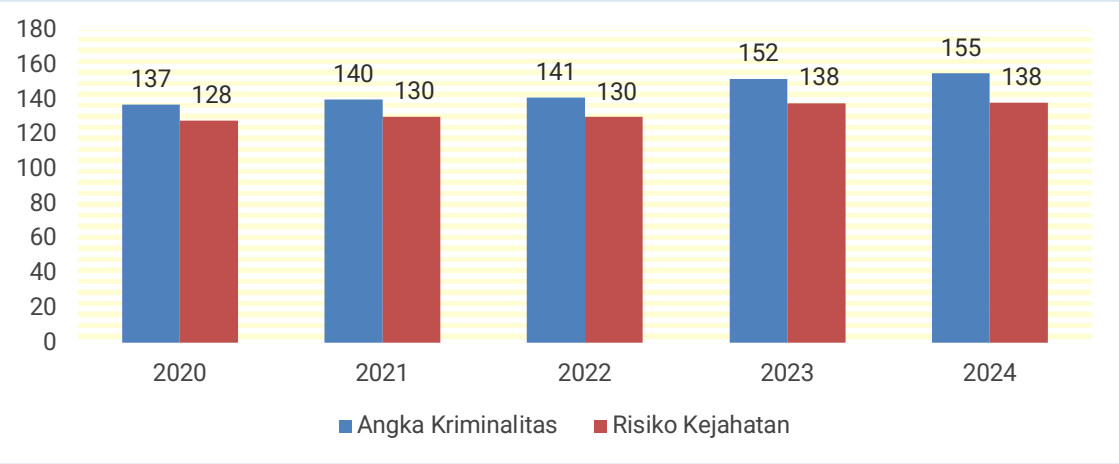

Gambar 2. 41 Angka Kriminalitas dan Risiko Kejahatan di Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: Polres Kabupaten Mappi (2025)

Sejalan dengan itu, risiko penduduk terkena tindak kejahatan per 100.000 penduduk juga mengalami peningkatan. Angka risiko ini naik dari 128 pada tahun 2020 menjadi 138 pada tahun 2024, yang menunjukkan pertumbuhan sebesar

7,81% selama lima tahun terakhir. Meskipun angka absolutnya masih dapat dianggap moderat, tren kenaikan ini merupakan sinyal yang harus diwaspadai. Peningkatan risiko kejahatan, sekecil apapun, berpotensi memengaruhi rasa aman dan kualitas hidup masyarakat, yang pada gilirannya dapat berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tren ini menjadi krusial untuk merumuskan kebijakan preventif yang efektif demi

2. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi, dengan capaian nasional yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Papua. Pada tahun 2018, IDI Provinsi Papua tercatat 62,2, sementara nasional 72,39. Angka ini meningkat pada tahun 2019 menjadi 65,25 untuk Provinsi Papua dan 74,92 untuk nasional. Meskipun demikian, pada tahun 2020, baik Provinsi Papua maupun nasional mengalami sedikit penurunan, menjadi 64,54 dan 73,66 secara berurutan. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2021, dengan IDI Provinsi Papua mencapai 66,39 dan nasional 80,41, yang merupakan capaian tertinggi nasional dalam periode ini. Pada tahun 2022, IDI Provinsi Papua berada di angka 66,65, sedikit di bawah nasional yang mencapai 78,12. Terakhir, pada tahun 2023, IDI Provinsi Papua menunjukkan sedikit kenaikan menjadi 67,64, sementara nasional mencapai 79,51. Fluktuasi ini sekaligus menandakan tingginya dinamika politik di wilayah Provinsi Papua selama periode tersebut. Perlu dicatat bahwa data IDI untuk Kabupaten Mappi masih menggunakan proksi dari Provinsi Papua karena perhitungan IDI secara teknis baru dapat dilakukan di tingkat provinsi. Situasi ini berkaitan dengan pemekaran Provinsi Papua Selatan dari Provinsi Papua pada tahun 2022, di mana Kabupaten Mappi termasuk dalam wilayah Provinsi Papua Selatan.

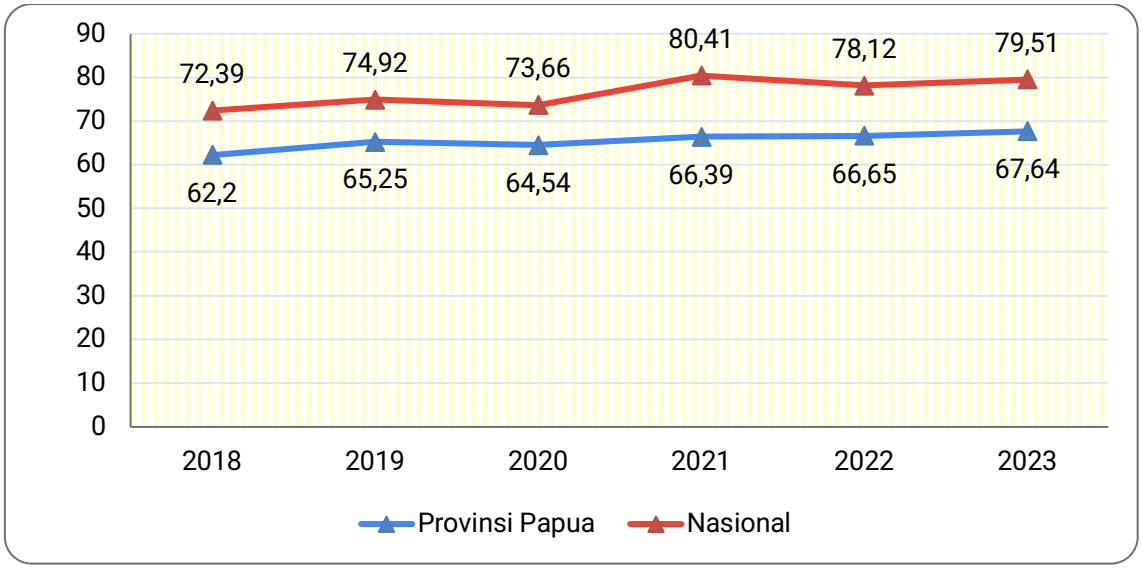

Gambar 2. 42 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua Tahun 2018-2023

Sumber: BPS Provinsi Papua Selatan (2024)

3. Indeks Rasa Aman

Analisis data Indeks Rasa Aman (Kejadian Kriminalitas) di Kabupaten Mappi dari 2018 hingga 2024 mengindikasikan adanya eskalasi yang perlu menjadi perhatian. Setelah dua tahun berada di level stabil 2,1 (2018-2019), indeks kriminalitas terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimulai dari 2,25 pada tahun 2020 dan mencapai level tertinggi dalam enam tahun terakhir, yaitu 3,25, pada tahun 2024.

Kenaikan angka pada Indeks Rasa Aman (Kejadian Kriminalitas) ini menyiratkan adanya peningkatan jumlah atau frekuensi kejadian kriminalitas di Kabupaten Mappi. Implikasinya, kondisi ini dapat mengurangi rasa ketentraman dan kepastian bagi masyarakat, serta menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah. Jika tren ini berlanjut, predikat "aman" bagi Kabupaten Mappi dapat terancam, berdampak pada berbagai aspek mulai dari investasi, pariwisata, hingga kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Ke depan, Kabupaten Mappi perlu mengambil langkah-langkah proaktif dan strategis untuk mengatasi tren peningkatan kejadian kriminalitas ini. Hal ini dapat mencakup penguatan kehadiran aparat keamanan di lapangan, peningkatan patroli di daerah rawan, serta optimalisasi fungsi pemolisian masyarakat. Selain itu, upaya preventif melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan lapangan kerja, dan edukasi hukum juga krusial untuk menekan

potensi terjadinya tindak kriminal. Dengan demikian, Kabupaten Mappi dapat berupaya mengembalikan dan mempertahankan rasa aman yang menjadi kebutuhan dasar masyarakatnya.

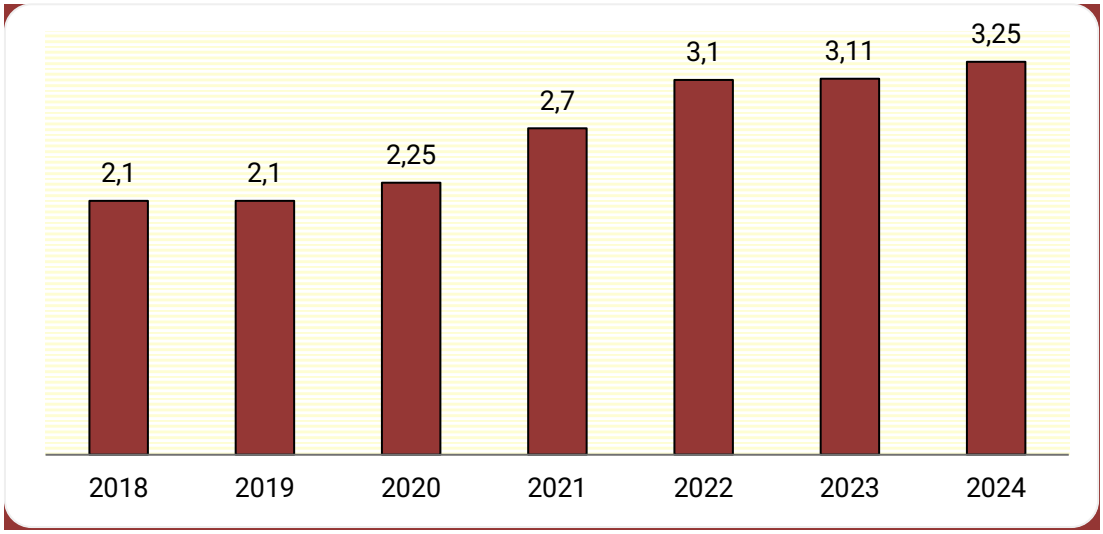

Gambar 2. 43 Kejadian Kriminalitas di Kabupaten Mappi Tahun 2018 – 2024

Sumber: Polres Kabupaten Mappi (2025)

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Berdasarkan hasil pemeringkatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), posisi Kabupaten Mappi di Provinsi Papua Selatan menunjukkan urgensi intervensi strategis yang sangat tinggi. Mappi tercatat tidak memperoleh skor komposit sama sekali (0,00), berbeda signifikan dengan rata-rata Provinsi Papua Selatan yang mencatat skor 2,78, dan jauh tertinggal dari rata-rata nasional sebesar 3,43. Skor nol ini merefleksikan belum tersedianya atau belum terlaporkannya data yang memadai secara sistemik, sehingga mengindikasikan lemahnya kapasitas tata kelola data, pelaporan, dan perencanaan pembangunan berbasis bukti di tingkat daerah.

Pada tataran sektoral, analisis per pilar menunjukkan kinerja yang sangat beragam. Misalnya, pada Pilar 1 (Institusi), Mappi mencatatkan skor 0,00, artinya belum terdapat sistem kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang terdokumentasi secara layak atau diakui dalam penilaian BRIN. Pilar ini sangat krusial karena berpengaruh terhadap stabilitas kebijakan, kepastian hukum, efisiensi birokrasi, serta integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebaliknya, sejumlah pilar menunjukkan potensi yang dapat dioptimalkan. Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro) menempatkan Mappi pada skor 3,99, setara dengan capaian nasional, menandakan bahwa secara makro, variabel-variabel ekonomi seperti inflasi, belanja daerah, dan pengelolaan fiskal relatif stabil. Selain itu, Pilar 7 (Pasar Produk) memperlihatkan skor 3,21, yang justru lebih tinggi dibandingkan Provinsi Papua Selatan (2,53) dan nasional (2,57). Ini mengindikasikan adanya potensi pasar produk yang cukup kompetitif di tingkat lokal, meskipun masih belum ditopang oleh kekuatan inovasi dan adopsi teknologi yang memadai. Namun demikian, tantangan mendasar tetap terlihat jelas pada beberapa pilar krusial lainnya. Misalnya, Pilar 3 (Adopsi TIK) hanya mencatat 1,37, yang berarti penetrasi teknologi digital masih sangat rendah. Begitu pula pada Pilar 12 (Kapabilitas Inovasi), dengan skor 1,23, menunjukkan lemahnya ekosistem riset, pengembangan, dan inovasi lokal. Tanpa penguatan dalam kedua pilar ini, maka transformasi digital dan penciptaan nilai tambah lokal akan sangat terbatas.

Kinerja pada Pilar 6 (Keterampilan) dan Pilar 5 (Kesehatan) masing-masing menunjukkan skor 3,22 dan 3,41, mendekati atau melampaui rata-rata provinsi, menandakan bahwa aspek pembangunan manusia relatif mulai menunjukkan kemajuan. Hal ini menjadi pijakan strategis untuk penguatan kualitas SDM secara menyeluruh, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal. Ketiadaan skor agregat pada tingkat kabupaten bukan semata-mata masalah teknis pelaporan data, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural dalam tata kelola pembangunan daerah. Ketidaksiapan sistem informasi pembangunan daerah, minimnya kapasitas birokrasi dalam pengumpulan dan validasi data, serta lemahnya koordinasi lintas sektor menjadi tantangan nyata yang perlu segera ditangani.

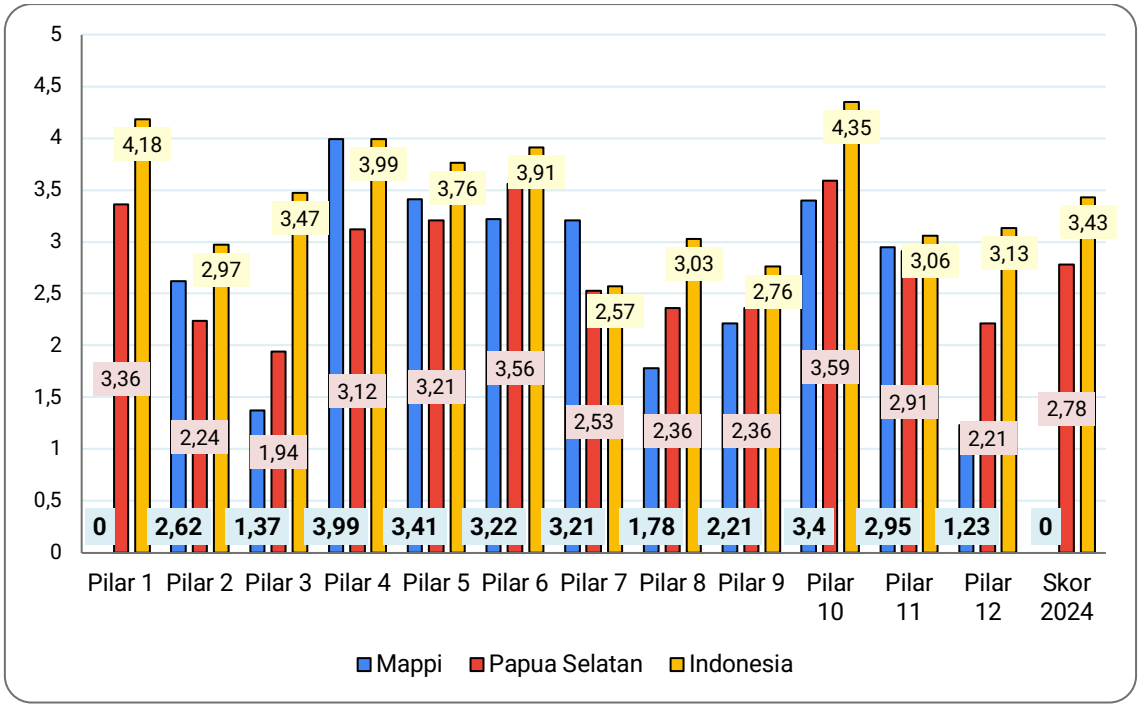

Gambar 2. 44 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, dan Indonesia Tahun 2024

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Keterangan:

Pilar 1	*Institusi*	***Pilar 7***	*Pasar Produk*
Pilar 2	*Infrastruktur*	***Pilar 8***	*Pasar Tenaga Kerja*
Pilar 3	*Adopsi TIK*	***Pilar 9***	*Sistem Keuangan*
Pilar 4	*Stabilitas Ekonomi Makro*	***Pilar 10***	*Ukuran Pasar*
Pilar 5	*Kesehatan*	***Pilar 11***	*Dinamisme Bisnis*
Pilar 6	*Keterampilan*	***Pilar 12***	*Kapabilitas Inovasi*

Berdasarkan grafik Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024 untuk wilayah Papua Selatan, seluruh kota/kabupaten, termasuk Kabupaten Mappi, Boven Digoel, Asmat, dan Merauke, belum memiliki skor komposit IDSD 2024 (Skor 2024 = 0). Hal ini mencerminkan bahwa belum ada daerah yang memenuhi ambang batas minimum dari seluruh pilar untuk dapat dihitung skor agregat daya saingnya secara menyeluruh. Dalam perbandingan antar pilar, Kabupaten Mappi menunjukkan performa cukup baik pada Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro) dengan skor 3,99, hanya sedikit di bawah Boven Digoel (4,27), dan lebih tinggi dari Asmat (3,85) serta Merauke (3,78). Kinerja positif juga terlihat pada Pilar 5 (Kesehatan) dan Pilar 6 (Keterampilan), di mana Kabupaten Mappi mencatat skor masing-masing 3,41 dan 3,22, bersaing dengan kabupaten lainnya.

Namun, klaim keunggulan Mappi pada Pilar 7 (Pasar Produk) tidak didukung data. Meskipun memperoleh skor 3,21, nilai tersebut masih lebih rendah dari Asmat yang mencatat skor tertinggi sebesar 4,08, meskipun tetap lebih tinggi dibanding Boven Digoel (2,00) dan Merauke (0,59). Sebaliknya, tantangan utama Mappi terlihat pada Pilar 3 (Adopsi TIK) dan Pilar 12 (Kapabilitas Inovasi). Skor masing-masing hanya 1,37 dan 1,23, menunjukkan perlunya peningkatan signifikan dalam aspek teknologi dan inovasi. Sementara Merauke unggul jauh pada Pilar 12 dengan skor 2,84, menandakan kesenjangan inovasi yang cukup lebar antarwilayah.

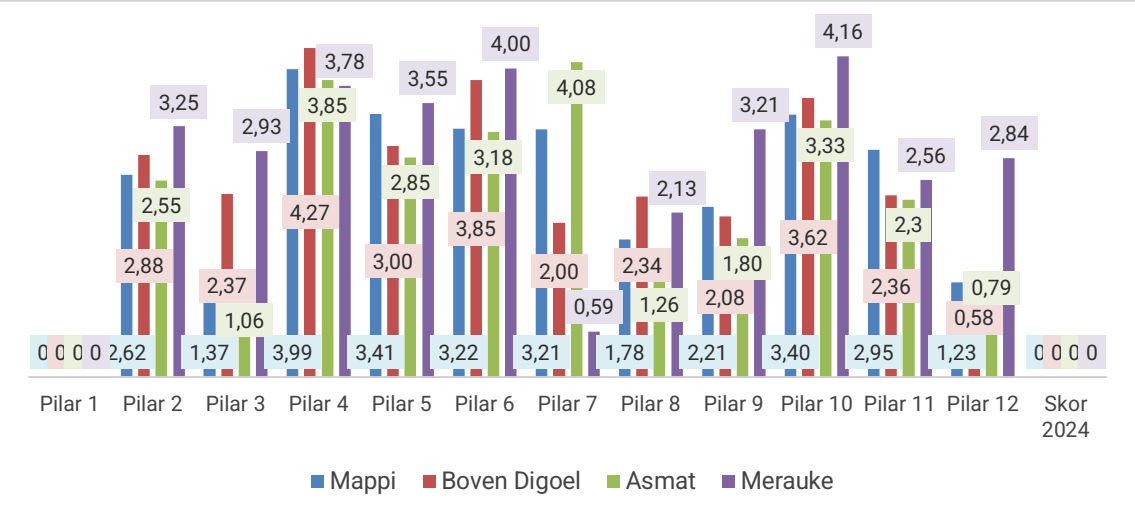

Gambar 2. 45 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, dan Indonesia Tahun 2024

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Keterangan:

Pilar 1	*Institusi*	***Pilar 7***	*Pasar Produk*
Pilar 2	*Infrastruktur*	***Pilar 8***	*Pasar Tenaga Kerja*
Pilar 3	*Adopsi TIK*	***Pilar 9***	*Sistem Keuangan*
Pilar 4	*Stabilitas Ekonomi Makro*	***Pilar 10***	*Ukuran Pasar*
Pilar 5	*Kesehatan*	***Pilar 11***	*Dinamisme Bisnis*
Pilar 6	*Keterampilan*	***Pilar 12***	*Kapabilitas Inovasi*

Secara umum, Kabupaten Mappi berada dalam posisi Tengah tidak selalu menjadi yang terendah, namun juga belum dapat menunjukkan dominasi pada pilar-pilar strategis. Peningkatan daya saing ke depan perlu difokuskan pada pembangunan infrastruktur digital, penguatan ekosistem inovasi, dan reformasi birokrasi yang mendukung efektivitas implementasi kebijakan daerah.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Mappi perlu melakukan langkah terstruktur untuk meningkatkan kemampuan dasar institusional, termasuk membangun sistem informasi pembangunan yang andal, memperkuat kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta memastikan kehadiran data yang valid dan berkelanjutan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Intervensi pada aspek digitalisasi tata kelola, pembangunan infrastruktur dasar, dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal juga harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang. Dengan mendorong transformasi yang sistemik dan berkelanjutan, Kabupaten Mappi memiliki peluang besar untuk mengejar ketertinggalan dan memperkuat posisinya dalam dinamika pembangunan nasional.

2.1.4.4 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja urusan pemerintahan daerah dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama lima tahun terakhir di Kabupaten Mappi, yakni pada tahun 2020-2024.

Tabel 2. 40 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2021-2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
B. Indikator Kinerja Kunci (IKK)							
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
1.1. Pendidikan							
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	19,78	22,64	25,5	28,36	31,22
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	83,55	85,05	86,55	88,05	89,55
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	5,67	5,98	6,29	6,60	6,91
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	28,17	29,67	31,17	32,67	34,17
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	25,41	28,31	31,21	34,11	37,01
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	45,37	46,47	47,57	48,67	49,77

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	46,20	47,70	49,20	50,70	52,20
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%				42	59
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%				74,35	87,5
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai				70,82	68,90
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai				68,75	70,05
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai				69,18	74,30
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai				67,18	70,65
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai				57,29	61,40
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai				57,45	68,90
1.2 Kesehatan							
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang		7	8	10	2
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	17,00	16,70	16,40	16,10	15,80
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persen	0,05	2,55	5,05	7,55	19,26
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Persen	61,06	63,01	64,96	66,90	68,85
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	60,27	62,19	64,12	66,04	67,96
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	26,46	30,96	35,46	39,96	22,70
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Persen	0,07	4,07	8,07	12,07	16,07
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Persen	22,67	22,98	23,29	23,60	23,92
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	78,38	80,56	82,75	84,93	87,12
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Persen	1,11	3,11	5,11	7,11	9,11
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Persen	0,96	1,96	2,96	3,96	4,96

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Persen	50,87	53,37	55,87	58,37	60,87
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	Persen	1,36	11,36	21,36	31,36	41,36
14	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (SPM) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persen	1,84	4,84	7,84	10,84	13,84
1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	-0,04	-0,05	0,10	0,24	0,34
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	-0,19	-0,09	0,01	0,11	5.08
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	41,66	43,67	45,68	47,69	49,70
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	41,66	43,67	45,68	47,69	49,70
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	1,77	2,91	4,05	5,19	6,33
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	1,89	2,16	2,43	2,7	2,97
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	NA	NA	50,88	62,27	62,27
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	19,10	19,48	19,86	20,24	20,62
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	0	0	88	0	98

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
10	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	0	0	0	0	24
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	10	10	10	10	10
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	0	0	0	2	1
1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	0	0	0	24	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	4,00	5,50	7,00	8,50	10,00
3	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	3,2	3,7	4,2	4,7	5,2
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	22,40	22,60	22,80	23,00	23,20
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	-6,4	-2,62	1,16	4,94	8,72
1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	57,25	57,50	57,95	58,20	58,53
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	55	60	65	70	75
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	%	2	2	2	2	2
4	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	60,00	61,25	62,75	63,25	64,28
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	9,33	18,61	27,66	36,27	43,80
8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	9,33	18,61	27,66	36,27	43,80
9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	2,39	3,42	4,45	5,47	6,50
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	8,57	13,57	18,57	23,57	28,57
11	Persentase penanganan pra bencana	%	NA	62,50	50,36	60,40	0,50
12	Persentase penanganan pasca bencana	%	28,53	29,73	30,93	32,13	33,33
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	NA	50	50	50	50
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00
1.6 Sosial							
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0,29	3,79	7,29	10,79	14,29
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	34,30	37,30	40,30	43,30	34,30
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	3,80	6,60	9,40	12,20	15,00
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	25,17	26,17	27,17	28,17	29,17
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	0,53	8,73	16,93	25,13	33,33

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	6,39	6,62	6,85	7,07	7,30
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	28,53	29,73	30,93	32,13	33,33
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	0,53	8,73	16,93	25,13	33,33
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDSyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	70,76	71,26	71,76	72,26	72,76
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	16,53	20,73	24,93	29,13	33,33
12	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	22,61	23,61	24,61	25,61	26,61
13	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	22,61	23,61	24,61	25,61	26,61
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	11,00	14,50	18,00	21,50	25,00
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
2.1 Tenaga Kerja							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	NA	100	69,23	100	38,10
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	NA	11,98	24,75	29,90	5,98
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	0	0	0	0	25,79
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	NA	31,73	35,71	34,44	24,19

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	NA	75,62	28,44	40,43	27,41
2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak							
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	83,43	83,6	83,77	83,94	84,11
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
3	Persentase ARG Daerah	%	19,05	28,57	38,10	47,62	57,14
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	0,17	1,17	2,17	3,17	4,17
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	0,19	0,77	1,35	1,92	2,50
2.3 Pangan							
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	49,67	49,75	49,83	49,92	50,00
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai 0-100	31,8	38,6	45,4	52,2	59
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	4,00	5,50	7,00	8,50	10,00
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	100	100	100	100	100
2.4 Pertanahan							
1	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%	NA	100	NA	NA	NA
2	Jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	%	NA	100	100	0	100
3	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	NA	NA	NA	75	38

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
4	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	NA	NA	NA	NA	NA
5	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	NA	NA	NA	NA	NA
2.5 Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Nilai	73,87	75,50	77,13	78,76	80,39
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	%	-5,50	2,00	9,50	17,00	24,50
	Kebijakan Pengelolaan Sampah	Dokumen		1	2	2	NA
	Sarana dan Prasarana (Pengangkutan dan Pengolahan Sampah)	Unit	NA	25	33	30	30
	Anggaran Pengelolaan Sampah	Rupiah			8.054.394.192	9.569.231.500	8.827.592.000
	Sosialisasi Dan Pemahaman Pengelolaan Sampah	Kelompok	NA	NA	NA	2	2
	Nilai IKA (Indeks Kualitas Air), Komponen dari IKLH	Indeks	NA	NA	52,11	51,11	57,78
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	NA	NA	NA	NA	NA
2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	95,67	96,54	97,40	98,27	95,67
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	13,05	13,69	13,65	15,10	35,42
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	1,24	6,24	11,24	16,24	22,45
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	49,28	37,54	45,57	58,33	56,85
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	3,76	5,33	5,78	8,59	9,58
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	40,00	48,00	56,00	64,00	72,00
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	%	NA	NA	NA	NA	NA
2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Persentase peningkatan status siste	%	0	0	0	0	0
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	0,25	3,66	3,0	5,49	9,15

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	1	1	1	1	1
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	22,86	27,86	32,86	37,86	42,86
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	22,75	27,25	31,75	36,25	40,75
2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	3,35	3,44	3,53	3,62	3,71
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (MCPR)	%	0,05	0,25	0,45	0,65	0,85
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	32,49	33,11	33,72	34,34	32,49
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	87,29	83,14	78,99	74,84	70,69
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai 0-100	50,20	52,20	54,20	56,20	50,20
2.9 Perhubungan							
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	NA	0.17	0.73	0.74	0.75
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	NA	45,00	37.17	43,00	60,00
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	NA	NA	NA	NA	NA
2.10 Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	NA	90,2	80,5	97,6	97,6
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	NA	4,65	4,65	4,65	25,00
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	NA	NA	NA	NA	40,00
2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	NA	NA	NA	NA	NA
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	NA	2,31	2,07	3,82	2,55
3	Pertumbuhan Wirausaha	%	NA	NA	10,08	8,67	30,05
2.12 Penanaman Modal							
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	NA	-67	46	113	-31
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	NA	101	40	112	89
2.13 Kepemudaan dan Olahraga							
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	NA	NA	NA	66,81	67,81
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	NA	NA	NA	60,30	62,25
2.14 Statistik							
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai	NA	NA	NA	1,61	2,43
2.15 Persandian							
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	NA	NA	NA	31,15	48,25
2.16 Kebudayaan							
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	58,67	60,67	62,67	64,67	66,67
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan	%	NA	NA	NA	NA	NA
2.17 Perpustakaan							
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	46,27	48,07	49,87	51,67	53,47
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	35,47	39,97	44,47	48,97	53,47
2.18 Kearsipan							
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	1,00	4,50	8,00	11,50	15,00
3. Urusan Pilihan							
3.1 Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	± 1.120	± 1.340	± 1.580	± 1.720	± 1,850
2	Produksi Perikanan Budi Daya	%	± 12,4	± 14,7	± 16,3	± 17,9	± 19,5

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
3.2 Pariwisata							
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	0,34	0,43	0,52	0,62	0,71
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	0,34	0,43	0,52	0,62	0,71
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	0,47	2,77	5,07	7,37	9,67
3.3 Pertanian							
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	NA	NA	4,45	30,33	17,19
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	NA	NA	-33	-33	16
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	NA	NA	1,94	- 9,1	0,8
4	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%	NA	NA	8,70	92,30	745,7
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	NA	NA	NA	NA	NA
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	NA	98	88,00	85,00	96,00
3.4 Perdagangan							
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	NA	NA	NA	NA	NA
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	NA	15	18	23	33,60
3.5 Perindustrian							
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi:	%	NA	NA	NA	NA	NA
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	-2,15	1,87	3,12	3,45	3,78
3	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota	%	0,84	0,91	1,02	1,08	1,15

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
4	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Orang	± 210	± 230	± 260	± 280	± 300
5	Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota		NA	17.687.500	NA	NA	NA
6	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota		NA	20.752.400	28.373.210	14.203.540	17.890.552
7	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	NA	14,1	9,3	1,4	1,4
8	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	%	NA	NA	NA	NA	NA
9	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	%	NA	NA	NA	NA	22,12
10	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	NA	NA	NA	NA	40,48
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
4.1 Perencanaan							
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100
4.2 Keuangan							
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	NA	14,21	15,20	16,98	19,74
2	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	NA	7,41	7,14	18,88	10,39
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	NA	NA	NA	94,22	72,50
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	NA	NA	NA	8,89	7,15

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	NA	NA	NA	NA	89,62
6	Persentase Penurunan SILPA	%	NA	3,28	0,82	416,80	-49,21
4.3 Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan							
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Nilai	NA	65	68.35	72.26	73.45
4.4 Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	NA	NA	NA	15,38	23,08
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	0:00	0:00	0:00	10:10	10:10
5. Fungsi Pengawasan							
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori / Opini	NA	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai (1-5)	2	2	3	3	2
			2,77	2,77	3,059	3,086	2,77
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai (2-5)	2	2	3	3	2
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai (1-5)	NA	NA	1	2	2
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	NA	71,37	75,17	80,95	83,19
6. Fungsi Pengadaan							
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	poin	100	100	100	100	100
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	poin	0	0	0	0	3
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	poin	0	0	1	2	3
7. Hubungan dengan Perwakilan Daerah							
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100%	100%	100%	100%	100%
8. Pelayanan Publik							
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	56,93	56,93	70,5	71,27	89,62

Dalam merumuskan perencanaan ke depan, evaluasi atas pencapaian tahun-tahun ke belakang menjadi diperlukan. Hasil evaluasi atas pencapaian

perencanaan periode sebelumnya bermanfaat untuk memastikan perencanaan yang dilakukan ke depan kontekstual dan tepat dengan kondisi yang ada. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dari implementasi kebijakan ke depan. Hasil evaluasi atas capaian IKK Kabupaten Mappi tahun 2020-2024 menunjukkan capaian yang beragam. Beberapa capaian indikator yang belum optimal menggambarkan beberapa intervensi pemerintah Kabupaten Mappi yang belum efektif dalam mencapai tujuan kinerja yang diharapkan. Oleh karenanya, diperlukan rekomendasi-rekomendasi yang dirumuskan dalam perencanaan jangka menengah kali ini.

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen krusial dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Mappi 2025-2029. Selain memastikan efisiensi alokasi sumber daya dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, pengelolaan ini juga harus mempertimbangkan stabilitas serta keberlanjutan fiskal daerah. Kondisi fiskal mencerminkan kesehatan keuangan daerah, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran, serta menjadi landasan utama dalam mendukung program pembangunan selama periode RPJMD.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi Kabupaten Mappi dalam menjaga keseimbangan pendapatan dan pengeluaran serta mengelola utang secara bijaksana demi keberlanjutan keuangan jangka panjang.

Keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk aset yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Keuangan daerah berperan penting dalam mendukung pemerintahan, pelayanan publik, serta kesinambungan pembangunan daerah dan nasional.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pengelolaan keuangan dilakukan secara terintegrasi dalam APBD untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Pengelolaan ini harus dilaksanakan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung

jawab, dengan memperhatikan aspek keadilan, kepatutan, manfaat bagi masyarakat, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Bab ini menyajikan hasil analisis data realisasi APBD Kabupaten Mappi tahun 2020-2024 serta proyeksi keuangan daerah tahun 2026-2030 sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan keuangan daerah.

2.2.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir (2020-2024)

Keuangan daerah merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terintegrasi dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara hakikat, APBD berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD disusun sebagai bentuk penjabaran kuantitatif atas tujuan, sasaran, serta tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah, dalam struktur yang mencerminkan kebutuhan pendanaan berdasarkan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan riil masyarakat pada tahun anggaran tertentu.

Realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Mappi periode 2020–2024 digambarkan melalui komponen penyusun struktur APBD, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan ketiga komponen tersebut, dilakukan analisis perkembangan realisasi kinerja pelaksanaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Analisis ini diperlukan sebagai dasar untuk proyeksi keuangan daerah. Upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mappi dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja

keuangan masa lalu, yang sedang berjalan, maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Perkembangan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Mappi selama periode 2020–2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 41 Realisasi APBD Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024 (*Unaudited*)
1.	**PENDAPATAN**					
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	32.648.526.189	20.305.379.210	71.357.713.016	54.365.331.861	23.688.929.167
1.2	Pendapatan Transfer	1.167.787.684.567	1.221.219.356.946	1.386.308.191.107	1.446.900.153.047	1.348.893.057.297
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	72.637.563.532	26.134.571.000	-	1.861.991.197	9.766.385.900
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.273.073.774.287**	**1.267.659.307.156**	**1.457.665.904.123**	**1.503.127.476.105**	**1.382.348.372.364**
2.	**BELANJA**					
2.1	Belanja Operasi	743.884.649.523	689.314.105.888	801.450.808.485	890.383.565.603	951.951.471.361
2.2	Belanja Modal	218.366.398.663	241.130.117.308	370.294.703.887	406.115.628.715	319.662.812.018
2.3	Belanja Tak Terduga	48.101.574.454	45.399.206.500	12.126.887.400	1.662.215.000	-
2.4	Belanja Transfer	264.114.339.676	269.000.602.600	248.147.951.900	259.149.902.800	81.451.385.100
	JUMLAH BELANJA	**1.274.466.962.316**	**1.244.844.032.296**	**1.432.020.351.672**	**1.557.311.312.118**	**1.353.065.668.479**
	Surplus/(Defisit)	**(1.393.188.028)**	**22.815.274.860**	**25.645.552.451**	**(54.183.836.012)**	**29.282.703.886**
3.	**PEMBIAYAAN**					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	108.747.957.208	104.350.363.416	126.272.997.226	150.840.346.861	95.811.510.849
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000	845.000.000	845.000.000	845.000.000	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**106.247.957.208**	**103.505.363.416**	**125.427.997.226**	**149.995.346.861**	**95.811.510.849**
	SILPA	**104.854.769.180**	**126.320.638.276**	**151.073.549.677**	**95.811.510.849**	**125.094.214.734**

Sumber: Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi 2020-2024 & BPKAD Kabupaten Mappi, 2025

Berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mappi Tahun 2020 hingga 2024 (*unaudited*), dapat diketahui bahwa struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan/atau provinsi. Rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan tergolong kecil, bahkan menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, dengan nilai tertinggi sebesar Rp71,36 miliar pada tahun 2022 dan terendah sebesar Rp20,30 miliar pada tahun 2021.

Pendapatan transfer menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga 2023, dengan puncaknya pada tahun 2023 sebesar Rp1,45 triliun, sebelum mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi Rp1,35 triliun. Sementara itu, komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak stabil, bahkan pada tahun 2022 tercatat tidak ada realisasi pendapatan dari pos ini.

Pada sisi belanja, Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, dengan tren peningkatan setiap tahunnya dari Rp743,88 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp951,95 miliar pada tahun 2024. Belanja Modal juga mengalami peningkatan hingga tahun 2023 sebelum menurun di tahun 2024. Belanja Tak Terduga berkurang signifikan hingga menjadi nihil pada tahun 2024. Belanja Transfer menurun drastis dari Rp264,11 miliar pada tahun 2020 menjadi hanya Rp81,45 miliar pada tahun 2024.

Dari segi keseimbangan anggaran, terdapat fluktuasi posisi surplus/defisit. Kabupaten Mappi mengalami defisit pada tahun 2020 dan 2023, sementara tahun lainnya mencatat surplus. Defisit terbesar terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp54,18 miliar. Pembiayaan Netto setiap tahun menunjukkan surplus, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pembiayaan, terutama dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pun secara umum mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2023 sempat turun sebelum kembali naik pada 2024.

Secara umum, analisis ini mengindikasikan bahwa pengelolaan APBD Kabupaten Mappi masih bergantung pada transfer pusat, sementara optimalisasi pendapatan asli daerah masih menjadi tantangan. Keseimbangan belanja yang cenderung meningkat harus diimbangi dengan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah di masa mendatang.

Pertumbuhan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Mappi selama periode 2020 hingga 2024 (*unaudited*) menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada sisi pendapatan, rata-rata pertumbuhan tahunan tercatat sebesar 0,22 persen. Pendapatan mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar 8,54 persen dan kembali menurun tipis sebesar 0,43 persen pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi pertumbuhan positif sebesar 14,99 persen yang kemudian melambat menjadi 3,12 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, pendapatan kembali mengalami penurunan sebesar 8,04 persen. Berikut adalah pertumbuhan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Mappi dari tahun 2020 hingga 2024 (*unaudited*).

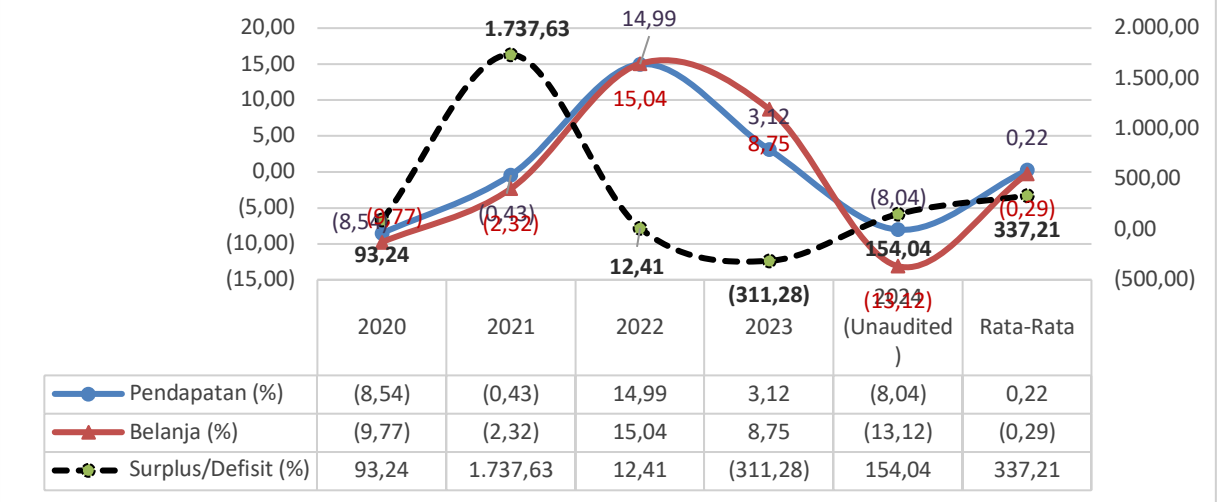

Gambar 2. 46 Pertumbuhan Pendapatan, Belanja, dan Surplus/Defisit Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Dari sisi belanja daerah, rata-rata pertumbuhan selama lima tahun tercatat negatif sebesar 0,29 persen. Belanja daerah mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 9,77 persen dan 2,32 persen. Tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 15,04 persen, diikuti pertumbuhan 8,75 persen pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 belanja kembali mengalami kontraksi sebesar 13,12 persen.

Sementara itu, surplus atau defisit APBD menunjukkan volatilitas yang sangat tinggi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 337,21 persen. Tahun 2020 mencatatkan peningkatan surplus sebesar 93,24 persen, melonjak tajam pada tahun 2021 sebesar 1.737,63 persen. Pertumbuhan ini melambat pada tahun 2022 sebesar

12,41 persen. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan tajam sebesar 311,28 persen, sebelum kembali tumbuh sebesar 154,04 persen pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa pengelolaan APBD Kabupaten Mappi dalam periode 2020–2024 menghadapi tantangan besar dalam menjaga kestabilan pendapatan, belanja, dan surplus/defisit. Fluktuasi yang tajam, terutama pada surplus/defisit, menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan, penganggaran, serta pengendalian keuangan daerah agar keberlanjutan fiskal dapat lebih terjamin di masa mendatang.

2.2.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah

Mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sumber pendapatan daerah meliputi (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; (2) pendapatan transfer, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat yang mencakup dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa/kampung; serta transfer antar daerah yang mencakup pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan; (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber-sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Tabel 2. 42 Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024 (*Unaudited*)
1	**PENDAPATAN**					
1.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**32.648.526.189**	**20.305.379.210**	**71.357.713.016**	**54.365.331.861**	**23.688.929.167**
1.1.1	Pajak Daerah	3.043.086.390	3.401.295.479	3.284.646.977	3.232.551.627	3.201.094.343
1.1.2	Retribusi Daerah	982.750.333	616.859.652	732.979.428	947.252.550	989.643.403
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.118.041.992	2.667.418.454	42.427.315.959	25.896.260.973	3.368.311.374
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	26.504.647.474	13.619.805.625	24.912.770.652	24.289.266.711	16.129.880.047
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.167.787.684.567**	**1.221.219.356.946**	**1.386.308.191.107**	**1.446.900.153.047**	**1.348.893.057.297**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**1.094.549.702.652**	**1.121.579.329.250**	**1.371.636.218.140**	**1.434.592.359.889**	**1.327.789.433.255**
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	10.570.576.461	13.714.055.904	12.682.267.534	7.771.735.950	4.013.954.250
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	34.931.434.914	28.600.177.301	98.840.351.718	34.754.884.050	17.217.118.772
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	706.979.710.000	697.309.133.000	696.489.858.584	727.045.661.449	757.072.010.100
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	134.530.953.267	159.199.694.562	178.934.402.998	136.013.054.140	127.465.939.954
1.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	19.161.347.010	29.336.273.483	56.798.304.306	100.198.949.300	51.184.036.179
1.2.1.6	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur			153.511.592.000	238.884.479.000	288.410.633.000
1.2.1.7	Dana Desa	188.375.681.000	193.419.995.000	174.379.441.000	177.422.554.000	82.425.741.000
1.2.1.8	Dana Insentif			-	12.501.042.000	
1.2.2	**Transfer antar – daerah**	**73.237.981.915**	**99.640.027.696**	**14.671.972.967**	**12.307.793.158**	**21.103.624.042**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	11.552.204.483	16.106.323.998	14.671.972.967	7.437.793.158	21.103.624.042
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	61.685.777.432	83.533.703.698	-	4.870.000.000	
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**72.637.563.532**	**26.134.571.000**	**-**	**1.861.991.197**	**9.766.385.900**
1.3.1	Pendapatan Hibah	20.137.563.532				
1.3.2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	52.500.000.000	26.134.571.000		1.861.991.197	9.766.385.900
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.273.073.774.287**	**1.267.659.307.156**	**1.457.665.904.123**	**1.503.127.476.105**	**1.382.348.372.364**

Sumber:Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi, 2020-2024

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Mappi pada tahun 2020 hingga 2024 (*unaudited*) menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, total pendapatan tercatat sebesar Rp1.273,07 miliar dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp1.267,66 miliar. Namun, pada tahun 2022, pendapatan meningkat menjadi Rp1.457,67 miliar dan kembali bertambah pada tahun 2023 menjadi Rp1.503,13 miliar. Pada tahun 2024 (*unaudited*), pendapatan daerah mengalami penurunan menjadi Rp1.382,35 miliar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami perubahan yang cukup drastis selama periode tersebut. Pada tahun 2020, PAD sebesar Rp32,65 miliar menurun tajam pada tahun 2021 menjadi Rp20,31 miliar, lalu melonjak pada tahun 2022 menjadi Rp71,36 miliar. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, PAD kembali menurun masing-masing menjadi Rp54,37 miliar dan Rp23,69 miliar. Fluktuasi ini disebabkan oleh ketidakstabilan pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang mencapai puncaknya di tahun 2022.

Pendapatan transfer menjadi komponen dominan dalam struktur pendapatan daerah, berkisar lebih dari 90% setiap tahunnya. Sumber utama transfer berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non-fisik. Dana Otonomi Khusus menunjukkan peningkatan yang cukup besar dari tahun 2022 hingga 2024, menggambarkan ketergantungan Pemerintah Kabupaten Mappi pada transfer pusat untuk membiayai belanja daerah.

Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan tajam dari Rp72,64 miliar pada tahun 2020 menjadi hanya Rp9,77 miliar pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan berkurangnya sumber pendapatan non-rutin yang dapat mempengaruhi fleksibilitas keuangan daerah.

Secara keseluruhan, komposisi pendapatan Pemerintah Kabupaten Mappi masih sangat bergantung pada pendapatan transfer, dengan kontribusi PAD yang relatif kecil dan fluktuatif. Hal ini mencerminkan pentingnya upaya peningkatan kapasitas PAD untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di masa mendatang.

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Mappi selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap

pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun antar daerah. Berdasarkan data, rata-rata proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah mencapai 95,40 persen. Angka ini menandakan bahwa sebagian besar pembiayaan daerah bersumber dari dana transfer, dengan kontribusi tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar 97,58 persen.

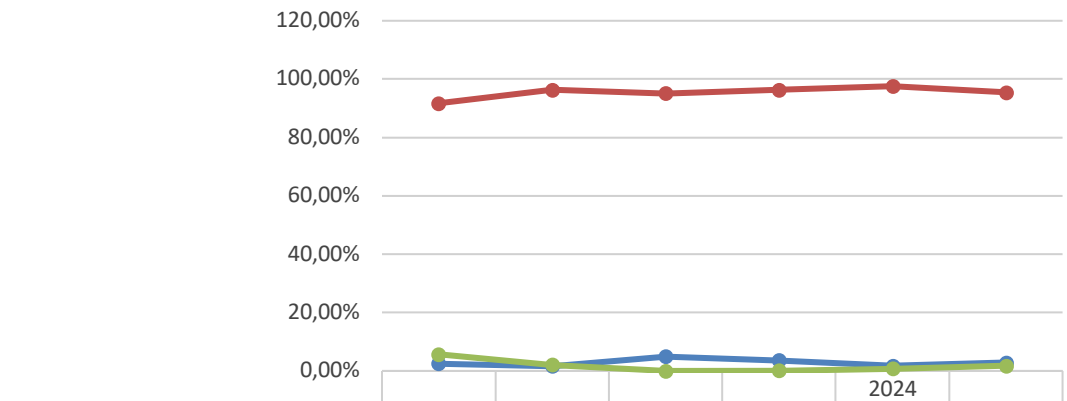

	2020	2021	2022	2023	2024 (Unaudited)	Rata-rata
PAD	2,56%	1,60%	4,90%	3,62%	1,71%	2,88%
Pendapatan Transfer	91,73%	96,34%	95,10%	96,26%	97,58%	95,40%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	5,71%	2,06%	0,00%	0,12%	0,71%	1,72%

Gambar 2. 47 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah, dengan rata-rata hanya sebesar 2,88 persen selama lima tahun terakhir. Proporsi PAD tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 4,90 persen, namun kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mappi dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal.

Adapun komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah juga menunjukkan tren penurunan, dari 5,71 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 0,71 persen pada tahun 2024. Rata-rata kontribusi komponen ini selama lima tahun tercatat sebesar 1,72 persen, yang menandakan bahwa sumber pendapatan selain PAD dan transfer masih sangat terbatas.

Secara keseluruhan, pola proporsi ini menegaskan pentingnya upaya peningkatan PAD sebagai bagian dari strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih mandiri dan efektif di Kabupaten Mappi.

Untuk derajat kemandirian fiskal (DDF) daerah ditunjukkan oleh proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan. Kemandirian fiskal daerah dikelompokkan menjadi: (1) Sangat Kurang (DDF ≤ 10,00); (2) Kurang (10,00 < DDF ≤ 20,00); (3) Sedang (20,00 < DDF ≤ 30,00); (4) Cukup Baik (30,00 < DDF ≤ 40,00); (5) Baik (40,00 < DDF ≤ 50,00); dan (6) Sangat Baik (DDF > 50,00). Semakin besar angka proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah maka kemandirian daerah semakin besar. Berikut adalah grafik derajat kemandirian daerah Kabupaten Mappi 2020-2024.

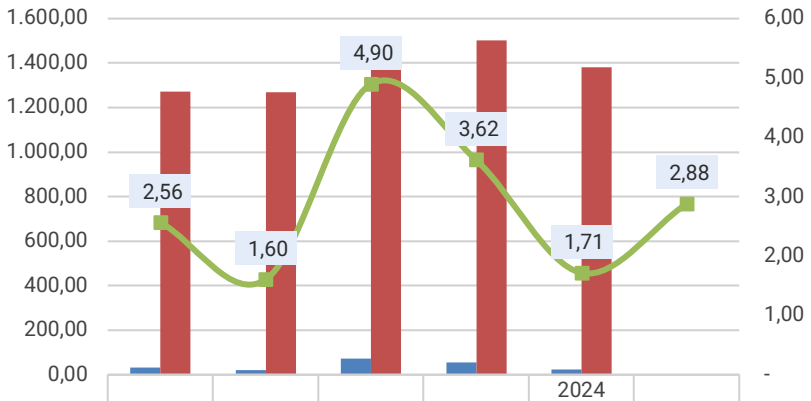

	2020	2021	2022	2023	2024 (Unaudited)	Rata-rata
PAD (Miliar)	32,65	20,31	71,36	54,37	23,69	
TOTAL PENDAPATAN DAERAH (Miliar)	1.273,07	1.267,66	1.457,67	1.503,13	1.382,35	
Derajat Kemandirian Fiskal (DDF)	2,56	1,60	4,90	3,62	1,71	2,88

Gambar 2. 48 Derajat Desentralisasi Fiskal (Kemandirian) Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Berdasarkan data Derajat Kemandirian Fiskal (DDF) Pemerintah Kabupaten Mappi selama periode 2020 hingga 2024 (*unaudited*), terlihat bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut masih berada pada kategori "Sangat Kurang". Rata-rata DDF selama lima tahun tersebut hanya sebesar 2,88 persen.

Pada tahun 2020, DDF tercatat sebesar 2,56 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 1,60 persen pada tahun 2021. Walaupun pada tahun 2022 terdapat peningkatan menjadi 4,90 persen, angka tersebut masih jauh dari batas minimal kategori "Kurang" (10,01 persen). Selanjutnya, DDF kembali menurun menjadi 3,62 persen pada tahun 2023 dan 1,71 persen pada tahun 2024 berdasarkan data *unaudited*.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Mappi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Kondisi ini mencerminkan rendahnya kapasitas fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan penerimaan PAD, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, guna memperkuat kemandirian fiskal di masa mendatang.

Rasio Ketergantungan (RK) Fiskal suatu daerah dihitung berdasarkan proporsi dana transfer ditambah dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini dikelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu: (1) Sangat Rendah (RK ≤ 10,00); (2) Rendah (10,00 < RK ≤ 20,00); (3) Sedang (20,00 < RK ≤ 30,00); (4) Cukup Tinggi (30,00 < RK ≤ 40,00); (5) Tinggi (40,00 < RK ≤ 50,00); dan (6) Sangat Tinggi (RK > 50,00). Semakin tinggi angka RK, semakin besar ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Berikut adalah grafik rasio ketergantungan daerah Kabupaten Mappi 2020-2024.

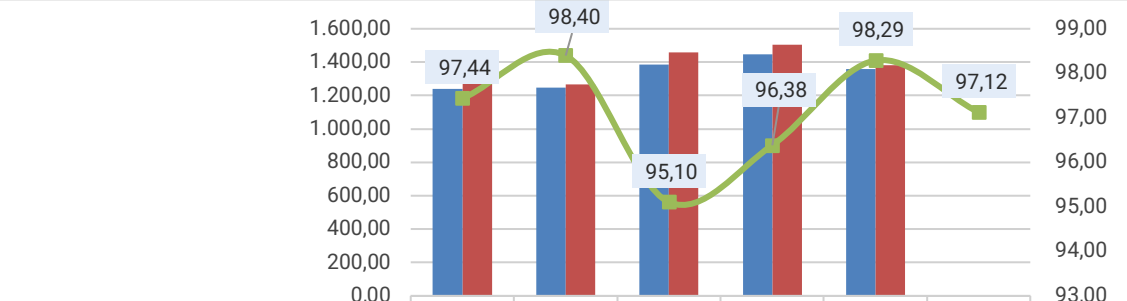

	2020	2021	2022	2023	2024 (Unaudited)	Rata-rata
Pendapatan Transfer + Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Miliar)	1.240,43	1.247,35	1.386,31	1.448,76	1.358,66	
TOTAL PENDAPATAN DAERAH (Miliar)	1.273,07	1.267,66	1.457,67	1.503,13	1.382,35	
Rasio Ketergantungan (RK)	97,44	98,40	95,10	96,38	98,29	97,12

Gambar 2. 49 Rasio Ketergantungan (RK) Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Berdasarkan data Rasio Ketergantungan Fiskal (RK) Pemerintah Kabupaten Mappi selama periode 2020 hingga 2024 (*unaudited*), diketahui

bahwa tingkat ketergantungan fiskal daerah ini tergolong dalam kategori "Sangat Tinggi". Rata-rata RK selama lima tahun tersebut tercatat sebesar 97,12 persen.

Pada tahun 2020, RK tercatat sebesar 97,44 persen, kemudian meningkat menjadi 98,40 persen pada tahun 2021. Meskipun pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 95,10 persen, angka tersebut tetap berada dalam kategori ketergantungan "Sangat Tinggi". Selanjutnya, RK meningkat kembali menjadi 96,38 persen pada tahun 2023 dan mencapai 98,29 persen pada tahun 2024 berdasarkan data *unaudited*.

Tingginya rasio ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan Pemerintah Kabupaten Mappi masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketergantungan fiskal yang sangat tinggi ini menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Untuk itu, diperlukan strategi konkret dalam memperkuat kapasitas pendapatan asli daerah (PAD) serta mengembangkan potensi ekonomi lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap bantuan eksternal di masa mendatang.

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mappi yang meningkat memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1), terdapat empat sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah. Untuk memahami realisasi masing-masing sumber pendapatan daerah, berikut disajikan data realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mappi tahun 2020-2024.

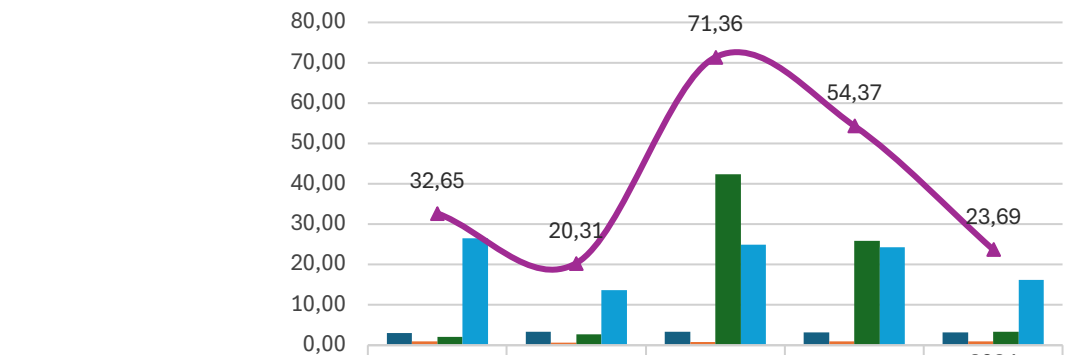

	2020	2021	2022	2023	2024 (Unaudited)
Pajak Daerah (Miliar)	3,04	3,40	3,28	3,23	3,20
Retribusi Daerah (Miliar)	0,98	0,62	0,73	0,95	0,99
HPKD yang Dipisahkan (Miliar)	2,12	2,67	42,43	25,90	3,37
Lain-lain PAD Yang Sah (Miliar)	26,50	13,62	24,91	24,29	16,13
TOTAL PAD (Miliar)	32,65	20,31	71,36	54,37	23,69

Gambar 2. 50 Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Berdasarkan data komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2020 hingga 2024 (*unaudited*), terlihat bahwa struktur PAD masih didominasi oleh komponen Lain-lain PAD yang Sah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKD).

Pada tahun 2020, total PAD tercatat sebesar Rp32,65 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp26,50 miliar. Pada tahun 2021, total PAD mengalami penurunan menjadi Rp20,31 miliar, yang juga didominasi oleh "Lain-lain PAD yang Sah" meskipun jumlahnya berkurang drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana total PAD melonjak menjadi Rp71,36 miliar. Lonjakan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari HPKD yang mencapai Rp42,43 miliar. Namun, tren ini tidak berlanjut pada tahun 2023 dan 2024, di mana total PAD masing-masing tercatat sebesar Rp54,37 miliar dan Rp23,69 miliar. Penurunan tersebut juga diikuti oleh turunnya kontribusi HPKD secara tajam, kembali mendekati level normal sebagaimana pada tahun-tahun sebelum 2022.

Sementara itu, penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang periode tersebut cenderung stabil, namun masih berkontribusi relatif

kecil terhadap total PAD. Pajak Daerah berada pada kisaran Rp3 miliar hingga Rp3,4 miliar setiap tahun, sedangkan Retribusi Daerah berada di bawah Rp1 miliar setiap tahunnya.

Kondisi ini mencerminkan bahwa ketergantungan terhadap komponen Lain-lain PAD yang Sah dan HPKD cukup tinggi, sementara potensi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum dioptimalkan. Untuk memperkuat struktur PAD secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Mappi perlu mengembangkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Untuk memberikan gambaran mengenai dinamika pertumbuhan pendapatan asli daerah, berikut disajikan data pertumbuhan dari masing-masing komponen PAD tahun 2020-2024.

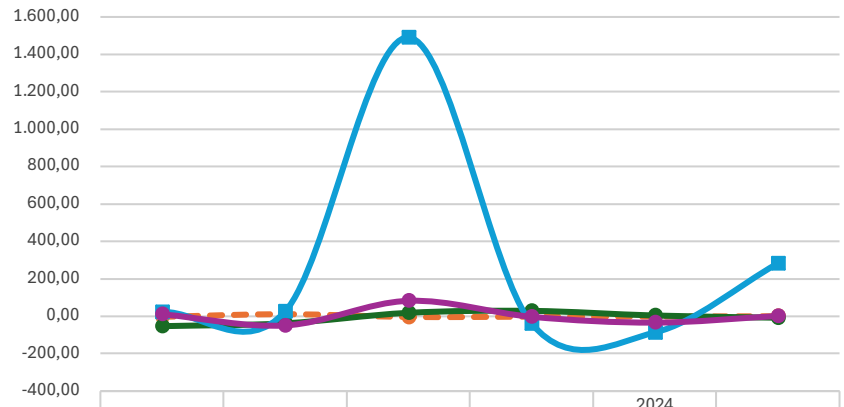

	2020	2021	2022	2023	2024 (Unaudited)	Rata-Rata
Pajak Daerah (%)	-2,57	11,77	-3,43	-1,59	-0,97	0,64
Retribusi Daerah (%)	-52,47	-37,23	18,82	29,23	4,48	-7,43
Hasil PKD yang Dipisahkan (%)	23,78	25,94	1.490,58	-38,96	-86,99	282,87
Lain-lain PAD yang Sah (%)	11,10	-48,61	82,92	-2,50	-33,59	1,86

Gambar 2. 51 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data pertumbuhan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Mappi dari tahun 2020 hingga 2024 (*unaudited*), terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan di hampir semua komponen pendapatan. Pertumbuhan Pajak Daerah selama periode tersebut menunjukkan dinamika yang relatif stabil, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,64 persen. Meskipun sempat mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2021 sebesar 11,77 persen, Pajak Daerah kembali mengalami kontraksi pada tahun-tahun berikutnya. Secara

umum, pertumbuhan Pajak Daerah menunjukkan tren yang kurang konsisten dan cenderung stagnan.

Retribusi Daerah mengalami pertumbuhan negatif yang cukup dalam pada tahun 2020 dan 2021, masing-masing sebesar -52,47 persen dan -37,23 persen. Namun, terdapat perbaikan pada tahun 2022 dan 2023, dengan pertumbuhan positif sebesar 18,82 persen dan 29,23 persen. Pada tahun 2024, pertumbuhan masih positif sebesar 4,48 persen. Secara rata-rata, Retribusi Daerah mengalami pertumbuhan negatif sebesar -7,43 persen, mencerminkan perlunya upaya peningkatan kinerja pemungutan retribusi.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKD) menunjukkan volatilitas yang sangat tinggi. Pada tahun 2022, HPKD mencatat lonjakan pertumbuhan sebesar 1.490,58 persen, yang merupakan anomali dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Namun, setelahnya terjadi penurunan tajam masing-masing sebesar -38,96 persen pada tahun 2023 dan -86,99 persen pada tahun 2024. Secara rata-rata, HPKD mencatat pertumbuhan positif sebesar 282,87 persen, namun angka ini dipengaruhi oleh lonjakan luar biasa pada tahun 2022.

Komponen Lain-lain PAD yang Sah menunjukkan pertumbuhan yang juga berfluktuasi. Setelah mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,10 persen pada tahun 2020, pertumbuhan komponen ini turun drastis menjadi -48,61 persen pada tahun 2021, kemudian kembali melonjak sebesar 82,92 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024, pertumbuhan kembali negatif. Secara rata-rata, Lain-lain PAD yang Sah mencatat pertumbuhan sebesar 1,86 persen.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa struktur pertumbuhan PAD Kabupaten Mappi masih sangat fluktuatif dan bergantung pada beberapa komponen tertentu, terutama HPKD dan Lain-lain PAD yang Sah. Fluktuasi yang tinggi ini menunjukkan pentingnya upaya stabilisasi dan diversifikasi sumber-sumber PAD agar dapat mendukung kemandirian fiskal daerah secara lebih berkelanjutan.

Untuk memahami kontribusi masing-masing komponen terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD), berikut disajikan grafik proporsi komponen PAD terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2020-2024.

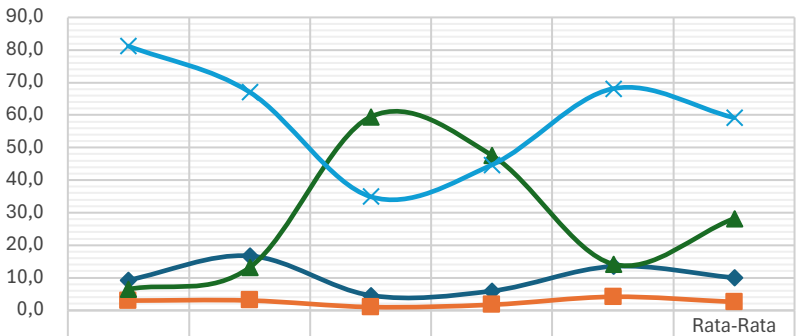

	2020	2021	2022	2023	2024 (Unaudited)	Rata-Rata Kontribusi Per Tahun (%)
Pajak Daerah (%)	9,3	16,8	4,6	5,9	13,5	10,0
Retribusi Daerah (%)	3,0	3,0	1,0	1,7	4,2	2,6
Hasil PKD yang Dipisahkan (%)	6,5	13,1	59,5	47,6	14,2	28,2
Lain-lain PAD yang Sah (%)	81,2	67,1	34,9	44,7	68,1	59,2

Gambar 2. 52 Proporsi Komponen PAD, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Berdasarkan data proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2020 hingga 2024 (*unaudited*), terlihat bahwa struktur PAD masih sangat bergantung pada kategori Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kontribusi komponen ini rata-rata mencapai 59,2 persen per tahun, dengan proporsi tertinggi sebesar 81,2 persen pada tahun 2020 dan terendah sebesar 34,9 persen pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah masih menjadi penopang utama PAD Kabupaten Mappi.

Sementara itu, kontribusi Pajak Daerah terhadap total PAD rata-rata sebesar 10,0 persen. Meskipun terdapat peningkatan pada tahun 2021 sebesar 16,8 persen, secara umum kontribusi Pajak Daerah masih relatif rendah dan fluktuatif sepanjang periode pengamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan dari sektor perpajakan daerah belum dimanfaatkan secara optimal.

Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang paling kecil terhadap total PAD, dengan rata-rata hanya sebesar 2,6 persen per tahun. Proporsi tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar 4,2 persen, sementara proporsi terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 1,0 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan dari retribusi pelayanan umum daerah masih sangat terbatas dan membutuhkan upaya intensif untuk peningkatan.

Adapun kontribusi dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKD) menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Rata-rata kontribusi HPKD mencapai 28,2 persen, dengan puncaknya pada tahun 2022 sebesar 59,5 persen. Peningkatan kontribusi HPKD dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa investasi modal mulai memberikan sumbangan yang lebih berarti terhadap PAD, meskipun stabilitas kontribusi ini masih perlu dijaga melalui pengelolaan aset daerah yang lebih profesional dan produktif.

Secara keseluruhan, struktur PAD Kabupaten Mappi masih belum seimbang dan sangat bergantung pada komponen Lain-lain PAD yang Sah. Oleh karena itu, diperlukan strategi diversifikasi sumber PAD melalui optimalisasi sektor perpajakan, retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal secara berkelanjutan.

2. Pendapatan Transfer

Dalam sistem keuangan daerah, pendapatan transfer merupakan salah satu sumber utama penerimaan yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan transfer terdiri atas transfer dari Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Transfer dari Pemerintah Pusat mencakup dana perimbangan, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa/kampung.

Sementara itu, transfer antar-daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan bagi hasil merupakan penerimaan yang dibagikan antar-pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sedangkan bantuan keuangan adalah alokasi dana yang diberikan oleh satu pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu. Secara keseluruhan, pendapatan transfer berperan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar-daerah serta memastikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Besarnya transfer dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum mampu memenuhi kebutuhan fiskalnya. Kapasitas fiskal yang rendah dapat disebabkan oleh rendahnya kontribusi pajak dalam pembiayaan daerah serta adanya disparitas jumlah penduduk, kondisi geografis yang mempengaruhi biaya operasional, dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Dominasi transfer dalam pendapatan daerah diharapkan dapat dialokasikan secara optimal ke sektor-sektor produktif guna mendorong investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kebutuhan daerah dapat meningkat secara berkelanjutan.

Berdasarkan data realisasi pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Mappi dari tahun 2020 hingga 2024 (*unaudited*), terlihat bahwa pendapatan

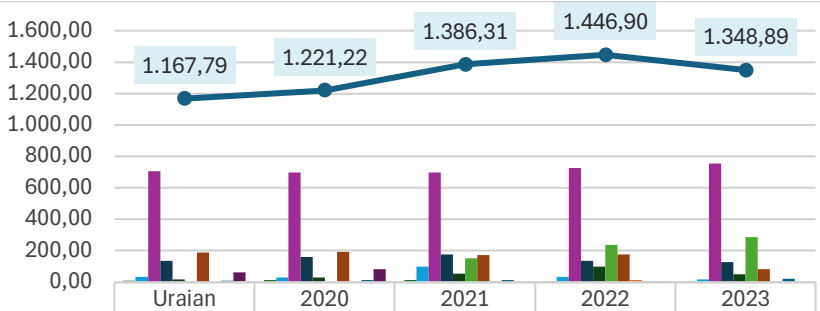

Uraian	2020	2021	2022	2023
DBH Pajak (Miliar)	10,57	13,71	12,68	7,77	4,01
DBH Bukan Pajak/SDA (Miliar)	34,93	28,60	98,84	34,75	17,22
DAU (Miliar)	706,98	697,31	696,49	727,05	757,07
DAK Fisik (Miliar)	134,53	159,20	178,93	136,01	127,47
DAK Non Fisik (Miliar)	19,16	29,34	56,80	100,20	51,18
Dana Otsus &DTI (Miliar)	0,00	0,00	153,51	238,88	288,41
Dana Desa (Miliar)	188,38	193,42	174,38	177,42	82,43
Dana Insentif (Miliar)	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
Bagi Hasil-Provinsi(Miliar)	11,55	16,11	14,67	7,44	21,10
Bantuan Keuangan-Provinsi (Miliar)	61,69	83,53	0,00	4,87	0,00
PENDAPATAN TRANSFER (Miliar)	1.167,79	1.221,22	1.386,31	1.446,90	1.348,89

Gambar 2. 53 Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Berdasarkan data realisasi komponen pendapatan transfer Kabupaten Mappi dari tahun 2020 hingga 2024 (*unaudited*), terlihat adanya fluktuasi yang signifikan dalam beberapa komponen pendapatan transfer. Total pendapatan

transfer pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.167,79 miliar, dan meningkat hingga mencapai Rp1.446,90 miliar pada tahun 2023, sebelum turun menjadi Rp1.348,89 miliar pada tahun 2024 (*unaudited*). Kenaikan ini terutama didorong oleh beberapa komponen utama, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen terbesar dalam pendapatan transfer, dengan rata-rata kontribusi yang cukup stabil, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp697,31 miliar, sebelum kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai Rp757,07 miliar pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat, yang memberikan alokasi terbesar bagi Pemerintah Kabupaten Mappi.

Sementara itu, Dana Otsus dan DTI yang baru mulai tercatat pada tahun 2022 mengalami lonjakan yang signifikan, dari Rp153,51 miliar di tahun 2022 menjadi Rp288,41 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan alokasi dana untuk daerah-daerah tertentu, seperti Kabupaten Mappi, yang memiliki kewenangan khusus dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).

Dana desa/kampung, yang berfungsi untuk mendukung pembangunan di tingkat desa/kampung, juga menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021, dana desa/kampung tercatat cukup tinggi, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2024, dengan angka hanya Rp82,43 miliar, yang perlu diperhatikan dalam rangka mendukung pembangunan desa/kampung yang berkelanjutan.

Komponen lainnya seperti DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak/SDA menunjukkan fluktuasi yang tajam. DBH Pajak yang semula relatif rendah, hanya sekitar Rp10 miliar pada tahun 2020 dan 2021, menurun signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, DBH Bukan Pajak/SDA mengalami lonjakan yang signifikan pada tahun 2022, dengan Rp98,84 miliar, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi hanya Rp17,22 miliar.

Komponen Dana Insentif yang muncul pada tahun 2023 dan tercatat sebesar Rp12,50 miliar, namun tidak terlihat adanya realisasi lebih lanjut pada

tahun 2024. Hal ini mungkin menunjukkan ketidakpastian atau ketergantungan pada kebijakan insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Secara keseluruhan, Kabupaten Mappi menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, terutama DAU dan Dana Otsus dan DTI. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer eksternal dan mendorong kemandirian fiskal yang lebih baik.

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen terhadap total Pendapatan Transfer, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen total Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2020-2024.

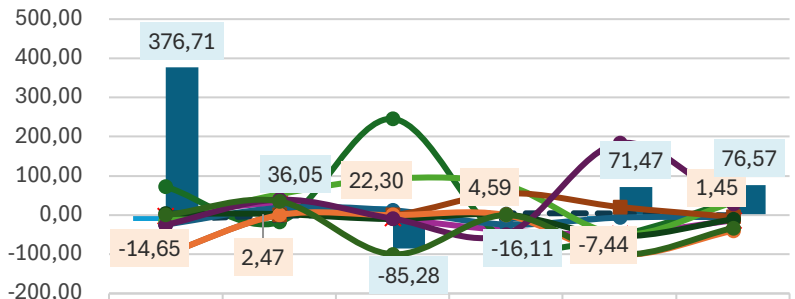

	2020	2021	2022	2023	2024 (Unaudited)	Rata-Rata
Transfer Pemerintah Pusat (%)	-14,65	2,47	22,30	4,59	-7,44	1,45
Transfer antar – daerah (%)	376,71	36,05	-85,28	-16,11	71,47	76,57
DBH Pajak (%)	-2,23	29,74	-7,52	-38,72	-48,35	-13,42
DBH Bukan Pajak/SDA(%)	72,43	-18,12	245,59	-64,84	-50,46	36,92
DAU (%)	-11,38	-1,37	-0,12	4,39	4,13	-0,87
DAK Fisik (%)	-24,31	18,34	12,40	-23,99	-6,28	-4,77
DAK Non Fisik (%)	-15,41	53,10	93,61	76,41	-48,92	31,76
Dana Otsus dan DTI (%)	-100,00	0,00	0,00	55,61	20,73	-4,73
Dana Desa (%)	4,12	2,68	-9,84	1,75	-53,54	-10,97
Dana Insentif (%)	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-40,00
Pendapatan Bagi Hasil (%)	-24,81	39,42	-8,91	-49,31	183,74	28,03
Bantuan Keuangan (%)	0,00	35,42	-100,00	0,00	-100,00	-32,92

Gambar 2. 54 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Berdasarkan data pertumbuhan komponen pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2020 hingga 2024 (*unaudited*), terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan dalam berbagai sumber pendapatan transfer. Secara umum, pertumbuhan transfer dari pemerintah pusat

menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,45 persen per tahun. Namun, pertumbuhan ini mengalami fluktuasi, dengan penurunan tajam pada tahun 2020 sebesar -14,65 persen dan penurunan kembali pada tahun 2024 sebesar -7,44 persen.

Komponen Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak mengalami tren penurunan yang konsisten, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -13,42 persen. Penurunan yang paling tajam terjadi pada tahun 2024, yakni sebesar -48,35 persen. Hal serupa juga terjadi pada DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA), yang meskipun sempat melonjak tajam sebesar 245,59 persen pada tahun 2022, mengalami penurunan tajam pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar -64,84 persen dan -50,46 persen. Meski demikian, secara rata-rata, DBH Bukan Pajak/SDA masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 36,92 persen.

Dana Alokasi Umum (DAU) relatif stabil dengan fluktuasi kecil, tercermin dari rata-rata pertumbuhan sebesar -0,87 persen. Setelah mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021, DAU kembali mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2023 dan 2024. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik menunjukkan pola pertumbuhan yang lebih berfluktuasi. DAK Fisik mencatat rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -4,77 persen, sedangkan DAK Non Fisik justru menunjukkan pertumbuhan rata-rata positif sebesar 31,76 persen, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan 2023.

Komponen Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) mencerminkan pertumbuhan yang belum stabil. Pada tahun 2020, Dana Otsus dan DTI tidak direalisasikan (penurunan -100 persen), tetapi sejak tahun 2023 terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 55,61 persen. Secara rata-rata, pertumbuhan Dana Otsus dan DTI masih mencatatkan angka negatif sebesar -4,73 persen.

Dana Desa/kampung juga mengalami fluktuasi, dengan pertumbuhan positif kecil pada awal periode, namun penurunan yang sangat tajam terjadi pada tahun 2024 sebesar -53,54 persen. Secara rata-rata, Dana Desa mengalami pertumbuhan negatif sebesar -10,97 persen per tahun. Sementara itu, Dana Insentif mengalami stagnasi, dengan realisasi yang tidak stabil dan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -40,00 persen.

Dari sisi transfer antar daerah, rata-rata pertumbuhan tercatat cukup tinggi sebesar 76,57 persen, meskipun terjadi fluktuasi yang ekstrem antar tahun. Pendapatan dari Bagi Hasil Provinsi menunjukkan pertumbuhan positif rata-rata sebesar 28,03 persen, didukung oleh lonjakan besar sebesar 183,74 persen pada tahun 2024. Namun, untuk Bantuan Keuangan dari Provinsi, rata-rata pertumbuhan justru negatif sebesar -32,92 persen, akibat adanya penghentian realisasi bantuan pada tahun 2022 dan 2024.

Secara keseluruhan, dinamika pertumbuhan pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Mappi memperlihatkan ketergantungan tinggi pada beberapa komponen utama, namun juga menunjukkan tantangan besar terkait stabilitas dan keberlanjutan pendapatan transfer, baik dari pemerintah pusat maupun antar daerah. Oleh karena itu, upaya diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan ketahanan fiskal Kabupaten Mappi di masa depan.

Untuk memahami kontribusi masing-masing komponen pendapatan transfer, berikut disajikan grafik proporsi komponen pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2020-2024.

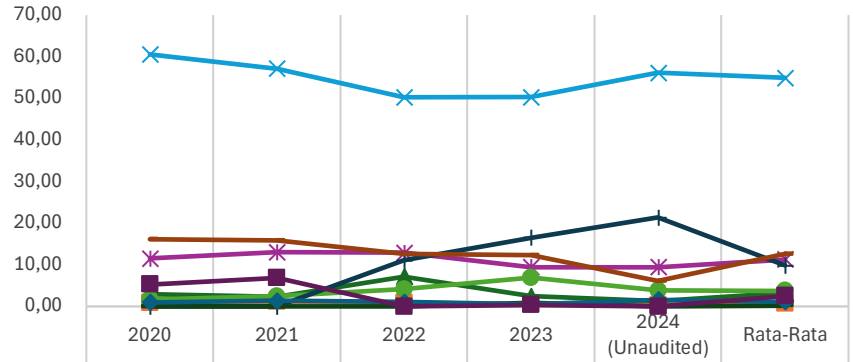

	2020	2021	2022	2023	2024 (Unaudited)	Rata-Rata
DBH Pajak (%)	0,91	1,12	0,91	0,54	0,30	0,76
DBH Bukan Pajak/SDA(%)	2,99	2,34	7,13	2,40	1,28	3,23
DAU (%)	60,54	57,10	50,24	50,25	56,13	54,85
DAK Fisik (%)	11,52	13,04	12,91	9,40	9,45	11,26
DAK Non Fisik (%)	1,64	2,40	4,10	6,93	3,79	3,77
Dana Otsus dan DTI (%)	0,00	0,00	11,07	16,51	21,38	9,79
Dana Desa (%)	16,13	15,84	12,58	12,26	6,11	12,58
Dana Insentif (%)	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,17
Pendapatan Bagi Hasil (%)	0,99	1,32	1,06	0,51	1,56	1,09
Bantuan Keuangan (%)	5,28	6,84	0,00	0,34	0,00	2,49

Gambar 2. 55 Proporsi Komponen Pendapatan Transfer, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Berdasarkan data proporsi komponen pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2020 hingga 2024 (*unaudited*), terlihat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan transfer terbesar. Rata-rata kontribusi DAU selama lima tahun tersebut mencapai 54,85 persen terhadap total pendapatan transfer, dengan proporsi tahunan yang relatif stabil, berkisar antara 50,24 persen hingga 60,54 persen. Hal ini menunjukkan ketergantungan fiskal Pemerintah Kabupaten Mappi yang sangat tinggi terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat melalui mekanisme DAU.

Sementara itu, Dana Desa/kampung menempati urutan kedua dalam hal kontribusi proporsional, dengan rata-rata sebesar 12,58 persen. Meskipun demikian, terdapat tren penurunan dalam proporsi Dana Desa/kampung, khususnya pada tahun 2024 yang hanya sebesar 6,11 persen. Penurunan ini perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap pembangunan desa/kampung dan pengurangan ketimpangan wilayah.

Komponen Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) mulai berkontribusi sejak tahun 2022 dengan tren peningkatan yang cukup signifikan, dari 11,07 persen di tahun 2022 menjadi 21,38 persen di tahun 2024. Rata-rata kontribusi Dana Otsus dan DTI mencapai 9,79 persen, mencerminkan adanya dukungan tambahan untuk percepatan pembangunan daerah khusus.

Adapun proporsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik, masing-masing berkontribusi rata-rata sebesar 11,26 persen dan 3,77 persen. DAK Fisik menunjukkan tren proporsi yang menurun tipis dari tahun ke tahun, sedangkan DAK Non Fisik mengalami kenaikan hingga tahun 2023 sebelum turun kembali pada 2024.

Komponen lain seperti Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) menunjukkan kontribusi yang relatif kecil terhadap total pendapatan transfer, masing-masing dengan rata-rata sebesar 0,76 persen dan 3,23 persen. Proporsi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari provinsi juga relatif kecil, dengan rata-rata kontribusi masing-masing 1,09 persen dan 2,49 persen. Dana Insentif menunjukkan kontribusi yang sangat minimal, dengan rata-rata hanya 0,17 persen selama periode tersebut.

Secara keseluruhan, struktur pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Mappi masih sangat bergantung pada komponen DAU, Dana Desa/kampung, serta Dana Otsus dan DTI. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Pemerintah Kabupaten Mappi perlu mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memanfaatkan potensi sumber-sumber penerimaan lain secara lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup seluruh pendapatan daerah kecuali PAD dan pendapatan transfer. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: hibah; dana darurat; dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Mappi dari tahun 2020 hingga 2024 (*unaudited*), terlihat adanya tren penurunan yang cukup tajam dalam penerimaan dari pos ini.

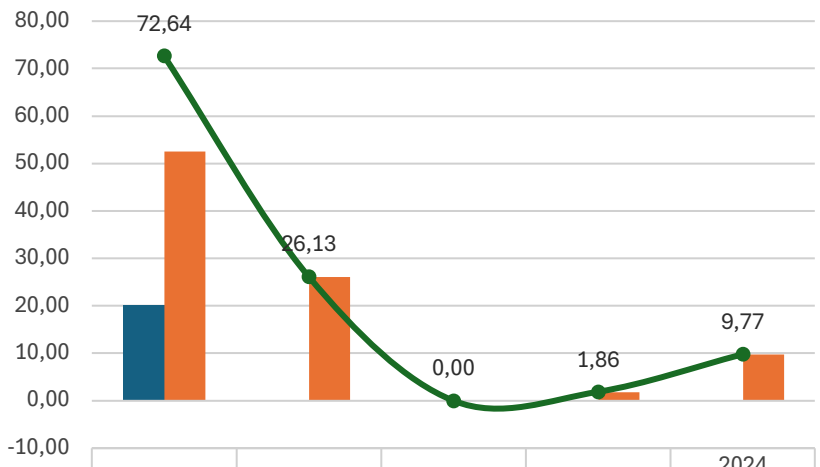

	2020	2021	2022	2023	2024 (Unaudited)
Pendapatan Hibah (Miliar)	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain pendapatan (Miliar)	52,50	26,13	0,00	1,86	9,77
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (Miliar)	72,64	26,13	0,00	1,86	9,77

Gambar 2. 56 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Pada tahun 2020, total Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tercatat sebesar Rp72,64 miliar, yang sebagian besar berasal dari pendapatan hibah sebesar Rp20,14 miliar dan lain-lain pendapatan daerah sebesar Rp52,50 miliar. Namun, mulai tahun 2021, terjadi perubahan signifikan, di mana pendapatan hibah tidak lagi tercatat, sedangkan lain-lain pendapatan daerah menurun menjadi Rp26,13 miliar.Penurunan berlanjut secara drastis pada tahun 2022, dengan tidak adanya realisasi baik dari pendapatan hibah maupun lain-lain pendapatan daerah, sehingga total realisasi menjadi Rp0,00 miliar. Pada tahun 2023, terjadi sedikit peningkatan dengan realisasi lain-lain pendapatan sebesar Rp1,86 miliar, dan pada tahun 2024 (*unaudited*) naik kembali menjadi Rp9,77 miliar. Meskipun terdapat sedikit pemulihan, nilai tersebut masih jauh di bawah capaian tahun 2020.

Tren ini mengindikasikan bahwa kontribusi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Mappi semakin menurun dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mappi perlu mengkaji potensi optimalisasi sumber-sumber lain-lain pendapatan daerah secara lebih serius guna mendukung kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen terhadap total Lain-lain pendapatan daerah yang sah, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen total Lain-lain pendapatan daerah yang sah Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2020-2024.

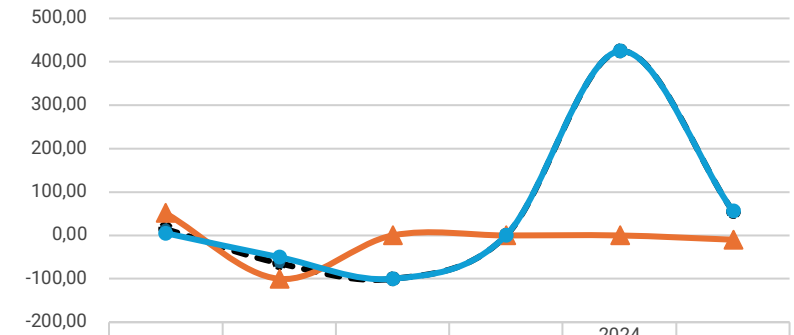

	2020	2021	2022	2023	2024 (Unaudited)	Rata-Rata
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (%)	14,68	-64,02	-100,00	0,00	424,51	55,03
Pendapatan Hibah (%)	50,98	-100,00	0,00	0,00	0,00	-9,80
Lain-lain pendapatan sesuai peraturan per-UU-an (%)	5,00	-50,22	-100,00	0,00	424,51	55,86

Gambar 2. 57 Pertumbuhan Komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Berdasarkan data pertumbuhan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2020 hingga 2024 (*unaudited*), terlihat adanya fluktuasi yang sangat tajam dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan rata-rata kenaikan sebesar 55,03 persen. Pada tahun 2020, pertumbuhan tercatat positif sebesar 14,68 persen. Namun, pada tahun 2021, terjadi kontraksi yang cukup signifikan sebesar -64,02 persen, diikuti dengan penurunan drastis hingga -100,00 persen pada tahun 2022, yang mencerminkan nihilnya realisasi pendapatan pada komponen ini. Pada tahun 2023, tidak terjadi pertumbuhan, sedangkan pada tahun 2024 terjadi lonjakan pertumbuhan sebesar 424,51 persen. Kenaikan tajam ini diduga akibat adanya basis nilai realisasi yang sangat rendah pada tahun sebelumnya.

Komponen pendapatan hibah juga mengalami fluktuasi ekstrem. Pada tahun 2020, pendapatan hibah tumbuh sebesar 50,98 persen, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan hingga -100,00 persen dan tidak menunjukkan pertumbuhan lagi hingga tahun 2024. Secara rata-rata, pendapatan hibah mengalami pertumbuhan negatif sebesar -9,80 persen selama periode lima tahun tersebut, mencerminkan tidak berlanjutnya penerimaan hibah dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan memperlihatkan tren serupa. Pada tahun 2020, komponen ini tumbuh sebesar 5,00 persen, namun mengalami kontraksi sebesar -50,22 persen pada tahun 2021, dan menurun drastis hingga -100,00 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023, tidak terjadi pertumbuhan, sedangkan pada tahun 2024 kembali terjadi lonjakan sebesar 424,51 persen. Rata-rata pertumbuhan komponen ini selama lima tahun terakhir mencapai 55,86 persen.

Fluktuasi yang sangat tinggi dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah ini menunjukkan bahwa pendapatan pada pos ini cenderung tidak stabil dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, seperti kebijakan hibah dan kondisi fiskal eksternal. Oleh karena itu, diperlukan strategi

pengelolaan pendapatan yang lebih terarah untuk meningkatkan keberlanjutan dan stabilitas sumber pendapatan daerah di masa mendatang.

Untuk memahami kontribusi masing-masing komponen terhadap Lain-lain pendapatan daerah yang sah, berikut disajikan grafik proporsi komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2020-2024.

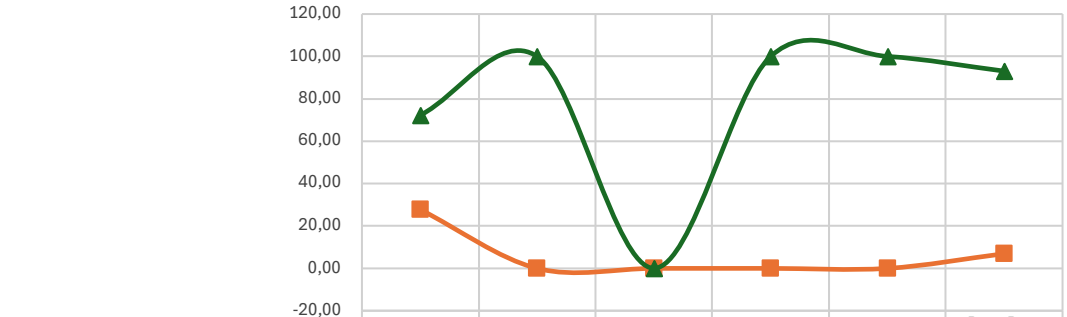

	2020	2021	2022	2023	2024 (Unaudited)	Rata-Rata Kontribusi Per Tahun (%)
Pendapatan Hibah (%)	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93
Lain-lain pendapatan sesuai peraturan per-UU-an (%)	72,28	100,00	0,00	100,00	100,00	93,07

Gambar 2. 58 Proporsi Komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Berdasarkan data proporsi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2020–2024, terlihat adanya perubahan struktur kontribusi antar komponen secara signifikan. Pada tahun 2020, Pendapatan Hibah memberikan kontribusi sebesar 27,72 persen terhadap total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sementara sisanya, yakni sebesar 72,28 persen, berasal dari Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 (*unaudited*), kontribusi Pendapatan Hibah tercatat nihil, sehingga seluruh realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal sepenuhnya dari Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Secara rata-rata selama lima tahun terakhir, Pendapatan Hibah berkontribusi sebesar 6,93 persen per tahun, sedangkan Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-undangan berkontribusi dominan sebesar 93,07 persen per tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan penerimaan dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di Kabupaten Mappi sangat

bergantung pada penerimaan dari sumber-sumber yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sementara potensi pendapatan hibah relatif tidak dimanfaatkan secara optimal dalam kurun waktu tersebut. Oleh karena itu, perlu upaya strategis untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan hibah yang dapat mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah ke depan.

2.2.1.2 Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Hal ini mencerminkan peran Belanja Daerah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, guna mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta penyediaan layanan bagi masyarakat.

Secara umum, belanja daerah terdiri atas beberapa komponen. Pertama, Belanja Operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan operasional pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Kedua, Belanja Modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Ketiga, Belanja Tidak Terduga, yang dialokasikan untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keempat, Belanja Bantuan Keuangan, yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya atau desa/kampung dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan.

Untuk memahami lebih lanjut dinamika pengeluaran daerah, berikut disajikan gambaran mengenai perkembangan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mappi selama periode 2020–2024.

Tabel 2. 43 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024 (*Unaudited*)
2.	**BELANJA**					
2.1	**Belanja Operasi**	**743.884.649.523**	**689.314.105.888**	**801.450.808.485**	**890.383.565.603**	**951.951.471.361**
2.1.1	Belanja Pegawai	262.443.716.516	270.889.434.829	314.912.800.946	360.806.566.677	381.792.262.654
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	453.888.064.632	363.409.556.512	442.761.275.505	405.894.003.359	365.770.787.917
2.1.5	Belanja Hibah	16.914.520.000	46.283.040.771	35.453.147.034	113.383.283.124	195.659.773.990
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.638.348.375	8.732.073.776	8.323.585.000	10.299.712.443	8.728.646.800
2.2	**Belanja Modal**	**218.366.398.663**	**241.130.117.308**	**370.294.703.887**	**406.115.628.715**	**319.662.812.018**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	8.081.750.000	1.928.000.000	60.515.340.000	8.770.750.000	-
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.288.710.767	43.167.667.008	60.511.125.282	53.155.245.729	30.905.654.474
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.157.483.896	99.479.400.520	130.342.280.525	122.930.591.915	137.874.387.824
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	86.511.014.000	88.131.529.400	111.871.662.080	218.883.592.901	149.519.015.020
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.327.440.000	8.423.520.380	7.054.296.000	1.875.504.170	1.063.755.000
2.2.6	Aset Lainnya	-	-	-	499.944.000	299.999.700
2.3	**Belanja Tak Terduga**	**48.101.574.454**	**45.399.206.500**	**12.126.887.400**	**1.662.215.000**	**-**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	48.101.574.454	45.399.206.500	12.126.887.400	1.662.215.000	
2.4	**Belanja Transfer**	**264.114.339.676**	**269.000.602.600**	**248.147.951.900**	**259.149.902.800**	**81.451.385.100**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil					
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	264.114.339.676	269.000.602.600	248.147.951.900	259.149.902.800	81.451.385.100
	JUMLAH BELANJA	**1.274.466.962.316**	**1.244.844.032.296**	**1.432.020.351.672**	**1.557.311.312.118**	**1.353.065.668.479**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Mappi 2020-2024 & BPKAD Kabupaten Mappi 2025

Berdasarkan data realisasi belanja daerah Kabupaten Mappi untuk tahun 2020 hingga 2024, dapat dilakukan analisis terhadap beberapa komponen belanja yang menunjukkan tren fluktuasi yang signifikan. Pada komponen belanja operasi, total realisasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh belanja pegawai yang terus meningkat setiap tahunnya, mencerminkan adanya peningkatan jumlah pegawai atau kenaikan gaji dan tunjangan pegawai. Belanja barang dan jasa mengalami penurunan pada tahun 2021, namun kembali meningkat di tahun-tahun berikutnya. Meskipun belanja hibah mengalami fluktuasi, ada lonjakan signifikan pada tahun 2023 dan 2024, yang menunjukkan adanya alokasi dana hibah yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, mungkin untuk mendukung program-program pembangunan atau bantuan kepada masyarakat. Belanja bantuan sosial juga mengalami penurunan pada tahun 2024, meskipun realisasinya masih cukup signifikan.

Pada komponen belanja modal, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 hingga 2023. Belanja modal untuk pembangunan gedung dan bangunan, serta infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan, menunjukkan angka yang tinggi, mencerminkan adanya prioritas untuk pembangunan fisik dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan daerah. Namun, belanja modal untuk tanah pada tahun 2022 mengalami lonjakan yang cukup besar, sementara pada tahun 2024 tidak ada alokasi untuk belanja tanah. Peningkatan belanja modal peralatan dan mesin menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas operasional melalui pengadaan peralatan dan mesin yang baru.

Sementara itu, belanja tak terduga mengalami penurunan drastis pada tahun 2024, dengan tidak adanya alokasi anggaran untuk pos ini. Hal ini mungkin mencerminkan adanya penyesuaian terhadap situasi anggaran yang lebih terencana dan terstruktur, serta kurangnya kejadian luar biasa yang membutuhkan pengeluaran tak terduga.

Komponen belanja transfer menunjukkan penurunan signifikan pada tahun 2024, dengan hanya sekitar 81,45 miliar rupiah yang terealisasi, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini

mungkin terkait dengan penyesuaian anggaran atau pergeseran prioritas dalam pengalokasian dana.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa komponen yang mengalami penurunan, pemerintah Kabupaten Mappi tetap mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur dan pengelolaan operasional daerah, dengan penurunan yang terlihat pada belanja transfer dan tak terduga. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pengelolaan belanja rutin dan investasi jangka panjang dalam pembangunan daerah.

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen Belanja Daerah, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2020-2024.

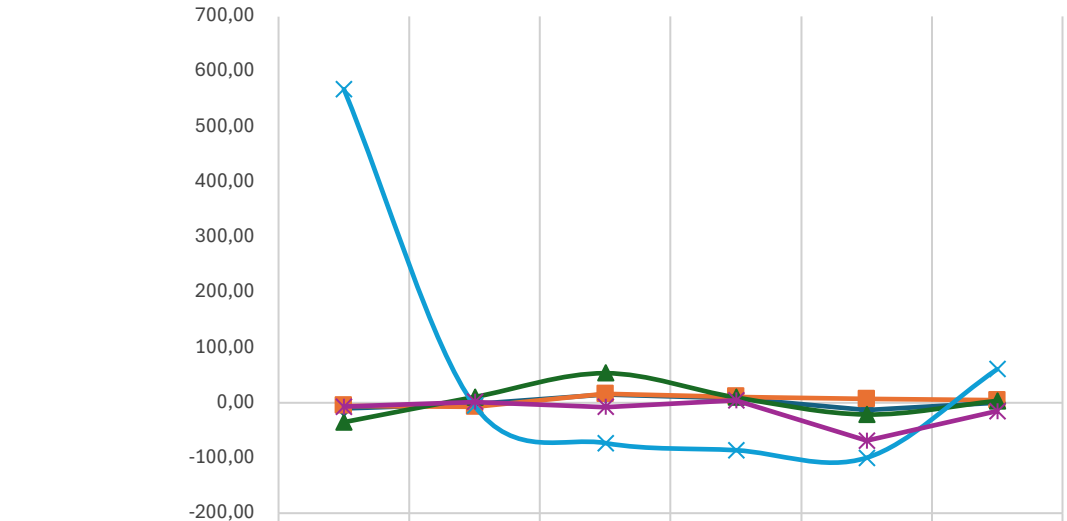

	2020	2021	2022	2023	2024 (Unaudited)	Rata-Rata
TOTAL BELANJA	-9,77	-2,32	15,04	8,75	-13,12	-0,29
Belanja Operasi (%)	-5,18	-7,34	16,27	11,10	6,91	4,35
Belanja Modal (%)	-35,16	10,42	53,57	9,67	-21,29	3,44
Belanja Tak Terduga (%)	568,08	-5,62	-73,29	-86,29	-100,00	60,58
Belanja Transfer (%)	-7,00	1,85	-7,75	4,43	-68,57	-15,41

Gambar 2. 59 Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Pertumbuhan total belanja daerah mengalami variasi pertumbuhan yang cukup signifikan sepanjang periode 2020-2024. Pada tahun 2020, terjadi penurunan sebesar -9,77 persen, yang berlanjut dengan penurunan lebih kecil sebesar -2,32 persen pada tahun 2021. Namun, belanja daerah mengalami lonjakan yang cukup besar pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 15,04

persen, diikuti dengan peningkatan moderat pada tahun 2023 sebesar 8,75 persen. Pada tahun 2024 (*unaudited*), total belanja mengalami penurunan lagi sebesar -13,12 persen. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhannya adalah -0,29 persen, menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Untuk komponen belanja operasi, pertumbuhannya cenderung positif pada sebagian besar periode. Pada tahun 2022, belanja operasi meningkat sebesar 16,27 persen, dan terus tumbuh sebesar 11,10 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, belanja operasi masih mengalami peningkatan sebesar 6,91 persen, meskipun ada penurunan kecil pada tahun 2020 dan 2021, yaitu -5,18 persen dan -7,34 persen, masing-masing. Rata-rata pertumbuhan belanja operasi mencapai 4,35 persen, mencerminkan konsistensi dalam alokasi untuk operasional yang lebih besar.

Sementara itu, belanja modal menunjukkan fluktuasi yang tajam. Pada tahun 2020, belanja modal mengalami penurunan yang signifikan sebesar -35,16 persen, tetapi kemudian meningkat drastis pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 53,57 persen. Meskipun ada penurunan pada tahun 2024 sebesar -21,29 persen, rata-rata pertumbuhannya masih mencatatkan angka positif sebesar 3,44 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja modal mengalami variasi yang cukup besar, dengan porsi yang lebih besar dialokasikan pada tahun-tahun tertentu, terutama untuk pengembangan infrastruktur dan aset tetap.

Belanja tak terduga menunjukkan fluktuasi yang ekstrem, dengan kenaikan luar biasa sebesar 568,08 persen pada tahun 2020, yang kemudian diikuti dengan penurunan signifikan pada tahun-tahun berikutnya, terutama pada tahun 2024 yang tercatat -100 persen. Hal ini mencerminkan ketergantungan yang tinggi pada dana darurat atau alokasi yang tidak terencana pada tahun 2020, sementara pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah cenderung lebih berhati-hati dan tidak mengalokasikan dana tak terduga.

Terakhir, belanja transfer mengalami penurunan rata-rata sebesar -15,41 persen. Meskipun pada tahun 2021 dan 2023 terdapat sedikit peningkatan, yaitu 1,85 persen dan 4,43 persen, masing-masing, namun secara keseluruhan belanja transfer menunjukkan tren negatif, dengan penurunan terbesar pada tahun 2024

sebesar -68,57 persen. Ini menunjukkan adanya perubahan dalam kebijakan alokasi dana antar daerah atau sektor yang mungkin mempengaruhi transfer antar daerah secara signifikan.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan adanya ketidakstabilan dan fluktuasi dalam alokasi dan penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Mappi. Faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian dalam perencanaan anggaran di masa depan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran lebih efisien dan stabil.

Untuk memahami kontribusi masing-masing komponen Belanja Daerah, berikut disajikan grafik proporsi komponen Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2020-2024.

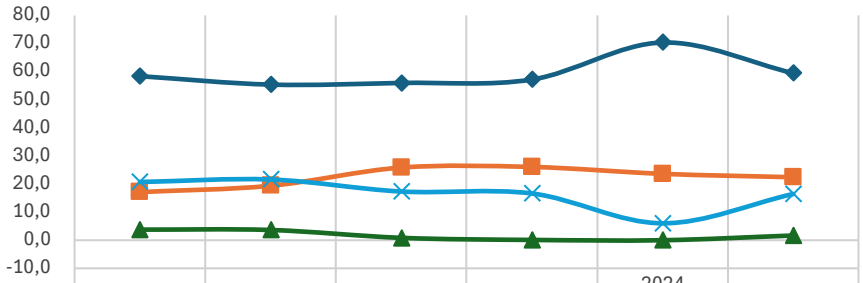

	2020	2021	2022	2023	2024 (Unaudited)	Rata-Rata
Belanja Operasi (%)	58,4	55,4	56,0	57,2	70,4	59,4
Belanja Modal (%)	17,1	19,4	25,9	26,1	23,6	22,4
Belanja Tak Terduga (%)	3,8	3,6	0,8	0,1	0,0	1,7
Belanja Transfer (%)	20,7	21,6	17,3	16,6	6,0	16,5

Gambar 2. 60 Proporsi Komponen Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Berdasarkan data proporsi komponen belanja daerah Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 (*unaudited*), terlihat adanya beberapa perubahan signifikan dalam struktur belanja daerah selama periode tersebut. Proporsi belanja operasi cenderung stabil, meskipun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2024 menjadi 70,4 persen, yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata lima tahun sebelumnya (59,4 persen). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah masih digunakan untuk operasional, yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, serta hibah, yang mengindikasikan adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk mempertahankan pelayanan publik yang berkelanjutan.

Untuk belanja modal, terjadi fluktuasi yang signifikan dengan proporsi tertinggi pada tahun 2023 (26,1 persen) dan rata-rata 22,4 persen. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi jangka panjang, seperti infrastruktur dan aset tetap, meskipun proporsinya menurun pada 2024. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh prioritas lain dalam pengelolaan anggaran.

Belanja tak terduga menurun drastis dari 3,8 persen pada tahun 2020 menjadi hampir 0 persen pada tahun 2024, yang mengindikasikan berkurangnya alokasi untuk kebutuhan mendesak atau kejadian tak terduga, yang mungkin juga berhubungan dengan stabilitas keuangan daerah yang lebih baik dalam beberapa tahun terakhir. Sebaliknya, proporsi belanja transfer menunjukkan penurunan signifikan, dari 20,7 persen pada 2020 menjadi hanya 6,0 persen pada 2024. Penurunan ini mencerminkan pengurangan dalam anggaran yang dialokasikan untuk transfer ke daerah lain atau pihak ketiga, yang mungkin disebabkan oleh perubahan kebijakan atau pengalihan alokasi anggaran untuk program-program prioritas lainnya.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi beberapa perubahan dalam komposisi belanja daerah, belanja operasi tetap menjadi bagian terbesar dari anggaran, diikuti oleh belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam alokasi untuk investasi jangka panjang, sebagian besar sumber daya masih difokuskan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

1. **Belanja Operasi**

Belanja Operasi merupakan bagian terbesar dalam struktur belanja daerah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Operasi didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pos belanja ini mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bunga, belanja subsidi, serta belanja bantuan sosial. Tren Belanja Operasi dalam lima tahun terakhir dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga

kualitas layanan publik serta efektivitas pengelolaan anggaran. Peningkatan atau penurunan pada belanja ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan operasional pemerintahan, kebijakan efisiensi anggaran, serta kondisi ekonomi daerah.

Realisasi komponen Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Mappi selama periode 2020 hingga 2024 (*unaudited*) menunjukkan tren peningkatan, meskipun terdapat fluktuasi di beberapa subkomponen belanja. Secara keseluruhan, Belanja Operasi meningkat dari Rp743,88 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp951,95 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama didorong oleh pertumbuhan Belanja Pegawai dan Belanja Hibah. Belanja Pegawai terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari Rp262,44 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp381,79 miliar pada tahun 2024, seiring dengan kebutuhan pembiayaan gaji dan tunjangan aparatur daerah.

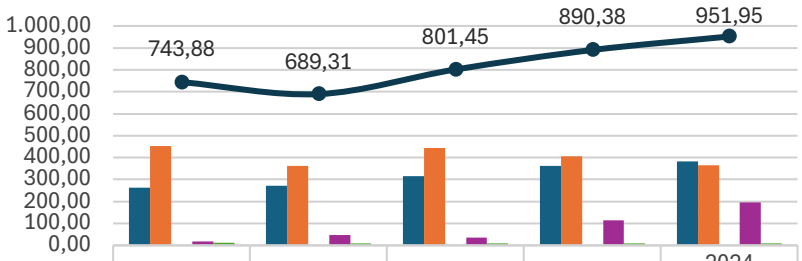

	2020	2021	2022	2023	2024 (Unaudited)
Belanja Pegawai (Miliar)	262,44	270,89	314,91	360,81	381,79
Belanja Barang dan Jasa (Miliar)	453,89	363,41	442,76	405,89	365,77
Belanja Bunga (Miliar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah (Miliar)	16,91	46,28	35,45	113,38	195,66
Belanja Bantuan Sosial (Miliar)	10,64	8,73	8,32	10,30	8,73
BELANJA OPERASI (Miliar)	743,88	689,31	801,45	890,38	951,95

Gambar 2. 61 Realisasi Komponen Belanja Operasi, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Sementara itu, Belanja Barang dan Jasa mengalami dinamika yang cukup signifikan. Setelah mengalami penurunan dari Rp453,89 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp363,41 miliar pada tahun 2021, nilai belanja ini kembali meningkat menjadi Rp442,76 miliar pada tahun 2022, namun kembali menurun hingga mencapai Rp365,77 miliar pada tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan adanya penyesuaian prioritas belanja pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan operasional dan pelayanan publik.

Belanja Hibah menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan, terutama pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing sebesar Rp113,38 miliar dan Rp195,66 miliar. Peningkatan ini menunjukkan adanya kebijakan daerah yang memperbesar alokasi dana hibah untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat dan lembaga non-pemerintah. Di sisi lain, Belanja Bantuan Sosial relatif stabil selama lima tahun terakhir, berada pada kisaran Rp8,32 miliar hingga Rp10,64 miliar per tahun, menunjukkan komitmen daerah dalam menjaga program bantuan sosial tetap berjalan.

Adapun Belanja Bunga dan Belanja Subsidi tidak terealisasi dalam periode tersebut, menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Mappi tidak memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman ataupun program subsidi dalam struktur belanja operasinya. Secara umum, peningkatan Belanja Operasi ini mengindikasikan komitmen Pemerintah Kabupaten Mappi dalam memperkuat belanja rutin untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen belanja operasi, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen belanja operasi Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2020-2024.

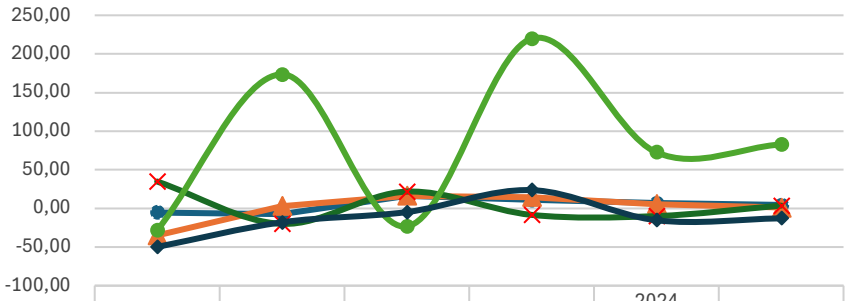

	2020	2021	2022	2023	2024 (Unaudited)	Rata-Rata
BELANJA OPERASI (%)	-5,18	-7,34	16,27	11,10	6,91	4,35
Belanja Pegawai (%)	-34,90	3,22	16,25	14,57	5,82	0,99
Belanja Barang dan Jasa (%)	34,87	-19,93	21,84	-8,33	-9,89	3,71
Belanja Hibah (%)	-28,53	173,63	-23,40	219,81	72,56	82,82
Belanja Bantuan Sosial (%)	-49,80	-17,92	-4,68	23,74	-15,25	-12,78

Gambar 2. 62 Pertumbuhan Komponen Belanja Operasi, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Pertumbuhan komponen belanja operasi Pemerintah Kabupaten Mappi pada periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Secara rata-rata, belanja operasi mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,35 persen

per tahun. Belanja pegawai, yang merupakan salah satu komponen utama, hanya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,99 persen per tahun, mencerminkan peningkatan yang relatif stabil meskipun sempat mengalami kontraksi cukup dalam sebesar -34,90 persen pada tahun 2020.

Belanja barang dan jasa menunjukkan fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,71 persen per tahun. Pada tahun 2021, belanja ini mengalami penurunan signifikan sebesar -19,93 persen, namun berhasil tumbuh positif kembali pada tahun 2022 sebelum kembali mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, belanja subsidi tercatat tidak mengalami pertumbuhan karena tidak terdapat realisasi belanja subsidi sepanjang periode tersebut.

Komponen belanja hibah mengalami pertumbuhan paling dinamis dengan rata-rata sebesar 82,82 persen per tahun. Lonjakan drastis terjadi pada tahun 2021 dan 2023, masing-masing dengan pertumbuhan sebesar 173,63 persen dan 219,81 persen. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan peningkatan alokasi belanja hibah dalam beberapa tahun terakhir. Sebaliknya, belanja bantuan sosial mengalami tren pertumbuhan negatif dengan rata-rata -12,78 persen per tahun. Meskipun sempat tumbuh positif pada tahun 2023 sebesar 23,74 persen, secara umum alokasi untuk bantuan sosial menunjukkan kecenderungan menurun.

Secara keseluruhan, dinamika pertumbuhan belanja operasi Kabupaten Mappi mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan belanja yang cukup signifikan dalam merespons kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Untuk memahami kontribusi masing-masing komponen belanja operasi, berikut disajikan grafik proporsi komponen belanja operasi Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2020-2024.

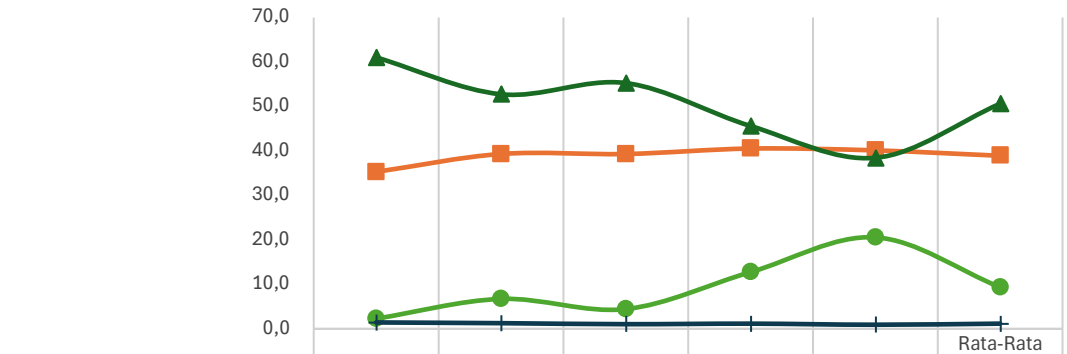

	2020	2021	2022	2023	2024 (Unaudited)	Rata-Rata Kontribusi Per Tahun (%)
Belanja Pegawai (%)	35,3	39,3	39,3	40,5	40,1	38,9
Belanja Barang dan Jasa (%)	61,0	52,7	55,2	45,6	38,4	50,6
Belanja Hibah (%)	2,3	6,7	4,4	12,7	20,6	9,3
Belanja Bantuan Sosial (%)	1,4	1,3	1,0	1,2	0,9	1,2

Gambar 2. 63 Proporsi Komponen Belanja Operasi, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Proporsi komponen Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Mappi pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola distribusi yang cukup dinamis. Secara rata-rata, Belanja Pegawai berkontribusi sebesar 38,9 persen terhadap total Belanja Operasi setiap tahunnya. Kontribusi ini relatif stabil, dengan kecenderungan meningkat dari 35,3 persen pada tahun 2020 menjadi 40,1 persen pada tahun 2024. Sementara itu, Belanja Barang dan Jasa masih mendominasi struktur Belanja Operasi, meskipun kontribusinya mengalami penurunan dari 61,0 persen pada tahun 2020 menjadi 38,4 persen pada tahun 2024, dengan rata-rata kontribusi tahunan sebesar 50,6 persen.

Belanja Hibah menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, porsi Belanja Hibah hanya sebesar 2,3 persen, namun meningkat menjadi 20,6 persen pada tahun 2024. Secara rata-rata, kontribusi Belanja Hibah terhadap Belanja Operasi mencapai 9,3 persen per tahun. Di sisi lain, Belanja Bantuan Sosial tercatat memiliki kontribusi yang paling kecil dibandingkan komponen lainnya, dengan rata-rata hanya 1,2 persen per tahun, serta kecenderungan kontribusi yang relatif stabil pada kisaran 0,9 persen hingga 1,4 persen.

Perubahan struktur proporsi ini mencerminkan adanya pergeseran prioritas dalam alokasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Mappi,

khususnya dengan meningkatnya perhatian terhadap belanja yang bersifat hibah, serta upaya menjaga stabilitas belanja pegawai dan bantuan sosial.

2. Belanja Modal

Belanja Modal mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam pembangunan aset tetap yang memiliki manfaat jangka panjang, seperti infrastruktur, sarana dan prasarana publik, serta pengadaan peralatan. Besaran dan pola perubahan Belanja Modal setiap tahun menunjukkan prioritas pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah serta efisiensi dalam pengelolaan investasi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pos belanja ini mencakup pengeluaran untuk belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; belanja modal aset tetap lainnya; dan belanja modal aset lainnya.

Fluktuasi dalam alokasi Belanja Modal dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pembangunan, kapasitas fiskal daerah, serta realisasi proyek-proyek strategis. Keterbatasan anggaran sering kali menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur, sehingga analisis terhadap Belanja Modal akan membantu dalam mengevaluasi efektivitas perencanaan dan implementasi belanja daerah.

Realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Mappi pada periode 2020 hingga 2024 (*unaudited*) menunjukkan tren yang bervariasi antar komponen. Secara umum, belanja modal mengalami peningkatan dari Rp218,37 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp406,12 miliar pada tahun 2023, sebelum menurun menjadi Rp319,66 miliar pada tahun 2024. Komponen belanja modal untuk gedung dan bangunan mendominasi alokasi selama periode tersebut, dengan nilai realisasi tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp137,87 miliar. Hal ini mencerminkan fokus pembangunan fisik, khususnya infrastruktur bangunan pemerintah.

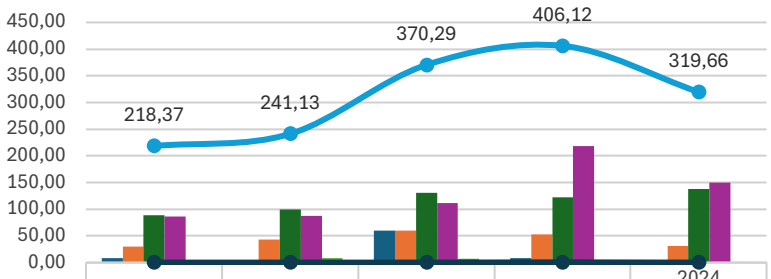

	2020	2021	2022	2023	2024 (Unaudited)
BM Tanah (Miliar)	8,08	1,93	60,52	8,77	0,00
BM Peralatan dan Mesin (Miliar)	30,29	43,17	60,51	53,16	30,91
BM Gedung dan Bangunan (Miliar)	88,16	99,48	130,34	122,93	137,87
BM Jalan, Irigasi dan Jaringan (Miliar)	86,51	88,13	111,87	218,88	149,52
BM Aset Tetap Lainnya (Miliar)	5,33	8,42	7,05	1,88	1,06
Aset Lainnya (Miliar)	0,00	0,00	0,00	0,50	0,30
BELANJA MODAL (Miliar)	218,37	241,13	370,29	406,12	319,66

Gambar 2. 64 Realisasi Komponen Belanja Modal, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan juga mengalami peningkatan yang signifikan, terutama pada tahun 2023 yang mencapai Rp218,88 miliar, sebelum menurun menjadi Rp149,52 miliar pada tahun 2024. Realisasi ini menunjukkan adanya prioritas pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur konektivitas daerah. Sementara itu, belanja modal untuk peralatan dan mesin menunjukkan fluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp60,51 miliar, dan mengalami penurunan menjadi Rp30,91 miliar pada tahun 2024.

Belanja modal untuk tanah mengalami variasi tajam, di mana realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp60,52 miliar, namun pada tahun 2024 tercatat nihil. Hal ini menunjukkan bahwa akuisisi tanah bukan merupakan prioritas dalam belanja modal pada tahun terakhir. Untuk belanja aset tetap lainnya dan aset lainnya, alokasinya relatif kecil sepanjang periode tersebut, mencerminkan fokus yang lebih besar terhadap pembangunan fisik yang bersifat strategis.

Secara keseluruhan, struktur belanja modal Pemerintah Kabupaten Mappi memperlihatkan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur dasar, baik melalui pembangunan gedung pemerintahan maupun peningkatan sarana konektivitas wilayah. Namun, fluktuasi antar tahun menunjukkan pentingnya

perencanaan yang lebih konsisten dan berkelanjutan untuk mendukung stabilitas pembangunan daerah ke depan.

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen belanja modal, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen belanja modal Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2020-2024.

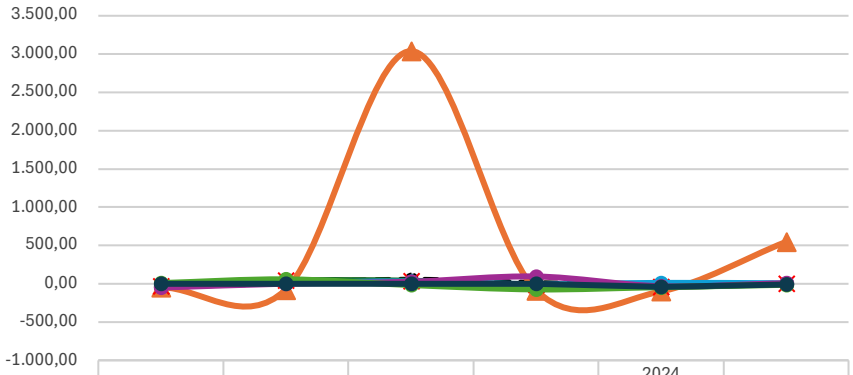

	2020	2021	2022	2023	2024 (Unaudited)	Rata-Rata
BELANJA MODAL (%)	-35,16	10,42	53,57	9,67	-21,29	3,44
Tanah (%)	-45,78	-76,14	3.038,76	-85,51	-100,00	546,27
Peralatan dan Mesin (%)	-28,33	42,52	40,18	-12,16	-41,86	0,07
Gedung dan Bangunan (%)	-15,48	12,84	31,02	-5,69	12,16	6,97
Jalan, Irigasi dan Jaringan (%)	-49,25	1,87	26,94	95,66	-31,69	8,71
Aset Tetap Lainnya (%)	9,62	58,12	-16,25	-73,41	-43,28	-13,04
Aset Lainnya (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,99	-8,00

Gambar 2. 65 Pertumbuhan Komponen Belanja Modal, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Pertumbuhan belanja modal Pemerintah Kabupaten Mappi pada periode 2020–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 3,44 persen. Secara rinci, belanja modal mengalami kontraksi sebesar 35,16 persen pada tahun 2020, kemudian tumbuh positif 10,42 persen pada 2021 dan melonjak 53,57 persen pada 2022. Namun, pada 2023 hanya tumbuh 9,67 persen sebelum kembali mengalami penurunan sebesar 21,29 persen pada tahun 2024 (*unaudited*).

Jika dilihat berdasarkan komponennya, pertumbuhan belanja modal tanah menunjukkan volatilitas yang sangat tinggi, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 546,27 persen. Lonjakan signifikan tercatat pada tahun 2022 sebesar 3.038,76 persen, namun diikuti oleh kontraksi tajam sebesar 85,51 persen pada 2023 dan penurunan hingga 100 persen pada 2024. Komponen belanja modal peralatan dan mesin juga menunjukkan fluktuasi, dengan pertumbuhan positif pada 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 42,52 persen

dan 40,18 persen, namun mengalami penurunan pada 2023 dan 2024, sehingga menghasilkan rata-rata pertumbuhan tahunan yang relatif stagnan sebesar 0,07 persen.

Belanja modal gedung dan bangunan cenderung lebih stabil, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 6,97 persen. Setelah mengalami kontraksi 15,48 persen pada 2020, pertumbuhan positif terjadi pada 2021 dan 2022, meskipun kembali sedikit menurun pada 2023 sebelum meningkat lagi pada 2024. Komponen jalan, irigasi, dan jaringan mencatat rata-rata pertumbuhan 8,71 persen, dengan pertumbuhan tinggi sebesar 95,66 persen pada 2023, meskipun di tahun-tahun lain terjadi fluktuasi yang cukup tajam. Sementara itu, belanja aset tetap lainnya mengalami tren penurunan dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar 13,04 persen per tahun, mencerminkan penurunan konsisten sejak 2022. Untuk belanja aset lainnya, tercatat pertumbuhan negatif pada tahun 2024 sebesar 39,99 persen, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar negatif 8,00 persen.

Secara umum, meskipun belanja modal menunjukkan pertumbuhan positif secara rata-rata, fluktuasi yang signifikan antar komponen mengindikasikan perlunya perencanaan investasi yang lebih terarah dan berkelanjutan guna menjaga stabilitas pertumbuhan belanja modal di masa mendatang. Untuk memahami kontribusi masing-masing komponen belanja modal, berikut disajikan grafik proporsi komponen belanja modal Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2020-2024.

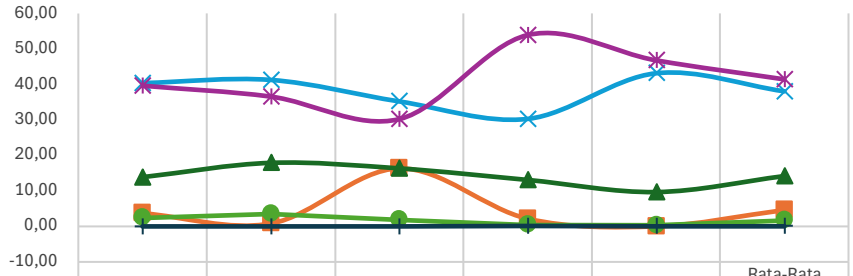

	2020	2021	2022	2023	2024 (Unaudited)	Rata-Rata Kontribusi Per Tahun (%)
Tanah (%)	3,70	0,80	16,34	2,16	0,00	4,60
Peralatan dan Mesin (%)	13,87	17,90	16,34	13,09	9,67	14,17
Gedung dan Bangunan (%)	40,37	41,26	35,20	30,27	43,13	38,05
Jalan, Irigasi dan Jaringan (%)	39,62	36,55	30,21	53,90	46,77	41,41
Aset Tetap Lainnya (%)	2,44	3,49	1,91	0,46	0,33	1,73
Aset Lainnya (%)	0,00	0,00	0,00	0,12	0,09	0,04

Gambar 2. 66 Proporsi Komponen Belanja Modal, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Berdasarkan data proporsi komponen belanja modal Pemerintah Kabupaten Mappi pada tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa alokasi terbesar secara konsisten diberikan pada belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 41,41 persen. Komponen ini mengalami fluktuasi, namun tetap menjadi prioritas utama, terutama pada tahun 2023 dan 2024 ketika proporsinya mencapai 53,90 persen dan 46,77 persen. Selanjutnya, belanja modal untuk gedung dan bangunan juga menunjukkan porsi yang cukup besar, dengan rata-rata kontribusi sebesar 38,05 persen. Proporsi tertinggi untuk komponen ini terjadi pada tahun 2024 sebesar 43,13 persen.

Belanja modal peralatan dan mesin menempati posisi ketiga dengan rata-rata kontribusi tahunan sebesar 14,17 persen. Meskipun relatif stabil, proporsi belanja untuk kategori ini cenderung mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024. Sementara itu, belanja modal tanah menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan proporsi tertinggi sebesar 16,34 persen pada tahun 2022, tetapi kemudian turun drastis menjadi 0 persen pada tahun 2024, menghasilkan rata-rata kontribusi sebesar 4,60 persen. Komponen belanja modal aset tetap lainnya memiliki kontribusi yang relatif kecil, dengan rata-rata sebesar 1,73 persen, dan terus menurun setiap tahunnya. Adapun belanja modal aset lainnya hampir tidak memberikan kontribusi signifikan, dengan rata-rata hanya 0,04 persen per tahun.

Secara keseluruhan, pola proporsi belanja modal Kabupaten Mappi selama periode 2020–2024 mencerminkan fokus utama pemerintah daerah pada pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan, serta pembangunan gedung dan bangunan, yang menjadi fondasi penting bagi pelayanan publik dan pengembangan wilayah.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi dalam perencanaan anggaran, seperti bencana alam, keadaan darurat, atau kebutuhan mendesak lainnya yang memerlukan respons cepat dari pemerintah daerah. Pos ini memiliki karakteristik yang unik karena

jumlah dan realisasinya sangat bergantung pada kondisi yang terjadi dalam suatu tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Mappi dalam periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, realisasi Belanja Tak Terduga tercatat sebesar Rp48,10 miliar, yang kemudian sedikit menurun menjadi Rp45,40 miliar pada tahun 2021. Penurunan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2022 dengan realisasi hanya sebesar Rp12,13 miliar, kemudian semakin mengecil pada tahun 2023 menjadi Rp1,66 miliar. Pada tahun 2024 (*unaudited*), Belanja Tak Terduga tercatat nihil atau Rp0,00 miliar. Tren ini mencerminkan semakin menurunnya kebutuhan pengeluaran tak terduga, yang bisa disebabkan oleh menurunnya kejadian luar biasa atau kedaruratan yang memerlukan alokasi dana tambahan, atau sebagai hasil dari peningkatan perencanaan dan mitigasi risiko yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah.

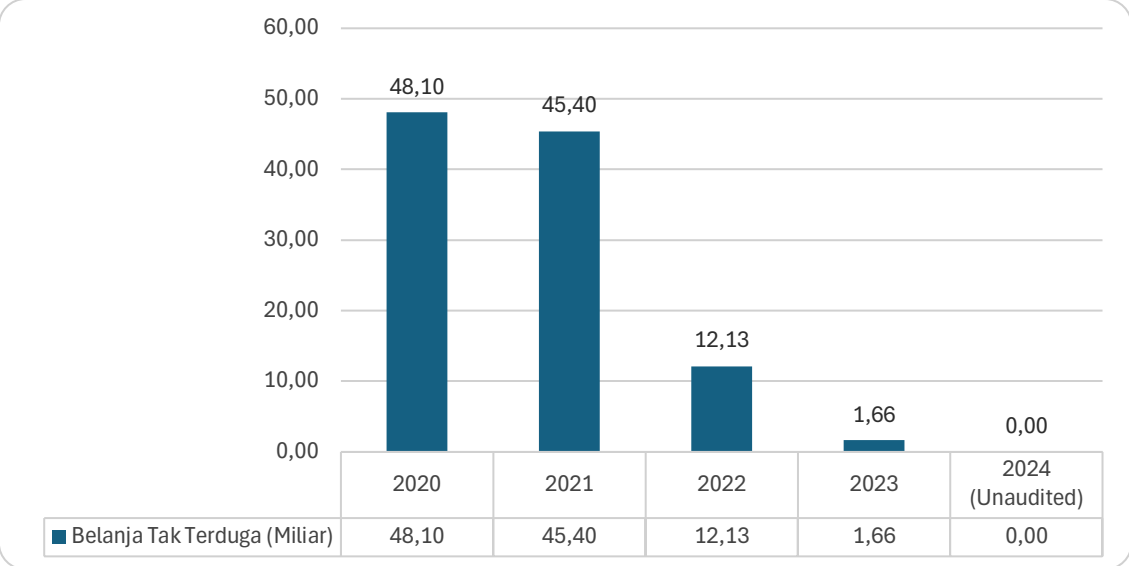

Gambar 2. 67 Realisasi Belanja Tak Terduga, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen belanja tak terduga, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen Belanja tak terduga Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2020-2024.

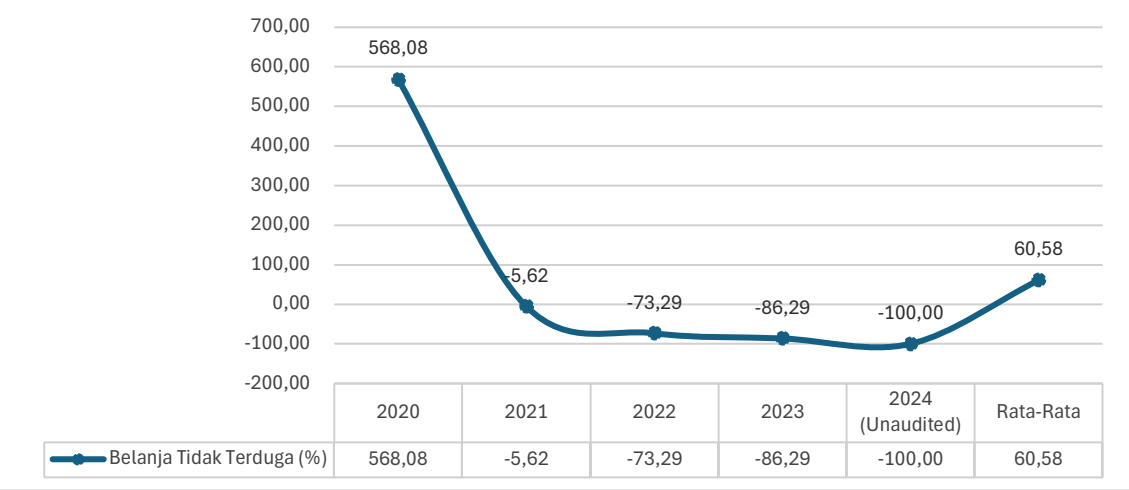

Gambar 2. 68 Pertumbuhan Belanja Tak Terduga, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Berdasarkan data pertumbuhan Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024, dapat dilihat fluktuasi yang cukup signifikan dalam alokasi belanja tersebut. Pada tahun 2020, terjadi lonjakan sangat besar sebesar 568,08 persen, yang kemungkinan disebabkan oleh kebutuhan mendesak atau kejadian luar biasa yang memerlukan pembiayaan tak terduga. Namun, setelah tahun 2020, terjadi penurunan yang sangat tajam pada tahun 2021 sebesar -5,62 persen, diikuti dengan penurunan lebih lanjut pada tahun 2022, yaitu -73,29 persen, dan penurunan yang lebih drastis lagi pada tahun 2023 sebesar -86,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi untuk belanja tak terduga semakin berkurang seiring berjalannya waktu, dengan indikasi bahwa situasi darurat atau kejadian luar biasa yang memerlukan dana tak terduga semakin jarang terjadi.

Pada tahun 2024, tercatat penurunan penuh dengan angka -100,00 persen, yang berarti tidak ada alokasi untuk belanja tak terduga pada tahun tersebut, mencerminkan bahwa kebutuhan untuk dana tak terduga tidak lagi diperlukan pada tahun ini. Rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 60,58 persen menunjukkan fluktuasi yang cukup besar, dengan kecenderungan menurun pada

tahun-tahun terakhir. Secara keseluruhan, pengelolaan belanja tak terduga di Kabupaten Mappi selama periode ini menunjukkan responsivitas terhadap kejadian tak terduga yang tinggi pada awal periode, namun semakin menurun pada tahun-tahun berikutnya, yang kemungkinan mencerminkan stabilitas keuangan dan pengelolaan anggaran yang lebih terencana.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan belanja yang dialokasikan kepada pemerintah desa/kampung dan entitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Transfer dana ini bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa/kampung, serta memperkuat layanan publik di tingkat lokal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa/kampung. Pos belanja ini mencakup pengeluaran untuk Belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Berdasarkan data realisasi komponen belanja transfer Pemerintah Kabupaten Mappi untuk periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi signifikan dalam alokasi belanja tersebut. Secara keseluruhan, total belanja transfer menunjukkan penurunan yang cukup tajam pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

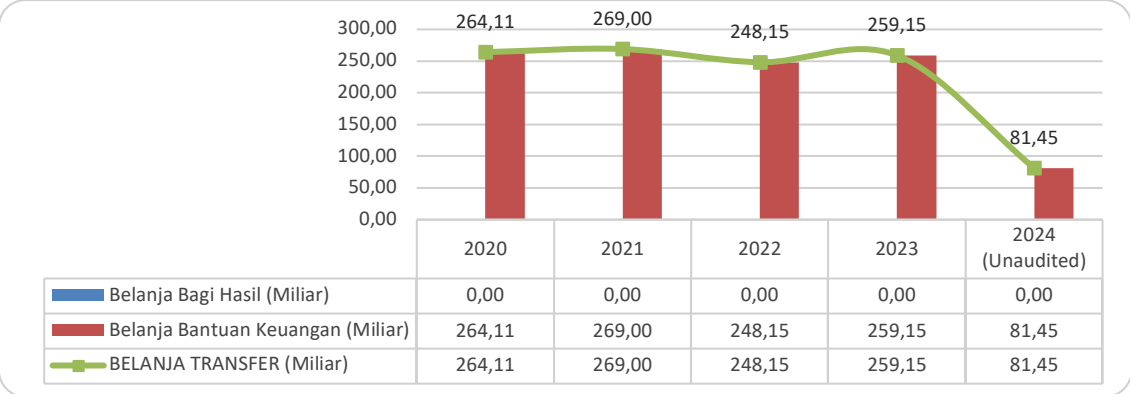

Gambar 2. 69 Realisasi Komponen Belanja Transfer, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Pada tahun 2020 hingga 2023, komponen belanja transfer didominasi oleh Belanja Bantuan Keuangan, yang alokasinya relatif stabil dengan kisaran

antara Rp 248,15 miliar hingga Rp 269,00 miliar. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan drastis dalam belanja bantuan keuangan menjadi Rp 81,45 miliar, yang berpengaruh langsung terhadap total belanja transfer yang turun menjadi angka yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Penurunan belanja bantuan keuangan pada tahun 2024 ini perlu dianalisis lebih lanjut, karena dapat menunjukkan adanya perubahan kebijakan atau penurunan kebutuhan alokasi anggaran untuk bantuan keuangan di daerah tersebut. Hal ini juga mungkin mencerminkan efisiensi anggaran atau pergeseran prioritas dalam pengalokasian dana daerah.

Secara keseluruhan, fluktuasi dalam belanja transfer ini menunjukkan pentingnya evaluasi lebih lanjut terkait alokasi dan penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa belanja tersebut dapat mendukung tujuan pembangunan daerah secara optimal, khususnya dalam hal pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah daerah yang lebih rendah atau untuk program-program yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi.

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen belanja transfer, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen belanja transfer Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2020-2024.

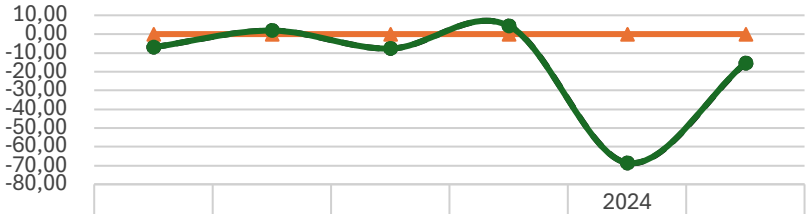

	2020	2021	2022	2023	2024 (Unaudited)	Rata-Rata
BELANJA TRANSFER (%)	-7,00	1,85	-7,75	4,43	-68,57	-15,41
Belanja Bagi Hasil (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan (%)	-7,00	1,85	-7,75	4,43	-68,57	-15,41

Gambar 2. 70 Pertumbuhan Komponen Belanja Transfer, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Analisis terhadap data pertumbuhan komponen belanja transfer Pemerintah Kabupaten Mappi untuk tahun 2020 hingga 2024 (*unaudited*) menunjukkan tren fluktuatif yang signifikan, terutama pada belanja bantuan keuangan. Pada tahun 2020, terdapat penurunan sebesar 7,00 persen, yang

kemudian diikuti oleh kenaikan sebesar 1,85 persen pada tahun 2021. Namun, setelah itu, terjadi penurunan yang lebih tajam pada tahun 2022, yaitu sebesar 7,75 persen. Pada tahun 2023, meskipun terdapat sedikit peningkatan sebesar 4,43 persen, tren penurunan kembali terjadi pada tahun 2024 dengan angka yang cukup drastis, yaitu sebesar -68,57 persen.

Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan tahunan untuk belanja transfer dalam lima tahun ini tercatat negatif sebesar -15,41 persen. Hal ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam alokasi anggaran transfer, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor eksternal maupun internal, seperti perubahan kebijakan pusat, fluktuasi pendapatan daerah, atau penyesuaian terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang lebih mendesak. Sebagai catatan, belanja bagi hasil tetap nihil selama periode tersebut, yang mengindikasikan bahwa tidak ada dana yang dialokasikan untuk pos ini dalam lima tahun terakhir.

Penting untuk melakukan evaluasi lebih lanjut mengenai efektivitas penggunaan belanja transfer, terutama dalam mendukung pembangunan daerah. Penyusunan kebijakan keuangan yang lebih stabil dan proaktif akan sangat diperlukan agar anggaran untuk belanja transfer dapat diarahkan lebih efektif, terutama dalam mendukung program-program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

2.2.1.3 Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan mencakup seluruh transaksi keuangan pemerintah yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran daerah, yang harus dibayar atau akan diterima kembali dalam sistem penganggaran pemerintah. Tujuan utama pembiayaan adalah menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sumber penerimaan pembiayaan daerah meliputi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, serta penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, investasi daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah didefinisikan sebagai setiap penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Pasal 70 ayat (1) menyebutkan bahwa pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Selanjutnya, Pasal 70 ayat (3) mengatur bahwa terdapat enam sumber penerimaan pembiayaan, yaitu: (1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA); (2) pencairan dana cadangan; (3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) penerimaan pinjaman daerah; (5) penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan (6) penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, sistematika APBD terdiri dari pendapatan dikurangi belanja, yang menghasilkan surplus atau defisit. Jika terjadi defisit, maka pembiayaan menjadi instrumen untuk menutup kekurangan tersebut, sementara jika terjadi surplus, pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk pengeluaran strategis yang mendukung pembangunan daerah.

Pada tahun 2020 hingga 2023, penerimaan pembiayaan daerah, yang terdiri sepenuhnya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Penerimaan tertinggi tercatat pada tahun 2023 sebesar Rp150,84 miliar, namun diperkirakan menurun pada 2024 menjadi Rp95,81 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi SiLPA untuk pembiayaan daerah berkurang pada tahun 2024, yang berpotensi mempengaruhi fleksibilitas fiskal daerah.

Tabel 2. 44 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024 (*Unaudited*)
3.	**PEMBIAYAAN**					
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**108.747.957.208**	**104.350.363.416**	**126.272.997.226**	**150.840.346.861**	**95.811.510.849**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	108.747.957.208	104.350.363.416	126.272.997.226	150.840.346.861	95.811.510.849
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah					
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**2.500.000.000**	**845.000.000**	**845.000.000**	**845.000.000**	**-**
3.2.1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri					
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.500.000.000	845.000.000	845.000.000	845.000.000	
	PEMBIAYAAN NETTO	**106.247.957.208**	**103.505.363.416**	**125.427.997.226**	**149.995.346.861**	**95.811.510.849**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**104.854.769.180**	**126.320.638.276**	**151.073.549.677**	**95.811.510.849**	**125.094.214.734**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Mappi 2020-2024 & BPKAD Kabupaten Mappi, 2025

Pengeluaran pembiayaan daerah, yang terdiri dari pembayaran pokok pinjaman dan penyertaan modal pemerintah daerah, tetap stabil sepanjang periode tersebut. Pembayaran penyertaan modal pemerintah daerah tercatat tetap di angka sekitar Rp845 juta pada tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2020, pengeluaran pembiayaan lebih tinggi, yakni sebesar Rp2,5 miliar, tetapi pada tahun 2024 tidak tercatat adanya pengeluaran pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024, daerah tidak lagi melakukan pengeluaran pembiayaan, yang bisa disebabkan oleh penyelesaian kewajiban atau perubahan prioritas pengelolaan anggaran.

Pembiayaan netto menunjukkan nilai yang cukup tinggi pada tahun 2022 dan 2023, mencapai sekitar Rp125,43 miliar dan Rp149,99 miliar, meskipun terjadi penurunan tajam pada 2024 menjadi Rp95,81 miliar. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya aliran pembiayaan daerah yang tersedia untuk mendanai kegiatan pembangunan, mengingat SiLPA yang tersedia menurun secara signifikan.

SILPA mengalami fluktuasi yang cukup besar selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, SILPA tercatat sebesar Rp104,85 miliar, lalu meningkat tajam pada 2021 hingga mencapai Rp126,32 miliar, yang menunjukkan adanya pengelolaan keuangan daerah yang efisien pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2024, SILPA diproyeksikan berkurang menjadi Rp125,09 miliar, meskipun masih cukup signifikan. Penurunan pada tahun 2024 mencerminkan berkurangnya cadangan fiskal daerah, yang mungkin terkait dengan pengurangan penerimaan pembiayaan serta pengelolaan anggaran yang lebih ketat.

Secara keseluruhan, meskipun pembiayaan daerah Kabupaten Mappi menunjukkan angka yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir, terdapat tren penurunan pada 2024 yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan fiskal mendatang. Penurunan penerimaan pembiayaan dan SILPA dapat mempengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai program-program pembangunan yang ada.

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen pembiayaan daerah, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2020-2024.

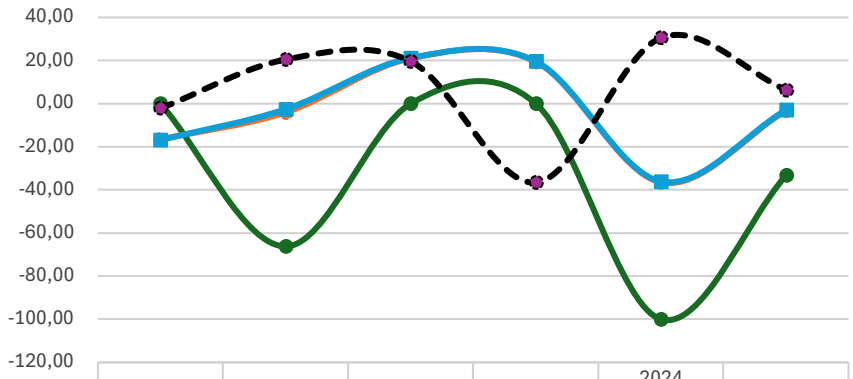

	2020	2021	2022	2023	2024 (Unaudited)	Rata-Rata
Penerimaan Pembiayaan	-16,56	-4,04	21,01	19,46	-36,48	-3,32
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	-66,20	0,00	0,00	-100,00	-33,24
PEMBIAYAAN NETO	-16,88	-2,58	21,18	19,59	-36,12	-2,96
SILPA	-2,19	20,47	19,60	-36,58	30,56	6,37

Gambar 2. 71 Pertumbuhan Komponen Pembiayaan Daerah dan SILPA, Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Berdasarkan data yang tersedia mengenai pertumbuhan komponen pembiayaan daerah dan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Pemerintah Kabupaten Mappi untuk tahun 2020 hingga 2024 (*unaudited*), dapat dianalisis beberapa tren yang signifikan dalam pembiayaan daerah.

Pada tahun 2020 hingga 2021, penerimaan pembiayaan mengalami penurunan yang cukup tajam, masing-masing sebesar -16,56 persen dan -4,04 persen. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, penerimaan pembiayaan mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan angka sebesar 21,01 persen dan 19,46 persen. Pada tahun 2024 (*unaudited*), penerimaan pembiayaan kembali mengalami penurunan yang besar, yaitu -36,48 persen. Secara rata-rata, penerimaan pembiayaan tercatat mengalami penurunan sebesar -3,32 persen per tahun.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2021, pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan tajam sebesar -66,20 persen, yang berlanjut dengan tidak adanya pengeluaran pembiayaan pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2024 (*unaudited*), pengeluaran pembiayaan tercatat sebesar -100 persen, yang mengindikasikan tidak adanya anggaran pengeluaran untuk pembiayaan di tahun tersebut. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan pengeluaran pembiayaan selama lima tahun

terakhir adalah -33,24 persen, menunjukkan adanya penghematan yang cukup besar dalam sektor ini.

Pembiayaan netto, yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, mengalami fluktuasi yang serupa. Pada tahun 2020 dan 2021, pembiayaan netto tercatat mengalami penurunan masing-masing sebesar -16,88 persen dan -2,58 persen. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, pembiayaan netto kembali tumbuh positif dengan angka masing-masing 21,18 persen dan 19,59 persen. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan netto selama periode tersebut tercatat sebesar -2,96 persen, yang menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pembiayaan daerah.

Sedangkan SiLPA, yang mencerminkan sisa anggaran lebih setelah semua belanja dan pembiayaan dilakukan, mengalami fluktuasi signifikan. Pada tahun 2021 dan 2022, SiLPA mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 20,47 persen dan 19,60 persen, yang menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Namun, pada tahun 2023, SiLPA mengalami penurunan yang cukup tajam sebesar -36,58 persen, sebelum kembali mengalami pertumbuhan pada tahun 2024 sebesar 30,56 persen. Rata-rata pertumbuhan SiLPA selama periode ini adalah 6,37 persen, yang mengindikasikan adanya sisa anggaran yang cukup besar di sebagian besar tahun yang dianalisis.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi dalam penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Mappi tampaknya berhasil mengelola sisa anggaran dengan cukup efisien, tercermin dari SiLPA yang cukup stabil di beberapa tahun terakhir. Namun, perlu perhatian terhadap fluktuasi yang cukup besar dalam beberapa tahun, terutama terkait dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang mengalami penurunan tajam pada beberapa tahun tertentu.

2.2.1.4 Realisasi Neraca Daerah

Neraca keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mappi merupakan salah satu laporan keuangan utama yang menggambarkan posisi keuangan suatu daerah meliputi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada dalam satu periode tertentu. Analisis terhadap neraca keuangan penting dilakukan untuk menilai kesehatan fiskal daerah, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta keberlanjutan keuangan

daerah dalam jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Mappi dalam menjalankan kegiatan pemerintah daerah pada setiap tahunnya terdapat dampak pada perubahan kondisi keuangan baik pada posisi aset, kewajiban maupun pada ekuitas. Perkembangan realisasi neraca daerah Kabupaten Mappi selama kurun waktu Tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 45 Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024 (*Unaudited*)
1	**ASET**	**2.885.920.901.891,79**	**2.876.930.448.096,49**	**3.034.113.103.976,23**	**3.134.867.478.602,89**	**3.168.224.329.222,72**
1.1	**ASET LANCAR**	**313.420.437.295,35**	**225.345.568.099,17**	**245.870.079.391,01**	**144.436.046.412,89**	**166.274.265.593,25**
	Kas	106.317.269.179,77	126.320.638.275,68	151.073.549.676,59	96.401.294.331,60	125.558.529.392,01
	Piutang	10.171.719.492,58	2.149.020.141,49	242.054.508,42	2.687.959.448,48	92.929.600,00
	Persediaan	196.931.448.623,00	96.875.909.682,00	94.554.475.206,00	45.346.792.632,81	40.622.806.601,24
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**37.000.000.000,00**	**37.845.000.000,00**	**38.690.000.000,00**	**39.535.000.000,00**	**38.690.000.000,00**
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen					
	Investasi Jangka Panjang Permanen	37.000.000.000,00	37.845.000.000,00	38.690.000.000,00	39.535.000.000,00	38.690.000.000,00
1.3	**ASET TETAP**	**2.264.410.067.758,72**	**2.341.813.821.508,16**	**2.471.524.350.230,50**	**2.665.365.099.854,35**	**2.785.253.514.285,54**
	Tanah	216.655.011.800,00	220.830.386.800,00	221.475.646.800,00	232.248.416.800,00	229.793.226.950,00
	Peralatan dan Mesin	578.559.232.810,22	631.974.432.694,22	701.815.325.918,22	752.500.287.147,20	759.084.106.035,86
	Gedung dan Bangunan	1.125.614.585.936,67	1.219.046.675.436,67	1.346.331.406.684,67	1.491.452.199.628,91	1.538.482.911.561,58
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.731.562.777.324,31	1.820.501.155.224,31	1.923.846.790.284,31	2.140.874.832.272,35	2.230.239.961.535,13
	Aset tetap Lainnya	33.197.984.724,71	33.318.670.998,71	38.085.224.098,71	38.198.679.098,71	39.211.143.642,71
	Konstruksi dalam pengerjaan	43.605.870.350,00	53.386.711.370,00	66.634.785.030,00	43.413.645.399,87	68.122.694.935,50
	Akumulasi Penyusutan	(1.464.785.395.187,19)	(1.637.244.211.015,75)	(1.826.664.828.585,41)	(2.033.322.960.492,69)	(2.079.680.530.375,24)
1.4	**ASET LAINNYA**	**271.090.396.837,72**	**271.926.058.489,16**	**278.028.674.354,72**	**285.531.332.335,65**	**178.006.549.343,93**
	Aset tak berwujud	287.837.000,00	142.315.304,00	47.311.728,00	860.175.688,00	924.834.942,00
	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya					7.200.824.218,00
	Aset Lain-lain	270.802.559.837,72	271.783.743.185,16	270.780.538.408,72	277.292.654.182,65	169.880.890.183,93
	Dana Transfer Treasury Deposit Facility			7.200.824.218,00	7.378.502.465,00	
1.5	**DANA CADANGAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dana Cadangan					
2	**KEWAJIBAN**	**63.638.827.114,40**	**59.629.462.100,40**	**2.570.285.914,40**	**602.345.583,40**	**83.780.086.583,40**
2.1	**Kewajiban Jangka Pendek**	**63.638.827.114,40**	**59.629.462.100,40**	**2.570.285.914,40**	**602.345.583,40**	**83.780.086.583,40**
	Utang perhitungan pihak ketiga	1.462.500.000,00	0,00	0,00	589.783.483,00	589.783.483,00
	Utang belanja	62.176.327.114,40	59.629.462.100,40	2.570.285.914,40	12.562.100,40	83.190.303.100,40
2.2	**Kewajiban Jangka Panjang**					
	Utang perhitungan pihak ketiga					
3	**EKUITAS**	**2.822.282.074.777,39**	**2.817.300.985.996,09**	**3.031.542.818.061,83**	**3.134.265.133.019,49**	**3.084.444.242.639,32**
	Ekuitas	2.822.282.074.777,39	2.817.300.985.996,09	3.031.542.818.061,83	3.134.265.133.019,49	3.084.444.242.639,32
4	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**	**2.885.920.901.891,79**	**2.876.930.448.096,49**	**3.034.113.103.976,23**	**3.134.867.478.602,89**	**3.168.224.329.222,72**

Sumber: Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi 2020-2024 & BPKAD Kabupaten Mappi, 2025

Berdasarkan data Neraca Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024 (*unaudited*), dapat dilakukan analisis mengenai perkembangan aset, kewajiban, dan ekuitas yang terjadi selama lima tahun terakhir. Secara keseluruhan, total aset Kabupaten Mappi mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, total aset tercatat sebesar Rp 2.885,92 miliar dan meningkat menjadi Rp 3.168,22 miliar pada tahun 2024 (*unaudited*). Kenaikan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mappi mengalami pertumbuhan aset yang signifikan. Komponen terbesar dalam aset adalah aset tetap, yang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Aset tetap mengalami peningkatan yang cukup besar, dari Rp 2.264,41 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 2.785,25 miliar pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mappi terus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur dan aset fisik lainnya untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.

Aset lancar mengalami fluktuasi, dengan penurunan pada tahun 2021 dan 2022, namun mengalami kenaikan pada tahun 2024 (*unaudited*). Posisi kas, yang merupakan komponen utama aset lancar, juga mengalami fluktuasi signifikan, mencerminkan perubahan dalam likuiditas kas daerah yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor penerimaan dan pengeluaran yang variatif.

Kewajiban total Kabupaten Mappi mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022, dengan jumlah kewajiban tercatat hanya Rp 2,57 miliar pada tahun tersebut, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 (*unaudited*) menjadi Rp 83,78 miliar. Fluktuasi ini menunjukkan adanya perubahan besar dalam kewajiban jangka pendek, khususnya utang belanja yang mengalami lonjakan besar pada tahun 2024 (*unaudited*), dari Rp 12,56 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp 83,19 miliar pada tahun 2024. Kenaikan kewajiban ini perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi kestabilan keuangan daerah dalam jangka panjang.

Ekuitas Kabupaten Mappi relatif stabil selama periode 2020 hingga 2024, meskipun mengalami penurunan tipis pada tahun 2021. Pada tahun 2020, ekuitas tercatat sebesar Rp 2.822,28 miliar, dan pada tahun 2024 (*unaudited*) tercatat sebesar Rp 3.084,44 miliar. Meskipun ada penurunan kecil pada tahun 2021, ekuitas cenderung meningkat, mencerminkan kestabilan dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Mappi menunjukkan tren peningkatan dalam aset dan ekuitas, meskipun terdapat fluktuasi dalam kewajiban dan kas. Peningkatan aset tetap menunjukkan fokus pada pengembangan infrastruktur, sedangkan fluktuasi kewajiban dan kas perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

Analisis neraca juga menjadi dasar dalam evaluasi kinerja keuangan daerah, terutama dalam memastikan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, solvabilitas dalam mengelola utang, serta efektivitas dalam pengelolaan aset dan kewajiban lainnya. Analisis ini menjadi instrumen penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

1. Analisis Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan mudah aset pemerintah daerah dapat dikonversi menjadi kas guna membayar kewajiban jangka pendek. Analisis rasio likuiditas mencakup rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), dan rasio kas (*cash ratio*).

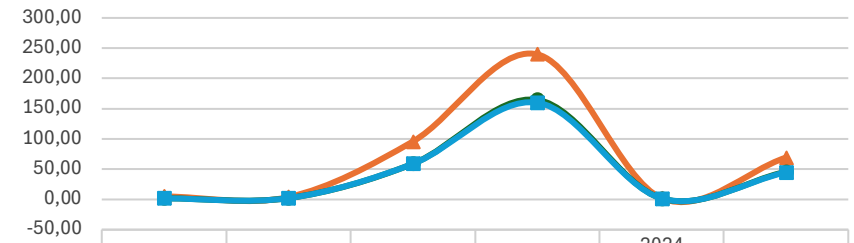

	2020	2021	2022	2023	2024 (Unaudited)	Rata-rata
Rasio Lancar (Current Ratio)	4,92	3,78	95,66	239,79	1,98	69,23
Rasio Cepat (Quick Ratio)	1,83	2,15	58,87	164,51	1,50	45,77
Rasio Kas (Cash Ratio)	1,67	2,12	58,78	160,04	1,50	44,82

Gambar 2. 72 Rasio Likuiditas Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024
Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Melihat pada hasil perhitungan rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio cepat (*quick ratio*), dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2024 (*unaudited*), kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Mappi

tidak mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, sehingga aktivitas keuangan untuk membayar kewajibannya berjalan dengan lancar.

1. **Rasio Lancar (*Current Ratio*)**

   Rasio lancar dihitung dengan membandingkan aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan potensi risiko likuiditas.

   Rasio Lancar (*Current Ratio*) menunjukkan fluktuasi yang sangat signifikan selama periode yang dianalisis. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 4,92, yang menunjukkan kecukupan aset lancar untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Namun, angka ini mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 menjadi 3,78, dan kemudian melonjak tajam pada tahun 2022 dengan rasio sebesar 95,66, yang sangat tinggi. Puncaknya terjadi pada tahun 2023 dengan rasio mencapai 239,79, mencerminkan adanya aset lancar yang jauh melebihi kewajiban jangka pendek. Pada tahun 2024 (*unaudited*), rasio ini kembali menurun menjadi 1,98, yang lebih seimbang, meskipun masih menunjukkan kecukupan likuiditas yang cukup baik. Rata-rata rasio lancar untuk periode tersebut adalah 69,23, yang menunjukkan kecukupan likuiditas yang sangat baik secara keseluruhan, meskipun ada lonjakan yang signifikan di tahun 2022 dan 2023.

2. **Rasio Cepat (*Quick Ratio*)**

   Rasio cepat mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mempertimbangkan persediaan. Persediaan sering kali memerlukan waktu lebih lama untuk dikonversi menjadi kas, sehingga rasio ini lebih mencerminkan kondisi likuiditas yang sebenarnya. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan

kemampuan lebih baik dalam memenuhi kewajiban tanpa bergantung pada persediaan.

Rasio Cepat (*Quick Ratio*), yang lebih konservatif karena tidak memasukkan persediaan, menunjukkan pola yang serupa. Pada tahun 2020, rasio ini berada di angka 1,83, yang berarti Kabupaten Mappi memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek tanpa harus mengandalkan persediaan. Rasio ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 2,15, kemudian melonjak tajam pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 58,87 dan 164,51, mencerminkan likuiditas yang sangat tinggi dan mungkin menandakan akumulasi dana yang belum sepenuhnya digunakan atau alokasi belanja yang belum terealisasi. Pada tahun 2024 (*unaudited*), rasio cepat ini sedikit menurun menjadi 1,50, namun masih cukup kuat untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Rata-rata rasio cepat selama lima tahun tersebut adalah 45,77, yang menunjukkan ketersediaan likuiditas yang cukup tinggi dalam jangka pendek.

3. **Rasio Kas (*Cash Ratio*)**

   Rasio kas mengukur sejauh mana kas dan setara kas dapat digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Rasio ini memberikan gambaran paling konservatif mengenai likuiditas pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara langsung.

   Rasio Kas (*Cash Ratio*), yang mengukur kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek hanya dengan kas yang tersedia, menunjukkan pola yang serupa dengan rasio cepat. Rasio kas pada tahun 2020 tercatat sebesar 1,67, dan meningkat menjadi 2,12 pada tahun 2021. Seperti rasio cepat, terjadi lonjakan tajam pada tahun 2022 dan 2023, dengan rasio kas masing-masing mencapai 58,78 dan 160,04. Ini menunjukkan kecukupan kas yang sangat tinggi dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek pada periode tersebut. Pada tahun 2024 (*unaudited*), rasio kas kembali menurun menjadi 1,50, yang masih cukup

menunjukkan likuiditas yang sehat. Rata-rata rasio kas selama periode tersebut adalah 44,82, yang menunjukkan kecukupan kas yang memadai, meskipun terdapat lonjakan likuiditas yang signifikan pada tahun 2022 dan 2023.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Mappi menunjukkan likuiditas yang sangat baik sepanjang periode 2020 hingga 2024, meskipun ada fluktuasi yang signifikan, terutama pada tahun 2022 dan 2023. Lonjakan rasio likuiditas tersebut dapat mengindikasikan adanya akumulasi dana yang belum sepenuhnya digunakan atau realisasi belanja yang tertunda, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset daerah dibiayai oleh utang dan seberapa mampu daerah melunasi kewajiban jangka panjangnya. Terdapat dua indikator utama yang dianalisis yaitu Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*) dan Rasio hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*).

Gambar 2. 73 Rasio Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Berdasarkan data rasio solvabilitas Pemerintah Kabupaten Mappi dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 (*unaudited*), terlihat bahwa tingkat ketergantungan terhadap utang dalam struktur keuangan daerah relatif rendah..

a. Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)

Rasio ini mengukur proporsi aset daerah yang didanai oleh utang. Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pembiayaan eksternal. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar risiko solvabilitas daerah karena ketergantungan yang tinggi terhadap utang.

Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*), menunjukkan nilai yang sangat rendah, dengan rata-rata sebesar 0,014. Nilai terendah terjadi pada tahun 2023 dan 2024, dengan angka mendekati nol, yang mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mappi memiliki ketergantungan yang sangat kecil terhadap pembiayaan eksternal dalam bentuk hutang untuk mendanai aset-asetnya. Ini menunjukkan posisi keuangan yang lebih sehat, di mana sebagian besar aset dibiayai dengan ekuitas atau sumber daya internal.

b. Rasio Hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio ini mengukur perbandingan antara total utang dan ekuitas pemerintah daerah. Rasio ini mencerminkan keseimbangan antara sumber pendanaan dari utang dan sumber internal. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah lebih banyak menggunakan utang dibandingkan modal sendiri untuk membiayai aktivitasnya.

Rasio Hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*) juga menunjukkan nilai yang sangat rendah dengan rata-rata sebesar 0,014. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mappi relatif tidak bergantung pada hutang dalam struktur modalnya. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Mappi cenderung mengelola pembiayaannya dengan lebih konservatif dan tidak mengambil risiko berlebihan dalam menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaan.

Secara keseluruhan, rasio solvabilitas yang rendah menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mappi tidak memiliki eksposur yang tinggi terhadap risiko

keuangan terkait dengan kewajiban jangka panjang. Hal ini bisa menjadi indikasi pengelolaan keuangan daerah yang berhati-hati dan berfokus pada stabilitas jangka panjang tanpa terlalu mengandalkan utang. Namun, meskipun kondisi ini dapat dilihat sebagai positif dalam hal pengelolaan risiko, perlu juga diperhatikan bahwa kebijakan ini bisa membatasi kapasitas untuk meningkatkan pembiayaan melalui hutang jika diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan besar.

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola asetnya, khususnya dalam mengelola piutang dan persediaan. Terdapat dua indikator utama yang dianalisis yaitu umur piutang dan umur persediaan.

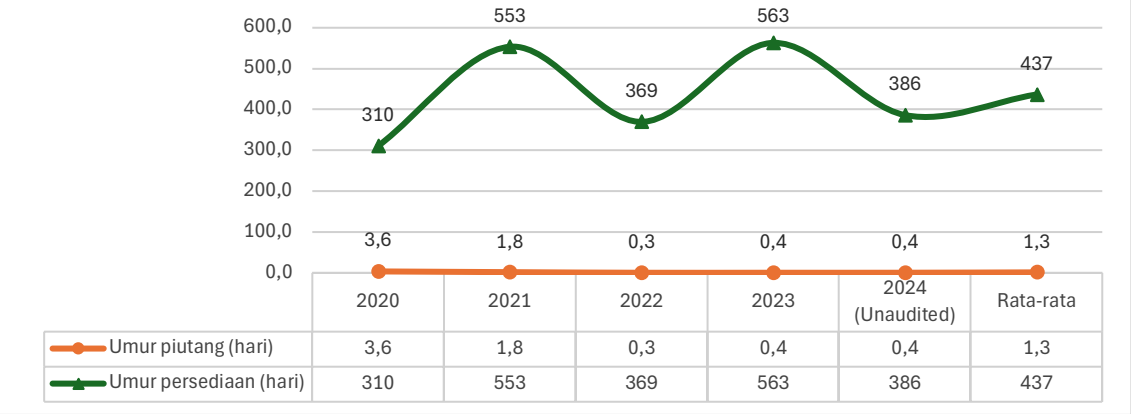

Gambar 2. 74 Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Berdasarkan data rasio aktivitas keuangan Pemerintah Kabupaten Mappi, terdapat fluktuasi pada umur piutang dan umur persediaan selama periode 2020 hingga 2024.

a. Umur Piutang

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menagih piutang dari pihak ketiga. Semakin lama umur piutang, semakin besar risiko ketidakmampuan daerah dalam mengonversi piutang menjadi kas. Umur piutang yang tinggi dapat mengindikasikan kelemahan dalam pengelolaan penerimaan daerah.

Dalam periode 2020 hingga 2024, umur piutang mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, umur piutang tercatat sebesar 3,6 hari, yang kemudian turun secara drastis pada tahun 2021 menjadi 1,8 hari. Penurunan ini berlanjut hingga 2022 dengan hanya 0,3 hari, yang mengindikasikan bahwa piutang berhasil tertagih dalam waktu yang sangat cepat. Pada tahun 2023 dan 2024 (*unaudited*), umur piutang stabil pada level rendah, yakni 0,4 hari. Rata-rata umur piutang selama periode ini adalah 1,3 hari, yang menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan piutang dan perputaran dana yang relatif cepat. Hal ini mencerminkan likuiditas yang cukup baik dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan piutang.

b. Umur Persediaan

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menghabiskan persediaan yang dimilikinya. Rasio ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan aset lancar. Semakin tinggi angka umur persediaan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi kas atau penggunaan yang produktif.

Dalam periode 2020 hingga 2024, umur persediaan mengalami fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2020, umur persediaan tercatat 310 hari, yang cukup tinggi, namun mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 553 hari. Pada tahun-tahun berikutnya, umur persediaan kembali menunjukkan fluktuasi, dengan 369 hari pada tahun 2022, 563 hari pada tahun 2023, dan 386 hari pada tahun 2024 (*unaudited*). Rata-rata umur persediaan selama lima tahun tersebut adalah 437 hari, yang mengindikasikan bahwa persediaan cenderung membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diproses atau digunakan. Ini mungkin mencerminkan adanya penumpukan persediaan atau ketidakcocokan antara pasokan dan kebutuhan yang ada, yang bisa berpengaruh pada efisiensi penggunaan sumber daya.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mappi berhasil meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan piutang, namun perlu

memperhatikan pengelolaan persediaan agar lebih optimal. Penurunan yang sangat tajam dalam umur piutang mencerminkan adanya perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan, sementara fluktuasi umur persediaan menunjukkan adanya potensi perbaikan dalam strategi pengadaan dan distribusi barang.

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan (2026-2030)

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode Tahun Anggaran 2020-2024, maka disusun suatu analisis proyeksi keuangan daerah dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2026-2030. Analisis bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama serta program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 2. 46 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**						
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23.688.929.167,43	24.043.182.000,00	25.807.725.000,00	27.738.156.000,00	29.853.892.000,00	32.176.945.000,00
1.2	Pendapatan Transfer	1.348.893.057.297,00	1.432.576.790.695,00	1.504.848.240.091,45	1.576.982.253.622,42	1.662.042.303.689,56	1.755.232.166.586,10
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9.766.385.900,00	10.361.158.000,00	10.671.993.000,00	10.992.153.000,00	11.321.918.000,00	11.661.576.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.382.348.372.364,43**	**1.466.981.130.695,00**	**1.541.327.958.091,45**	**1.615.712.562.622,42**	**1.703.218.113.689,56**	**1.799.070.687.586,10**
2.	**BELANJA**						
2.1	Belanja Operasi	951.951.471.360,96	913.465.160.000,00	934.596.972.000,00	956.261.054.000,00	1.048.471.578.000,00	1.000.019.187.000,00
2.2	Belanja Modal	319.662.812.017,76	464.107.968.196,75	504.431.211.635,03	540.598.234.638,22	568.327.487.666,35	696.770.895.508,16
2.3	Belanja Tidak Terduga	-	3.307.500.000,00	3.472.875.000,00	3.646.519.000,00	3.828.845.000,00	4.020.287.000,00
2.4	Belanja Transfer	81.451.385.100,00	149.034.095.000,00	152.348.109.000,00	155.136.003.000,00	157.989.708.000,00	160.911.021.000,00
	JUMLAH BELANJA	**1.353.065.668.478,72**	**1.529.914.723.196,75**	**1.594.849.167.635,03**	**1.655.641.810.638,22**	**1.778.617.618.666,35**	**1.861.721.390.508,16**
	SURPLUS/DEFISIT	**29.282.703.885,71**	**(62.933.592.501,75)**	**(53.521.209.543,58)**	**(39.929.248.015,80)**	**(75.399.504.976,79)**	**(62.650.702.922,06)**
3.	**PEMBIAYAAN**						
3.1	Penerimaan	95.811.510.848,60	63.933.592.501,75	89.521.209.543,58	75.929.248.015,80	76.399.504.976,79	63.650.702.922,06
3.2	Pengeluaran	-	1.000.000.000,00	36.000.000.000,00	36.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	**95.811.510.848,60**	**62.933.592.501,75**	**53.521.209.543,58**	**39.929.248.015,80**	**75.399.504.976,79**	**62.650.702.922,06**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**125.094.214.734,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Proyeksi kerangka pendanaan Pemerintah Kabupaten Mappi menunjukkan arah kebijakan fiskal yang relatif optimistis dengan tren pertumbuhan pendapatan daerah dari Rp1,38 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp1,79 triliun pada tahun 2030. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh kenaikan signifikan pada komponen pendapatan transfer yang tetap menjadi sumber utama penerimaan daerah, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil meskipun menunjukkan tren peningkatan dari Rp23,69 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp32,17 miliar pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan tantangan besar dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, yang masih sangat bergantung pada alokasi dari pemerintah pusat.

Di sisi belanja, terjadi dinamika yang cukup menarik. Belanja operasi yang pada baseline 2024 mencapai Rp951,95 miliar justru diproyeksikan menurun pada tahun 2026 menjadi Rp913,47 miliar, meskipun selanjutnya kembali meningkat hingga di atas Rp1 triliun pada tahun 2029. Sementara itu, belanja modal mengalami tren peningkatan yang signifikan, dari Rp319,66 miliar pada 2024 menjadi Rp696,77 miliar pada 2030. Kenaikan belanja modal ini dapat diartikan sebagai komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat investasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Namun, proporsi belanja tidak terduga dan belanja transfer relatif kecil dibandingkan dua komponen utama tersebut.

Meskipun pendapatan terus meningkat, realisasi proyeksi belanja yang lebih besar dibandingkan pendapatan menghasilkan defisit anggaran setiap tahun mulai 2026 hingga 2030, dengan nilai defisit yang bervariasi antara Rp39,93 miliar hingga Rp75,39 miliar. Defisit ini ditutup melalui mekanisme pembiayaan, khususnya penerimaan pembiayaan yang relatif stabil dari tahun ke tahun, meskipun terdapat fluktuasi pada sisi pengeluaran pembiayaan. Dengan pola tersebut, posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) hanya tercatat pada baseline 2024 sebesar Rp125,09 miliar, sedangkan pada tahun-tahun proyeksi berikutnya diasumsikan nol.

Secara umum, kerangka pendanaan ini menggambarkan strategi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan fiskal dengan tetap mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan belanja melalui instrumen pembiayaan. Namun, tantangan utama yang perlu diperhatikan adalah masih rendahnya kontribusi PAD, meningkatnya beban belanja rutin, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menutup defisit. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inovatif dalam optimalisasi PAD, efisiensi belanja operasi, serta penguatan

manajemen pembiayaan daerah agar struktur fiskal Kabupaten Mappi semakin sehat, mandiri, dan berkelanjutan.

2.2.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi pendapatan adalah berdasarkan analisis tren dari data historis dalam beberapa tahun terakhir untuk setiap obyek pendapatan. Selain itu, proyeksi juga dirumuskan dengan mempertimbangkan kecenderungan pencapaian dan pertumbuhan pendapatan historis, kondisi ekonomi makro yang terjadi, serta kebijakan serta strategi terkait dengan pendapatan daerah di masa mendatang sehingga diharapkan hasil dari proyeksi tersebut menjadi lebih realistis. Berikut Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Mappi ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 47 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**						
1.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**23.688.929.167,43**	**24.043.182.000,00**	**25.807.725.000,00**	**27.738.156.000,00**	**29.853.892.000,00**	**32.176.945.000,00**
1.1.1	Pajak Daerah	3.201.094.343,00	4.601.573.000,00	5.291.809.000,00	6.085.580.000,00	6.998.417.000,00	8.048.180.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	989.643.403,00	1.251.899.000,00	1.377.089.000,00	1.514.798.000,00	1.666.278.000,00	1.832.906.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.368.311.374,00	3.963.156.000,00	4.200.945.000,00	4.453.002.000,00	4.720.182.000,00	5.003.393.000,00
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	16.129.880.047,43	14.226.554.000,00	14.937.882.000,00	15.684.776.000,00	16.469.015.000,00	17.292.466.000,00
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.348.893.057.297,00**	**1.432.576.790.695,00**	**1.504.848.240.091,45**	**1.576.982.253.622,42**	**1.662.042.303.689,56**	**1.755.232.166.586,10**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**1.327.789.433.255,00**	**1.413.335.840.695,00**	**1.485.222.471.091,45**	**1.556.963.969.622,42**	**1.641.623.653.689,56**	**1.734.405.143.586,10**
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	4.013.954.250,00	4.297.340.000,00	4.340.313.000,00	4.383.716.000,00	4.427.553.000,00	4.471.829.000,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	17.217.118.772,00	18.790.763.000,00	19.166.578.000,00	19.549.910.000,00	19.940.908.000,00	20.339.726.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	757.072.010.100,00	810.521.294.000,00	842.942.146.000,00	868.230.410.000,00	894.277.322.000,00	921.105.642.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	127.465.939.954,00	141.793.111.000,00	146.046.904.000,00	150.428.311.000,00	154.941.160.000,00	159.589.395.000,00
1.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	51.184.036.179,00	56.937.122.000,00	58.645.236.000,00	60.404.593.000,00	62.216.731.000,00	64.083.233.000,00
1.2.1.6	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	288.410.633.000,00	292.751.212.695,00	324.953.846.091,45	363.948.307.622,42	414.901.070.689,56	472.987.220.586,10
1.2.1.7	Dana Desa	82.425.741.000,00	88.244.998.000,00	89.127.448.000,00	90.018.722.000,00	90.918.909.000,00	91.828.098.000,00
1.2.1.8	Dana Insentif	-	-	-	-	-	-
1.2.2	**Transfer antar – daerah**	**21.103.624.042,00**	**19.240.950.000,00**	**19.625.769.000,00**	**20.018.284.000,00**	**20.418.650.000,00**	**20.827.023.000,00**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	21.103.624.042,00	19.240.950.000,00	19.625.769.000,00	20.018.284.000,00	20.418.650.000,00	20.827.023.000,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**9.766.385.900,00**	**10.361.158.000,00**	**10.671.993.000,00**	**10.992.153.000,00**	**11.321.918.000,00**	**11.661.576.000,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	**-**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	**9.766.385.**900,00	10.361.158.000,00	10.671.993.000,00	10.992.153.000,00	11.321.918.000,00	11.661.576.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.382.348.372.364,43**	**1.466.981.130.695,00**	**1.541.327.958.091,45**	**1.615.712.562.622,42**	**1.703.218.113.689,56**	**1.799.070.687.586,10**

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

PAD Kabupaten Mappi menunjukkan tren pertumbuhan positif dari Rp23,68 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp32,17 miliar pada tahun 2030. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh kenaikan pajak daerah, yang diproyeksikan meningkat lebih dari dua kali lipat dari Rp3,20 miliar menjadi Rp8,04 miliar. Retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Namun, kontribusi terbesar masih berasal dari pos lain-lain PAD yang sah, meskipun porsinya sedikit menurun dari Rp16,12 miliar menjadi Rp17,29 miliar dalam periode proyeksi. Secara umum, meskipun tumbuh, PAD masih berkontribusi sangat kecil terhadap total pendapatan daerah, sehingga ketergantungan terhadap transfer pusat tetap tinggi.

Pendapatan transfer merupakan komponen dominan dengan kontribusi lebih dari 97 persen terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2024, jumlahnya mencapai Rp1,34 triliun dan diproyeksikan naik menjadi Rp1,75 triliun pada 2030. Transfer pemerintah pusat menjadi sumber utama, dengan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai pos terbesar yang tumbuh stabil dari Rp757,07 miliar menjadi Rp921,10 miliar. Pos lain yang juga mengalami kenaikan signifikan adalah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, yang melonjak dari Rp288,41 miliar pada 2024 menjadi Rp472,98 miliar pada 2030. Hal ini mencerminkan peran strategis kebijakan fiskal pusat dalam mendukung pembangunan Papua. Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun non-fisik, serta Dana Desa juga menunjukkan tren kenaikan, meski relatif lebih moderat. Sementara itu, transfer antar-daerah cenderung stagnan, bahkan sedikit menurun pada awal periode sebelum kembali naik secara bertahap.

Pos ini relatif kecil dibandingkan transfer, namun tetap memberikan kontribusi tambahan yang stabil. Pada 2024, tercatat Rp9,76 miliar dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp11,66 miliar pada 2030. Komponen utamanya berasal dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena tidak ada proyeksi pendapatan hibah. Meskipun jumlahnya tidak besar, keberadaan pos ini penting sebagai ruang fleksibilitas fiskal daerah di luar PAD dan transfer.

Secara keseluruhan, struktur pendapatan Kabupaten Mappi masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat, khususnya melalui DAU, Dana

Otsus, dan DAK. Sementara itu, kontribusi PAD, walaupun tumbuh, masih kurang signifikan terhadap keseluruhan pendapatan daerah. Kondisi ini menggambarkan tantangan serius dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, strategi yang perlu didorong mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan kualitas pelayanan retribusi, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta penciptaan sumber-sumber pendapatan alternatif yang sah.

Dalam rangka mewujudkan proyeksi pertumbuhan pendapatan yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Mappi perlu mengambil langkah-langkah konkret dan terukur. Oleh karena itu, untuk mencapai target proyeksi pendapatan tersebut diperlukan kebijakan dan strategi pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Mappi di masa mendatang diarahkan pada:

a. Dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, maka pendapatan daerah dianggarkan berdasarkan pendekatan rasional dan terukur, sebagaimana tertuang dalam prinsip penganggaran pendapatan yang berlandaskan pada hukum positif, termasuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
b. Dalam rangka pelaksanaan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi melakukan sinergi vertikal sebagai salah satu pilar utama dalam optimalisasi pajak dan opsen, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga menumbuhkan semangat kolaboratif antarlembaga dalam mengelola sumber daya fiskal secara berkeadilan

c. Optimalisasi sumber pendapatan daerah melalui perbaikan sistem pemungutan, penyesuaian tarif, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai Peraturan Daerah Tahun 2024.
d. Ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi, mulai dari penghimpunan data hingga pengawasan penyetoran, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai lembaga.
e. Mengoptimalkan pengelolaan data potensi pajak dan retribusi daerah, serta melakukan pemutakhiran dan evaluasi kontinu terhadap program yang telah dilaksanakan.
f. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah, serta meningkatkan kapasitas perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
g. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan peningkatan kinerja BUMD, serta eksplorasi sumber-sumber pendapatan alternatif melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kemitraan publik-swasta (*Public-Private Partnership*). Strategi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari ketergantungan ke arah kemandirian fiskal yang berkelanjutan untuk pembangunan infrastruktur.
h. Meningkatkan kemampuan SDM dan organisasi pengelola pendapatan daerah, dengan fokus pada pelatihan di bidang pendapatan, keuangan, dan pengelolaan aset daerah.
i. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menggali potensi pendapatan daerah serta meningkatkan penguasaan teknologi untuk pelayanan yang lebih baik.
j. Mengintensifkan pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan, keuangan, dan aset daerah, serta melakukan sosialisasi tentang pendapatan daerah kepada masyarakat.

Dengan demikian, melalui serangkaian kebijakan strategis dan langkah penguatan kelembagaan yang telah dirumuskan, Pemerintah Kabupaten Mappi menunjukkan komitmen kuat dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan

daerah secara terencana, berkelanjutan, dan berkeadilan. Harapannya, seluruh upaya ini tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal daerah, tetapi juga menjadi pijakan yang kokoh dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.2.2.2 Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan instrumen utama yang mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Mappi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan. Proyeksi belanja daerah disusun secara cermat dengan mengacu pada tren historis tahun 2020–2024 untuk setiap kelompok belanja, serta mempertimbangkan dinamika ekonomi makro, arah kebijakan pemerintah, dan kewajiban belanja yang bersifat mengikat maupun wajib. Di samping itu, kebijakan pembiayaan daerah turut diperhitungkan secara holistik guna memastikan proyeksi belanja lebih realistis dan selaras dengan kebutuhan pembangunan yang terus berkembang.

Proyeksi belanja daerah dilakukan secara proporsional dengan mengakomodasi kebutuhan pada empat kategori utama, yaitu belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Alokasi ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, dengan menitikberatkan pada kebermanfaatan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mappi secara konsisten memprioritaskan penggunaan anggaran untuk mendanai program-program strategis yang mendesak dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjunjung asas efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan. Berikut ini adalah Proyeksi Belanja Kabupaten Mappi untuk periode 2026–2030.

Tabel 2. 48 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
2.	**BELANJA**						
2.1	**Belanja Operasi**	**951.951.471.360,96**	**913.465.160.000,00**	**934.596.972.000,00**	**956.261.054.000,00**	**1.048.471.578.000,00**	**1.000.019.187.000,00**
2.1.1	Belanja Pegawai	381.792.262.654,29	405.043.412.000,00	417.194.714.000,00	429.710.555.000,00	442.601.872.000,00	455.879.928.000,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	365.770.787.917,16	380.547.928.000,00	388.158.887.000,00	395.922.065.000,00	403.840.506.000,00	411.917.316.000,00
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	195.659.773.989,51	118.792.536.000,00	119.980.461.000,00	121.180.266.000,00	192.392.069.000,00	122.392.069.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	8.728.646.800,00	9.081.284.000,00	9.262.910.000,00	9.448.168.000,00	9.637.131.000,00	9.829.874.000,00
2.2	**Belanja Modal**	**319.662.812.017,76**	**464.107.968.196,75**	**504.431.211.635,03**	**540.598.234.638,22**	**568.327.487.666,35**	**696.770.895.508,16**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	-	7.449.931.000,00	6.891.259.000,00	6.315.885.000,00	4.832.648.000,00	5.176.807.000,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatand an Mesin	30.905.654.474,00	32.154.243.000,00	32.797.328.000,00	33.453.275.000,00	34.122.341.000,00	34.804.788.000,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	137.874.387.823,91	142.041.642.000,00	144.172.267.000,00	146.334.851.000,00	148.529.874.000,00	150.757.822.000,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	149.519.015.019,85	281.055.421.196,75	319.141.491.635,03	353.042.780.638,22	379.368.152.666,35	504.533.517.508,16
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.063.755.000,00	1.106.731.000,00	1.128.866.000,00	1.151.443.000,00	1.174.472.000,00	1.197.961.000,00
2.2.6	Aset Lainnya	299.999.700,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	-	**3.307.500.000,00**	**3.472.875.000,00**	**3.646.519.000,00**	**3.828.845.000,00**	**4.020.287.000,00**
2.4	**Belanja Transfer**	**81.451.385.100,00**	**149.034.095.000,00**	**152.348.109.000,00**	**155.136.003.000,00**	**157.989.708.000,00**	**160.911.021.000,00**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	81.451.385.100,00	149.034.095.000,00	152.348.109.000,00	155.136.003.000,00	157.989.708.000,00	160.911.021.000,00
	JUMLAH BELANJA	**1.353.065.668.478,72**	**1.529.914.723.196,75**	**1.594.849.167.635,03**	**1.655.641.810.638,22**	**1.778.617.618.666,35**	**1.861.721.390.508,16**

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Berdasarkan data proyeksi belanja daerah Kabupaten Mappi tahun 2026–2030 dengan baseline tahun 2024, dapat dilihat bahwa struktur belanja daerah diarahkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur secara lebih seimbang. Pada tahun 2024, total belanja daerah tercatat sebesar Rp1,35 triliun, dan diproyeksikan meningkat konsisten hingga mencapai Rp1,86 triliun pada tahun 2030.

Belanja operasi masih menjadi komponen terbesar, meskipun mengalami fluktuasi. Pada 2024, nilainya mencapai Rp951,95 miliar, namun pada 2026 turun menjadi Rp913,46 miliar, lalu meningkat kembali hingga Rp1 triliun pada 2030. Belanja pegawai dan belanja barang-jasa mendominasi komponen ini, dengan tren kenaikan yang relatif stabil, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan operasional pemerintahan. Sementara itu, belanja hibah menunjukkan fluktuasi cukup signifikan, turun pada 2026–2028, namun meningkat pada 2029 sebelum kembali menurun di 2030.

Belanja modal mengalami pertumbuhan yang sangat menonjol, dari Rp319,66 miliar pada 2024 menjadi Rp696,77 miliar pada 2030. Kenaikan terbesar terdapat pada belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, yang melonjak dari Rp149,51 miliar pada 2024 menjadi lebih dari Rp504,53 miliar pada 2030. Hal ini menunjukkan adanya prioritas besar dalam pembangunan infrastruktur dasar yang berorientasi pada peningkatan konektivitas wilayah, aksesibilitas, serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mappi.

Belanja tidak terduga juga dialokasikan secara lebih jelas mulai 2026, meskipun porsinya relatif kecil, yakni sekitar Rp3,3 miliar pada 2026 dan meningkat bertahap menjadi Rp4,02 miliar pada 2030. Pos ini penting sebagai instrumen antisipasi terhadap kondisi darurat, bencana, atau kebutuhan tak terduga lainnya.

Belanja transfer menunjukkan tren meningkat cukup tajam, dari Rp81,45 miliar pada 2024 menjadi Rp160,91 miliar pada 2030. Hampir seluruhnya berasal dari belanja bantuan keuangan, yang berfungsi memperkuat kapasitas fiskal pemerintah desa atau lembaga lain di daerah, sehingga mampu mendukung pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Secara umum, arah belanja daerah Kabupaten Mappi menekankan keseimbangan antara keberlanjutan operasional pemerintahan, pembangunan infrastruktur strategis, serta pemberdayaan wilayah melalui transfer dan bantuan keuangan. Tren peningkatan belanja modal menjadi indikasi penting adanya komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sementara pengendalian belanja operasi dan penguatan belanja transfer memperlihatkan orientasi pemerataan pembangunan yang lebih inklusif.

a. Penyusunan belanja daerah dilandaskan pada pendekatan berbasis kinerja yang menitikberatkan pada pencapaian hasil (*outcome*). Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas publik, serta mendorong efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran daerah.

b. Prioritas belanja diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, melalui alokasi yang terukur dan terarah guna mendorong peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan tetap mengacu pada standar teknis dan harga satuan regional.

c. Penganggaran honorarium bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara bijak dan proporsional, berdasarkan prinsip kepatutan, kewajaran, dan efektivitas. Hanya ASN yang memberikan kontribusi nyata terhadap capaian program yang berhak menerima insentif ini.

d. Pengadaan barang habis pakai dilakukan secara selektif dan berbasis kebutuhan riil, selaras dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta mempertimbangkan sisa persediaan yang masih tersedia untuk menghindari pemborosan.

e. Belanja modal difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis yang memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas layanan publik, termasuk pembangunan jalan, jembatan, jaringan irigasi, serta sarana pendidikan dan kesehatan.

f. Pemerintah Daerah mendorong optimalisasi skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan proyek strategis, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap APBD sekaligus memperluas ruang fiskal daerah.

g. Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta mengedepankan penggunaan produk dalam negeri. Perencanaan pengadaan didasarkan pada standar kebutuhan dan kondisi nyata yang dihadapi perangkat daerah.

h. Alokasi bantuan keuangan ditujukan untuk memperkuat kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kampung. Pemanfaatan bantuan ini diawasi melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat guna menjamin efektivitas dan akuntabilitas penggunaannya.

i. Penggunaan belanja daerah senantiasa diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan dalam rangka mencapai visi dan misi daerah secara berkelanjutan. Hal ini mencakup pula dukungan terhadap adaptasi tatanan kehidupan baru di bidang pemerintahan, kesehatan, sosial, dan ekonomi.

j. Setiap kegiatan belanja wajib disusun dengan tolok ukur kinerja yang jelas, mencakup input, output, dan outcome. Pertanggungjawaban dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi administratif, proses pelaksanaan, maupun pencapaian hasil.

k. Kebijakan belanja juga diarahkan untuk memperkuat sinergi lintas pemerintahan antara pusat, provinsi, kabupaten, hingga kampung, demi mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, memperluas lapangan kerja, dan menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

l. Alokasi belanja daerah dilakukan secara proporsional dan realistis sesuai kapasitas fiskal daerah, dengan penekanan pada peningkatan

belanja modal guna mendukung kualitas layanan publik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Seluruh belanja diarahkan untuk mendukung pencapaian hasil yang nyata melalui pendekatan berbasis kinerja, dengan menekankan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Penajaman prioritas dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kewajiban pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan PP 2/2008 dan Permendagri 50/2021 atau sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan. Komitmen terhadap transparansi, perencanaan berbasis kebutuhan riil, serta penguatan kolaborasi lintas pemerintahan menjadi fondasi dalam memastikan setiap rupiah anggaran membawa manfaat maksimal bagi masyarakat Mappi.

2.2.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal daerah beriorientasi keuntungan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pertimbangan utama dalam proyeksi pembiayaan daerah didasarkan pada analisis tren data historis dari 2020-2024 untuk setiap objek pembiayaan. Selain itu, proyeksi juga disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro, kebijakan penyelesaian kewajiban daerah, kebijakan efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan daerah, kewajiban kepada pihak ketiga yang menjadi tanggungan pemerintah daerah, serta kebijakan defisit anggaran. Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil proyeksi akan lebih realistis. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mappi dijelaskan pada tabel di bawah berikut ini

Tabel 2. 49 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
3.	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**95.811.510.848,60**	**63.933.592.501,75**	**89.521.209.543,58**	**75.929.248.015,80**	**76.399.504.976,79**	**63.650.702.922,06**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	95.811.510.848,60	63.933.592.501,75	89.521.209.543,58	75.929.248.015,80	6.399.504.976,79	63.650.702.922,06
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-				70.000.000.000,00	
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**1.000.000.000,00**	**36.000.000.000,00**	**36.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**
3.1.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
3.1.2	Pembentukan Dana Cadangan	-	0,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**95.811.510.848,60**	**62.933.592.501,75**	**53.521.209.543,58**	**39.929.248.015,80**	**75.399.504.976,79**	**62.650.702.922,06**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**125.094.214.734,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Pembiayaan daerah Kabupaten Mappi dalam periode 2024–2030 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, mencerminkan adanya upaya penyesuaian fiskal sekaligus strategi kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan APBD. Pada tahun 2024, penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp95,81 miliar yang sepenuhnya bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Angka ini mencerminkan bahwa kapasitas pembiayaan lebih banyak bertumpu pada akumulasi sisa anggaran, bukan pada instrumen pembiayaan aktif lainnya.

Memasuki periode proyeksi, penerimaan pembiayaan cenderung menurun pada tahun 2026 menjadi Rp63,93 miliar, lalu meningkat pada 2027 hingga Rp89,52 miliar, sebelum kembali melemah pada 2028 sebesar Rp75,93 miliar. Fluktuasi ini memperlihatkan pola yang erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola belanja dan menghasilkan SiLPA. Menariknya, pada tahun 2029 muncul pencairan dana cadangan sebesar Rp70 miliar, yang menandai adanya strategi pemerintah daerah untuk memanfaatkan instrumen fiskal dalam mendukung kebutuhan belanja strategis.

Dari sisi pengeluaran pembiayaan, tren mulai muncul pada tahun 2026 dengan realisasi Rp1 miliar yang diarahkan untuk penyertaan modal pemerintah daerah. Selanjutnya, pada 2027 dan 2028 pengeluaran meningkat signifikan hingga Rp36 miliar, terutama karena adanya pembentukan dana cadangan untuk persiapan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung masing-masing sebesar Rp35 miliar. Hal ini mengindikasikan adanya kebijakan jangka menengah untuk mengantisipasi kebutuhan fiskal di masa mendatang, sekaligus memperkuat posisi likuiditas daerah. Namun, pada tahun 2029 dan 2030 pengeluaran kembali ditekan menjadi Rp1 miliar, yang berarti pemerintah lebih selektif dalam mengalokasikan pembiayaan keluar.

Secara keseluruhan, pembiayaan netto Kabupaten Mappi dalam periode 2026–2030 terus menurun dibandingkan baseline tahun 2024. Dari Rp95,81 miliar pada tahun dasar, pembiayaan netto merosot menjadi Rp62,93 miliar pada 2026, lalu turun lagi pada 2027 dan 2028 masing-masing Rp53,52 miliar dan Rp39,92 miliar, sebelum meningkat kembali pada 2029 sebesar Rp75,39 miliar dan sedikit terkoreksi ke Rp62,65 miliar pada 2030. Tren ini memperlihatkan

bahwa ruang pembiayaan semakin terbatas, sehingga ketergantungan terhadap SiLPA tidak dapat dijadikan strategi jangka panjang yang berkelanjutan.

Dengan demikian, arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Mappi ke depan perlu diarahkan pada penguatan instrumen fiskal yang lebih produktif, tidak semata-mata bergantung pada SiLPA. Optimalisasi penyertaan modal yang terukur, pemanfaatan dana cadangan, serta penataan pengeluaran pembiayaan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan menjaga stabilitas APBD dalam mendukung pembangunan daerah secara berkesinambungan.

Adapun kebijakan penerimaan pembiayaan daerah ke depan sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran diarahkan pada:

a. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
b. Pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran;
c. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
d. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berikutnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan;
e. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
f. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran mendatang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal

daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya kebijakan ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik.

2.2.2.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama tahun 2026-2030.

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mappi tahun 2026-2030 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 50 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	1.382.348.372.364,43	1.466.981.130.695,00	1.541.327.958.091,45	1.615.712.562.622,42	1.703.218.113.689,56	1.799.070.687.586,10
2	Penerimaan Pembiayaan	95.811.510.848,60	63.933.592.501,75	89.521.209.543,58	75.929.248.015,80	76.399.504.976,79	63.650.702.922,06
	Total Penerimaan	**1.478.159.883.213,03**	**1.530.914.723.196,75**	**1.630.849.167.635,03**	**1.691.641.810.638,22**	**1.779.617.618.666,35**	**1.862.721.390.508,16**
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	**1.478.159.883.213,03**	**1.530.914.723.196,75**	**1.630.849.167.635,03**	**1.691.641.810.638,22**	**1.779.617.618.666,35**	**1.862.721.390.508,16**
3	**PRIORITAS I (70 %)**		**1.071.640.306.237,72**	**1.141.594.417.344,52**	**1.184.149.267.446,75**	**1.245.732.333.066,45**	**1.303.904.973.355,71**
4	**PRIORITAS II (20 %)**		**306.182.944.639,35**	**326.169.833.527,01**	**338.328.362.127,64**	**355.923.523.733,27**	**372.544.278.101,63**
5	**PRIORITAS III (10 %)**		**153.091.472.319,68**	**163.084.916.763,50**	**169.164.181.063,82**	**177.961.761.866,64**	**186.272.139.050,82**

Sumber: BPKAD Kabupaten Mappi 2025 (Hasil Olah Data, 2025)

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mappi dalam periode 2024–2030 menunjukkan tren yang meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, total kapasitas riil tercatat sebesar Rp1,478 triliun yang sebagian besar bersumber dari pendapatan daerah (Rp1,382 triliun) serta ditopang oleh penerimaan pembiayaan sebesar Rp95,81 miliar. Seiring dengan proyeksi hingga tahun 2030, kapasitas tersebut tumbuh menjadi Rp1,862 triliun, atau meningkat sekitar 26% dibandingkan baseline tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya ruang fiskal yang semakin membaik untuk mendukung program pembangunan daerah.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:

a. Prioritas I, sebesar 70 persen dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, dengan fokus untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) rangka peningkatan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan. Pada tahun 2026, alokasi Prioritas I tercatat sebesar Rp1,071 triliun, dan terus meningkat hingga mencapai Rp1,303 triliun pada tahun 2030. Peningkatan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mappi dalam menjaga kesinambungan layanan dasar dan kewajiban keuangan pemerintah daerah, khususnya terhadap aparatur sipil negara serta kebutuhan pelayanan publik yang tidak dapat ditunda.

b. Prioritas II, sebesar 20 persen dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Besaran alokasi Prioritas II tumbuh dari Rp306,18 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp372,54 miliar pada tahun 2030, dengan pertumbuhan yang relatif stabil. Adapun Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati mencakup:
    1) Peningkatan Kapasitas Keluarga melalui Kesehatan Terjamin, SDM Unggul, dan Peran Perempuan yang Berdaya;
        a) Peningkatan akses dan penguatan kualitas pendidikan yang merata pada jenjang pra sekolah, dasar, dan menengah.
        b) Program 1000 sarjana untuk putra putri asli daerah Kabupaten Mappi.

c) Penyediaan akses, fasilitas, serta pembiayaan bagi pendidikan tingkat tinggi.
d) Peningkatan serta penguatan pendidikan, pelatihan, pembinaan pemuda dalam bidang olahraga, seni budaya, dan keagamaan
e) Pengembangan sarpras, alkes, obat dan SDM RSUD Mappi kualitas tipe B.
f) Pembangunan gedung administrasi, gedung instalasi maternal perinatal – pediatrik terpadu, gedung isolasi A-B-C, gedung rehap medik, gedung rawat inap kelas I, II, II, VIP, dan alkes seperti ct-scan, MRI, ipal.
g) Pengembangan sarpras alkes, obat serta SDM di puskesmas, pembangunan gedung utama di 7 lokasi puskesmas, pengembangan di 17 puskesmas dan pengembangan puskesmas pembantu biasa.
h) Pembangunan RS tipe D pratama di Senggo dan Bade.
i) Peningkatan akses magang/pelatihan SDM kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta pemenuhaan dokter spesialis dalam rangka menuju Mappi sebagai destinasi wisata layanan kesehatan di Provinsi Papua Selatan.

2) Pembangunan Infrastruktur Inklusif untuk Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Hidup;
   a) Pembangunan gedung sarana pemerintahan.
   b) Pembangunan infrastruktur perhubungan darat.
   c) Pembangunan infrastruktur perhubungan laut dan sungai.
   d) Pembangunan infrastruktur perhubungan udara.
   e) Pembangunan infrastruktur air minum.
   f) Pembangunan sanitasi rumah tangga yang layak.
   g) Pembangunan perumahan rakyat layak huni.
3) Pemberdayaan Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Masyarakat;
   a) Penataan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan.
   b) Peningkatan dan pengembangan usaha peternakan.
   c) Intensifikasi dan eksentifikasi pertanian.

d) Pengembangan sentra produksi perkebunan.
e) Pembinaan dan pola kemitraan dalam mewujudkan ketahanan. pangan dan agrobisnis.
f) Penataan dan pengembangan manajemen koperasi.
g) Peningkatan produktivitas tenaga kerja.

4) Transformasi serta Restrukturisasi Birokrasi untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Profesional, dan Berkeadilan;
   a) Penguatan tata kelola dan optimalisasi potensi keuangan daerah untuk mendorong kemandirian fiskal dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
   b) Penguatan pemberian layanan publik yang optimal bagi masyarakat.
   c) Penguatan kinerja profesional melalui peningkatan kompetensi dan penegakan etos kerja pegawai.
   d) Penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN.
   e) Melakukan audit terhadap kecurigaan adanya penyimpangan.
   f) Membantu menanggulangi kasus pelanggaran HAM.
5) Pemantapan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui Harmonisasi Sosial dan Penegakan Hukum;
   a) Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum.
   b) Peningkatan pendidikan dan literasi politik untuk warga yang cerdas dan bertanggung jawab.
   c) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk kesiapsiagaan aparat keamanan.
   d) Penguatan peran PKK dalam membangun kemandirian dan ketahanan keluarga sejahtera.
   e) Sosialisasi dan penyuluhan hukum ke masyarakat.
   f) Pemenuhan hak-hak perempuan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.
6) Peningkatan Ketahanan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan;
   a) Pengawasan terhadap pengrusakan dan pembakaran hutan.

b) Pembinaan kepada masyarakat tentang pelestarian lingkungan. dan dampaknya terhadap ekosistem.
c) Merencanakan tata ruang yang berwawasan lingkungan hidup.
d) Peningkatan sosialisasi wawasan lingkungan bersih dan sehat, terutama kamar mandi, cuci dan WC.

Program-program prioritas tersebut di atas ini juga beririsan dengan program prioritas I dalam kerangka pemenuhan belanja *mandatory spending*.

c. Prioritas III, sebesar 10 persen dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yang mendukung tercapainya program prioritas kepala daerah. Nilainya juga meningkat sejalan dengan kapasitas fiskal, dari Rp153,09 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp186,27 miliar pada tahun 2030.

Secara keseluruhan, struktur kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mappi 2026–2030 memperlihatkan keseimbangan antara keberlanjutan belanja wajib, pemenuhan pembangunan strategis, dan ruang inovasi pembangunan. Meski demikian, besarnya alokasi untuk Prioritas I yang cenderung meningkat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu terus mengendalikan beban belanja pegawai dan pengeluaran pembiayaan agar tidak mengurangi fleksibilitas fiskal untuk investasi pembangunan jangka panjang.

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bagian ini menyajikan analisis atas permasalahan pembangunan daerah yang dihasilkan dari penelahan atas data-data yang telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya. Permasalahan pembangunan daerah merupakan titik pangkal dari proses perencanaan yang akan dirumuskan. Bab ini secara umum akan menyajikan dua hal, yaitu permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kedua hal ini merupakan landasan bagi Pemerintah Kabupaten Mappi untuk merumuskan intervensi-intervensi yang akan dilakukan selama lima tahun mendatang.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta hasil kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, maka

diketahui permasalahan utama Kabupaten Mappi yakni “Belum optimalnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mappi”. Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Mappi tersebut, kemudian di jabarkan ke dalam 4 (empat) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Kualitas SDM yang berkarakter masih perlu ditingkatkan;

Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mappi masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun pembentukan karakter. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat menyebabkan daya saing tenaga kerja terbatas, sementara akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan belum merata di seluruh wilayah. Selain itu, pembinaan karakter yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan, etika, dan disiplin juga masih belum optimal, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

2. Belum optimalnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan keberlanjutan lingkungan hidup;

Pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Potensi unggulan di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata belum mampu dimanfaatkan secara maksimal akibat keterbatasan infrastruktur, rendahnya nilai tambah produk, serta minimnya akses pasar. Selain itu, aktivitas pembangunan ekonomi masih menghadapi tantangan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tekanan terhadap sumber daya alam, degradasi lingkungan, dan lemahnya pengelolaan kawasan berpotensi menghambat keberlanjutan pembangunan yang seharusnya berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat.

3. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis;

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mappi masih dihadapkan pada permasalahan tata kelola yang mencakup lemahnya kapasitas birokrasi, kurang terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran, serta terbatasnya akurasi dan ketersediaan data pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan juga masih perlu diperluas agar prinsip demokrasi dan transparansi dapat terwujud secara lebih nyata. Di samping itu, pengawasan dan akuntabilitas publik

belum berjalan optimal, sehingga menuntut perbaikan dalam membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Terciptanya keamanan, kedamaian dan ketertiban masyarakat yang tangguh masih perlu dioptimalkan.

Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Mappi merupakan salah satu fondasi penting bagi kelancaran pembangunan. Namun demikian, masih terdapat potensi konflik sosial, gesekan antar kelompok, serta persoalan kriminalitas yang dapat mengganggu kedamaian masyarakat. Peran aparatur keamanan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat dalam menjaga kerukunan, menumbuhkan toleransi, serta membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat perlu terus diperkuat. Dengan demikian, terciptanya kondisi sosial yang aman, damai, dan tertib dapat menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.1 Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Mappi Tahun 2025–2029 secara umum masih didominasi oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta kapasitas kelembagaan. Pada urusan wajib pelayanan dasar, pendidikan menghadapi tantangan berupa rendahnya kualitas tenaga pendidik, minimnya sarana prasarana sekolah, serta masih rendahnya angka partisipasi sekolah terutama di wilayah pedalaman. Kondisi serupa juga terlihat pada sektor kesehatan yang masih dihadapkan pada keterbatasan tenaga medis, tidak meratanya fasilitas pelayanan kesehatan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan sanitasi juga belum memadai sehingga menghambat aksesibilitas pelayanan publik dan distribusi logistik, sementara perumahan rakyat dan kawasan permukiman masih terkendala oleh rendahnya kualitas hunian dan belum tersedianya prasarana dasar secara merata. Pada aspek ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, keterbatasan personel serta sarana prasarana menyebabkan pelayanan belum optimal, sedangkan urusan sosial masih menghadapi persoalan pendataan masyarakat miskin yang belum akurat serta layanan perlindungan sosial yang belum merata.

Urusan wajib non-pelayanan dasar juga menyimpan sejumlah tantangan. Bidang ketenagakerjaan menghadapi masalah tingginya pengangguran terbuka dan keterbatasan keterampilan angkatan kerja. Bidang pangan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, dan komunikasi masih diwarnai keterbatasan sarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Demikian pula pada pemberdayaan masyarakat dan desa, perhubungan, koperasi dan UMKM, hingga kebudayaan dan perpustakaan, sebagian besar permasalahan berakar pada keterbatasan kapasitas aparatur, sarana prasarana yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat.

Sementara itu, urusan pilihan yang seharusnya menjadi potensi penggerak ekonomi daerah seperti perikanan, pertanian, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata, masih terkendala oleh rendahnya investasi, minimnya pengolahan pascapanen, serta belum optimalnya promosi dan pemasaran produk unggulan. Keterbatasan infrastruktur penunjang juga menyebabkan potensi daerah belum mampu memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pada unsur pendukung, penunjang, pengawasan, serta kewilayahan, Kabupaten Mappi masih dihadapkan pada lemahnya sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Data pembangunan belum sepenuhnya akurat dan terintegrasi, koordinasi antar-OPD belum berjalan optimal, serta kapasitas aparatur dalam mengelola program pembangunan masih terbatas. Pada urusan pemerintahan umum, permasalahan mencakup rendahnya pemahaman wawasan kebangsaan, masih adanya potensi konflik sosial, serta terbatasnya mekanisme pembinaan kerukunan antarumat beragama.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa akar masalah utama penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Mappi terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana dasar, serta kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelayanan publik, rendahnya daya saing ekonomi daerah, serta lambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya strategis ke depan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas SDM, pembangunan infrastruktur dasar, perbaikan sistem tata kelola pemerintahan, serta pengembangan potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Berikut ini adalah tabel Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029.

Tabel 2. 51 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan	Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan	Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan (SDM) dalam mendukung urusan pendidikan
			Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan
			Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung layanan pendidikan
			Belum optimalnya tata kelola pendidikan
			Belum optimalnya pembinaan kelembagaan dan manajemen pendidikan di semua jenjang
			Masih terbatasnya jumlah gedung sekolah yang layak
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan
			Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat
2	Kesehatan	Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Belum memadainya infrastruktur dan konektivitas di daerah dalam mendukung pelayanan kesehatan
			Terbatasnya sarana prasarana pelayanan kesehatan di masing-masing distrik
			Masih terbatasnya tenaga kesehatan
			Terbatasnya alat kesehatan yang menunjang pelayanan di puskesmas
			Masih adanya kepercayaan lokal yang menghambat peningkatan kualitas kesehatan
			Belum optimalnya pengendalian penyakit, seperti malaria, HIV/AIDS, tuberkulosis, kusra, dan diare
			Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan dan PHBS

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya akses dan kualitas infrastruktur wilayah	Belum optimalnya kualitas jaringan jalan
			Pemeliharaan jalan dan pengawasan pembangunan jalan kurang optimal
			Integrasi jaringan jalan dan fasilitas jalan belum optimal
			Tata kelola air bersih masih rendah dan sumber air bersih terbatas
			Kepemilikan fasilitas sanitasi masyarakat masih terbatas
			Saluran drainase belum tersedia dan terintegrasi secara menyeluruh
			Belum optimalnya kesesuaian tata ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni	Konstruksi bangunan di kampung masih menggunakan bahan temporer yang tidak memenuhi standar kelayakan
			Akses layanan air bersih dan sanitasi belum merata
			Data *by name and by address* pemiliki RTLH belum mencakup seluruh distrik
			Survei terkendala aksesibilitas yang rendah
			Kesadaran masyarakat akan kelayakan rumah belum terbangun dengan baik
			Masih rendahnya cakupan rumah tidak layak huni yang ditangani
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Belum optimalnya penguatan peran dan fungsi Kepala Distrik	Masih rendahnya sosialisasi terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
			Keterbatasan SDM terkait keamanan yang tidak berimbang dengan luas wilayah
		Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas antara aparat keamanan dan pemerintah kabupaten	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung program kegiatan
6	Sosial	Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan sosial bagi masyarakat	Kuantitas dan kualitas SDM belum memenuhi standar yang seharusnya
			Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung program kegiatan

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Kegiatan monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara optimal
			Belum optimalnya sinergitas antara kota kabupaten dengan kecamatan/distrik dalam program pelayanan sosial
Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
7	Tenaga Kerja	Kurangnya ketersediaan tenaga kerja lokal yang terampil	Belum optimalnya akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya program kegiatan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menjangkau masyarakat terutama yang di pedalaman
			Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar dalam menopang program kegiatan
			Masih belum optimalnya perencanaan terkait program kegiatan
9	Pangan	Ketersediaan pangan belum memadai	Belum optimalnya stok cadangan pangan
			Belum optimalnya fungsi lumbung pangan
		Keterjangkauan pangan belum optimal	Fungsi lumbung pangan belum memadai
			Penurunan daerah/ distrik rawan pangan belum optimal
		Pemanfaatan pangan belum optimal	Diversifikasi pangan lokal belum optimal
			Konsumsi protein hewani, sayur-sayuran dan buah-buahan belum memadai
		Belum optimalnya keamanan pangan	Pangan yang memiliki kandungan kimia di atas ambang batas masih beredar
10	Pertanahan	Tingginya tumpang tindih penguasaan tanah	Kesadaran masyrakat terhadap legalitas hak tanah masih rendah
			Pendataan kepemilikan tanah belum optimal
			Ketersediaan data *by name and by adress* pertanahan masih rendah
			Koordinasi antar OPD teknis dalam penyiapan lahan untuk pembangunan masih lemah

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Aset tanah daerah belum terdata dan belum tersertifikasi
			Pendataan aset tanah pemerintah daerah belum optimal
			Inventarisasi TORA belum optimal
11	Lingkungan Hidup	Pengelolaan sampah dan limbah belum optimal	Belum tersedianya TPA
			Sarana dan prasarana pengangkutan sampah belum memadai
			Pengelolaan akhir sampah menggunakan metode open dumping
			Belum tersedianya layanan persampahan level rumah tangga
			Belum tersedianya fasilitas daur ulang sampah
			IPAL Komunal belum tersedia
			Penganganan limbah B3 medis belum sesuai standar
			Masyarakat belum memiliki kesadaran penuh dalam penanganan sampah
		Pengukuran kualitas lingkungan hidup belum optimal	Ketersediaan alat ukur kualitas lingkungan hidup belum memadai
			Kajian izin lingkungan belum dilakukan
			Kapasitas tenaga teknis belum menguasai penuh tata cara pengukuran kualitas dan dampak lingkungan
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya pelayanan di distrik dan kampung, saat ini masih terpusat di Kota Kabupaten	Masih terbatasnya SDM pada instansi dalam menopang kegiatan
			Belum optimalnya sosialisasi terkait program kegiatan di masyarakat
			Belum optimalnya koordinasi antara distrik/kampung dengan Kota Kabupaten
		Belum optimalnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan	Masih terbatasnya ketersediaan alat pendukung program kegiatan
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya pengelolaan/tata kelola kampung	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Masih terbatasnya ketersediaan SDM pada instansi dalam menopang kegiatan
			Kurangnya komitmen dari para kepala kampung
		Distrik dan pemerintah kabupaten belum bersinergi dalam mencapai tujuan	Masih rendahnya pemahaman penggunaan sistem keuangan desa
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan keluarga berkualitas	Masih rendahnya kesadaran Masyarakat untuk menggunakan KB
			Belum optimalnya KIE terkait penggunaan KB
			Masih terbatasnya ketersediaan alat dan obat kontrasepsi
			Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terkait pola asuh anak
			Masih tingginya angka pernikahan dini
15	Perhubungan	Konektivitas belum optimal	Belum optimalnya sarpras perhubungan
			Belum layanan transportasi
16	Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya digitalisasi tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik
			Sistem komunikasi dan informatika yang belum optimal
			Masih minimnya media untuk menyebarluaskan dan memberikan akses terkait informasi pembangunan daerah
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rendahnya produktivitas usaha mikro daerah	Akses pasar yang terbatas
			Terbatasnya akses permodalan
		Belum optimalnya peran koperasi dalam perekonomian daerah	Masih rendahnya jumlah koperasi berbadan hukum
			Rendahnya kompetensi pengelola koperasi
18	Penanaman Modal	Realisasi investasi belum optimal	Identifikasi potensi investasi belum optimal

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Promosi investasi belum memadai
			Penyusunan LKPM oleh pelaku usaha belum optimal
			Pelaporan investasi berbasis sistem elektronik belum memadai
			Kemudahan perizinan perlu ditingkatkan
19	Kepemudaan dan Olahraga	Belum sinkronnya antara program strategis provinsi dan kabupaten	Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan
			Belum optimalnya perencanaan terkait kepemudaan dan olahraga
		Belum optimalnya pemanfaatan SDM pemuda	Belum optimalnya sosialisasi yang diberikan kepada kelompok pemuda
20	Statistik	Belum optimalnya penyelenggaraan statistik daerah	Kapasitas penyelenggara statistik masih perlu ditingkatkan
			Sistem pengelolaan basisdata terukur belum terbangun
			Ketersediaan data terfragmentasi pada setiap OPD
			Belum optimalnya koordinasi data
			Ketersediaan data sektoral secara *up to date* belum optimal
21	Persandian	Belum optimalnya penyelenggaraan program kegiatan terkait persandian daerah	Cakupan infrastruktur telekomunikasi yang belum merata
22	Kebudayaan	Belum optimalnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan lokal	Belum optimalnya perencanaan pelestarian kebudayaan
			Belum optimalnya pendataan dan pemeliharaan objek kebudayaan
			Belum optimalnya pemanfaatan potensi budaya lokal
			Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pemajuan kebudayaan
23	Perpustakaan	Masih rendahnya budaya baca masyarakat	Belum optimalnya penyelenggaraan perpustakaan
			Masih terbatasnya koleksi perpustakaan

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Masih belum terpenuhinya kebutuhan pustakawan
			Belum optimalnya sosialisasi budaya baca dan literasi
			Masih terbatasnya sarana penunjang perpustakaan
24	Kearsipan	Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah	Belum adanya depo arsip
			Belum memadainya arsiparis daerah
Urusan Pemerintahan Pilihan			
25	Perikanan	Produksi perikanan tangkap dan budidaya belum optimal	Kelembagaan kelompok perikanan tangkap dan budidaya belum memadai
			Kapasitas sumber daya manusia perikanan belum optimal
			Sarana dan prasarana perikanan belum memadai
			Metode budidaya perikanan masih konvensional
			Kurangnya akses terhadap bantuan permodalan
26	Pariwisata	Kunjungan wisata belum optimal	Akses belum optimal
			Pengelolaan pariwisata belum optimal
			Potensi wisata belum dioptimalkan
			Terdapat sengketa kepemilikan tanah
27	Pertanian	Produktivitas sektor pertanian belum optimal	Akses petani terhadap pupuk masih sulit
			Lahan produktif daerah belum terkelola dengan optimal
			Penerapan teknologi pertanian masih rendah
			Kapasitas SDM petani masih rendah
			Peralatan pertanian belum memadai
			Sistem irigasi belum optimal
28	Perdagangan	Belum optimalnya arus distribusi barang daerah	Jaringan distribusi barang daerah masih belum optimal
			Sarana perdagangan masih minim
			Pengawasan peredaran barang dan jasa belum optimal
29	Perindustrian	Kapasitas produksi IKM belum optimal	Kapasitas sumber daya manusia pelaku IKM belum memadai
			Kualitas sarana dan prasarana IKM belum memadai

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai
			Kualitas tata kelola perindustrian belum optimal
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
30	Sekretariat Daerah	Belum optimlanya reformasi birokrasi	Belum optimlanya akuntabilitas daerah
			Belum optimlanya pelayanan publik
			Belum optimlanya budaya birokrasi tang berintegritas
			Belum optimlanya kebijakan kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi
31	Sekretariat DPRD	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	Belum optimalnya kualitas layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD
			Masih terbatasnya kompetensi SDM aparatur
			Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung layanan pada DPRD
			Agenda pimpinan dan angota DPRD yang dinamis
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
32	Perencanaan Pembangunan	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya kesesuaian program Renstra dengan RPJMD
			Belum optimalnya kesesuaian antara perencanaan dengan penganggaran
			Belum optimalnya kesesuaian program antara RKPD dan Renja
33	Keuangan	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Pengelolaan keuangan daerah belum tepat waktu
			Rendahnya kapasitas aparatur penatausahaan keuangan dan aset pada masing-masing perangkat daerah
			Aset daerah belum seluruhnya memiliki legalitas yang absah
34	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	Masih terbatasnya SDM dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya
			Tidak adanya manajemen resiko
			Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan
35			Masih terbatasnya SDM peneliti

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
	Penelitian dan Pengembangan	Belum optialnya pengembangan dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	Belum adanya regulasi terkait pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah
			Belum tersedianya rencana induk pengembangan riset dan inovasi daerah
			Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung riset dan inovasi daerah
			Masih kurangnya komitmen dari perangkat daerah untuk melaksanakan riset dan inovasi daerah
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
36	Inspektorat Daerah	Belum optimlanya pengawasan daerah	Belum optimlanya kapbilitas APIP
			Belum optimlanya sistem pengaduan masyarakat
			SDM pengawas belum memadai
Unsur Kewilayahan			
37	Kecamatan/Distrik	Belum optimalnya pelayanan kewilayahan	Belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan desa
			Belum optimalnya koordinasi penyelesaian permasalahan sosial
			Belum optimalnya kapasitas SDM
			Belum optimalnya pelayanan kesehatan
Unsur Pemerintahan Umum			
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	Belum optimalnya dalam menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pokok	Masih terbatasnya SDM dalam melakukan kegiatan program pokok
			Masih kurangnya komitmen dari perangkat daerah terkait dengan kegiatan pembinaan

2.3.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Mappi diidentifikasi melalui kajian data dan informasi pembangunan daerah khususnya data strategis pembangunan. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kabupaten Mappi sebagai berikut:

2.3.2.1 Kualitas SDM yang Berkarakter Masih Perlu Ditingkatkan

Aspek Sumber Daya Manusia merupakan aspek terpenting yang akan menentukan daya saing sebuah bangsa pada kancah global. Jika kita merefleksikan keberadaan Kabupaten Mappi, maka akan terdapat kontradiksi dengan beberapa daerah baik di dalam maupun di luar Papua. Mappi merupakan daerah dengan potensi sumber daya alamnya yang amat beragam di berbagai sektor, seperti pertanian, kelautan, perhutanan, dan lain sebagainya. Dengan kondisi seperti itu, seharusnya untuk menjadi daerah yang maju, bukanlah suatu keniscayaan, namun realitas sampai dengan saat ini telah berbicara sebaliknya, Kabupaten Mappi masih terkategori sebagai daerah tertinggal. Semuanya tidak terlepas dari faktor SDM Mappi yang belum cukup memadai untuk mampu mengelola segenap potensi yang dimiliki untuk menjadi katalisator kemajuan daerah. Sehingga hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi segenap elemen di daerah ini, dalam kaitannya untuk meningkatkan kualitas SDM Mappi.

Salah satu aspek yang perlu disiapkan yaitu sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas yang dimaksud tidak hanya manusia yang unggul dalam aspek intelektual namun juga kepribadian yang baik. Artinya, memiliki karakter yang sesuai dengan nilai budaya dan karakter bangsanya. Kualitas SDM mencerminkan kualitas bangsa. Sumberdaya manusia yang berkarakter berarti pula bangsa yang berkarakter. Berbicara di tingkat regional, karakter suatu daerah ditentukan oleh karakter manusianya yang dipengaruhi oleh pandangan terhadap nilai-nilai kehidupan, sikap, dan perilaku anggota masyarakatnya. Merosotnya karakter masyarakat di Kabupaten Mappi salah satunya disebabkan oleh memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Kebersamaan dalam berkehidupan bermasyarakat sudah pudar dan tidak lagi merupakan cara hidup bermasyarakat. Misalnya, kepedulian dan gotong royong sudah dapat dikatakan mati.

Karena itu, untuk mewujudkan SDM Mappi yang berkualitas dan berkarakter perlu memasukkan karakter ke dalam indikator modal manusia, maka modal manusia tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas tetapi juga dari sisi budaya yang mendasari karakter daerah, sehingga sumberdaya manusia ukurannya menjadi imbang dan holistik. Dengan demikian, SDM yang berkualitas adalah yang memperhitungkan indicator pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan karakter berbasis budaya yakni, karakter yang dilandasi oleh budaya setempat,

sebagai kearifan lokal yang berupa nilai-nilai universal yang kondusif bagi pembangunan. Permasalahan terkait kualitas SDM yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat Mappi terangkum dalam sebuah indikator impact yakni Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indeks komposit dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan posisi relatif IPM tahun 2020, capaian IPM Kabupaten Mappi mencapai nilai 58,15. Nilai ini lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Papua yang sebesar 60.44. Jika dibandingkan dengan dengan nilai IPM kabupaten/kota lain di Papua, nilai IPM Kabupaten Mappi lebih tinggi dari 16 daerah lainnya. Nilai IPM Kabupaten Mappi masih dalam kategori rendah, sehingga perlu untuk ditingkatkan lagi, terutama jika dilihat dari komponenkomponen pembentuk IPM.

Capaian indikator komposit IPM Kabupaten Mappi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut: (1) Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 65,11; (2) Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 10,55 tahun; serta (3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 6,31 tahun; dan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan yang didekati dengan indikator Paritas Daya Beli (PPP) yang sebesar Rp. 6.353,- (ribu rupiah per tahun). Berikut rumusan permasalahan terkait pokok permasalahan pertama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 52 Rumusan Permasalahan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Masih Perlu Ditingkatkan

PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
1.1. Belum optimalnya akses dan mutu layanan pendidikan	Masih rendahnya cakupan pendidikan anak usia dini
	Belum efektifnya penyelenggaraan Pendidikan non formal
	Belum efektifnya penyelenggaraan fungsi pengawasan pendidikan
	Belum optimal penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 12 tahun
	Masih perlunya peningkatan pendidikan pembentukan karakter
	Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan pada jenjang pendidikan pertama dan atas
	Belum optimalnya pemenuhan standar penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan berbasis sekolah

PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
	Masih tingginya angka putus sekolah dan angka mengulang
	Masih rendahnya daya serap siswa terhadap ujian sekolah maupun ujian nasional
	Belum optimalnya pemenuhan kelayakan mengajar oleh tenaga pendidik
1.2. Belum optimalnya akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat	Belum optimalnya budaya perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat.
	Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta implementasi pelaksanaan SPM
	Terbatasnya tenaga media dan kompetensi tenaga kesehatan yang belum optimal
	Masih cukup tingginya kasus penyakit baik menular maupun tidak menular
	Belum optimalnya pencegahan *stunting*
	Belum optimalnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat
	Masih cukup tingginya AKI, AKB dan AKABA
1.3. Tingginya tingkat pengangguran	Rendahnya pertumbuhan ketersediaan lapangan kerja
	Rendahnya minat kewirausahaan masyarakat
	Produktivitas dan kompetensi tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja
1.4. Masih belum optimalnya penanganan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Masih minimnya ketersediaan *data base* kesejahteraan sosial yang *up to date*
	Belum efektifnya jaringan forum pranata sosial
	Belum optimalnya implementasi pelaksanaan SPM

PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
1.5. Masih tingginya beban pengeluaran warga miskin dan tidak mampu	Belum optimalnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang terlayani jaminan kesehatan
1.6 Belum optimalnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan lokal	Belum optimalnya perencanaan pelestarian kebudayaan
	Belum optimalnya pendataan dan pemeliharaan objek kebudayaan
	Belum optimalnya pemanfaatan potensi budaya lokal
	Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pemajuan kebudayaan
1.7 Kecenderungan memudarnya pelestarian keragaman budaya	Belum optimalnya pelestarian seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal
1.8 Rendahnya peranan pemuda dalam pembangunan	Belum optimalnya partisipasi aktif kepemudaan dalam pembangunan
1.9 Masih rendahnya aktivitas masyarakat terhadap olahraga	Belum optimalnya budaya olahraga ditengah-tengah masyarakat
2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan	Kecenderungan penurunan peran serta masyarakat dalam pembangunan
	Masih rendahnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan
	Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan masih perlu dioptimalkan
	Masih perlu dioptimalkannya koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat

2.3.2.2 Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Keberlanjutan Lingkungan

Kebutuhan individu dan masyarakat semakin luas seiring dengan perkembangan zaman. Titik tolak prinsip-prinsip inklusivitas memandang sisi positif perbedaan sehingga mendorong usaha-usaha untuk mempelajari perbedaan dan menarik sisi-sisi universal yang bernilai positif dan menunjang tujuan dan manfaat

pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Harapan untuk mencapai tujuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif.

Pergeseran paradigma pembangunan yang bersifat eksklusif ke arah pembangunan inklusif, merupakan serangkaian proses evaluasi pemerintah atas hasil (*outcome/impact*) kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selama ini. Sebelumnya, pembangunan yang hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian, sehingga terkadang terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan.

Dampak lainnya, banyak kelompok yang termarjinalkan dari pembangunan karena wilayah, jenis kelamin, etnis, usia, difabel dan kemiskinan. Ketidaksetaraan pembangunan jelas menjadi efek dari model pembangunan eksklusif tersebut. Kondisi tersebut di atas juga dialami oleh Kabupaten Mappi, dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode tahun 2016-2020 mencapai 5% setiap tahunnya, namun di periode tahun yang sama rata-rata angka kemiskinan mencapai 25,71% atau meningkat setiap tahunnya sebesar 1,84%. Begitu pun dengan perkembangan derajat ketidakmerataan distribusi/ tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk (gini ratio), dimana pada periode tahun yang sama rata-rata gini rasio mencapai 0,4188 atau rata-rata peningkatan sebesar 0,030. Demikian halnya dengan perkembangan rata-rata tingkat pengangguran terbuka selama periode tahun 2017-2020 mencapai 4,89% setiap tahunnya dari rata-rata jumlah angkatan kerja setiap tahunnya sebanyak 46.473 orang.

Gambaran di atas, mencerminkan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi antar individu maupun wilayah saat ini masih dialami oleh Kabupaten Mappi. Untuk itu, diperlukan arah kebijakan pembangunan yang merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan kesempatan ekonomi yang sama bagi semua orang secara merata, tidak ada ketimpangan dan kemiskinan. Pembangunan ekonomi harus dapat menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruhlapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta

mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Rumusan permasalahan terkait pokok permasalahan kedua dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 53 Rumusan Permasalahan Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup

PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
1. Pertumbuhan ekonomi cenderung melambat dan tidak stabil/ belum kuat	Masih rendah kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan
	Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pola gizi seimbang
	Terbatas dan masih mahalnya harga sumber protein hewani di pasaran
	Masih lambatnya pertumbuhan pendapatan penduduk 40% terbawah
	Pemeliharaan jalan dan pengawasan pembangunan jalan kurang optimal
	Pengangguran usia muda relatif tinggi
	Masih banyaknya pekerja dengan upah rendah
	Masih rendahnya tingkat keahlian/ keterampilan tenaga kerja
2. Angka kemiskinan yang tinggi dan belum meratanya pendapatan penduduk	Masih rendah kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan
	Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pola gizi seimbang
	Terbatas dan masih mahalnya harga sumber protein hewani di pasaran
	Masih lambatnya pertumbuhan pendapatan penduduk 40% terbawah
	Masih adanya diskriminasi upah terhadap perempuan
	Masih terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha di kampung
	Masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan di kampung
2. Akses dan kesempatan masyarakat terhadap pembangunan ekonomi relatif masih rendah	Akses UMKM terhadap kredit perbankan masih rendah
	Jumlah kantor layanan bank belum merata di seluruh distrik
	Tata kelola air bersih relatif buruk dan sumber air bersih terbatas
	Kepemilikan fasilitas BAB rumah tangga masih terbatas
	Kesadaran dan perilaku masyarakat BAB sembarang masih rendah
	Akses ke perguruan tinggi masih terbatas

PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
	Fokus kebijakan/ layanan kesehatan lebih kepada upaya kuratif
	Kepesertaan penduduk dalam JKN masih rendah
3. Masih kurangnya sektor-sektor potensial lainnya dalam perekonomian daerah	Perlunya upaya pengelolaan objek dan daya tarik produk wisata
	Belum optimalnya upaya peningkatan, pengembangan dan pengelolaan perikanan
	Belum optimalnya pemanfaatan potensi lahan basah dan sumber daya air untuk pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan
4. Masih rendahnya ketahanan pangan masyarakat	Minimnya ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat
	Masih bergantungnya ketersediaan pangan dari luar daerah
	Pemanfaatan lahan pekarangan untuk pangan rumah tangga perlu ditingkatkan
5. Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah dan kawasan-kawasan strategis	Integrasi jaringan jalan dan fasilitas jalan belum optimal
	Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum masal
	Belum efektifnya pengelolaan sarana dan prasarana transportasi
6. Minimnya ketersediaan PSU perumahan dan permukiman	Masih terdapat kondisi lingkungan perumahan dan permukiman yang buruk
	Perlunya upaya pengoptimalan pelayanan pengelolaan air minum, air limbah dan sampah
7. Masih terjadinya genangan banjir dan rob	Minimnya ketersediaan saluran dan gorong-gorong dan belum berfungsi secara optimal
	Saluran drainase belum tersedia dan terintegrasi secara menyeluruh
8. Perlunya peningkatan pengelolaan tata ruang	Belum optimalnya kesesuaian tata ruang
	Pembangunan kawasan yang mendukung perwujudan tata ruang yang berdaya guna perlu dioptimalkan
9. Pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang masih	Masih terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan persampahan

2.3.2.3 Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kekola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis

Dalam perwujudan *good government* di setiap lingkungan pemerintahan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam realisasinya yakni akuntabilitas (pertanggungjawaban), transparansi (keterbukaan), prediktabilitas (kepastian hukum), dan partisipasi (peran serta) dari seluruh elemen masyarakat. Jika keseluruhan faktor tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan seksama maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan berjalan pada koridor pencapaian pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional.

Pembangunan berkelanjutan menjadi pokok perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mappi. Kinerja tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik dan demokratis di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mappi masih belum optimal. Kondisi ini tercermin dari beberapa permasalahan mendasar, antara lain seperti: 1) Perlunya peningkatan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan agar lebih inklusif dan dapat dipertanggungjawabkan, serta pemerataan akses terhadap pelayanan dasar berkualitas; 2) Belum optimalnya akses terhadap informasi publik; 3) Belum optimalnya promosi kesetaraan gender dan peningkatan akses perempuan terhadap keadilan dan keterwakilan; 4) Belum efektifnya fasilitasi keterlibatan warga dan organisasi masyarakat dalam pembangunan; dan 5) Akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi mengalami perjalanan panjang yang cukup signifikan selama enam belas tahun dengan status *disclaimer*. Hingga pada tahun 2019 opini BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Mappi berstatus "Wajar Dengan Pengecualian", artinya penilaian atas sistem pengendalian internal telah memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Seperti diketahui WTP adalah opini tertinggi yang berarti akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan daerah lebih baik, sehingga *good and clean government*

dapat terwujud. Namun demikian, pengelolaan tata pemerintahan perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Selanjutnya rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Belum optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. 54. Rumusan Belum optimalnya Penyelenggaraan Tata Kekola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis

PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah	Belum optimalnya sistem manajemen SDM aparatur
	Belum optimalnya kinerja dan ketatalaksanaan
	Belum optimalnya integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah
	Belum optimalnya tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan
	Belum optimalnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah
	Belum optimalnya Implementasi SPIP dan Kapabilitas APIP
	Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset daerah
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
	Masih rendahnya ketersediaan, pemanfaatan dan pengambilan keputusan berbasis data
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP, SPP dan SPM
	Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar yang ditetapkan
	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik
3. Belum efektifnya kemajuan demokrasi yang inklusif, adil dan bertanggung jawab	Belum optimalnya akses terhadap keadilan dan perlindungan hak-hak warga masyarakat
	Masih rendahnya kesetaraan gender
	Belum efektifnya fasilitasi keterlibatan warga dan organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah
	Belum efektifnya sistem penanganan pengaduan kualitas layanan
	Masih adanya intoleransi keberagaman dan konflik sosial bernuansa SARA

2.3.2.4 Terciptanya Keamanan, Kedamaian dan Ketertiban Masyarakat yang Tangguh Masih Perlu Dioptimalkan

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas diantaranya adalah terpenuhinya rasa aman, damai dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui penegakkan dan adanya kepastian hukum. Kondisi yang diharapkan ini, mencerminkan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan seluruh elemen masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur serta dilaksanakan melalui pengaturan dan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD RI 1945 dan Wawasan Kebangsaan Untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi: 1) Pendeteksian dan pencegahan dini; 2) Pembinaan dan penyuluhan; 3) Patroli; 4) Pengamanan; 5) Pengawalan; 6) Penertiban; 7) Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; 8) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; 9) Penegakan hukum; 10) Perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaran keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat perlu dioptimalkan lagi, mengingat rata-rata jumlah kejahatan selama periode tahun 2018-2020 mecapai 77 kasus yang dilaporkan. Jumlah kejahatan tertinggi terjadi di tahun 2020 sebanyak 123 kasus, meningkat 116 kasus dari tahun 2019 yang hanya sebanyak 11 kasus. Sedangkan rata-rata tindak pidana sepanjang periode tahun 2014-2019 mencapai 60-70 kasus. Sementara presentase penyelesain tindak pidana tiga tahun terakhir sebesar 32,33% setiap tahunnya.

Secara disagregasi wilayah, kejadian kriminalitas menurut data di atas terjadi di beberapa distrik. Oleh karena itu, penguatan peran dan fungsi Kepala Distrik dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga perlu dioptimalkan. Koordinasi tersebut mempunyai tujuan untuk menciptakan keamanan, kedamaian dan ketertiban masyarakat, serta rasa aman dilingkungannya dan juga bertujuan untuk mewujudkan kesadaran warga masyarakat dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maupun bencana alam.

Selanjutnya rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Terciptanya keamanan, kedamaian dan ketertiban masyarakat yang tangguh masih perlu dioptimalkan dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. 55 Rumusan Permasalahan Terciptanya Keamanan, Kedamaian dan Ketertiban Masyarakat yang Tangguh Masih Perlu Dioptimalkan

PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
Masih tingginya gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman
	Masih adanya ancaman dan gangguan, kerawanan sosial politik terhadap masyarakat
	Belum efektifnya koordinasi penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat di Distrik dan Kampung
Belum optimalnya ketangguhan bencana	Masih kurangnya sistem peringatan dini bencana
	Masih rendahnya responsivitas kejadian kebakaran di daerah WMK
	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana

2.3.3 Isu Strategis

2.3.3.1 Isu Global

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi (i) perkembangan demografi global, (ii) geopolitik dan geoekonomi, (iii) disrupsi teknologi, (iv) peningkatan urbanisasi dunia, (v) peningkatan peran perdagangan internasional, (vi) perubahan keuangan internasional, (vii) peningkatan penduduk kelas menengah (middle class), (viii) peningkatan persaingan pemanfaatan sumber

daya alam, (ix) perubahan iklim, dan (x) pemanfaatan luar angkasa (space economy). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 75 Megatrend Global 2045

Sumber: RPJPN 2025-2045 (Bappenas)

Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Terdapat 10 (sepuluh) megatren global yang akan dihadapi menuju 2045, yaitu:

1. **Pertumbuhan Kelas Menengah (*Middle Class*)**
   - **Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia**

     Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.

   - **Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong**

penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*)

Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui virtual-metaverse, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

2. **Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam**

- **Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang**

  Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetensi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, diantaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

3. **Perkembangan Teknologi (*Digital Disruption*)**

- **Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat**

  Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatkan oleh masyarakat seperti *Internet of Things (IoT), blockchain, Hyper Connection, Artificial Intelligence (AI), Distributed Ledger Technology (DLT), Production Lifecycle Management, Robotic Process Automation (RPA), Edge Computing, Auto Robotic System, 3D,* dan *Future Technologies.*

- **Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat**

Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal, yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

- **Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor**

  Selama pandemi, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. Digitalisasi usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas serta pasar usaha. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang. Faktor penghambat pemanfaatan teknologi dan digital perlu diatasi karena penggunaan teknologi dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

- **Teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur**

  Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri seperti: *nanotechnology*; *blockchain*; robotika cerdas, IoT, AI, dan teknologi imersif; digitalisasi yang mendukung konektivitas; material maju; rekayasa genetik dan bioteknologi; teknologi lanjutan dari *additive manufacturing* (3D *printing*, *rapid prototyping*, *powder bed system*, dan lainnya); inovasi mesin multifungsi yang mengintegrasikan proses produksi komponen dan produk akhir untuk rantai pasok terlokalisasi; serta teknologi hijau, termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan.

- **Perkembangan teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan**

  Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis *artificial intelligence*

(AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan AI, penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis.

- **Perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi**

  Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Industri media termasuk yang paling terdampak dan hanya meninggalkan sedikit pelaku usaha yang mampu bertahan ditengah gempuran disrupsi. Bahkan, pekerjaan yang membutuhkan aspek kreatif (seni dan hiburan) dalam jangka panjang juga berisiko tergantikan atau setidaknya tersaingi oleh kemajuan teknologi dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan.

- **Perkembangan teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi**

  Pekerjaan jarak jauh (*remote working*) menciptakan peluang di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mendorong perkembangan sektor lain yang mendukung pola *work from anywhere* (WFA). Akan tetapi, di sisi lain hal tersebut akan memukul sektor yang selama ini bertumpu pada pola kerja konvensional, seperti properti perkantoran dan *real estate*. Pola kerja jarak jauh mengasumsikan terbangunnya kepercayaan antara pekerja dan pemberi kerja sehingga kualitas hasil pekerjaan terjaga.

- **Perkembangan dapat berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah**

  Teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi di antara masyarakat

maupun masyarakat dengan pemerintah.

- **Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi**

  Pemanfaatan teknologi dapat membantu mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara. Teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang- undangan, serta mampu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi

4. **Perubahan Iklim**

- **Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan keanekaragaman hayati (tiga krisis global – *the Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari**

  Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirankan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan seperti, lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple Planetary Crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business as usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan, dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sekuler.

- **Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global**

  Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target *net zero emission* pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

- **Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia**

  Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi IV yang dinamakan Innovative Designs termasuk skala lebih kecil atau *Small Modular Reactor* (SMR). Teknologi elektrolisis *Green Hydrogen* (GH2) dan *fuel cell* menunjukan perkembangan yang positif, terutama untuk transportasi berat, seperti kendaraan truk, kereta api, kapal tanker, dam transportasi udara sebagai pengganti avtur, serta pemanfaatan GH2 sebagai *f*eedstock industri petrokimia dan *green ammonia* untuk pupuk.

5. **Pemanfaatan Luar Angkasa (*Space Economy*)**

- **Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir**

  Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of humankind*), yaitu suatu ruang strategis yang dapat

dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (*space ecenomy*), kelestarian antariksa (*space sustainabilility*), dan keamanan antariksa (*space security*).

- **Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang**

  Ekonomi antariksa diperkirakan mencapai US$ 469,0 miliar pada tahun 2021 dan diprediksi akan terus meningkat mencapai US$ 1,0 triliun hingga tahun 2040. Nilai pasar ekonomi antariksa bahkan tumbuh sebesar 6,0 persen saat krisis COVID-19. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

6. **Tata Kelola Keuangan Global**

- **Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi**

  Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

- **Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara**

CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas asset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

- **Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan**

  Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), *Cloud Computing*, *Artificial Intelligence* (AI), dan *Machine Learning* telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Ke depannya puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (*skill*) yang baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial (*financial technology*) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

7. **Konstelasi Perdagangan Global**

- **Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika**

  Berkembangnya negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama di Tiongkok, India, dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di kawasan Afrika, Nigeria, dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

- **Kolaborasi produksi bersama internasional (*Global Production Networks/GPN*) dan rantai pasok global (*Global Value Chain/GVC*) semakin menguat dan terdiversifikasi**

  Skema GPN dan GVC menjadi salah satu pilihan utama bagi industri dalam melakukan produksi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari GPN dan GVC tidak hanya mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih murah, tetapi juga meningkatkan penerimaan investasi asing dan perdagangan internasional bagi suatu negara. Sementara itu, kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat GVC dunia seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor.

- **Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang**

  Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global.

- **Kerja sama Kawasan menciptakan *hub* perdagangan strategis**

  Kerja sama kawasan seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dan *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan berpusat

di Asia terutama kawasan Indo-Pasifik.

8. **Geopolitik dan Geoekonomi**

- **Dinamika geopolitik ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali indonesia**

  Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

- **Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan**

  Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antar negara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan.

- **Persaingan geopolitik terutama di Kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas**

  Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antar negara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan.

- **Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific* untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan**

  Indo-Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antar negara.

- **Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan**

  Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas (*borderless*) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional.

- **Nilai *output* dunia negara berkembang semakin dominan**

  Pada tahun 2015, negera berkembang menyumbang 55 persen dari nilai output dunia, meningkat 34 persen pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai output negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 persen dari total nilai output dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54 persen dari total nilai output global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai output yang menurun dari 32 persen pada tahun 2015 menjadi 20 persen pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi dari pada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015.

- **Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang**

  Sebagian besar negara berkembang selama 60 puluh tahun terakhir

mengandalkan ekspor komoditas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan 54 persen ekspor negara di kawasan Amerika Latin berbasis pada produk komoditas, 81 persen di Afrika, dan 75 persen di negara kawasan Timur Tengah. Perubahan struktur perekonomian, utamanya di negara pengimpor komoditas menurunkan permintaan atas komoditas. Kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang.

- **Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang**

  Kebijakan makroekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan menjadi salah satu pilar utama di masa mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas.

- **Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju**

  Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. secara umum, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Perbaikan investasi dan perkembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi akan menjadi sumber pertumbuhan di negara-negara kawasan Afrika Timur Tengah, dan Amerika Latin. Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya.

- **Perekonomian global pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun 2015**

Pada tahun 2015 perekonomian global adalah sebesar USD 74,0 triliun, dengan kontribusi Amerika Serikat sebesar USD 17,9 triliun, Tiongkok sejumlah USD 11,0 triliun, dan India senilai USD 2,1 triliun (IMF, *World Economic Outlook*, Oktober 2016). Pada tahun 2050 nilai perekonomian dunia diperkirakan meningkat sebanyak 3 kali lipat dengan kontribusi dari 5 negara terbesar (Tiongkok, India, AS, Jepang, dan Indonesia) mencapai kurang lebih 55 persen dari nilai *output* dunia.

9. **Peningkatan Urbanisasi Dunia**

- **Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota**

  Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, dimana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Berdasarkan data UN, pada tahun 2020 terdapat 23 *megacities*, yaitu kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa di dunia (di mana lebih separuhnya berada di negara *emerging economies*). Jumlah ini meningkat pesat sejak tahun 1970, di mana pada saat itu dunia hanya memiliki dua *megacities*.

- **Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara *emerging economies* yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyuluruh**

  Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25-30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan

perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (*compact*) melalui efisiensi layanan.

- **Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari**

  Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis mahadata kedepan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan. Di sisi lain, dampak pandemi COVID-19, di samping menimbulkan kerugian jiwa dan meterial, juga menjadi pemicu perkembangan teknologi yang memudahkan proses kolaborasi lintas ruang dan waktu. Tantangan terhadap pengarusutamaan pendekatan hijau juga menjadi peluang bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya humanis, melainkan juga ramah lingkungan. Kota yang mampu beradaptasi terhadap transformasi pasca pandemi dan pengarusutamaan pendekatan hijau tersebut akan mampu menarik SDM kompeititf untuk menetap dan berkarya.

10. Perkembangan Demografi Global

- **Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomo dan sosial dunia**

  Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (*life-span*) yang semakin panjang.

- **Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi glonal memengaruhi kualitas keluarga**

  Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena ingin tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran. Sementara itu perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal.

- **Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global**

  Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil menjadi daya tarik investor di kawasan tersebut. Pada saat bersamaan, beberapa negara berkembang di kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia di masa mendatang.

2.3.3.2 Isu Nasional

1. Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

Dalam kerangka pikir pembangunan nasional, membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Visi dan Misi abadi **Negara yaitu Negara Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur** menjadi acuan utama dalam setiap pembangunan yang kemudian diterjemahkan ke dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**. Untuk mencapai Visi Indonesia ditetapkan 8 Misi pembangunan, 5

Sasaran, dan 17 Tujuan pembangunan yang kesemuanya diukur dengan akan tercapainya 45 indikator utama pembangunan.

Penjabaran Visi:

1. **Berdaulat:**
   Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.
2. **Maju:**
   Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil.
3. **Berkelanjutan:**
   Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Penjabaran Misi:

1. **Transformasi Sosial:**
   Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. **Transformasi Ekonomi:**
   Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi Iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
3. **Transformasi Tata Kelola:**
   Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. **Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia:**

Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia ditingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdasya gentar kawasan.

5. **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:**
   Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. **Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan:**
   Pembangunan Kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing Wilayah.
7. **Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**
   Dukungan Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi
8. **Kesinambungan Pembangunan:**
   Kesinambungan Pembangunan Untuk Mengawal Pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Penjabaran Sasaran RPJPN:

1. **Pendapatan Perkapita Setara Negara Maju**
   Pendapatan perkapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US$ 23.000 - 30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima terbesar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen

berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.

2. **Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Ketimpangan Berkurang**

   Sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,290-0,320. Sementara itu, ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB kawasan timur Indonesia menjadi 28,5 persen.

3. **Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat**

   Sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan Global Power Indeks (GPI) di peringkat 15 besar dunia.

4. **Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat**

   Meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia *(Human Capital Index*) menjadi 0,73 persen pada tahun 2045.

5. **Intensitas Emisi dan Rumah Kaca (GRK) Menurun Menuju *Net Zero Emission***

   Dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang ditunjukan oleh menurunya Intensitas Emisi (GRK) menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca ditahun 2010, dan *menuju Net Zero Emission* pada tahun 2060.

Gambar 2. 76 Visi dan Misi RPJPN 2025-2045
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Selanjutnya, dalam mencapai visi dan misi Nasional terdapat 5 (lima) Sasaran pokok RPJPN 2025-2045 yaitu:

1. **Perkapita Setara Negara Maju.** Pendapatan perkapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US$ 23.000 - 30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima terbesar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.
2. **Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Ketimpangan Berkurang.** Sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,290- 0,320. Sementara itu, ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB kawasan timur Indonesia menjadi 28,5 persen.
3. **Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.** Sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia

internasional meningkat yang dicerminkan penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan *Global Power Indeks* (GPI) di peringkat 15 besar dunia.

4. **Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.** Meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) menjadi 0,73 persen pada tahun 2045.
5. **Intensitas Emisi dan Gas Rumah Kaca (GRK) Menurun.** Dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang ditunjukan oleh menurunya Intensitas Emisi (GRK) menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca ditahun 2010, dan menuju *Net Zero Emission* pada tahun 2060.

Selanjutnya, isu jangka panjang nasional yang dapat dijadikan referensi dalam merumuskan isu strategis diantaranya adalah dokumen RPJP Nasional dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua. Review terhadap RPJPN bertujuan untuk mengetahui arah pembangunan nasional dan sasaran pembangunan pada setiap tahapan lima tahunan. Pemahaman terhadap arah dan sasaran pembangunan jangka panjang memandu RPJPD Kabupaten Mappi agar selaras dengan tujuan pembangunan pusat dan daerah (provinsi). Adapun berdasarkan RPJP Nasional 2025-2045 isu dan tantangan pembangunan selengkapnya dapat dilihat pada uraian berikut ini:

1. **Tingkat produktivitas yang masih rendah di tengah persaingan global semakin meningkat, hal tersebut ditandai dengan:**
   - Produktivitas yang rendah juga kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus melambat;

- Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai;
- Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah;
- Lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian;
- Kinerja pariwisata meningkat, tetapi masih di bawah potensi yang dimilikinya, sedangkan pemanfaatan potensi ekonomi kreatif yang besar masih perlu dikembangkan;
- Belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan;
- Kontribusi UMKM terhadap perekonomian relatif rendah;
- Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal;
- Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi;
- Pengelolaan limbah industri cenderung masih lemah;
- Infrastruktur digital yang belum optimal, rendahnya literasi digital, serta belum tersedianya talenta digital yang memadai sehingga pemanfaatan digital untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat belum terlaksana secara optimal; dan
- Rendahnya peran perkotaan di Indonesia dalam kontribusi PDB perkotaan.

2. **Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat.**

3. **Sektor pendidikan, pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan**

di berbagai bidang, hal tersebut ditandai dengan:

- Kualitas pendidikan yang masih rendah;
- Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global saat ini juga masih rendah; dan
- Kualifikasi pendidikan penduduk masih rendah.

4. **Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.**

5. **Tata Kelola diperlukan dalam rangka memampukan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas:**
   - Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah;
   - Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif;
   - Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif;
   - Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D;
   - Belum meratanya kualitas pelayanan publik;
   - Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat; dan
   - Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantang mendasar;

6. **Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik, hal tersebut ditandai dengan:**
   - Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal;

- Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan;
- Dari aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal procedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan; dan
- Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan.

7. **Stabilitas makro yang mencakup aspek fiskal dan moneter masih menghadapi beberapa tantangan, utamanya ketidakpastian ekonomi global dan keberlanjutan fiskal, hal tersebut ditandai dengan:**
    - Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya dan ekologi, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan dengan masyarakat;
    - Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan; dan
    - Meskipun pembangunan kewilayahan sejak desentralisasi dilaksanakan pada tahun 1999 telah mencapai hasil yang cukup signifikan, ketimpangan antar wilayah walau menurun masih cukup tinggi.

8. **Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya, hal tersebut ditandai dengan:**
    - Belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana;
    - Konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau

belum optimal;

- Belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/ Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang; dan
- Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.

2. Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Isu strategis di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dibagi menjadi lima isu besar, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Kategori isu ini harus diperhatikan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Berikut adalah rincian dari isu strategis nasional di dalam dokumen RPJMN tahun 2025-2029.

a. Isu Strategis Transformasi Sosial

Transformasi Sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi Sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, resilien, unggul, dan berdaya saing. Namun demikian, masih terdapat tantangan pada masing-masing bidang pembangunan.

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, baik kesehatan ibu dan anak, usia sekolah, usia produktif maupun lansia. Pengendalian penyakit dan kapasitas ketahanan kesehatan juga belum optimal. Penyakit menular masih tinggi, penyakit tidak menular terus meningkat, penyakit tropis terabaikan belum dapat dieliminasi, adanya ancaman penyakit berpotensi wabah/kejadian luar biasa, dan perilaku hidup sehat belum membudaya. Selain itu, disparitas kapasitas sistem kesehatan

terjadi di seluruh wilayah yang menyebabkan permasalahan pada kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.

Sementara pada bidang pendidikan masih menghadapi tantangan di antaranya, belum meratanya akses pendidikan yang menyebabkan ketimpangan partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi. Selain itu, kualitas pendidikan masih rendah antara lain disebabkan oleh sarana prasarana pendidikan yang belum memadai, dan keterbatasan guru berkualitas yang belum terdistribusi secara merata. Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global juga masih rendah.

Adapun perlindungan sosial berfokus untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga kesinambungan kesejahteraan, khususnya untuk penduduk rentan. Tantangan yang dihadapi yaitu masih rendahnya akurasi dan integrasi program bantuan sosial, risiko bencana alam dan non alam, perubahan iklim, transisi besar lainnya, terbatasnya layanan dan pengasuhan bagi kelompok rentan, belum meratanya kesempatan kerja dan berusaha bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan, serta rendahnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Sementara itu, penyelenggaraan program jaminan sosial belum optimal akibat rendahnya kepesertaan aktif dan literasi masyarakat serta program yang belum sepenuhnya konvergen memberikan perlindungan yang inklusif khususnya bagi pekerja informal dan jaminan hari tua bagi seluruh penduduk.

Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan dan pemerataan kapasitas ketahanan kesehatan, serta responsiveness sistem kesehatan di seluruh wilayah.

1	AKI masih tinggi (189/100.000)
2	Stunting masih tinggi (21,6%)
3	Prevalensi obesitas terus meningkat (21,8%)
4	Persentase aktivitas fisik cukup pada penduduk umur ≥10 tahun masih rendah (66,5%)
5	Kasus baru TBC peringkat ke-2 dunia (385 per 100.000 penduduk)
6	Kasus baru kusta peringkat ke-3 dunia (10.976 kasus baru)
7	43,78% puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes sesuai standar
8	20,36% RSUD kelas C belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang
9	78,35% rumah sakit terakreditasi paripurna
10	63,54% PKTP terakreditasi paripurna

Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang.

1	Akses pendidikan belum merata (APK PAUD 36,36% dan tingkat penyelesaian SMA/SMK/MA/sederajat 66,79%)
2	Kualitas pendidikan masih rendah (skor PISA membaca: 359, matematika: 366, sains: 383)
3	Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru terbatas (<50% guru memiliki sertifikat pendidik dan kekurangan 679 ribu guru)
4	Kualifikasi pendidikan angkatan kerja masih rendah (55,43% berpendidikan SMP ke bawah)
5	Rendahnya kualitas lulusan, sehingga produktivitas dan daya saingnya masih rendah (40,49% yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi)
6	Daya saing pengunan tinggi di tingkat nasional masih rendah (peringkat 75 dari 132 negara dalam GII pada tahun 2022)

Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kewenangan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

1	Akurasi program bantuan sosial masih rendah
2	Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim
3	Kesempatan yang belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah
5	Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan
6	Program Jaminan Sosial belum optimal dan inklusif

Gambar 2. 77. Isu Strategis Transformasi Sosial RPJMN Tahun 2025-2029

Sumber: RPJMN tahun 2025-2029

b. Isu Strategis Transformasi Ekonomi

Pembangunan ekonomi Indonesia jangka menengah dalam rangka keluar dari jebakan negara pendapatan menengah dan mengejar pertumbuhan berbasis produktivitas akan menghadapi berbagai isu dan tantangan struktural.

Industrialisasi belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, bahkan peranannya cenderung mengalami penurunan. Upaya pengembangan sektor industri pengolahan dihadapkan pada berbagai isu strategis, baik dari sisi penawaran (*supply*) seperti inefisiensi faktor produksi, kompleksitas dan nilai tambah produk yang masih rendah, struktur industri yang belum kuat, serta kemampuan adopsi teknologi, pemanfaatan RD&D (*Research, Development, and Demonstration*) dan penerapan standardisasi yang masih terbatas atau pun dari sisi permintaan (*demand*).

Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia menjadi tantangan besar dalam memperluas kelas pendapatan menengah karena sebagian besar angkatan kerja Indonesia berpendidikan menengah ke bawah dan bekerja di sektor bernilai tambah rendah. Akibatnya, laju peningkatan nilai tambah di beberapa subsektor industri padat karya pun relatif terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum Indonesia masih berada pada era Industrial Revolution 2.0. Di sisi lain, perkembangan teknologi industri semakin masif, sehingga perlu akselerasi peningkatan kemampuan dan produktivitas tenaga kerja industri.

Hal tersebut terjadi juga di sektor pertanian, bahkan penyerapan tenaga kerja berpendidikan menengah ke bawah pada sektor pertanian relatif tinggi. Selain itu, sektor pertanian masih memiliki tantangan untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya adopsi teknologi. Lambatnya regenerasi petani serta degradasi kualitas lahan. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga dihadapkan pada pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang belum berkualitas karena SDM, dukungan fasilitas, serta sarana dan prasarana yang terbatas.

Sektor UMKM dan koperasi masih terkendala dalam meningkatkan kapasitasnya, terutama dari sisi permodalan dan adopsi teknologi sehingga menghambat UMKM dan koperasi untuk naik kelas. BUMN sebagai agen pembangunan masih bersifat eksklusif dalam melaksanakan penugasan pembangunan. Diharapkan BUMN dan UMKM dapat bersinergi dalam

mendukung pembangunan sehingga dapat lebih berdampak, inklusif, dan berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang diharapkan dapat mendorong Indonesia berperan di pasar global dihadapkan pada berbagai isu antara lain masih belum optimalnya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, terbatasnya pasar bagi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia domestik maupun global, masih rendahnya pemanfaatan keuangan syariah dalam mendukung perekonomian, serta regulasi dan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah baik pusat maupun daerah yang belum optimal.

Upaya pembangunan berkelanjutan melalui transisi energi perlu diakselerasi utamanya pada isu ketergantungan pada energi fosil dan rendahnya pemanfaatan potensi energi terbarukan, emisi GRK pada sektor pembangkit dan transportasi yang sangat tinggi, keterbatasan dukungan pendanaan dan investasi, keterbatasan infrastruktur kelistrikan, serta keterbatasan infrastruktur gas bumi untuk sektor industri. Pendekatan ekonomi hijau dan biru belum mencapai posisi yang kuat. Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya karena membutuhkan biaya dan teknologi tinggi untuk implementasinya.

Percepatan digitalisasi dihadapkan pada tantangan keberagaman geografi dan karakteristik daerah yang berbeda sehingga pelaksanaannya masih perlu terus didorong secara kolaboratif. Kesenjangan dan karakteristik antar daerah dan wilayah yang berbeda juga menyebabkan pengintegrasian ekonomi domestik masih perlu intervensi lebih jauh untuk optimalisasinya.

Selain itu, rendahnya akses hunian layak dan layanan perkotaan yang menimbulkan permukiman kumuh dan *urban sprawl* berdampak pada belum optimalnya kualitas urbanisasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, masih juga terdapat ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan.

Industri

1	Deindustrialisasi dini, ditunjukkan oleh penurunan rasio PDB industri pengolahan per PDB dari 32,0% (2002) menjadi 18,3% (2022)
2	Rendahnya produktivitas tenaga kerja, dimana produktivitas TK Indonesia tahun 2020 setara dengan produktivitas TK Jepang di tahun 1960-an (APO, 2022)
3	Kompleksitas dan daya saing produk, produk industri pengolahan semakin kehilangan daya saingnya di pasar global padahal Malaysia dan Thailand semakin bergerak ke arah ekspor produk *knowledge intensive* (Basri, 2023)
4	Adopsi teknologi kian masif, sementara TK di industri pengolahan masih didominasi oleh *unskilled labour* (89,3%, 2022) dan hanya 18,6% lulusan pendidikan tinggi yg berasal dari program STEAM (BPS, 2022; WEF, 2020; WB, 2017)
5	*Mismatched* produksi dengan permintaan global, contoh untuk produk HS 85, Indonesia mengekspor produk yang permintaannya melambat dalam 5 tahun terakhir (Trademap, 2023)
6	Rendahnya kemampuan inovasi, dalam *Global Innovation Index* tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-75 dari 132 negara
7	Tuntutan energi hijau semakin besar, sementara penggunaan energi fosil di industri pengolahan masih di atas 60% (IESR, 2022)

Produktivitas Tenaga Kerja

Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia menjadi tantangan besar dalam mewujudkan transformasi ekonomi untuk memperluas *middle income class* menuju Indonesia Emas 2045.

1	Besarnya angkatan kerja berpendidikan SMP ke bawah sebesar 53,4% (BPS, 2023)
2	Ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) di pasar kerja
3	Belum terbangunnya sistem informasi pasar kerja yang kredibel
4	Stagnasi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan

Pertanian

1	Rendahnya nilai tambah produk pertanian
2	Rendahnya produktivitas pertanian
3	Rendahnya adopsi teknologgi pertanian
4	*Aging farmer*
5	Degradasi kualitas lahan

Ekonomi Biru

1	Upaya konservasi kawasan perairan dan pesisir yang belum maksimal
2	Rendahnya produktivitas, nilai tambah, daya saing ekonomi biru yang tecermin pada rendahnya kontribusi PDB Maritim terhadap PDB Nasional
3	Rendahnya Kualitas, Keterjangkauan, dan Keamanan Pangan Akuatik/Pangan Biru
4	Rendahnya jumlah dan kualitas riset, penggunaan teknologi, inovasi, ketersediaan data dan informasi terkait kemaritiman dan perairan darat
5	Kurangnya pendanaan dan tata kelola pada sektor-sektor penghasil barang, penghasil jasa, dan upaya konservasi di kawasan perairan dan pesisir

Ekonomi Kreatif

1	Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal • Indeks Kekayaan Intelektual Indonesia berada pada posisi 50 dari 55 negara, di bawah rata-rata nilai Indeks di Asia (2023) • Merujuk data yang sama pilar komersialisasi KI menjadi skor terendah dengan 2,5 skala 100
2	Ketersediaan data ekonomi kreatif yang sangat terbatas, sedangkan peranan data sangat penting untuk menyusun kebijakan
3	Kelembagaan ekonomi kreatif yang belum optimal, terutama untuk mendukung ekosistem kekayaan intelektual
4	Daya saing SDM Ekonomi kreatif yang rendah, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual
5	Rantai pasok ekonomi kreatif yang belum optimal, terutama di daerah

UMKM dan Koperasi

1	Rendahnya kontribusi dan jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil
2	Rendahnya pemanfaatan riset dan adopsi teknologi pada UMKM
3	Belum optimalnya akses UMKM terhadap pembiayaan dan pemasaran
4	Rendahnya wirausaha yang berorientasi untuk tumbuh

Pekerjaan Hijau

Belum memadainya ekosistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan besar dalam mengoptimalkan peluang penciptaan pekerjaan hijau (*green jobs*) untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

1	Minimnya pemahaman dan minat terhadap pekerjaan hijau
2	Belum terintegrasinya data, arah kebijakan, dan strategi pengembangan SDM dalam mendukung pekerjaan hijau
3	Belum memadainya pengembangan keahlian dan kompetensi tenaga kerja hijau
4	Terbatasnya akses pendanaan dan insentif dalam pengembangan pekerjaan hijau
5	Lemahnya peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) dalam mendukung pengembangan pekerjaan hijau

Pengelolaan Hutan Lestari

1	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB Nasional masih rendah
2	Rendahnya Produktivitas Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu
3	Belum berkembangnya Bioekonomi Sektor Kehutanan
4	Belum optimalnya pemanfaatan seluruh potensi sumber daya hutan (air, karbon, dan keanekaragaman hayati)
5	Pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat melalui Perhutanan Sosial belum mencapai kondisi ideal
6	Terbatasnya kewenangan dan peranan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
7	Tingginya tingkat deforestasi
8	Keterlibatan para pihak/multisektor yang belum optimal

Percepatan Transisi Energi

1	Ketergantungan terhadap energi fosil yang cadangannya terus menurun
2	Emisi GRK sektor energi yang cukup tinggi terutama sektor pembangkit dan transportasi
3	Potensi energi terbarukan yang sangat besar dan pemanfaatan masih sangat kecil
4	Kualitas infrastruktur ketenagalistrikan yang belum memadai
5	Keterbatasan dukungan pendanaan transisi energi
6	Pemanfaatan energi baru yang belum berkembang
7	Dominasi pembangkit listrik berbasis fosil dan keterbatasan sistem penyaluran
8	Ketimpangan dan rendahnya kualitas pelayanan ketenagalistrikan
9	Ketergantungan pada produksi impor
10	Belum optimalnya tata kelola ketenagalistrikan termasuk kebijakan tarif dan harga
11	Terbatasnya rantai nilai domestik pendukung transisi energi
12	Keterbatasan untuk adopsi dan adaptasi perkembangan teknologi (termasuk digitalisasi)

Digital

1	Perlunya penguatan pondasi dalam percepatan transformasi digital • Belum meratanya infrastruktur konektivitas digital dan kumputasi yang berkualitas • Penguatan pengelolaan ekosistem infrastruktur, termasuk tata kelola dan regulasi • Belum optimalnya adopsi perkembangan perangkat teknologi infrastruktur digital dan infrastruktur penyiaran
2	Digitalisasi Sektor Strategis • Terdapat layanan pendidikan dan kesehatan belum berinternet • Penguatan pemerintah digital (SPBE dan SDI) • Adopsi digital bagi pelaku UMKM belum optimal • Inovasi dan pengembangan keuangan digital (*FinTech*) • Pengelolaan destinasi wisata, pertanian, perikanan, logistik, industri, serta sektor lain yang berbasis teknologi
3	Aspek Pendukung dan Akselerator Transformasi Digital • Keamanan siber nasional • Perlindungan data pribadi dan privasi • Literasi digital masyarakat belum merata • Penyediaan SDM dan talenta digital berkualitas untuk meguasai dan menerapkan adopsi teknologi • Pemanfaatan teknologi modern (*Artificial Inteligence, Big Data Analytics, Blockchain, IoT, gigabit coonectivity, cloud computing*, dst)

Badan Usaha Milik Negara

1. Masih rendahnya produktivitas BUMN
   - Masih rendahnya ROA BUMN (3,05% di tahun 2022)
   - Masih rendahnya kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (Rp573,6 Triliun pada tahun 2022)
2. Masih rendahnya Daya Saing BUMN
   - Masih rendahnya Total *Asset Turn Over* BUMN (0,3% pada tahun 2022)
3. Peran BUMN sebagai Agen Pembangunan
   - Masih rendahnya rasio capex BUMN terhadap PDB (1.3% pada tahun 2022)
   - Masih rendahnya rasio persentase perusahaan negara yang telah melakukan kegiatan berkonsep *Creating Shared Value* (CSV) (70% pada tahun 2022)

Pariwisata

1. Destinasi pariwisata menghadapi masalah degradasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal akibat pariwisata yang tidak terkendali (overtourism) dan akulturasi budaya dari wisatawan
2. Terbatasnya amenitas, aksesibilitas, dan atraksi yang melaksanakan kaidah pariwisata berkelanjutan
3. Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus pada kepuasan pengalaman
4. Rendahnya pengeluaran wisatawan akibat rendahnya investasi pariwisata dan pilihan kegiatan wisata
5. Kurangnya keterampilan SDM pariwisata dan rendahnya pemanfaatan ekonomi pariwisata oleh masyarakat lokal

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Keterkaitan perekonomian secara domestik masih terbatas
   - Pusat pertumbuhan masih berfokus di Jawa
   - Infrastruktur konektivitas belum memadai dan belum terintegrasi
   - Kinerja sistem logistik nasional belum optimal
   - Pembangunan wilayah tidak merata
   - Ketimpangan pembangunan antardaerah dan kebutuhan pendekatan
2. Perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta partisipasi dalam rantai nilai global masih belum optimal

   Supply Side
   - Keterkaitan rantai nilai antarwilayah masih rendah serta ekspor serta terpusat di Pulau Jawa
   - Masih rendahnya *awareness* daerah untuk diversifikasi ekspor
   - Masih rendahnya daya saing ekspor domestik
   - Pembiayaan ekspor masih terhambat
   - Masih belum terintegrasinya fasilitasi dan informasi terkait perdagangan
   - Keterbatasan informasi dalam mengakses data sektor perdagangan jasa
   - Sektor jasa memiliki regulasi yang saling tumpang tindih
   - Standardisasi produk ekspor yang masih belum optimal
   - Masih belum optimalnya ekosistem persaingan usaha

   Demand Side
   - Daya saing produk sektor jasa yang masih rendah
   - Minat pelaku industri sektor jasa yang masih rendah untuk masuk ke dalam pasar global.
   - Adanya kebijakan dekarbonisasi (*decarbonization policies*) di beberapa negara
   - Peningkatan kebijakan proteksionisme serta *trade barriers* yang tinggi (bea masuk, NTMs) di beberapa negara
3. Belum optmalnya penguatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global
   - Infrastruktur yang belum memadai menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi
   - Kekurangan pembiayaan, terutama di daerah dengan sumber daya keuangan terbatas
   - Perlunya pasar yang kuat untuk mendukung investasi
   - Biaya tinggi dan hambatan dalam menarik investasi
4. Daya dukung tercapainya integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global perlu diperkuat
   - Masih terdapat regulasi yang menghambat perbaikan iklim berusaha
   - Terbatasnya investasi produktif dan berkualitas yang mendukung upaya transformasi ekonomi
   - Tumpang tindih peraturan dan birokrasi yang menghambat pembangunan infrastruktur
   - Koordinasi cermat diperlukan dalam integrasi moda transportasi

Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1 Belum Optimalnya Kontribusi Ekonomi Perkotaan terhadap Nasional
- Potensi ekonomi perkotaan yang belum teroptimalisasi secara maksimal
- Pertumbuhan ekonomi perkotaan yang belum berkontribusi pada kawasan sekitar

2 Pola Pembangunan Perkotaan yang Menyerak
- Penggunaan lahan perkotaan yang belum efisien
- Pengendalian pemanfaatan ruang yang belum terlaksana secara efektif
- Laju urbanisasi pinggiran kota yang lebih tinggi dibandingkan kota inti khususnya di Wilayah Metropolitan

3 Pemenuhan Layanan Perkotaan yang Belum Memadai dan Inklusif
- Ketersediaan rumah layak huni terjangkau belum memadai
- Pemenuhan layanan air minum dan akses sanitasi layak terjangkau belum merata
- Pengelolaan dan penanganan sampah belum berkelanjutan
- Rendahnya ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur dan jaringan aksesibilitas kawasan perkotaan
- Rendahnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan
- Sarana pendidikan dan kesehatan belum memadai dan merata

4 Masalah Sosial-Ekonomi Masyarakat Perkotaan
- Rendahnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja penduduk perkotaan
- Penanganan sektor ekonomi informal perkotaan yang belum optimal
- Tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial yang masih tinggi
- Tingkat kriminalitas yang tinggi di perkotaan

5 Degradasi Lingkungan Perkotaan dan Rendahnya Ketangguhan Bencana
- Tingkat pencemaran lingkungan perkotaan yang tinggi
- Risiko bencana alam dan nonalam yang tinggi di perkotaan

6 Tata Kelola yang Belum Terpadu, Inovatif, dan Kolaboratif
- Belum adanya regulasi yang khusus mengatur perkotaan secara terpadu
- Belum sinkronnya kebijakan pembangunan perkotaan antar lembaga sektoral dan antar pusat daerah
- Belum lengkapnya ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang di daerah
- Rendahnya pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan alternatif perkotaan
- Rendahnya kapasitas fiskal daerah dan rendahnya kualitas belanja daerah
- Belum optimalnya digitalisasi pelayanan publik
- Belum terintegrasi dan belum memenuhinya standar data perkotaan dengan data lainnya

7 Kemiskinan dan Ketimpangan di Perkotaan-Perdesaan
- Tingkat kemiskinan di perdesaan sebesar 12,22% (di atas tingkat kemiskinan nasional 9,36%), sementara tingkat kemiskinan perkotaan berada di angka 7,29% (BPS, 2022)
- Terdapat kesenjangan akses pelayanan dasar pada perdesaan, seperti rendahnya akses air minum layak di perdesaan sebesar 85,70%, sementara di perkotaan mencapai 94,40%. Akses air minum jaringan perpipaan di perkotaan yang sebesar 26,63% dan akses di perdesaan hanya sebesar 10,16%. Untuk akses sanitasi aman, hanya 5,4% rumah tangga di perdesaan yang terlayani dan 13,46% akses di perkotaan (Susenas, 2023)
- Rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni yang dilengkapi akses air minum dan sanitasi layak hanya sebesar 63,15%, mencakup 65,47% akses di perkotaan dan 59,91% akses di perdesaan (Susenas, 2023)
- Belum optimalnya integrasi antara penyediaan perumahan dengan prasarana, sarana dan utilitas umum

8 Perubahan Lanskap Perdesaan
- Banyak desa yang berkarakteristik urban akibat pertumbuhan dan pembangunan (in situ urbanisasi) (BPS, 2020)
- Kebutuhan diversifikasi ekonomi desa karena tren penurunan sektor pertanian hingga seperlima di tahun 2045 (BPS, 2021)

Gambar 2. 78. Isu Strategis Ekonomi RPJMN Tahun 2025-2029

Sumber: RPJMN tahun 2025-2029

c. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola

Tata kelola merupakan konsep penting dalam diskursus pembangunan dan telah diterima secara universal sebagai elemen krusial dalam menentukan strategi pembangunan. Ruang lingkup tata kelola dalam RPJMN 2025-2029 meliputi wilayah politik, administrasi, dan hukum. Tata kelola tidak hanya menyangkut kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, namun juga terkait dengan bagaimana pengelolaan tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, inklusif, bermanfaat, serta berdampak secara sosial dan ekonomi. Transformasi tata kelola diperlukan untuk merespon munculnya kecenderungan besar (*global megatrends*) dan adanya perubahan lingkungan strategis di level global maupun nasional, terutama terkait dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya tuntutan dan kesadaran masyarakat.

Selain itu, transformasi tata kelola menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan, konsistensi, dan sinkronisasi kebijakan pembangunan makro dan sektoral. Namun demikian, masih terdapat berbagai persoalan tata kelola, baik yang menyangkut wilayah birokrasi, politik dan hukum. Reformasi Birokrasi masih bersifat prosedural dan administratif sehingga belum dapat mencegah terjadinya praktik-praktik koruptif. Hal tersebut terlihat dari adanya kecenderungan penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada dua tahun terakhir. Selain itu, tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga, serta pembagian kewenangan yang belum ideal, telah menghasilkan inefisiensi birokrasi. Intervensi politik atas birokrasi juga menjadi persoalan menonjol dalam tata kelola pemerintahan. Konteks dan lingkungan politik menjadi penentu dalam proses transformasi tata kelola. Pada akhirnya, persoalan-persoalan tersebut menjadi kendala utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Integritas Partai Politik

1. Integritas partai politik belum terwujud karena standar etika belum ada, demokrasi internal belum optimal, kaderisasi belum terlembaga, rekrutmen politik belum terbuka, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan belum optimal, di samping biaya politik tinggi dan pendanaan dari negara yang belum memadai

Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik

1. Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat serta belum memadainya kompetensi digital penyelenggara dan pengguna pelayanan publik

Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan

1. Lemahnya kontrol dalam pencegahan di sektor-sektor yang rawan korupsi serta rendahnya budaya antikorupsi yang akhirnya mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi
2. Belum adanya sistem penilaian kementerian/lembaga/daerah terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja, anggaran, dan integritas
3. Indonesia memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 34 dari skala 0-100 pada 2023
4. Belum optimalnya peran APIP untuk dapat memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan peningkatan manajemen risiko

Sistem Penggajian Tunggal

1. Disparitas kesejahteraan ASN pusat dan daerah, remunerasi ASN belum memenuhi prinsip kompetitif, manfaat pensiun ASN masih rendah, dan adanya dual system penggajian ASN

Manajemen Talenta

1. Penerapan sistem merit belum optimal, belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D, dan 34% ASN berusia 50 tahun ke atas (*aging*)

Kualitas Regulasi

1. Kondisi hiper regulasi, kewenangan pengelolaan regulasi yang tersebar di beberapa Kementerian, belum memadainya SDM di bidang regulasi, dan partisipasi pembentukan regulasi yang belum optimal

Integrasi Proses Bisnis

1. Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak efektif serta tumpang tindih program yang memboroskan anggaran

Gambar 2. 79. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola RPJMN Tahun 2025-2029

Sumber: RPJMN tahun 2025-2029

d. Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Dalam rangka menjamin kepastian hukum melalui pemerintahan yang efektif dan responsif maka arah kebijakan tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis. Dalam bidang hukum, kelembagaan dan praktik penegakan hukum belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM, rendahnya kepatutan hukum masyarakat karena minimnya literasi dan pemberdayaan, serta akses terhadap keadilan yang terbatas.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, perkembangan teknologi dan teknologi informasi menjadi ancaman sekaligus peluang dalam pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang demokrasi, belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sipil, belum meratanya informasi dan komunikasi publik, serta Pancasila dan konstitusionalisme yang belum terinternalisasi. Kelembagaan demokrasi masih bersifat prosedural akibat politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu, serta belum optimalnya fungsi lembaga perwakilan.

Dalam bidang politik luar negeri, dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan luar negeri, seperti konflik intra dan antarnegara, disrupsi rantai pasok global, dan tren *global economic decoupling*. Kondisi eksternal diiringi dengan belum terselesaikannya perundingan batas wilayah negara serta belum idealnya postur dan sinergi pelaksanaan diplomasi Indonesia.

Stabilitas ekonomi makro masih menghadapi tantangan dalam 5 tahun ke depan. Secara eksternal, perlambatan ekonomi mitra dagang utama, divergensi ekonomi global, tekanan inflasi global, kebijakan suku bunga acuan higher for longer, perubahan iklim, serta tren digitalisasi. Dari sisi domestik, rendahnya penerimaan perpajakan, belum optimalnya kualitas Belanja Negara baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Belanja Transfer ke Daerah, serta imbal hasil obligasi yang relatif masih tinggi dibanding negara sekawasan menjadi tantangan keberlanjutan fiskal.

Terakhir, dangkalnya pendalaman sektor keuangan, belum optimalnya fungsi intermediasi sektor keuangan, terbatasnya peran sektor keuangan non-bank, ketimpangan inklusi dan literasi keuangan, belum optimalnya pengembangan keuangan syariah, dan lemahnya perlindungan konsumen/ investor menjadi tantangan bagi sektor keuangan dalam menyediakan likuiditas yang memadai untuk pembiayaan pembangunan.

Stabilitas Makro

1 Risiko *climate action*; Deglobalisasi; Krisis lapangan pekerjaan; Krisis utang, Konfrontasi geoekonomi; Asset bubble burst; Inflasi masih tinggi; tingkat suku bunga higher for longer; tensi geopolitik; disrupsi rantai pasok; perlambatan ekonomi China, AS da Eropa, serta divergensi ekonomi global; transisi demografi; perubahan iklim; potensi pandemi ke depan; digitalisasi; rendahnya penerimaan perpajakan; masih terbatasnya belanja negara, serta imbal hasil obligasi yang tinggi

Demokrasi

1 Demokrasi masih prosedural dengan ciri: (1) Kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; (2) Belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; (3) informasi dan komunikasi publik belum merata; (4) Permasalahan politik electoral seperti, politik uang, politisasi isu SARA; (5) Fungsi-fungsi asasi parlemen belum terlaksana secara optimal; (6) nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi

Politik Luar Negeri

1 Dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan luar negeri, beberapa di antaranya seperti konflik intra dan antar negara; disrupsi rantai pasok global dan tren *global economic decoupling*; belum terselesaikannya perundingan batas wilayah; serta belum idealnya postur dan sinergi pelaksanaan diplomasi Indonesia

Hukum

1 Praktik penegakan hukum yang belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM; Rendahnya kepatutan hukum masyarakat sebagai akibat dari minimnya literasi dan pemberdayaan; Keterbatasan akses terhadap keadilan; dan Kelembagaan penegak hukum yang belum professional

Keamanan

1 Insurgensi; konflik internal termasuk konflik sosial; serangan terorisme; pelanggaran batas wilayah dan kejahatan transnasional; disrupsi teknologi; pelanggaran hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi; serta perlindungan IIVN dari serangan siber

Pertahanan

1 Dampak konflik hegemoni; perubahan tipologi perang yang semakin kompleks dan sarat penggunaan senjata Chemical, Biological, Radioactive, Nuclear and High Yield Explosive (CBRNE) termasuk respon negara-negara di dunia untuk memperkuat industri pertahanannya

Gambar 2. 80. Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia RPJMN Tahun 2025-2029

Sumber: RPJMN tahun 2025-2029

e. Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

Keseimbangan pengakuan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu dipastikan

terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

Seiring dengan meningkatnya populasi, Indonesia dihadapkan pada isu penurunan kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, dan ketersediaan sumber daya alam. Konversi lahan hutan untuk pertanian dan perkebunan telah mengurangi fungsi lingkungan hutan. Petani dan nelayan yang merupakan produsen pangan menghadapi masalah serius berupa stagnasi kesejahteraan. Isu pengelolaan sampah juga perlu diwaspadai, mengingat daya tampung tempat pemrosesan akhir (TPA) diprediksi akan penuh pada 2028.

Saat ini, Indonesia berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan intensitasnya di lima sektor kunci, yakni energi, lahan, kelautan dan pesisir, industri, dan pengelolaan limbah. Pada sektor energi, pemenuhan ketahanan energi masih menghadapi tantangan dalam segi penyediaan, akses, maupun harga. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dari aspek pendanaan, regulasi, inovasi, hingga kelembagaan diharapkan dapat menggantikan peran energi fosil. Dampak perubahan iklim berpotensi meningkatkan kerugian ekonomi, kerentanan masyarakat, dan intensitas bencana lingkungan, terutama di sektor air, laut dan pesisir, pertanian, serta kesehatan. Ancaman kelangkaan air muncul dari rendahnya efisiensi pengelolaan dan daya rusak sumber daya air. Akses terhadap air minum dan sanitasi yang buruk juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit menular dan masalah pertumbuhan anak.

Isu Agama

1	Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kebaikan bersama
2	Wawasan dan identitas nasional sebagai bangsa majemuk tidak serta merta melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif, ditandai dengan capaian IKUB di tahun 2023 sebesar 76,02
3	Beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan

Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1	Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda
2	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal
3	Ketimpangan gender yang masih tinggi
4	Kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif menjadi sulit terwujud

Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati

1	Kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut semakin menurun. Indeks Kesehatan Laut (OHI) Indonesia masih rendah (63) atau baru berada pada peringkat 152 dari 220 wilayah global. Biaya kesehatan akibat pencemaran lingkungan menjadi tinggi
2	Peningkatan luasan lahan terkontaminasi limbah B3 yang cukup signifikan akibat pembuangan limbah secara ilegal
3	Terdapat setidaknya sepuluh provinsi yang status TPA-nya sudah melebihi kapasitas daya tampungnya, antara lain: Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DIY, dan Banten, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Maluku
4	Laju Kepunahan Spesies global semakin cepat dan sudah puluhan hingga ratusan kali lebih tinggi daripada rata-rata selama 10 juta tahun terakhir. Saat ini, sekitar 1 juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan

Isu Budaya

1	Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global
2	Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
3	Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat, ditandai dengan capaian IPK di tahun 2022 sebesar 55,13

Pangan

1	Belum idealnya kualitas, keragaman, dan keamanan pangan
2	Belum optimalnya kapasitas produksi pangan nasional, termasuk pangan lokal dan pangan akuatik
3	Belum terpadunya tata kelola sistem pangan, termasuk susut dan sisa pangan, Satu Data Pangan serta pendekatan *One Health*
4	Masih belum optimal keterkaitan/*nexus* antara pangan, energi, dan air (*food, energy, and water nexus*)

Energi

1	Akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah
2	Pangsa pemanfaatan energi baru-terbarukan dalam bauran energi nasional yang masih kecil
3	Efisiensi pengusahaan dan pemanfaatan energi yang belum berjalan baik
4	Kurangnya eksplorasi
5	Tata kelola energi oleh badan usaha yang belum efektif dan belum efisien
6	Kewenangan pengelolaan energi pada level provinsi terbatas

Bencana dan Perubahan Iklim

1	Tren kejadian bencana meningkat hampir tiga kali lipat dalam satu dekade terakhir, dengan didominasi bencana hidrometeorologi
2	53.000 desa terletak di daerah rawan bencana dan menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 51 juta keluarga

Gambar 2. 81. Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

Sumber: RPJMN tahun 2025-2029

2.3.3.3 Isu Regional Papua

Perumusan isu regional adalah hal penting dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Mappi 2025-2029. Sebagaimana diungkap dalam dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Papua Selatan 2025-2029, pemetaan isu regional bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan kelompok pendapatan di Papua Selatan. Pemetaan berbasis regional ini didorong oleh desentralisasi dan otonomi daerah sehingga kapasitas daerah memegang peranan utama dalam pembangunan berkelanjutan. Harapannya, setiap karakteristik masing-masing wilayah dapat dipertimbangkan dan berpihak pada daerah afirmasi.

Secara umum, isu regional di wilayah Provinsi-Provinsi Papua (termasuk Provinsi Papua Selatan) adalah pembangunan wilayah Papua masih berada pada tingkat penguatan fondasi. Hal ini dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan, pelayanan dasar, dan daya saing yang belum maksimal. Upaya untuk memecahkan masalah pembangunan ini memerlukan intervensi lintas sektor pembangunan seperti pengembangan sumber daya manusia, penguatan kapasitas perencanaan dan penganggaran, hingga peningkatan kepemimpinan sektor publik di wilayah Papua. Dengan merujuk pada RPJPN 2025-2045, isu regional yang terdapat di wilayah Papua dapat dilihat pada beberapa kondisi seperti berikut.

Kondisi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Dalam hal ini diharapkan upaya untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan yang merata sesuai standar, memperkuat pendidikan sepanjang hayat, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dan pendidik, serta mendorong inovasi dan tata kelola layanan kesehatan dan pendidikan. Pembangunan harus memperhatikan aspek sosial budaya, wilayah adat, dan zona ekologis untuk keberlanjutan dan memprioritaskan Orang Asli Papua.

Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dasar belum optimal, yang mana salah satunya didorong untuk menerapkan pemerintahan yang baik, terbuka, dan partisipatif dengan dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan berbasis data.

Keberagaman komoditas unggulan sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan dengan angka produktivitas yang tinggi untuk mendukung hilirisasi dan ekspor.

a. Potensi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

b. Potensi energi terbarukan;
c. Pengembangan ekonomi yang belum inklusif;
d. Aksesibilitas dan konektivitas intra dan antar wilayah yang belum maksimal;
e. Potensi energi hidro, energi surya, dan energi angin;
f. Pembangunan infrastruktur dasar di Wilayah Papua belum optimal;
g. Desentralisasi dan otonomi daerah;
h. Rendahnya kemandirian fiskal;
i. Pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum belum optimal;
j. Rendahnya perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat; dan
k. Risiko bencana tinggi dan rendahnya kemandirian pangan.

2.3.3.4 Isu RPJPD Provinsi Papua Selatan

Penelaahan RPJPD Provinsi Papua Selatan sangat diperlukan dalam rangka memetakan isu strategis Kabupaten Mappi secara akurat dan tepat. Papua Selatan merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dilahirkan melalui UU No. 14 Tahun 2021. Tujuannya adalah memperpendek rentang kendali pemerintahan yang selama diselenggarakan di Provinsi Papua. Tujuan lainya adalah meningkatkan kesejahteraan, pendapatan, dan daya saing daerah. Oleh karena itu penelaahan RPJPD nya tidak bisa dilepaskan dari kajian dokumen RPJPD yang tengah diselesaikan bersama dengan RPJPD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2045. Penelaahan dimaksud meliputi isu strategis transformasi- transformasi yang akan berlangsung dalam pembangunan Papua Selatan ke depan, antara lain:

1. Mewujudkan Transformasi sosial, ekonomi serta tata kelola Papua Selatan melalui peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan OAP dan Non OAP serta pelayanan publik yang afirmatif dan inklusif;
2. Transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup, kualitas kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan OAP dan Non OAP;
3. Transformasi ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, potensi unggulan daerah/lokal;

4. Transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif dan inklusi di Papua Selatan;
5. Landasan Transformasi: Transformasi ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, produktif, makmur berbasis kearifan budaya Ha-anim;
6. Mengembangkan keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural (*eco-culture*) secara berkelanjutan serta meningkatkan kondusivitas wilayah, dan stabilitas ekonomi makro di Papua Selatan;
7. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan Ha-anim di Papua Selatan. Implementasi Transformasi: Melalui peningkatan kapasitas pemerintahan dan mewujudkan pembangunan sarana prasarana, konektivitas, pemerataan pembangunan, keadilan untuk masyarakat serta kesinambungan pembangunan Mempercepat pemerataan pembangunan, keadilan untuk semua serta mengentaskan kemiskinan di Papua Selatan khususnya kemiskinan OAP; dan
8. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana, ketahanan energi, air, pangan serta konektivitas antar daerah, wilayah dan daerah tertinggal, terluar, terdepan yang berkualitas dan ramah lingkungan.

2.3.3.5 Isu RPJMD Provinsi Papua Selatan

Isu strategis Provinsi Papua Selatan menjadi salah satu pendoman yang harus dipertimbangkan dalam perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Mappi tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat keselarasan dalam proses pembangunan daerah. Adapun isu strategis pembangunan Provinsi Papua Selatan tahun 2025-2029 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua Selatan tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan pondasi tata kelola daerah otonomi baru Papua Selatan, serta tata kelola Otonomi Khusus;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar;
3. Penyiapan suprastruktur dan infrastruktur serta tata ruang Papua Selatan ke depan;
4. Pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah dan ekonomi

kreatif yang menyerap tenaga kerja; dan

5. Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial.

2.3.3.6 Telaah Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP)

Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) adalah dokumen induk perencanaan pembangunan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dokumen RIPPP menjadi pembawa semangat, paradigma, desain, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Secara filosofis, RIPPP merupakan penjabaran tujuan dan cita-cita pembangunan di dalam UUD 1945 yang disinergikan dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*Sustainable Development Goals/* SDGs). Visi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang yaitu Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera. Selain Visi, adapun 3 Misi besar yang terumuskan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yaitu, (1) Memberikan **pelayanan kesehatan** yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan Sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk. (2) Memberikan **pelayanan pendidikan** yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, dan (3) **Meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi** dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif, dengan Sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk.

Gambar 2. 82 Visi Misi dan Sasaran RIPPP OTSUS Papua Tahun 2022-2041

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023, Tentang RIPPP Tahun 2022-2041

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam proses implementasi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022- 2041 ialah (1) Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk; (2) Tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk; serta (3) Tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk.

Tabel 2. 56 Telaah Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041

VISI	MISI	SASARAN	DIMENSI PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera.	Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudaya ka n hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat.	**Papua Sehat:** tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk.	Akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat

VISI	MISI	SASARAN	DIMENSI PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN
			Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan sesuai standar di seluruh fasilitas kesehatan	Mentngkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
			Cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh.	Membudayakan perilaku hidup sehat dan tata kelola pelayanan kesehatan
				Meningkatkan pembudayaan dan prestasi olahraga
	Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju Papua Cerdas.	**Papua Cerdas:** tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk.	Fasilitas pendidikan yang berkualitas	Menumbuhkan budaya belajar serta menjamin akses dan kualitas pelayanan pendidikan Papua secara merata
			Akses ke pelayanan pendidikan (semua jenjang) yang inklusif	
			Distribusi tenaga pendidik yang merata	
			Afirmasi pendidikan bagi OAP, termasuk beasiswa dan pendidikan keterampilan	

VISI	MISI	SASARAN	DIMENSI PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN
			hidup	
	Meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif.	Papua Produktif: tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk.	Ekonomi masyarakat adat dan sumber-sumber daya lokal	Meningkatkan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja
			Akses terhadap teknologi, perdagangan, dan pasar nasional, regional, dan global	Meningkatkan daya saing industri, perdagangan dan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan daerah
			Sumber daya alam yang berkelanjutan	Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan yang adil dan merata
			Ekonomi lokal	Mengembangkan pemerataan kawasan ekonomi
			Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah	Meningkatkan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023, Tentang RIPPP Tahun 2022-2041.

Kemudian, arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Anim Ha diantaranya ialah **Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan Yang Terstandar, Serta Pengembangan Wilayah Adat Anim Ha Sebagai Sentra Tanaman**

Pangan, Perkebunan, Kelautan Dan Perikanan, Serta Ekowisata Berkelanjutan Dan Berorientasi Global. Adapun arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:

1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
2. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
3. Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*);
4. Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;
5. Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
6. Meningkatkan tata kelola keuangan dana kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung; Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
7. Mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan hasil pertanian tanaman pangan;
8. Mengembangkan pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokat (PKL); dan
9. Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan: a) Mengembangkan sentra tanaman pangan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha; b) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi perkebunan serta kelautan dan perikanan; c) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global; dan d) Mendorong pemberdayaan ekonomi di kawasan perbatasan negara.

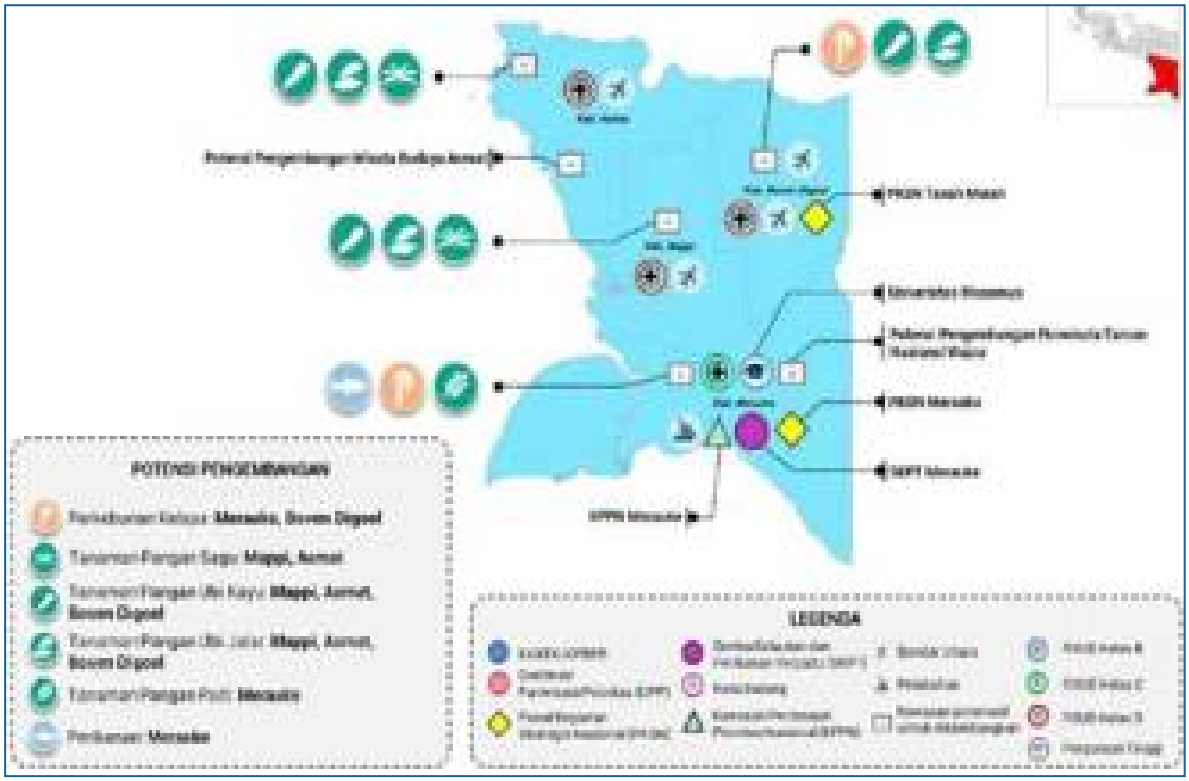

Gambar 2. 83 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Adat Anim Ha
Sumber: RIPPP 2022-2041 (2023)

Selanjutnya, Kabupaten Mappi dalam pengembangan wilayah adat Anim Ha merupakan salah satu kawasan strategis nasional sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Selain itu, kebijakan pengembangan wilayah adat Anim Ha terutama Kabupaten Mappi difokuskan pada pengembangan komoditas **perkebunan kelapa, tanaman pangan ubi kayu, dan tanaman pangan ubi jalar**.

Selanjutnya, perumusan isu dan tantangan dalam RIPPP terbagi atas beberapa bidang yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Isu dan Tantangan Bidang Kesehatan

- Belum meratanya akses ke pelayanan kesehatan akibat kondisi geografis yang beragam;
- Masih terdapat kecamatan/distrik yang belum memiliki puskesmas;
- Rendahnya persentase Rumah Sakit (RS) dan puskesmas terakreditasi;
- Masih terdapat puskesmas yang belum memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar;
- Terdapat rumah sakit kabupaten/kota kelas C tidak memiliki dokter

spesialis dasar dan dokter spesialis lainnya;

- Terdapat puskesmas yang belum memiliki dokter;
- Pengetahuan masyarakat yang masih minim tentang masalah kesehatan, menyebabkan tingginya penyakit menular endemis seperti tuberkulosis (TB), HIV/AIDS, malaria, dan kusta, serta tingginya faktor risiko penyakit tidak menular seperti konsumsi rokok, alkohol, NAIZA, dan obesitas;
- Kesadaran ibu hamil yang masih minim untuk rutin memeriksakan kehamilannya, menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi stunting;
- Minimnya pembudayaan olahraga ditunjukkan dengan persentase penduduk yang rutin berolahraga dalam seminggu terakhir yang masih di bawah rata-rata nasional;
- Belum optimalnya keberlangsungan kegiatan pelayanan kesehatan, salah satunya telemedicine akibat cakupan infrastruktur energi dan telekomunikasi yang belum merata;
- Masih tingginya masalah kesehatan di Papua akibat belum optimalnya penyediaan akses layanan infrastruktur dasar, meliputi hunian layak dan terjangkau, air minum layak dan aman, sanitasi layak dan aman, serta promosi kebersihan;
- Masih rendahnya cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Papua yang dapat menghambat masyarakat mendapatkan layanan kesehatan;
- Belum optimalnya tata kelola manajemen mutu dan risiko pada puskesmas; dan
- Belum optimalnya regulasi antarsektor yang terintegrasi, serta kewenangan dalam perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan dalam rangka otonomi khusus yang bersinergi.

b) Isu dan Tantangan Bidang Pendidikan

- Masih rendahnya rata-rata lama sekolah;
- Masih rendahnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP/sederajat, SMA/sederajat, dan perguruan tinggi (PT) ;

- Belum optimalnya tingkat aksesibilitas layanan pendidikan akibat faktor geografis serta belum meratanya distribusi tenaga pendidik, namun di sisi lain telah terdapat upaya mengatasi kekurangan guru melalui Kolese Pendidikan Guru (KPG) untuk menghasilkan guru profesional yang dapat beradaptasi dengan budaya lokal, meskipun kualifikasi dan kompetensinya masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar;
- Masyarakat Papua memiliki karakteristik yang terbuka terhadap keberagaman agama, suku, dan adat istiadat yang ditunjukkan oleh capaian indeks kerukunan umat beragama;
- Masih rendahnya AMH penduduk usia 15-59 tahun;
- Kurangnya aksesibilitas siswa dan tenaga pendidik menuju fasilitas pendidikan akibat kondisi geografis yang beragam sehingga menjadi kendala dalam pembangunan jalan antar kota dan antar kampung, tetapi di sisi lain upaya pembangunan Jalur Trans-Papua diharapkan dapat meningkatkan dan membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk menjangkau pelayanan pendidikan;
- Masih rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun;
- Keterbatasan tenaga pendidik dan siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar akibat cakupan infrastruktur energi dan telekomunikasi yang belum merata;
- Masih terdapat blank spot yang menjadi salah satu kendala akses telekomunikasi;
- Belum optimalnya integrasi konektivitas, sehingga siswa dan tenaga pendidik mengalami keterbatasan dalam mengakses fasilitas pendidikan; dan
- Masih terdapat ketimpangan gender di Papua dalam upaya pembangunan kualitas hidup masyarakat yang ditunjukkan dengan capaian indeks pembangunan gender (IPG).

c) Isu dan Tantangan Bidang Ekonomi

- Belum optimalnya nilai realisasi investasi;

- Rendahnya penciptaan nilai tambah yang disebabkan belum optimalnya pengembangan sektor/komoditas unggulan dari hulu ke hilir;
- Tingginya proporsi tenaga kerja informal yang sebagian besar terdiri dari pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar, serta masih rendahnya proporsi angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas;
- Masih tingginya ketimpangan pendapatan;
- Belum optimalnya pemberdayaan UMKM;
- Belum optimalnya penguatan terhadap pelaku UMKM yang ditunjukkan oleh penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM;
- Adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga kredit UMKM tumbuh signifikan sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi;
- Rendahnya rata-rata konsumsi kalori per kapita penduduk;
- Indeks kemahalan konstruksi di Papua yang masih relatif tinggi, akibat kondisi geografis yang beragam, kendala pembebasan lahan, dan faktor keamanan;
- Belum terintegrasinya infrastruktur konektivitas jalan, darat, laut, dan udara, menyebabkan akses menuju pusat-pusat ekonomi terbatas sehingga pertumbuhan ekonomi wilayah belum optimal;
- Belum meratanya cakupan infrastruktur energi dan telekomunikasi yang menjadi kebutuhan dasar dalam melakukan kegiatan ekonomi, yang ditandai dengan masih terdapat banyaknya daerah blank spot;
- Rendahnya persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN;
- Rendahnya konsumsi listrik per kapita yang bersumber dari listrik PLN;
- Masih terdapat ketimpangan gender; dan
- Belum optimalnya penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) di Papua yang dapat menjadi sumber pendanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup yang

berkelanjutan dengan memperhatikan pemulihan kawasan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis; pengelolaan keanekaragaman hayati; dan kepastian hukum pertanahan di kawasan hutan dan reforma agrarian.

d) Isu dan Tantangan Bidang Lingkungan Hidup

- Indeks resiko bencana termasuk kelas risiko tinggi yang diakibatkan (a) masih lemahnya pengawasan dan mitigasi terhadap kawasan rawan bencana; (b) masih lemahnya kesadaran dan wawasan masyarakat dalam mengelola sampah dan tanggap bencana; dan (c) lemahnya pengawasan terhadap penggunaan lahan (land use) pada zona rentan bencana;
- Indeks kualitas air sudah berada di atas nasional. Selain itu indeks kualitas udara juga berada di atas angka nasional. Hal ini perlu dipertahankan untuk mengantisipasi penurunan kualitas air dan udara akibat pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan;
- Terdapat dampak perubahan iklim pada sektor kesehatan;
- Terdapat 18 kabupaten/kota prioritas ketahanan iklim subsektor malaria dan 2 kabupaten/kota prioritas ketahanan iklim subsektor demam berdarah yang berpotensi meningkatkan jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan adanya perubahan iklim apabila tidak dilakukan intervensi (*business as usual*) ;
- Isu pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai *backbone* ekonomi hijau belum terimplementasikan dengan baik di Papua. Konversi hutan mengganggu keseimbangan lingkungan dan meningkatkan emisi gas rumah kaca;
- Belum optimalnya pemanfaatan bioekonomi hutan di Papua untuk menyejahterakan masyarakat setempat; dan
- Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan berbasis masyarakat untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan melalui skema perhutanan sosial.

e) Isu dan Tantangan Bidang Tata Kelola

- Masih tingginya gangguan keamanan dan ketertiban umum

menyebabkan cakupan pelayanan dan tenaga kesehatan dan pendidikan belum optimal yang ditunjukkan dengan persentase rumah tangga menurut kekhawatiran berjalan sendirian di siang hari khususnya di daerah perkotaan;

- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus yang ditunjukkan dengan rendahnya pemanfaatan dana otonomi khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan; dan
- Masih rendahnya penerapan tata kelola pemerintahan digital yang selaras dengan kerangka regulasi sistem pemerintahan berbasis (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) akibat belum meratanya infrastruktur TIK yang ditunjukkan dengan masih banyaknya daerah *blank spot*; dan
- Masih rendahnya cakupan akta kelahiran anak usia 0-17.

f) Isu dan Tantangan Bidang Sosial Budaya

- Belum optimalnya upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- Nilai Budaya Literasi masih berada di bawah rata-rata nasional; dan
- Indeks kerukunan umat beragama berada di atas angka nasional yang perlu diperkuat sebagai modal sosial dalam pembangunan yang berkelanjutan.

2.3.3.7 Telaah RTRW Kabupaten Mappi

Penelaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi bagian penting dalam konteks perencanaan dan pengembangan wilayah sebab, RTRW merupakan dokumen perencanaan yang mengatur tata ruang suatu wilayah dalam skala kabupaten/kota atau bahkan provinsi yang mencakup aspek-aspek seperti penggunaan lahan, zona-zona khusus, transportasi, pemukiman, dan lain-lain. Penelaahan dokumen ini memastikan bahwa pembangunan dapat berlangsung sesuai dengan rencana jangka panjang yang terumuskan dalam Tujuan, Kebijakan, dan Strategi-Strategi Penataan Ruang yang telah ditetapkan.

Tujuan Penataan ruang wilayah Kabupaten Mappi Tahun 2011- 2031 adalah Mewujudkan wilayah Kabupaten Mappi dengan optimalisasi potensi sumber daya alam berbasiskan agroforestry dan perikanan dalam meningkatkan daya saing kabupaten dalam mendukung ketahanan pangan Pulau Papua secara Berkelanjutan.

Dalam mendukung tercapainya Tujuan Penataan ruang wilayah tersebut, telah terumuskan berbagai kebijakan dan strategi penataan ruang yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 57 Telaah RTRW Kabupaten Mappi Tahun 2011-2031

Tujuan	Arah Kebijakan	Strategi
Mewujudkan wilayah Kabupaten Mappi dengan optimalisasi potensi sumber daya alam berbasiskan agroforestry dan perikanan dalam meningkatkan daya saing kabupaten dalam mendukung ketahanan pangan Pulau Papua secara Berkelanjutan	Penetapan pusat-pusat kegiatan yang mencakup Pusat Kegiatan Pusat Kegitan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Meningkatkan peran PKW sebagai pusat koleksi dan distribusi kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
		Meningkatkan peran PKW sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat melalui pengembangan prasarana dan permukiman yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di wilayah sekitarnya
		Meningkatkan peran PKL perkotaan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa Kecamatan/Distrik
		Meningkatkan peran PKL perdesaan sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi dengan PKL perkotaan.
		Penyediaan rumah sakit tipe B, pengembangan perdagangan dan jasa skala regional, pengembangan pendidikan skala dasar sampai tinggi, penyediaan kawasan olahraga, penyediaan ruang terbuka hijau dan penyediaan sarana pelayanan umum peribadatan skala wilayah.
	Peningkatan keterpaduan infrastruktur dan sistem kota dalam menunjang pertanian, kehutanan, dan perikanan serta pemanfaatan ruang secara optimal berdasarkan kajian daya dukung dan daya	Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, sungai, laut, dan udara.
		Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi.

Tujuan	Arah Kebijakan	Strategi
	tampung lingkungan hidup.	Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik.
		Meningkatkan infrastruktur minyak dan gas bumi yang optimal.
		Meningkatkan kualitas jaringan prasarana.
		Mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
		Mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi pertanian, kehutan dan perikanan.
		Mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian.
		Mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.
	Pengembangan prasarana guna mendukung kegiatan utama berbasiskan pengembangan agroforestry dan perikanan	Mengembangkan kombinasi antara komponen kehutanan dan pertanian
		Mengembangkan kombinasi antara komponen pertanian dan peternakan.
		Mengembangkan kombinasi antara komponen kehutanan dan peternakan.
		Mengembangkan antara komponen pertanian, kehutanan, dan peternakan.
		Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya air tawar, pengolahan hasil ikan dan pemasarannya.
		Mengamankan lahan pertanian berkelanjutan dan menjaga suplai pangan nasional.

Tujuan	Arah Kebijakan	Strategi
		Mengembangkan komoditas-komoditas unggul perkebunan di setiap distrik.
		Meningkatkan produk dan nilai tambah perikanan budidaya melalui sentra pengolah hasil ikan.
		Meningkatkan daya saing produk industri hasil perikanan tangkap.
		Menciptakan sistem pemasaran dan distribusi produk perikanan tangkap di dalam negeri yang efisien, aman, dan berkualitas.
		Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan nelayan dan tenaga kerja perikanan tangkap.
	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan yang tersedia secara tepat dan lestari untuk mengangkat Kabupaten Mappi sebagai sentra produksi pertanian di wilayah selatan.	Pencegahan teknik budi daya tanaman yang bersifat penambangan hara tanah secara eksploitatif, sehingga terjadi deplesi hara, ketidakberimbangan hara atau ketidaktersediaan hara bagi tanaman.
		Mengembangkan pusat kegiatan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama perekonomian wilayah.
		Pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaraman dan nilainya.
		Memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta penetapan kawasan lindung spiritual
		Memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan

Tujuan	Arah Kebijakan	Strategi
		suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya.
		Memantapkan wilayah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah disertai dengan pemantapan zonasi di kawasan dan wilayah sekitarnya serta pemantapan pengelolaan kawasan secara partisipatif.
		Memantapkan kawasan lindung lainnya sebagai penunjang usaha pelestarian alam.
	Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan risiko dan mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi.	Meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di bawahnya berupa kawasan resapan air untuk perlindungan fungsi lingkungan.
		Memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta penetapan kawasan lindung spiritual.
		Memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya.
		Memantapkan wilayah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah disertai dengan pemantapan zonasi di kawasan dan wilayah sekitarnya serta pemantapan pengelolaan kawasan secara partisipatif.
		Peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai budaya dan fungsi kawasan lindung berdasarkan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
		Memantapkan kawasan lindung lainnya sebagai penunjang usaha pelestarian alam.

Tujuan	Arah Kebijakan	Strategi
		Meningkatkan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian budaya leluhur dan melibatkan peran serta masyarakat.
	Perwujudan pengembangan daerah yang berorientasi meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan	Mendorong laju perkembangan perekonomian berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan pariwisata yang diperkuat oleh pengembangan industri, perdagangan, dan jasa sesuai potensi sumber daya yang tersedia serta tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
		Meningkatkan produktivitas lahan dan aktivitas budi daya yang dibarengi dengan upaya mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung.
		Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam pemanfaatan lahan kawasan perbatasan dengan kabupaten perbatasan.
	Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan ketahanan pangan	Peningkatan kerja sama antara universitas, industri dan pemerintah untuk menciptakan sistem ketahanan pangan yang kuat.
		Peningkatan ketersediaan pangan.
		Peningkatan akses pangan.
		Pengembangan Sagu, Jagung dan ubi sebagai komoditas unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian daerah.
		Peningkatan produksi komoditas unggulan melalui intensifikasi dan perluasan areal tanam.
		Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi penduduk.

Tujuan	Arah Kebijakan	Strategi
		Penguatan kelembagaan serta peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku utama.
		Memperkuat posisi tawar petani (bargaining position) dalam pemasaran hasil Pertanian.
	Peningkatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana alam	Menyusun Kajian Risiko Bencana setiap 5 tahun.
		Melakukan evaluasi Kajian Kapasitas setiap tahun.
		Membangun Sistem Informasi Risiko Bencana dan edukasi Kebencanaan untuk Masyarakat.
		Melakukan Edukasi Kebencanaan bagi masyarakat tentang potensi risiko bencana
		Memasang Papan Informasi Kebencanaan.
		Memperkuat tata kelola risiko bencana dan 2 manajemen risiko bencana.
		Meningkatkan investasi dalam pengurangan risiko 3 bencana untuk ketangguhan.

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Mappi Tahun 2011-2031.

Kemudian berdasarkan beberapa potensi dan permasalah yang terdapat di Kabupaten Mappi, maka dapat disimpulkan terkait isu strategis Kabupaten Mappi, diantaranya:

1) Kabupaten Mappi merupakan bagian dari Merauke Food Estate (MFE) yang mempertimbangkan ketahanan pangan Papua;
2) Pontensi pertanian dan keberadaan dengan kawasan hutan yang dikembangkan sebagai bagian dari agroforestry di seluruh Kabupaten Mappi;
3) Potensi perikanan yang mampu mendukung pengembangan industri pengolahan perikanan;
4) Sebagai Kawasan Gambut Nasional dan Internasional yang perlu dijaga dan dipertahankan di seluruh Kabupaten Mappi;
5) Pengembangan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil

pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan kehutanan;

6) Keterbatasan infrastruktur pendukung pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan pariwisata;
7) Keterbatasan infrastruktur pendukung pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan pariwisata.

2.3.3.8 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Mappi 2025-2029

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument pencegahan degradasi lingkungan hidup, penyusunannya ditujukan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029. Telaah terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada Analisa dan sintesa informasi geospatial tematik (IGT), isu tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), isu lingkungan hidup, dan isu perencanaan strategis lainnya termasuk dari hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Mappi 2005-2025, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan isu strategis RTRW Kabupaten Mappi, isu strategis KLHS RTRW Kabupaten Mappi, dan KLHS RPJPD Papua Selatan.

Identifikasi isu strategis TPB didasarkan pada gap capaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Kabupaten Mappi menyelenggarakan 220 indikator TPB dengan rincian capaian sebagai berikut: indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS) berjumah 76 indiaktor; indikator yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target berjumlah 102 indikator; sejumlah 23 indikator belum memiliki data; dan 19 indikator belum dilaksanakan. Pada Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera menunjukkan gap tertinggi hingga 34 indikator belum mencapai target, kemudian Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan terdapat 24 indikator yang belum mencapai target. Mengindikasikan masih lemahnya pemenuhan dan pemerataan layanan dasar dalam penanganan kemiskinan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Sejumlah indikator yang belum memiliki data mencerminkan belum optimalnya inventarisasi data secara terstruktur pada penyelenggaraan TPB. Tingginya jumlah indikator yang belum mencapai target menandakan penyelenggaraan TPB masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yaitu tata Kelola pemerintah yang belum optimal dan sinergis dari sisi perencanaan dan

pelaksanaan. Isu strategis TPB dapat disintesa menjadi tujuh isu yaitu Tingkat kemiskinan tinggi, ketersediaan pangan terbatas, perekonomian mappi tumbuh lambat, akses air bersih terbatas, layanan Pendidikan belum merata, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan belum optimalnya tata Kelola pemerintahan.

Ekonomi yang ditandai dengan Penurunan laju pertumbuhan PDRB dari 5,1% menjadi 2,57% mengindikasikan perlambatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan di Kabupaten Mappi. Penurunan Konsumsi Rumah Tangga menunjukan melambat-nya pertumbuhan konsumsi rumah tangga menunjukkan kemungkinan penurunan daya beli masyarakat atau kepercayaan konsumen. Apabila merujuk pada Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mappi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha", beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah adanya Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Secara Umum. Hampir semua sektor mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, mencerminkan tantangan ekonomi yang mempengaruhi berbagai sektor di Kabupaten Mappi. Sektor dengan Pertumbuhan Lambat yakni Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan basis ekonomi utama Kabupaten Mappi. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan laju pertumbuhan eknomoni adalah keterbatasan infrastruktur pendukung ekonomi terutama akses transportasi, sumber daya manusia terutama dari aspek Pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, dan ketergantungan pada sektor primer.

Isu kerentanan perubahan iklim dan lingkungan hidup dimaksud mencakup kemampuan ekosistem, masyarakat, atau upaya untuk mengantisipasi, mempersiapkan dan menanggapi dampak perubahan iklim dan lingkungan hidup. Dampak perubahan tersebut digambarkan melalui hubungan kejadian bencana banjir, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dalam hubungannya dengan komponen iklim dan lingkungan berdasarkan karakteristik wilayah. Beberapa faktor yang menggambarkan menurunnya kualitas lingkungan hidup antara lain penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rendahnya efisiensi jasa lingkungan terhadap rencana pola ruang, peningkatan risiko bencana hidrometeorologis, dan terganggunya keanekaragaman hayati, dan peningkatan risiko pencemaran lingkungan dari sampah dan limbah, berkurangnya tutupan hutan, dan terganggunya akses layanan air minum layak.

Tata kelola pemerintahan dan penyediaan layanan publik di Kabupaten Mappi masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan diantaranya yaitu lemahnya reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan, serta akuntabilitas pemerintahan. Kurangnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, serta minimnya sistem pengawasan menyebabkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah rendah. Reformasi birokrasi di Kabupaten Mappi masih jauh dari optimal. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Mappi pada 2023 mencapai 30,90 menandakan adanya tantangan besar dalam meningkatkan efektivitas birokrasi. Indeks perilaku anti korupsi mencapai 3,83 poin pada tahun 2023. Kurangnya evaluasi secara berkala, minimnya pelaporan, dan lemahnya inisiatif pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan menjadi faktor utama yang perlu diperbaiki. aspek pengelolaan keuangan dan akuntabilitas di Kabupaten Mappi belum berjalan secara optimal. Beberapa penyebabnya dapat terjadi karena dukungan pemerintah daerah tetapi juga yang penting adalah pelatihan SDM yang belum memadai atau keterbatasan tenaga ASN, sistem keuangan yang kurang terintegrasi, dan pemantauan serta evaluasi yang masih lemah.

Hasil telaah terhadap 6 muatan dan isu KRP strategis yang relevan disintesis dengan capaian TPB, disimpulkan isu strategis KLHS-RPJMD Kabupaten Mappi tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia;
2) Rendahnya produktivitas ekonomi;
3) Permasalahan yang terdokumentasi adalah adanya Perlambatan Pertumbuhan ;
4) Lemahnya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan OAP;
5) Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan dan layanan publik;
6) Kerentanan perubahan iklim dan lingkungan hidup;
7) Rendahnya pemanfaatan pangan lokal; dan
8) Tingkat kemiskinan tinggi.

2.3.3.9 Telaah Isu RPJPD Kabupaten Mappi

Dengan memperhatikan berbagai tantangan di atas, isu strategis pembangunan di atasnya baik nasional maupun provinsi, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Mappi Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel 2. 58 Isu Strategis RPJPD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2045

Aspek Pembangunan	Isu RPJPD
Kependudukan dan Tenaga Kerja	1) Adanya bonus demografi 2045; 2) Adanya bonus bonus demografi 2045; 3) Migrasi dan urbanisasi penduduk yang semakin tinggi; 4) Gen Milenial dan Gen Z saat ini akan mendominasi jumlah penduduk dominan di masa mendatang; 5) Terjadi perubahan struktur pasar tenaga kerja dari pendidikan rendah ke pendidikan menengah dan tinggi, serta dari sektor pertanian ke sektor non pertanian; dan 6) Persaingan tenaga kerja membuat ketimpangan dalam penyerapan tenaga kerja.
Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olah Raga	1) Pembangunan manusia akan bergeser pada peningkatan modal manusia (terjadi perubahan HDI ke HCI); 2) Tuntas stunting, dan Wajib Belajar 12 tahun; 3) Unit layanan pendidikan dan kesehatan terakreditasi menjadi kebutuhan; 4) Berkembangnya marketplace dalam dunia pendidikan dan kesehatan; 5) Kesehatan dan pendidikan menjadi pilar utama transformasi menuju Masyarakat Swa-Maju Mappi 2045; 6) Peranan pemuda dalam pembangunan menjadi lebih dominan, terjadi transformasi peran pemuda dari obyek menjadi subyek pembangunan; dan 7) Revitalisasi pembangunan olah raga yang berdaya saing.
Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan	1) Tuntas kemiskinan ekstrim; 2) Bertambah banyaknya PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang memberi ekses negatif sebagai akibat kemajuan teknologi dan pembangunan; 3) Kualitas perlindungan dan pemberdayaan sosial menjadi semakin penting; 4) Degradasi budaya yang dapat; dan 5) Menghilangkan jati diri.

Aspek Pembangunan	Isu RPJPD
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1) Pengembangan kabupaten layak anak menjadi kebutuhan penting mewujudkan Generasi Swa-Maju Mappi 2045; 2) Perempuan semakin kritis dan mandiri, menuntut emansipasi dan dan kesetaraan gender; 3) Perilaku *childfree* pada perempuan (perempuan tanpa anak).
Infrastruktur PUPR, Perumahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	1) Mindset ekonomi menjadi lebih utama dalam pembangunan bidang ke PU-an; 2) Kebutuhan transportasi terpadu jalan dan angkutan sungai semakin meningkat; 3) Kebutuhan perumahan dan permukiman layak huni bertambah; 4) Disrupsi teknologi komunikasi dan informasi yang semakin cepat dan masif melalui jaringan 4g dan 5g; dan 5) Harmonisasi tata ruang dengan kebutuhan pembangunan.
Ekonomi, SDA dan Lingkungan	1) Perekonomian yang tumbuh cepat mandiri, inklusif dan berkelanjutan lebih diutamakan; 2) Transformasi struktural dalam perekonomian wilayah; 3) Korporasi dalam agrobisnis menjadi jalan utama meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan peternak; 4) Biaya transaksi (*transaction cost*) yang tinggi sehingga mengurangi hasrat berinvestasi; 5) Penguatan dan pengembangan pariwisata 6) berbasis masyarakat; dan 7) Kemunculan konsumen baru yaitu *social customer* dengan ciri : (1) *knowledgeable* (tahu segalanya); (2) *socially connected* (terkoneksi tanpa batas).
Politik dan Demokrasi	1) Bertambahnya jumlah partai politik; 2) Profil partai politik bukan lagi menjadi pilihan utama; dan 3) Masyarakat semakin cerdas dan kritis dalam berpolitik dan berdemokrasi.

Aspek Pembangunan	Isu RPJPD
Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1) Faktor keamanan, ketentraman dan ketertiban umum menjadi kunci utama berjalannya pembangunan; 2) Ketersediaan tenaga keamanan yang tidak berimbang dengan luas wilayah; 3) Modus operandi kejahatan semakin berkembang dan maju; 4) *Hoax* (berita kebohongan) yang meningkat dan masif; dan 5) Kekerasan dalam rumah tangga.
Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Desa	1) Bertambahnya dana pembangunan desa; 2) Masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan 2 kali dapat dipilih sehingga dimungkinkan memimpin 16 tahun; dan 3) Profesionalisme dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa semakin dibutuhkan.
Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi	1) Diperlukan respon yang cepat untuk mengadaptasi dan harmonisasi perubahan regulasi; 2) Transformasi birokrasi dan kinerja ASN; 3) Orientasi pelayanan publik bergeser dari *supplier-oriented* (mengejar target) ke consumer-oriented (kepentingan masyarakat) dan terakhir ke *customer-oriented* (sesuai kebutuhan masyarakat) dimana tingkat partisipasi menjadi lebih besar; 4) Pengelolaan keuangan daerah dituntut semakin transparan dan akuntabel; 5) Transformasi peran aktor pembangunan dari *triple-helix* (pemerintah, swasta, PT) ke *penta-helix* (pemerintah, swasta, PT, komunitas, media); dan 6) Diberlakukannya PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) dalam sistem perencanaan pembangunan. Jika berlaku, maka visi dan misi pembangunan sama semua, yaitu visi dan misi sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (bersatu, berdaulat, adil dan makmur).

2.3.3.10 Penetapan Isu Strategis Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029

Isu strategis daerah merupakan kondisi atau hal fundamental yang wajib diperhatikan dan diprioritaskan dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, mengingat dampaknya yang signifikan di masa depan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu-isu ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti permasalahan mendesak yang perlu diatasi, potensi unggulan daerah yang dapat dikembangkan, ataupun dinamika lain yang relevan dengan konteks kewilayahan. Perumusan isu strategis harus didasarkan pada sumber-sumber data yang akuntabel dan relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi dokumen perencanaan tingkat nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah periode sebelumnya, rekomendasi dari laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, serta hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Secara teknis, proses identifikasi isu strategis juga mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain: (1) potensi unik daerah yang dapat dioptimalkan untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat; (2) permasalahan pembangunan yang masih menjadi kendala; (3) isu-isu prioritas yang termuat dalam KLHS RPJMD; serta (4) dinamika lingkungan strategis (baik global, nasional, maupun regional) yang berpotensi memengaruhi daerah. Berdasarkan kerangka kerja tersebut, perumusan isu strategis untuk Kabupaten Mappi dilakukan secara sistematis. Secara lebih rinci, pemetaan isu-isu strategis daerah Kabupaten Mappi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 59 Pemetaan Isu Strategis Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis RPJMD Mappi
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1) Potensi lumbung pangan nasional (Merauke Food Estate) 2) Potensi pertanian dan agroforestry 3) Potensi industri pengolahan perikanan 4) Potensi ekosistem gambut 5) Potensi industri komoditas hasil alam terpadu 6) Peluang investasi pembangunan infrastruktur	1) Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia 2) Belum optimalnya akses dan mutu layanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan 3) Belum optimalnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan keberlanjutan lingkungan 4) Belum optimalnya penyelenggaran pelayanan publik 5) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan demokratis 6) Belum optimalnya keamanan, kedamaian dan ketertiban masyarakat	1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia 2) Rendahnya produktivitas ekonomi 3) Permasalahan yang terdokumentasi adalah adanya perlambatan pertumbuhan 4) Lemahnya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan OAP 5) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan layanan publik 6) Kerentanan perubahan iklim dan lingkungan hidup 7) Rendahnya pemanfaatan pangan lokal 8) Tingkat kemiskinan tinggi	Megatrend Global 2045: 1) Geopolitik dan geoekonomi 2) Pertumbuhan kelas menengah 3) Persaingan sumber daya alam 4) Perubahan iklim 5) Tata kelola keuangan global 6) Luar angkasa 7) Urbanisasi dunia 8) Konstelasi perdagangan global 9) Perkembangan teknologi 10) Demografi global	Tantangan pembangunan RPJMN: 1) Rendahnya produktivitas 2) Rendahnya kualitas SDM 3) Pergeseran struktur kelas masyarakat 4) Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif 5) Krisis lingkungan 6) Geopolitik dan geoekonomi 7) Tata kelola dan akubtabilitas pemerintah	Isu strategis RPJMD Provinsi Papua Selatan: 1) Penguatan pondasi tata kelola daerah otonomi baru Papua Selatan, serta tata kelola otonomi khusus 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar 3) Penyiapan suprastruktur dan infrastruktur serta tata ruang Papua Selatan ke depan 4) Pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah dan ekonomoi kreatif yang menyerap tenaga kerja 5) Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial	1) Optimalisasi peran strategis Kabupaten Mappi dalam Merauke Food Estate (MFE) untuk mendukung ketahanan pangan regional Papua 2) Pengembangan potensi pertanian yang terintegrasi dengan pelestarian kawasan hutan melalui sistem agroforestri berkelanjutan 3) Hilirisasi dan peningkatan nilai tambah potensi perikanan untuk mendukung tumbuhnya industri

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis RPJMD Mappi
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
						pengolahan perikanan di daerah 4) Tantangan perlindungan dan pengelolaan Kawasan Gambut Nasional dan Internasional di tengah tekanan kebutuhan pembangunan 5) Akselerasi pembangunan pusat-pusat industri pengolahan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan 6) Keterbatasan infrastruktur pendukung sebagai hambatan utama dalam optimalisasi potensi ekonomi

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis RPJMD Mappi
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
						sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata

Berdasarkan pertimbangan berbagai aspek seperti potensi daerah, permasalahan pembangunan, isu KLHS RPJMD, serta isu lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional), maka dirumuskan 6 (enam) isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 dijelaskan pada narasi berikut:

1. Optimalisasi peran strategis Kabupaten Mappi dalam Merauke Food Estate (MFE) untuk mendukung ketahanan pangan regional Papua

Penetapan Kabupaten Mappi sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional Merauke Food Estate (MFE) menempatkan daerah ini pada posisi yang sangat penting sekaligus menantang. Isu strategis ini menekankan bahwa peran Mappi tidak bisa lagi hanya sebatas wilayah pendukung, melainkan harus dioptimalkan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat regional Papua. Optimalisasi ini menuntut adanya kesiapan yang menyeluruh, mulai dari identifikasi komoditas unggulan spesifik Mappi yang dapat dikembangkan dalam skala besar, hingga penyiapan infrastruktur dasar seperti akses jalan produksi, irigasi, dan fasilitas pascapanen yang memadai. Tantangan utamanya bukan hanya terletak pada peningkatan produksi semata, tetapi juga pada bagaimana memastikan masyarakat lokal menjadi pelaku utama dan penerima manfaat langsung dari pengembangan lumbung pangan ini, bukan sekadar menjadi penonton. Oleh karena itu, arah kebijakan yang lahir dari isu ini harus mampu mengintegrasikan program Merauke Food Estate (MFE) dengan rencana pembangunan daerah, memperkuat kelembagaan petani, serta menciptakan rantai pasok yang efisien agar kontribusi Mappi terhadap ketahanan pangan regional dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

2. Pengembangan potensi pertanian yang terintegrasi dengan pelestarian kawasan hutan melalui sistem agroforestri berkelanjutan

Kabupaten Mappi dihadapkan pada sebuah kondisi unik di mana potensi lahan subur untuk pertanian berdampingan langsung dengan kawasan hutan luas yang wajib dijaga kelestariannya. Isu strategis ini mengangkat konsep agroforestri sebagai solusi jalan tengah, yang memungkinkan pemanfaatan lahan untuk ekonomi tanpa harus mengorbankan fungsi ekologis hutan. Fokusnya adalah mengarahkan model pembangunan pertanian agar tidak lagi bertumpu pada pembukaan lahan dan monokultur skala besar, melainkan pada sistem tumpang sari yang cerdas dengan menggabungkan tanaman pangan atau komoditas perkebunan bernilai ekonomi di

antara tegakan pohon-pohon asli. Pendekatan ini secara khusus sangat relevan untuk Mappi karena dapat memberdayakan masyarakat adat dan lokal, yang secara turun-temurun telah akrab dengan pemanfaatan hasil hutan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya adalah menciptakan kebijakan yang mendukung, memberikan pendampingan teknis, dan membuka akses pasar bagi produk-produk agroforestri, sehingga pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan, bukan saling meniadakan.

3. Hilirisasi dan peningkatan nilai tambah potensi perikanan untuk mendukung tumbuhnya industri pengolahan perikanan di daerah

Kabupaten Mappi memiliki potensi perikanan yang sangat besar, baik dari perairan laut maupun darat, namun selama ini nilai ekonominya belum tergali secara maksimal karena sebagian besar hasil tangkapan cenderung dijual dalam bentuk bahan mentah. Isu strategis ini mendorong adanya sebuah pergeseran fundamental, yaitu dari sekadar menjadi daerah pemasok bahan baku menjadi produsen produk olahan yang memiliki nilai jual jauh lebih tinggi. Secara konkret, hilirisasi ini berarti mendorong tumbuhnya industri-industri lokal, mulai dari fasilitas pembekuan (*cold storage*) untuk menjaga kualitas udang dan ikan, hingga unit pengolahan yang mampu menghasilkan produk jadi atau bahkan produk kalengan. Langkah ini secara langsung akan menciptakan lapangan kerja baru di luar sektor penangkapan, menyerap tenaga kerja lokal, dan memastikan perputaran uang terjadi di dalam daerah. Akan tetapi, tantangan untuk mewujudkannya sangat nyata, terutama terkait kebutuhan infrastruktur dasar seperti listrik yang stabil untuk fasilitas pendingin, akses jalan yang lancar untuk distribusi, serta peningkatan keterampilan sumber daya manusia dalam hal pengolahan pangan dan standar mutu. Oleh karena itu, isu ini menuntut kebijakan yang terintegrasi, yang tidak hanya menarik investasi ke sektor pengolahan, tetapi juga secara paralel membangun infrastruktur pendukung dan menyiapkan tenaga kerja yang kompeten.

4. Tantangan perlindungan dan pengelolaan Kawasan Gambut Nasional dan Internasional di tengah tekanan kebutuhan pembangunan

Isu strategis ini menempatkan Kabupaten Mappi pada sebuah posisi dilematis yang krusial: sebagai penjaga ekosistem gambut berkelas dunia yang sekaligus dihadapkan pada tuntutan mendesak untuk percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kawasan gambut Mappi bukanlah sekadar lahan kosong,

melainkan aset ekologis global yang berfungsi sebagai penyimpan karbon raksasa dan pengatur tata air vital, di mana statusnya diakui secara nasional maupun internasional. Tekanan pembangunan yang dimaksud sangat nyata, terutama datang dari kebutuhan pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan skala besar, dan pembangunan infrastruktur yang seringkali mensyaratkan pengeringan lahan gambut yang mana dapat memicu kerusakan permanen, bencana kabut asap, dan pelepasan emisi gas rumah kaca secara masif. Oleh karena itu, tantangannya bukan sekadar melarang aktivitas ekonomi, melainkan merumuskan sebuah model pengelolaan yang cerdas. Hal ini menuntut adanya kebijakan tata ruang yang tegas untuk melindungi zona-zona inti, penegakan hukum yang tanpa kompromi, dan yang terpenting, pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat yang selaras dengan prinsip pelestarian gambut, seperti budidaya tanaman khas gambut (*paludikultur* – teknik pemanfaatan lahan gambut basah secara produktif melalui budidaya tanaman yang sesuai dengan kondisi rawa, bukan dengan pengeringan lahan) atau ekowisata. Keberhasilan dalam menjawab tantangan ini akan menentukan apakah kawasan gambut akan menjadi penghambat atau justru menjadi sumber keunggulan dan identitas pembangunan berkelanjutan bagi Mappi di masa depan.

5. Akselerasi pembangunan pusat-pusat industri pengolahan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan

Isu strategis ini berangkat dari kesadaran bahwa kekayaan sumber daya alam Mappi dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan belum memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi daerah karena sebagian besar komoditas masih dikirim ke luar dalam bentuk mentah. Akselerasi pembangunan pusat-pusat industri pengolahan adalah jawaban strategis untuk memotong mata rantai tersebut dan memusatkan kegiatan ekonomi bernilai tambah di Mappi. Fokusnya adalah secara sengaja dan terencana menciptakan kawasan-kawasan industri terpadu, di mana berbagai hasil bumi dapat diolah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Kata 'akselerasi' menjadi kunci karena proses ini kerap berjalan lambat akibat berbagai hambatan fundamental. Tantangan utamanya adalah menyiapkan lahan yang berstatus jelas dan siap pakai untuk investor, menyediakan infrastruktur energi dan logistik yang andal, serta memberikan kepastian regulasi dan kemudahan perizinan yang nyata. Oleh karena itu, isu ini menuntut peran proaktif pemerintah daerah untuk tidak hanya menunggu, tetapi secara agresif menciptakan

iklim investasi yang kondusif sehingga mampu menarik modal dan teknologi yang dibutuhkan untuk membangun basis industri yang kuat di Mappi.

6. Akselerasi Keterbatasan infrastruktur pendukung sebagai hambatan utama dalam optimalisasi potensi ekonomi sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata

Isu strategis ini menyoroti akar persoalan yang menjadi penghambat utama bagi hampir seluruh sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Mappi. Secara sederhana, sebagus apapun potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dimiliki, semua itu tidak akan bisa dioptimalkan tanpa adanya infrastruktur pendukung yang memadai. Di sektor pertanian dan perkebunan, ketiadaan jalan usaha tani yang layak menyebabkan biaya angkut hasil panen menjadi sangat mahal, sehingga keuntungan petani terkikis habis oleh para tengkulak sebelum mencapai pasar. Demikian pula di sektor perikanan, hasil tangkapan nelayan yang melimpah seringkali anjlok nilainya karena tidak adanya dermaga yang representatif dan fasilitas rantai dingin (*cold storage*) untuk menjaga kesegaran produk. Sementara itu, berbagai destinasi wisata alam yang potensial menjadi terisolasi dan sulit dijangkau, membuatnya tidak menarik bagi pengunjung maupun investor. Kondisi ini secara keseluruhan menciptakan biaya logistik yang sangat tinggi, yang pada akhirnya membuat produk dari Mappi sulit bersaing dan minat investasi dari pihak swasta menjadi rendah. Oleh karena itu, isu ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan ketersediaan energi bukan lagi sekadar program pendukung, melainkan harus menjadi prioritas absolut dan prasyarat utama untuk membuka seluruh potensi ekonomi Mappi.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat kondisi yang akan dicapai sepanjang periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Mappi yang terdapat di dalam rumusan visi. Selain kondisi, Bab tiga juga memuat substansi strategis berupa agenda pembangunan yang akan dijalankan dalam rangka mencapai visi. Agenda pembangunan ini dirumuskan dalam bentuk misi, arah kebijakan, strategi dan program prioritas pembangunan.

3.1 VISI

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi yang telah dikampanyekan dan disampaikan kepada masyarakat harus dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelembagaan sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam memandu pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan visi harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan visi RPJPD dan visi RPJMN dalam rangka membangun keselarasan antar perencanaan berjangka panjang dan keselarasan antara perencanaan pusat dan daerah. Visi pembangunan jangka menengah akan mengarahkan berbagai agenda pembangunan agar mencapai kondisi yang telah ditetapkan selama lima tahun mendatang. Adapun Visi RPJMD Kabupaten Mappi tahun 2025-2029 yaitu:

"Percepatan Pembangunan untuk perubahan Mappi lebih Religi, Mandiri, Bermartabat, Adil dan Makmur, Berkesinambungan dan Terintegrasi, serta Berkelanjutan guna menunjang terwujudnya kawasan baru ketahanan pangan di Provinsi Papua Selatan"

Adapun penjabaran masing-masing kata kunci visi Kabupaten Mappi tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

- **Percepatan Pembangunan Untuk Perubahan Mappi** menunjukkan mendorong percepatan pembangunan daerah secara cepat, efektif, efisien, dan terukur untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dan menciptakan perubahan signifikan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Perubahan Mappi menunjukkan transformasi Kabupaten Mappi menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera yang mencakup peningkatan kualitas hidup Masyarakat, produktivitas ekonomi daerah, dan tata kelola pemerintahan.
- **Religi** berkaitan dengan transformasi masyarakat Mappi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan daerah, baik dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- **Mandiri** dimaksudkan transformasi Mappi menjadi tuan di negeri sendiri dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Mappi.
- **Bermartabat** berkaitan dengan rasa saling menghormati antara masyarakat dan menghormati nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas Masyarakat Mappi. Bermartabat juga mencerminkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparansi, dan berintegritas.

- **Adil dan Makmur** berkaitan dengan cita-cita bersama Pembangunan daerah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan tanpa diskriminasi.
- **Berkesinambungan dan Terintegrasi** mencerminkan proses Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi masa depan. Terintegrasi menekankan bahwa seluruh program pembangunan harus dilaksanakan secara terpadu dan kolaboratif, guna menghindari adanya tumpang tindih dan menjamin setiap langkah selaras dengan visi daerah.
- **Berkelanjutan** merupakan prinsip kerja pembangunan yang secara terpadu menyelaraskan kemajuan di berbagai sektor. Prinsip ini diterapkan melalui tata kelola yang baik untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur tidak merusak lingkungan. Sekaligus, pendekatan ini memperkuat ketahanan sosial budaya dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga setiap langkah pembangunan memberikan manfaat jangka panjang yang seimbang bagi masyarakat dan alam Mappi
- **Kawasan Baru Ketahanan Pangan di Provinsi Papua Selatan** menunjukkan peran strategis Kabupaten Mappi dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Papua Selatan. Daerah ini diarahkan untuk menjadi pusat baru dalam produksi dan bahkan distribusi pangan melalui pengembangan sektor pertanian dan perikanan berbasis potensi lokal.

3.2 MISI

Dalam mencapai visi RPJMD ini dilakukan melalui pelaksanaan misi pembangunan. Misi merupakan rumusan umum tentang upaya mencapai visi. Misi RPJMD Kabupaten Mappi tahun 2025–2029 dijelaskan sebagai berikut:

MISI 1: Menata kelembagaan pemerintah dan aparatur daerah untuk menuju pemerintah yang baik (*Good Governance*), aparatur yang bersih (*Good Governance*)

Misi menata kelembagaan pemerintah dan aparatur daerah untuk menuju pemerintah yang baik (*good governance*), aparatur yang bersih (*good government*), adalah komitmen esensial untuk membangun fondasi tata kelola pemerintahan daerah yang solid, profesional, dan akuntabel. Misi ini berfokus pada dua aspek utama yang saling terkait: pertama, penataan ulang kelembagaan pemerintah daerah agar lebih efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat, melalui optimalisasi struktur, proses kerja, dan pembagian kewenangan yang jelas. Kedua, penataan aparatur daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, integritas, profesionalisme, dan budaya pelayanan prima di kalangan pegawai, sehingga tercipta sumber daya manusia pemerintahan yang handal.

Upaya komprehensif ini diarahkan untuk mewujudkan prinsip-prinsip "*Good Governance*" dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penegakan hukum. Lebih lanjut, misi ini bertujuan untuk membentuk "*Good Government*," yakni suatu sistem dan aparatur pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berdedikasi tinggi dalam melayani kepentingan publik. Keberhasilan misi ini akan menghasilkan pemerintahan daerah yang tidak hanya efektif dan efisien dalam menjalankan fungsinya, tetapi juga mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat, sebagai modal dasar untuk akselerasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

MISI 2: Mempercepat laju pembangunan untuk mendorong percepatan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Misi mempercepat laju pembangunan untuk mendorong percepatan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu misi yang bertujuan untuk mengintervensi

pembangunan ekonomi daerah dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mappi ke depan. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Mappi berkomitmen dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dalam waktu lima tahun mendatang. Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah ditempuh melalui berbagai upaya strategis lima tahun mendatang, diantaranya melalui peningkatan investasi daerah, peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, dan pembangunan berbagai infrastruktur pendukung perekonomian.

Peningkatan realisasi investasi daerah dilakukan dengan meningkatkan iklim penanaman modal daerah. Pemetaan potensi-potensi investasi daerah dan peningkatan pelayanan penanaman modal daerah menjadi dua kunci penting dalam rangka pengembangan iklim investasi daerah yang mendukung. Penjagaan kondusivitas daerah yang stabil juga menjadi prasyarat penting dalam upaya menarik penanaman modal ke daerah. Melalui peningkatan investasi ini aktivitas ekonomi dapat berkembang secara eksponensial. Meningkatnya aktivitas perekonomian dapat mendorong para pelaku ekonomi daerah untuk meningkatkan produktivitas ekonominya. Peningkatan produktivitas tidak hanya menyoal meningkatnya keluaran dari hasil produksi, namun produktivitas juga meliputi efisiennya penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan, sehingga produk akhir yang dihasilkan dapat memiliki nilai tambah yang kompetitif untuk bersaing di pasar. Pembangun infrastruktur pendukung perekonomian menjadi salah satu prasyarat penting dalam memastikan laju pertumbuhan perekonomian daerah dapat tumbuh secara berkelanjutan. Berbagai sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, moda transportasi barang dan jasa baik darat, perairan, dan udara, hingga sarana perdagangan yang memadai menjadi berbagai infrastruktur pendukung perekonomian yang perlu ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya di seluruh wilayah daerah.

MISI 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan efisien

Misi ini merupakan sebuah komitmen fundamental untuk mentransformasi pelayanan publik dengan berfokus pada dua dimensi utama: peningkatan jangkauan (kuantitas) dan mutu (kualitas). Peningkatan kuantitas diwujudkan dengan memperluas aksesibilitas layanan bagi seluruh masyarakat agar tidak lagi terpusat di satu lokasi, yaitu melalui layanan terintegrasi, layanan keliling yang proaktif mendatangi warga, hingga digitalisasi layanan melalui aplikasi dan website untuk mempermudah akses. Secara simultan, peningkatan kualitas menjadi krusial, yang diukur dari pengalaman nyata yang dirasakan warga. Hal ini mencakup adanya kepastian prosedur, waktu, dan biaya yang transparan; kecepatan proses dengan memangkas waktu tunggu; serta jaminan akurasi hasil layanan yang didukung oleh aparatur yang kompeten, ramah, dan solutif.

Landasan untuk mencapai kedua dimensi tersebut adalah prinsip efektivitas dan efisiensi. Efektivitas memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar menyelesaikan kebutuhan masyarakat, sementara efisiensi mendorong agar layanan tersebut dapat diberikan dengan penggunaan sumber daya baik waktu, anggaran, maupun tenaga yang seminimal mungkin tanpa mengorbankan mutu. Pada akhirnya, keberhasilan misi ini tidak diukur dari laporan internal, melainkan dari meningkatnya kepuasan dan kepercayaan publik, di mana warga merasakan secara langsung bahwa urusan mereka menjadi lebih mudah, cepat, dan pasti, menjadikan pemerintah sebagai mitra yang andal dalam kehidupan sehari-hari.

MISI 4: Peningkatan kualitas mutu pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Mappi

Misi ini diarahkan untuk menjawab tantangan mendasar dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Mappi, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi pondasi utama peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah. Kabupaten Mappi perlu menaruh perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan serta kesehatan yang inklusif dan

berkeadilan.

Dalam bidang pendidikan, fokus diarahkan pada pemerataan akses pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik, ketersediaan sarana prasarana pendidikan, serta perluasan akses bagi anak usia sekolah untuk menempuh pendidikan yang layak hingga jenjang menengah. Upaya ini menjadi strategi kunci dalam menekan angka putus sekolah, meningkatkan angka partisipasi, dan mendorong tercapainya standar mutu pendidikan secara merata di seluruh distrik.

Sementara itu, pada sektor kesehatan, misi ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia. Penguatan layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas dan pustu), peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penanganan penyakit menular dan gizi buruk menjadi prioritas strategis yang sejalan dengan tantangan kesehatan masyarakat di wilayah pedalaman dan pesisir Kabupaten Mappi.

Pelaksanaan misi ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat Mappi yang sehat dan cerdas sebagai modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Misi ini juga mendukung pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mappi secara bertahap dan terukur dalam periode RPJMD.

MISI 5: Mendorong percepatan terwujudnya Kabupaten Admi Korbay dan Muara Digoel serta Provinsi Papua Selatan

Misi ini merupakan sebuah agenda strategis yang berfokus pada peran aktif pemerintah daerah untuk mengakselerasi proses pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu Kabupaten Admi Korbay, Kabupaten Muara Digoel, serta Provinsi Papua Selatan. Peran ini bukanlah sebatas dukungan pasif, melainkan sebuah upaya proaktif untuk memfasilitasi dan memenuhi seluruh prasyarat yang dibutuhkan, baik dari aspek administratif, teknis, maupun politis. Secara nyata, ini diterjemahkan menjadi tindakan konkret seperti penyiapan kajian

akademis yang komprehensif, pemenuhan syarat-syarat teknis kewilayahan dan kependudukan, serta pengawalan aspirasi masyarakat secara terstruktur hingga ke tingkat pusat. Selain itu, misi ini mencakup lobi dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah di level yang lebih tinggi untuk memastikan usulan pemekaran ini menjadi prioritas nasional. Tujuan akhir dari percepatan ini adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah-wilayah yang akan dimekarkan, serta membuka keran percepatan pembangunan dan ekonomi yang lebih fokus dan merata. Dengan demikian, misi ini diadopsi sebagai sebuah investasi jangka panjang dalam tata kelola wilayah untuk mencapai efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal di masa depan.

MISI 6: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya Aparatur Sipil dan sumber daya manusia Mappi yang bermartabat

Misi meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya Aparatur Sipil dan sumber daya manusia Mappi yang bermartabat, menjadi landasan strategis kemajuan Kabupaten Mappi melalui penguatan modal insani secara menyeluruh. Misi ini berfokus ganda: pertama, pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memastikan ketersediaan jumlah (kuantitas) yang cukup untuk pelayanan efektif, serta peningkatan signifikan dalam kompetensi, profesionalisme, integritas, dan etos kerja (kualitas) demi mewujudkan birokrasi yang kapabel, bersih, dan berorientasi melayani. Kedua, pada sumber daya manusia Mappi secara umum, dengan mendorong peningkatan partisipasi aktif dalam pembangunan (kuantitas) serta peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan karakter (kualitas) agar masyarakat menjadi lebih berdaya, inovatif, dan mampu mengoptimalkan potensi daerah.

Seluruh proses peningkatan ini harus dilandasi oleh prinsip "bermartabat", yang menjamin perlakuan adil, kesempatan berkembang yang setara, serta penghargaan terhadap harkat dan martabat setiap individu, baik aparatur maupun masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan

misi ini diharapkan akan menciptakan sebuah siklus positif: aparatur yang berkualitas dan bermartabat akan menghasilkan layanan publik yang unggul, yang kemudian akan memberdayakan masyarakat Mappi menjadi sumber daya manusia yang kompeten, mandiri, dan bermartabat, sehingga secara bersama-sama mendorong kemajuan dan kesejahteraan berkelanjutan bagi Kabupaten Mappi.

MISI 7: Perbaikan dan peningkatan sarana ibadah serta komunikasi antar umat beragama di Kabupaten Mappi

Misi perbaikan dan peningkatan sarana ibadah serta komunikasi antar umat beragama di Kabupaten Mappi bertujuan untuk memperkuat fondasi kehidupan sosial yang harmonis melalui pendekatan keagamaan. Sarana ibadah di Kabupaten Mappi memiliki peran strategis sebagai wadah untuk membangun karakter masyarakat yang religius dan berkeadaban melalui kegiatan peribadatan dan sosial. Kondisi sarana peribadan berkualitas belum sepenuhnya merata di seluruh kampung, menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan ruang publik yang inklusif. Pembangunan dan perbaikan sarana ibadah bertujuan untuk pemerataan fasilitas keagamaan yang memadai di seluruh wilayah Kabupaten Mappi.

Selain dari aspek fisik, komunikasi antar umat beragama penting untuk diperkuat dalam membangun nilai-nilai sosial dan keagamaan di lingkungan masyarakat. Peningkatan komunikasi umat beragama didorong melalui upaya memperluas forum kerukunan umat beragama, fasilitasi dialog, dan pengarusutamaan nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Diharapkan dengan penguatan pilar keagamaan dapat mempererat harmoni sosial, memperkuat nilai toleransi, menciptakan masyarakat yang rukun dan damai dalam bingkai spiritualitas keagamaan.

MISI 8: Meningkatkan infrastuktur dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Kabupaten Mappi, yang terletak di Provinsi Papua Selatan, memiliki karakteristik wilayah geografis yang luas, terpencil, dan sebagian besar sulit dijangkau. Hal ini menyebabkan banyak tantangan dalam

pembangunan, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Tingkat kemiskinan, angka kematian ibu dan anak, gizi buruk, serta akses terhadap fasilitas kesehatan masih menjadi isu utama. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur dan pelayanan kesehatan menjadi misi penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

Misi *"Meningkatkan infrastruktur dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat"* merupakan fondasi penting bagi pembangunan manusia di Kabupaten Mappi. Kesehatan adalah syarat utama bagi masyarakat untuk beraktivitas secara produktif dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan pelaksanaan misi ini secara konsisten dan terukur, Mappi dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih sehat, berdaya, dan sejahtera.

MISI 9: Menciptakan kawasan pengembangan ekonomi mandiri berbasis masyarakat kampung

Kampung sebagai salah satu unit kemasyarakat yang paling dekat dengan masyarakat menjadikannya sebagai sebuah kelembagaan sosial yang krusial dalam pengembangan perekonomian daerah. Pemberdayaan masyarakat dan lembaga ekonomi kampung menjadi salah satu prioritas Pemerintah kabupaten Mappi ke depan. Berdayanya masyarakat kampung secara ekonomi menjadi tolok ukur yang signifikan terhadap kondisi ekonomi daerah secara keseluruhan. Melalui misi menciptakan kawasan pengembangan ekonomi mandiri berbasis masyarakat kampung, Pemerintah Kabupaten Mappi mendorong kampung untuk dapat berdaya secara ekonomi melalui berbagai aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat kampung dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan fasilitasi berbagai aktivitas perekonomian masyarakat untuk dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonominya. Tujuannya, produk-produk asli kampung dapat terserap dalam pasar dan memenuhi kebutuhan daerah hingga regional. Pemberdayaan juga dilakukan terhadap lembaga-lembaga ekonomi

kampung seperti badan usaha milik kampung hingga koperasi kampung. Lembaga-lembaga ekonomi ini berperan sebagai instrumen bagi masyarakat kampung untuk melakukan aktivitas perekonomian secara kolektif. Oleh karenanya, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat kampung juga menjadi hal yang perlu diintervensi selama lima tahun mendatang. Berbagai intervensi seperti peningkatan kapasitas pengelola badan usaha dan koperasi kampung, fasilitasi izin badan usaha dan koperasi kampung untuk berbadan hukum, dan bantuan permodalan menjadi beberapa intervensi yang perlu dilakukan. Harapannya, ekonomi mandiri berbasis kampung dapat terwujud dengan meningkatnya kemampuan masyarakat kampung untuk memproduksi dan memasarkan produk dari aktivitas ekonomi yang dilakukan.

MISI 10: Meningkatkan kepedulian dan keberpihakan serta pemberdayaan terhadap peran perempuan Papua dan generasi muda Papua dalam pembangunan

Misi untuk meningkatkan kepedulian, keberpihakan, dan pemberdayaan terhadap perempuan Papua dan generasi muda Papua mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Mappi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks ini, perempuan dan pemuda bukan hanya dipandang sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai subjek aktif yang berkontribusi langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Penguatan peran ini sangat penting agar pembangunan tidak hanya menyentuh aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Perempuan Papua memiliki potensi besar dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal serta membangun ketahanan keluarga dan sosial di tengah perubahan zaman. Demikian juga, generasi muda Papua yang merupakan aset masa depan sehingga harus dipersiapkan untuk menjadi pemimpin dan penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, misi ini diarahkan untuk memperluas akses perempuan dan pemuda

terhadap pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, serta peluang ekonomi dan politik, sehingga dapat memiliki kapasitas dan keberanian untuk tampil serta mengambil peran strategis dalam pembangunan.

Implementasi misi ini akan diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan berbasis komunitas, adat, pelibatan perempuan dan pemuda dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), serta penciptaan ruang aman dan inklusif untuk turut berpartisipasi secara aktif. Pemerintah Kabupaten Mappi juga akan mendorong kolaborasi lintas sektor dan mitra pembangunan dalam mendukung pencapaian tujuan ini. Dengan demikian, diharapkan lahir masyarakat yang lebih setara, tangguh, dan berdaya, sekaligus memperkuat fondasi sosial yang menjadi pilar utama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

MISI 11: Pemberdayaan masyarakat kampung mandiri

Misi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat kampung sebagai fondasi utama dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berbasis potensi lokal. Kabupaten Mappi yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari kampung-kampung dengan karakter geografis terpencil memerlukan pembangunan yang responsif terhadap kondisi sosial budaya, sumber daya alam, serta struktur kelembagaan yang ada di tingkat kampung.

Pemberdayaan masyarakat kampung diarahkan pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan, memperkuat kelembagaan kampung, serta menciptakan kampung-kampung yang mandiri secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fokus pembangunan meliputi peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, pangan, serta penguatan kapasitas ekonomi berbasis pertanian, perikanan, kerajinan, dan usaha mikro lokal.

Selain itu, misi ini juga mendukung peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, termasuk melalui optimalisasi dana desa, pelatihan berbasis kebutuhan

lokal, serta fasilitasi inovasi masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta kampung yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri, tetapi juga berperan sebagai subjek utama dalam pembangunan Kabupaten Mappi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Misi ini menjadi salah satu strategi penting dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah, memperkuat integrasi sosial, serta mempercepat transformasi sosial ekonomi masyarakat Mappi.

MISI 12: Peningkatan kualitas layanan kelistrikan dan penyediaan air bersih bagi masyarakat

Misi peningkatan kualitas layanan kelistrikan dan penyediaan air bersih bagi masyarakat bertujuan untuk memenuhi layanan dasar yang berkualitas dan merata di Kabupaten Mappi. Pemenuhan akses layanan dasar terkendala oleh kondisi geografis wilayah dan beberapa wilayah terletak pada area yang belum memiliki akses transportasi memadai. Pemenuhan layanan dasar merupakan aspek penting dalam pembangunan sumber daya di Kabupaten Mappi terutama untuk mendukung pembangunan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.

Saat ini layanan kelistrikan di Kabupaten Mappi terbatas pada beberapa wilayah, pada beberapa distrik waktu operasional layanan dibatasi pada jam-jam tertentu. Akses terhadap layanan kelistrikan belum merata di seluruh distrik menjadi kendala dalam pemenuhan akses pendidikan berkualitas, akses layanan kesehatan terutama penggunaan alat medis elektronik, dan perluasan informasi. Peningkatan kualitas layanan kelistrikan tidak hanya terbatas pada optimalisasi jam layanan namun juga perlu mendorong akses layanan yang merata dan terjangkau bagi seluruh wilayah.

Penyediaan air bersih secara merata di Kabupaten Mappi memiliki urgensi tinggi dalam pembangunan daerah terutama implikasinya terhadap kesehatan masyarakat. Tantangan geografis berupa wilayah rawa, aksesibilitas yang masih terbatas, dan distribusi permukiman tersebar sangat jauh berimplikasi terhadap kompleksitas penyediaan

layanan air bersih di seluruh wilayah Kabupaten Mappi. Misi ini mendorong pemerataan layanan air bersih melalui peningkatan jaringan infrastruktur perpipaan ke seluruh wilayah dengan memperhatikan kondisi geografis, pengelolaan sumber air baku berkelanjutan, dan peningkatan layanan infrastruktur terbangun. Pemenuhan air bersih secara merata dan berkelanjutan merupakan aspek penting dalam membangun sumber daya manusia berkualitas karena dampaknya yang besar untuk kesehatan masyarakat. Penguatan layanan kelistrikan dan air bersih secara berkesinambungan menjadi pengungkit untuk pembangunan daerah di Kabupaten Mappi secara inklusif dan berkelanjutan.

MISI 13: Penguatan kelembagaan dan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih

Misi ini merupakan fondasi operasional yang menopang seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan misi lainnya, dengan fokus utama pada peningkatan kapasitas internal agar berfungsi secara optimal, transparan, dan akuntabel. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan kelembagaan sebagai 'perangkat keras' pemerintahan, yang mencakup penataan struktur organisasi agar lebih efektif dan ramping, pembangunan aparatur yang profesional dan kompeten berbasis sistem meritokrasi, serta adopsi teknologi untuk modernisasi administrasi menuju pemerintahan digital. Penguatan perangkat keras ini kemudian dijalankan oleh 'sistem operasi' berupa tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini diimplementasikan dengan menegakkan prinsip transparansi melalui keterbukaan akses informasi anggaran dan pengadaan barang/jasa, memperkuat akuntabilitas dengan menetapkan indikator kinerja yang terukur, serta membangun integritas untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih melalui penguatan pengawasan internal dan penerapan Zona Integritas yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada akhirnya, keberhasilan misi ini tidak diukur secara internal, melainkan dari meningkatnya kepercayaan publik, di

mana masyarakat merasakan dampak nyata berupa layanan yang bebas pungutan liar, kemudahan mengakses informasi, serta kebijakan yang dibuat berdasarkan data, menjadikan pemerintahan yang kuat dan bersih sebagai katalisator utama bagi percepatan pembangunan di semua sektor.

MISI 14: Meningkatkan sarana prasarana dan infrastruktur transportasi guna menunjang percepatan pengembangan kawasan

Misi meningkatkan sarana prasaran dan infrastruktur transportasi guna menunjang percepatan pengembangan kawasan bertujuan untuk meningatkan konektivitas dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi wilayah. Wilayah Kabupaten Mappi belum seluruhnya terhubung oleh layanan transportasi sehingga menjadi kendala dalam pergerakan barang dan jasa secara kontinyu. Mobilitas yang rendah menjadi pemicu utama rendahnya pergerakan ekonomi kewilayahan. Faktor geografis wilayah rawa merupakan faktor kendala utama dalam membangunan jaringan transprotasi yang memadai.

Kabupaten Mappi saat ini terhubung melalui layanan transportasi darat, air, dan udara, namun dengan jumlah pergerakan yang masih rendah. Pergerakan masyarakat terutama mengandalkan akses sungai. Peningkatan konektivas didorong dengan memperhatikan geografis wilayah, sehingga misi ini memadukan peningkatan akses secara multimoda. Peningkatan layanan transportasi udara dan sungai diarahkan untuk dapat menjangkau wilayah kampung dengan tingkat aksesibilitas sangat terbatas. Transportasi darat diarahkan untuk mendorong pergerakan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Integrasi multimoda menjadi urgensi tinggi bagi Kabupaten Mappi untuk memperluas konektivitas wilayah kedepannya. Peningkatan konektivitas wilayah tidak hanya difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana, namun sekaligus meningkatkan layanan transportasi untuk memastikan keterhubungan antarwilayah dan kelancaran aktivitas perekonomian. Peningkatan konektivitas wilayah di Kabupaten Mappi harus dirancang secara strategis dan

berkelanjutan dengan memperhatikan geografis wilayah agar dapat menjawab kebutuhan daerah dan pemerataan pembangunan.

MISI 15: Menjaga identitas budaya dan kearifan lokal sebagai bagian penguatan persatuan kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Misi ini bertujuan untuk memperkuat jati diri masyarakat Kabupaten Mappi melalui pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Kabupaten Mappi memiliki kekayaan budaya yang khas, yang mencerminkan keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, serta praktik sosial yang tumbuh secara turun-temurun. Keberagaman ini merupakan aset penting dalam memperkuat ikatan sosial dan memperkokoh semangat kebangsaan di tengah pluralitas masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, pelestarian identitas budaya tidak hanya difokuskan pada aspek simbolik, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun karakter masyarakat yang inklusif, toleran, dan berdaya saing. Upaya penguatan budaya lokal dilakukan melalui fasilitasi pelestarian adat, pengembangan seni dan budaya daerah, pemberdayaan lembaga adat, serta integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam sistem pendidikan dan tata kelola sosial kemasyarakatan.

Pelaksanaan misi ini mendukung pencapaian visi daerah serta berkontribusi terhadap penguatan integrasi nasional, khususnya dalam menjaga persatuan dan kesatuan di wilayah perbatasan dan kawasan terluar Indonesia. Misi ini juga selaras dengan arah kebijakan nasional dalam memperkuat ketahanan budaya sebagai bagian dari pembangunan manusia dan masyarakat yang berkarakter.

Sebagai penjabaran dari visi pembangunan daerah, diperlukan rumusan misi yang lebih tajam dan terarah. Misi RPJMD Kabupaten Mappi tahun 2025–2029 di bawah ini merupakan hasil transformasi dari misi awal yang kemudian disesuaikan dan dikelompokkan berdasarkan urusan/bidang pemerintahan agar lebih fokus dan strategis, tanpa menghilangkan substansi utamanya. Hasil

transformasi misi ini dikelompokkan secara sistematis ke dalam 6 (enam) pilar pembangunan strategis. Keenam pilar tersebut mencakup urusan ***sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi, tata kelola*, *sosial budaya*, dan *lingkungan*.** Berikut adalah rincian transformasi misi untuk setiap pilar:

MISI 1 (*SUMBER DAYA MANUSIA*): MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

Misi ketiga ini berfokus pada investasi jangka panjang yang paling krusial, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Misi ini didasarkan pada keyakinan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah di masa depan. Oleh karena itu, Kabupaten Mappi perlu menaruh perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan serta kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam bidang pendidikan, fokus diarahkan pada pemerataan akses, peningkatan kompetensi pendidik, pemenuhan sarana prasarana yang layak, serta perluasan kesempatan bagi anak usia sekolah untuk menempuh pendidikan hingga jenjang menengah dan perguruan tinggi sebagai strategi kunci menekan angka putus sekolah. Sementara itu, pada sektor kesehatan, misi ini bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan infrastruktur dan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dengan prioritas pada kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia, serta penanganan isu strategis seperti gizi buruk di wilayah pedalaman dan pesisir. Pelaksanaan misi ini secara sinergis diharapkan mampu menciptakan masyarakat Mappi yang sehat dan cerdas, yang menjadi modal utama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan serta mendukung pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mappi secara bertahap dan terukur.

MISI 2 (*INFRASTRUKTUR*): MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERKUALITAS

Misi kelima ini menjadi pilar krusial dan prasyarat fundamental bagi keberhasilan misi pembangunan lainnya, yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Pembangunan infrastruktur diposisikan sebagai tulang punggung untuk membuka isolasi wilayah, mengurangi kesenjangan antar distrik, dan memfasilitasi pergerakan orang, barang, serta jasa di seluruh wilayah Kabupaten Mappi. Fokus utama dalam misi ini adalah meningkatkan sarana prasarana dan infrastruktur transportasi guna menunjang percepatan pengembangan kawasan, baik melalui pemantapan konektivitas darat maupun penguatan transportasi perairan yang menjadi jalur vital bagi sebagian besar masyarakat. Di samping konektivitas, misi ini juga secara tegas diarahkan pada peningkatan kualitas layanan kelistrikan dan penyediaan air bersih bagi masyarakat, yang merupakan hak dasar dan kunci utama dalam peningkatan derajat kesehatan serta kualitas hidup. Seluruh upaya pembangunan infrastruktur ini akan dilaksanakan dengan mengedepankan standar kualitas yang baik, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan agar dapat menjadi katalisator yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas akses terhadap layanan sosial, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mappi secara adil dan merata.

MISI 3 (*EKONOMI*): MEWUJUDKAN EKONOMI YANG PRODUKTIF DAN INKLUSIF BERBASIS POTENSI LOKAL

Misi kedua ini menjadi pilar fundamental untuk mendorong transformasi struktural ekonomi Kabupaten Mappi, dengan tujuan utama mewujudkan ekonomi yang produktif dan inklusif berbasis potensi lokal. Arah pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka semata, tetapi pada kualitas pertumbuhan yang mampu menyejahterakan masyarakat secara merata. Fokus utama diletakkan pada menjadikan kampung sebagai basis pengembangan

kawasan ekonomi mandiri di masyarakat, di mana setiap kampung didorong untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi lokal yang inklusif, seperti pertanian, perikanan, dan produk hasil hutan, dari skala subsisten menjadi usaha yang produktif dan memiliki nilai tambah melalui hilirisasi sederhana di tingkat komunitas. Sejalan dengan penguatan ekonomi dari tingkat basis, pemerintah daerah akan fokus pada upaya strategis di mana peningkatan realisasi investasi daerah dilakukan dengan meningkatkan iklim penanaman modal daerah yang lebih kondusif dan berdaya saing. Hal ini mencakup penyederhanaan perizinan, penyediaan data potensi yang akurat, jaminan kepastian hukum, serta pembangunan infrastruktur penunjang secara bertahap. Dengan menciptakan sinergi antara pemberdayaan ekonomi rakyat di tingkat kampung dan iklim investasi yang sehat, diharapkan akan tercipta sebuah ekosistem ekonomi yang tangguh, di mana masyarakat lokal bukan hanya menjadi objek, melainkan aktor utama yang merasakan manfaat langsung dari setiap gerak roda perekonomian daerah.

MISI 4 (*TATA KELOLA*): MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS

Misi pertama merupakan fondasi esensial dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan membangun aparatur yang bersih (*clean government*) di Kabupaten Mappi. Keberhasilan misi ini menjadi prasyarat mutlak bagi efektivitas seluruh program pembangunan lainnya, karena bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan fundamental antara pemerintah dan masyarakat. Secara internal, misi ini diterjemahkan ke dalam upaya sistematis untuk menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan akuntabel melalui transparansi pengelolaan anggaran serta pengukuran kinerja yang berbasis hasil. Upaya pembenahan internal ini kemudian harus bermuara pada transformasi kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat, mengubah paradigma

birokrasi dari yang rumit dan lambat menjadi sederhana, cepat, dan mudah diakses. Lebih lanjut, misi ini bertujuan untuk membentuk suatu sistem dan aparatur pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berdedikasi tinggi dalam melayani kepentingan publik.

Untuk mencapai hal tersebut, arah kebijakan strategis akan difokuskan pada pemanfaatan teknologi dan inovasi digital secara optimal sebagai tulang punggung efisiensi, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan agar mampu beradaptasi dan berinovasi. Sebagai wujud nyata dari perbaikan layanan, pemerintah akan mendorong lahirnya berbagai terobosan dan model pelayanan publik yang inovatif, baik melalui pengembangan layanan terpadu yang menyederhanakan akses bagi masyarakat, maupun melalui mekanisme proaktif yang dapat menjangkau warga hingga ke wilayah terpencil. Keseluruhan upaya ini akan dikawal oleh fungsi pengawasan yang efektif dan kanal pengaduan publik yang responsif. Dengan demikian, implementasi misi ini tidak hanya akan mereformasi cara kerja birokrasi, tetapi secara fundamental menjadikan prinsip-prinsip *good governance* sebagai nafas dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Kabupaten Mappi.

MISI 5 (*SOSIAL BUDAYA*): MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG HARMONIS, RELIGIUS, DAN BERBUDAYA

Misi keempat ini berfokus pada pembangunan aspek sosial dan kultural dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang harmonis, religius, dan berbudaya. Misi ini bertujuan memperkuat jati diri dan kohesi sosial masyarakat Kabupaten Mappi melalui pelestarian serta pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang beragam sebagai aset utama dalam membangun karakter masyarakat yang toleran dan berdaya saing. Upaya ini diwujudkan dengan memberdayakan lembaga adat, mengembangkan seni daerah, serta mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam sistem pendidikan dan tata kelola kemasyarakatan. Penguatan

jati diri ini berjalan seiring dengan komitmen untuk meningkatkan kepedulian, keberpihakan, dan pemberdayaan terhadap perempuan Papua dan generasi muda Papua, sebagai cerminan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dalam kerangka ini, perempuan dan pemuda tidak lagi diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai subjek aktif yang dilibatkan secara penuh mulai dari perencanaan melalui musrenbang hingga evaluasi pembangunan, melalui program pemberdayaan berbasis komunitas dan penciptaan ruang partisipasi yang aman. Dengan demikian, pelaksanaan misi ini secara holistik tidak hanya akan memperkokoh ketahanan budaya, tetapi juga memastikan pembangunan menyentuh kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, serta berkontribusi strategis terhadap penguatan integrasi nasional di wilayah Indonesia.

MISI 6 (*LINGKUNGAN*): MEWUJUDKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Misi keenam ini menjadi pilar fundamental yang menegaskan bahwa pembangunan di Kabupaten Mappi harus berjalan di atas prinsip keberlanjutan, dengan tujuan utama mewujudkan kelestarian lingkungan hidup. Misi ini bukanlah penghambat, melainkan sebuah panduan yang memastikan bahwa setiap langkah pembangunan selaras dengan amanat dan tujuan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan sejak tahap awal perencanaan. Fokus utama dari misi ini adalah untuk melindungi sumber daya alam untuk penghidupan masyarakat, mengingat hutan, sungai, dan rawa di Mappi merupakan aset dan denyut nadi kehidupan yang menyediakan pangan, air, serta menjadi basis budaya bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, setiap kebijakan ekonomi dan infrastruktur akan diarahkan untuk dapat menjaga keseimbangan alam, melindungi keanekaragaman hayati yang khas, serta meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan demikian, misi ini memastikan bahwa kemajuan yang dicapai tidak mengorbankan warisan alam untuk generasi mendatang, melainkan menciptakan sebuah

harmoni antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian ekosistem sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk masa depan Mappi yang berkelanjutan.

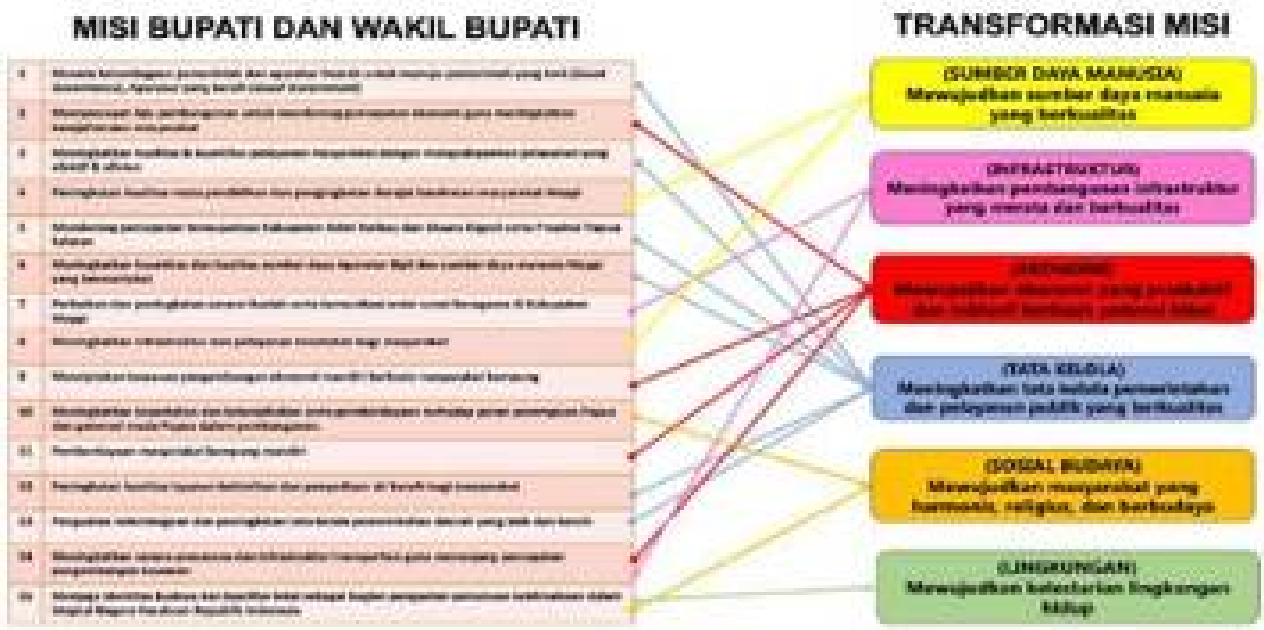

Gambar 3. 1 Misi Bupati dan Wakil Bupati dengan Transformasi Usulan Misi

3.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Tujuan mencerminkan kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun. Setiap tujuan disertai dengan sasaran yang merinci kondisi spesifik yang menunjukkan keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Berikut ini merupakan perumusan tujuan, sasaran, serta indikator dalam RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	***(SUMBER DAYA MANUSIA)*** **Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia**		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) [*Indeks*]	62.37	63.37	64.38	65.38	66.39	67.39
		Meningkatnya akses, kualitas, dan	Harapan Lama Sekolah [*Tahun*]	11.48	11.68	11.88	12.08	12.29	12.50

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		daya saing pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah [*Tahun*]	7.39	7.63	7.87	8.12	8.39	8.65
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) [*Tahun*]	66.34	66.84	67.34	67.84	68.34	68.84
			Prevalensi Stunting [%]	15.50	15.20	15.00	14.80	14.50	14.00
2.	***(INFRASTRUKTUR)*** **Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah**		Indeks Infrastruktur Daerah [*Indeks*]	46.05	46.55	47.05	47.55	48.05	48.55
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung perekonomian	Rasio Konektivitas Kab/Kota [%]	36.10	38.00	39.90	41.90	43.99	46.19
			Kapasitas Air Baku [%]	7.47	8.00	8.54	9.07	9.61	19.35
		Meningkatnya kualitas permukiman	Rasio Kawasan Layak Huni [%]	24,49	24,99	25,49	25,99	26,49	26,99
3.	***(EKONOMI)*** **Meningkatnya perekonomian yang menyejahterakan dan berdaya saing**		Indeks Daya Saing Daerah [*Angka]*	2.73	2.76	2.80	2.83	2.87	2.90
			Tingkat Kemiskinan [%]	25.72	23.37	21.03	18.68	16.34	13.99
		Menurunnya ketimpangan dan pengangguran	Indeks Gini [*Indeks*]	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38
			Tingkat Pengangguran Terbuka [%]	3.85	3.73	3.62	3.50	3.39	3.27
		Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi [%]	4.52	4.65	4.77	4.90	5.02	5.15
			PDRB per Kapita [*Juta Rp*]	18,370	18,602	18,834	19,066	19,298	19,530
		Meningkatnya ketahahan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan [*Indeks*]	37,92	40,58	43,42	46,45	49,71	52,19
4.	***(TATA KELOLA)*** **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**		Indeks Reformasi Birokrasi [*Nilai*]	46.30	47.15	48.01	48.89	49.79	50.70
		Meningkatnya tata kelola	Nilai SAKIP [*Nilai*]	55.79	58.58	61.50	64.58	67.81	71.20

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	Indeks Persepsi Anti Korupsi [*Indeks*]	50.00	53.00	56.00	59.00	62.00	65.00
		Meningkatnya birokrasi yang melayani secara profesional	Indeks Pelayanan Publik [*Indeks*]	82,70	83,80	84,90	86,00	87,10	88,20
5.	***(SOSIAL BUDAYA)*** **Meningkatnya nilai religi, harmoni sosial, dan pemajuan kebudayaan**		Indeks Pembangunan Kebudayaan [%]	50.00	51.07	52.13	53.20	54.26	55.33
		Meningkatnya nilai religi	Indeks Kerukunan Umat Beragama [*skor*]	76,97	77,47	77,97	78,47	78,97	79,47
		Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas Keluarga [%]	55.00	56.00	60.00	70.00	75.00	75.00
		Meningkatnya pemajuan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan [%]	65,00	70,00	72,00	75,00	77,00	80,00
6	***(LINGKUNGAN)*** **Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim**		Persentase Penurunan Emisi GRK [*Presentase*]	59.28	61.38	63.48	65.58	67.68	69.78
		Meningkatnya adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana [*Poin*]	126,40	126,40	126,40	126,40	126,40	126,40
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup [*Indeks*]	80.85	81.30	81.75	82.20	82.65	83.10

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah [%]	4.15	4.65	5.15	5.65	6.15	6.65

Untuk memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap perumusan tersebut, berikut disajikan deskripsi naratif yang menguraikan kerangka logis, substansi, serta keterkaitan strategis antara setiap tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai.

1) **TUJUAN 1 (SUMBER DAYA MANUSIA): Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia merupakan pilar fundamental untuk mencapai kemajuan jangka panjang. Kualitas sumber daya manusia menjadi prasyarat utama dalam menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran strategis yang saling menopang. **Sasaran pertama adalah peningkatan akses, kualitas, dan daya saing pendidikan**. Hal ini diwujudkan melalui upaya pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi, termasuk pendidikan vokasi. Peningkatan kualitas mencakup kurikulum yang adaptif, ketersediaan SDM pendidik yang berkualitas dan kompeten, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan mampu bersaing. **Sasaran kedua adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat**. Kesehatan yang prima merupakan modal dasar bagi produktivitas individu. Upaya ini difokuskan pada penguatan sistem kesehatan, mulai dari layanan promotif dan preventif hingga kuratif dan rehabilitatif. Penguatan tersebut mencakup pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang layak, distribusi SDM kesehatan yang berkualitas dan merata, jaminan ketersediaan obat-obatan esensial, serta perbaikan gizi

masyarakat. Kombinasi antara SDM yang terdidik dan sehat akan menghasilkan angkatan kerja yang produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

2) **TUJUAN 2 (INFRASTRUKTUR): Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah**

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas merupakan tulang punggung (*backbone*) yang menopang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung konektivitas dan meningkatkan kualitas hidup. **Sasaran pertama adalah peningkatan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian**. Ini mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan irigasi, energi, dan telekomunikasi. Infrastruktur ini berfungsi untuk melancarkan arus barang, jasa, dan informasi, sehingga menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk daerah. **Sasaran kedua adalah peningkatan kualitas permukiman.** Sasaran ini berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar di kawasan permukiman, seperti akses terhadap air minum yang layak, sanitasi yang aman, pengelolaan persampahan, serta penataan lingkungan permukiman yang sehat dan teratur. Peningkatan kualitas pada kedua jenis infrastruktur ini akan menciptakan efek ganda: mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

3) **TUJUAN 3 (EKONOMI): Meningkatnya Perekonomian yang Menyejahterakan dan Berdaya Saing**

Tujuan ini diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi harus mampu dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat dan tidak terkonsentrasi pada segelintir kelompok. Upaya pencapaiannya ditempuh melalui tiga sasaran utama. **Sasaran pertama adalah penurunan ketimpangan dan pengangguran.** Ini merupakan inti dari perekonomian yang menyejahterakan, di mana pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja yang layak dan mempersempit jurang

kesenjangan pendapatan. **Sasaran kedua adalah peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi.** Fokusnya adalah menggeser sumber-sumber pertumbuhan dari sektor berbasis sumber daya alam bernilai tambah rendah ke sektor industri pengolahan dan jasa modern yang berbasis inovasi dan teknologi. Pertumbuhan yang berkualitas juga berarti ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan sumber daya. **Sasaran ketiga adalah peningkatan ketahanan pangan daerah.** Ketahanan pangan menjadi fondasi stabilitas sosial dan ekonomi. Upaya ini mencakup peningkatan produktivitas sektor pertanian, diversifikasi pangan lokal, serta kelancaran distribusi dan stabilitas harga. Ketiga sasaran ini secara simultan akan mendorong terciptanya struktur ekonomi yang kuat, berdaya saing, dan berkeadilan.

4) **TUJUAN 4 (TATA KELOLA): Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) adalah instrumen kunci untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan. Pencapaian tujuan ini menjadi landasan bagi keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan lainnya. **Sasaran pertama adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien.** Hal ini diukur melalui transparansi dalam pengelolaan anggaran, perencanaan yang berbasis bukti (*evidence-based*), serta proses pengambilan keputusan yang partisipatif. Sistem pengawasan internal yang kuat dan penegakan hukum yang tegas menjadi bagian integral dari sasaran ini. **Sasaran kedua adalah peningkatan kualitas birokrasi yang melayani secara profesional.** Fokusnya adalah membangun aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki integritas, kompetensi, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi birokrasi diarahkan pada penyederhanaan prosedur layanan, penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan. Birokrasi yang profesional dan sistem pemerintahan yang akuntabel akan meningkatkan kepercayaan publik dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan.

5) **TUJUAN 5 (SOSIAL BUDAYA): Meningkatnya Harmonisasi Sosial, Nilai**

Religi, dan Pemajuan Kebudayaan

Pembangunan tidak hanya berdimensi fisik dan ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan spiritual. Harmonisasi sosial, nilai-nilai religi, dan kekayaan budaya adalah modal sosial yang tak ternilai untuk menjaga persatuan dan identitas daerah. **Sasaran pertama adalah peningkatan kualitas keluarga**. Keluarga merupakan unit terkecil sekaligus fondasi utama dalam masyarakat. Penguatan ketahanan keluarga melalui program edukasi, kesehatan, perlindungan sosial, serta penanaman nilai-nilai religi dan moral akan membentuk generasi yang berkualitas dan mencegah timbulnya masalah-masalah sosial. Keluarga yang kokoh menjadi basis bagi terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis. **Sasaran kedua adalah peningkatan pemajuan kebudayaan**. Ini mencakup upaya pelestarian warisan budaya, baik benda maupun tak benda, serta pengembangan seni dan kreativitas lokal. Kebudayaan yang maju dan lestari, yang sering kali dijiwai oleh nilai-nilai religi, berfungsi sebagai perekat sosial, sumber inspirasi, dan potensi ekonomi kreatif. Dengan demikian, penguatan institusi keluarga dan pemajuan kebudayaan secara bersama-sama akan memperkokoh kohesi sosial dan jati diri daerah.

6) **TUJUAN 6 (LINGKUNGAN): Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**

Sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi, peningkatan resiliensi menjadi sebuah keharusan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan keselamatan masyarakat. Tujuan ini dijabarkan ke dalam dua sasaran yang saling terkait erat. **Sasaran pertama adalah peningkatan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim.** Upaya adaptasi difokuskan pada pengembangan sistem peringatan dini, penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana, serta pembangunan infrastruktur yang tangguh. Sementara itu, upaya mitigasi diarahkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengembangan energi terbarukan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. **Sasaran kedua adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup.** Lingkungan yang sehat memiliki daya dukung dan daya lenting yang

lebih tinggi terhadap tekanan bencana dan dampak perubahan iklim. Sasaran ini mencakup pengendalian pencemaran, rehabilitasi ekosistem kritis seperti hutan dan pesisir, serta pengelolaan sampah dan limbah yang efektif. Keterpaduan antara aksi adaptasi-mitigasi dengan perbaikan kualitas lingkungan akan membangun ketangguhan daerah secara komprehensif.

3.4 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan visi, tujuan, dan sasaran membutuhkan serangkaian agenda pembangunan untuk dapat diwujudkan. Agenda ini terdiri atas berbagai kegiatan yang disusun melalui strategi, arah kebijakan, dan program prioritas. Strategi merupakan rencana menyeluruh yang memuat langkah-langkah seperti pemanfaatan sumber daya secara optimal, tahapan pembangunan, penentuan lokasi kegiatan, serta penetapan program prioritas guna merespons dinamika lingkungan demi tercapainya tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Arah kebijakan sendiri merupakan penjabaran dari misi yang disesuaikan dengan strategi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Secara umum, bagian ini membahas empat hal utama: tahapan pembangunan RPJMD, wilayah fokus pembangunan, program prioritas daerah, serta arah kebijakan dari setiap misi.

3.4.1 Strategi Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan merupakan bagian dari strategi pembangunan jangka menengah daerah dan menjadi panduan bagi perumusan prioritas pembangunan setiap tahun. Penahapan pembangunan merupakan langkah-langkah strategis untuk mencapai visi **“Percepatan pembangunan untuk perubahan Mappi lebih religi, mandiri, bermartabat, adil dan makmur, berkesinambungan dan terintegrasi, serta berkelanjutan guna menunjang terwujudnya kawasan baru ketahanan pangan di Provinsi Papua Selatan”**.

Penahapan pembangunan dalam kerangka tema pembangunan tahun 2025-2029 di dalam RPJPD, yaitu **“Pemenuhan fondasi transformasi: peningkatan pembangunan di seluruh bidang yang didukung oleh sarana prasarana yang berkualitas dan memadai, serta dengan kondisi keamanan,**

ketenteraman dan ketertiban yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan”.

Penahapan pembangunan merupakan panduan strategis yang merinci prioritas tahunan untuk mencapai visi daerah. Sesuai dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), penahapan untuk periode 2025-2029 ini difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan di seluruh bidang, yang ditopang oleh ketersediaan infrastruktur berkualitas dan jaminan keamanan yang kondusif. Berdasarkan kerangka tersebut, tema penahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Tema Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 disandingkan dengan RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029

Tema Pembangunan RPJMD Provinsi Papua Selatan				
Tahun 2026	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**	**Tahun 2030**
Penguatan dasar pembangunan dalam mendukung ketahanan pangan dan energi berbasis potensi local dalam rangka Papua Selatan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan	Percepatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan dasar serta pemberdayaan ekonomi local berbasis masyarakat adat	Peningkatan kualitas pelayanan dasar serta peningkatan rantai nilai dan pemanfaatan produk unggulan daerah berbasis sektor unggulan Papua Selatan	Penguatan keunggulan kompetitif daerah melalui percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan strategis dan peningkatan investasi yang berfokus pada potensi unggulan lokal	Perwujudan Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, sejahterah, pemerintahan yang aspiratif
Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Mappi				
Tahun 2026	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**	**Tahun 2030**
Penguatan tata kelola pemerintahan dan akselerasi infrastruktur pelayanan dasar yang merata	Peningkatan kualitas SDM dan produktivitas ekonomi masyarakat	Akselerasi kualitas pelayanan dasar dan perekonomian berbasis potensi daerah	Perwujudan Mappi sebagai kawasan baru ketahanan pangan	Perwujudan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan

Tahap 1 Tahun 2026: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Akselerasi Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Merata

Pada Tahap 1 di tahun 2026, fokus pembangunan diletakkan pada fondasi ganda yang krusial untuk landasan pembangunan Kabupaten Mappi ke depan. Di satu sisi, dilakukan **penguatan tata kelola pemerintahan** secara menyeluruh melalui peningkatan profesionalitas aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, serta adaptasi terhadap transformasi digital. Tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi yang bersih, kapabel, dan terpercaya.

Di sisi lain, kapabilitas birokrasi yang andal ini menjadi prasyarat utama untuk pilar kedua, yaitu **akselerasi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang merata**. Prioritas akan diberikan pada percepatan pemenuhan dan peningkatan kualitas infrastruktur esensial seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, serta akses air bersih, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau secara optimal. Sinergi antara tata kelola yang baik dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai ini diharapkan dapat secara langsung mewujudkan reformasi birokrasi yang dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, yakni melalui pelayanan dasar yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan berkeadilan bagi semua.

Tahap 2 Tahun 2027: Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Ekonomi Masyarakat

Memasuki Tahap 2 di tahun 2027, pembangunan beranjak dari penguatan fondasi menuju tahap kapitalisasi hasil. Dengan tata kelola yang lebih baik dan infrastruktur dasar yang lebih merata dari tahun sebelumnya, fokus kini dialihkan pada **peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)** secara komprehensif. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan mutu layanan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, serta didukung oleh penguatan nilai-nilai budaya, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan pemuda. SDM yang lebih sehat, cerdas, dan berkarakter inilah yang menjadi motor penggerak utama untuk pilar kedua, yaitu mendorong **peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat** yang bertumpu di tingkat basis.

Pemberdayaan masyarakat kampung, khususnya Orang Asli Papua (OAP), menjadi sentral melalui penguatan kapasitas angkatan kerja dan fasilitasi pengembangan potensi lokal melalui institusi seperti Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dan koperasi. Dengan demikian, Tahap 2 dirancang untuk menciptakan siklus positif di mana manusia yang unggul mampu menggerakkan ekonomi yang produktif, mendorong lebih banyak warga untuk berwirausaha, dan pada gilirannya ekonomi yang produktif tersebut memberikan daya dukung untuk peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Tahap 3 Tahun 2028: Akselerasi Kualitas Pelayanan Dasar dan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah

Memasuki Tahap 3 di tahun 2028, pembangunan memasuki fase akselerasi dengan memanfaatkan modal sumber daya manusia dan sosial yang telah terbentuk pada tahap sebelumnya. Fokus ganda pada tahap ini adalah **akselerasi kualitas pelayanan dasar** yang berjalan seiring dengan **akselerasi perekonomian berbasis potensi daerah**. Di satu sisi, percepatan ekonomi didorong untuk mencapai pertumbuhan yang stabil dan inklusif melalui optimalisasi sektor unggulan seperti perikanan dan pertanian, sembari terus meningkatkan iklim investasi yang kondusif untuk menarik penanaman modal padat karya dan berkelanjutan. Di sisi lain, percepatan ekonomi ini menjadi penopang utama untuk meningkatkan mutu layanan dasar.

Pembangunan infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, serta peningkatan ketercukupan energi dan air bersih, memainkan peran ganda: tidak hanya untuk melancarkan roda perekonomian, tetapi juga secara langsung menjadi medium untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan ke seluruh pelosok. Dengan demikian, Tahap 3 dirancang untuk menciptakan sebuah spiral pembangunan positif, di mana pertumbuhan ekonomi yang kuat mampu mendanai peningkatan kualitas layanan publik, dan layanan publik yang unggul akan menghasilkan SDM berkualitas yang semakin memperkokoh daya saing ekonomi daerah.

Tahap 4 Tahun 2029: Perwujudan Mappi Sebagai Kawasan Baru Ketahanan Pangan

Tahap 4 di tahun 2029 merupakan fase puncak dan perwujudan dari seluruh akumulasi hasil pembangunan selama periode RPJMD. Pada tahap ini, seluruh modalitas yang telah dibangun mulai dari pelayanan dasar yang merata, SDM yang produktif, kelembagaan ekonomi lokal yang kuat, hingga konektivitas yang handal diarahkan untuk satu tujuan strategis: **Perwujudan Mappi Sebagai Kawasan Baru Ketahanan Pangan** di Provinsi Papua Selatan. Akselerasi produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan digenjot secara masif, serta didukung oleh proses hilirisasi di tingkat masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Tujuannya tidak hanya untuk mencapai kemandirian pangan dan kecukupan gizi bagi warga Mappi, tetapi juga untuk memposisikan daerah sebagai lumbung pangan yang mampu menopang kebutuhan regional Provinsi Papua Selatan. Dengan demikian, pencapaian ini menjadi kontribusi nyata dan wujud daya saing Kabupaten Mappi dalam mendukung prioritas pembangunan nasional untuk memperkokoh kedaulatan pangan bangsa.

Tahap 5 Tahun 2030: Perwujudan Kesinambungan Pembangunan yang Berkelanjutan

Memasuki tahun 2030, Tahap 5 diposisikan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai fase transisi strategis yang krusial dengan fokus pada **Perwujudan Kesinambungan Pembangunan yang Berkelanjutan**. Pada tahap ini, seluruh capaian visi dari periode RPJMD 2025-2029, termasuk posisi strategis Mappi sebagai kawasan ketahanan pangan, dikonsolidasikan dan diinstitusionalisasikan agar menjadi fondasi yang kokoh. Fokus kemudian diarahkan untuk memastikan bahwa fondasi yang telah dibangun selaras sepenuhnya dengan kerangka yang lebih luas, yaitu pencapaian **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)** secara komprehensif yang ditopang oleh pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Dengan demikian, tahap ini menjadi jembatan penghubung yang vital, memastikan seluruh modal pembangunan yang ada menjadi landasan pacu yang solid untuk periode pembangunan jangka menengah berikutnya (2030-2034), demi menjaga momentum dan mengarahkan sumber daya daerah untuk mencapai visi jangka

panjang: **"Kabupaten Mappi Maju dan Sejahtera Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berkelanjutan dan Berbudaya."**

3.4.2 Arah Pembangunan Kewilayahan dalam RPJMN

Pembangunan kewilayahan dalam RPJMN tertuang dalam arah kebijakan kewilayahan yang ada pada lampiran IV RPJMN. Pada lampiran tersebut disajikan highlight indikasi intervensi pada masing-masing daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota. Berikut *highlight* indikasi intervensi Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini termasuk Kabupaten Mappi.

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
1.	Kabupaten Mappi	Penguatan sentra produksi berbasis komoditas sagu, melalui: • Peningkatan produksi perkebunan, dengan output pemberian bibit unggul tanaman, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman Perkebunan • Pengembangan tata niaga/pemasaran, dan promosi produk, dengan output pembntukan/pengembangan dan pendampiagan IKM/UMKM, BUMDesa, dan koperasi, serta revitalisasi pasar rakyat • Peningkatan kuaitas SDM, dengan output pengembangan sekolah vokasi, serta fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung dengan output peningkatan jalan usaha tani, penyediaan sarana dan prasarana pasca panen tanaman perkebunan, penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat • Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan output, pengembangan kelembagaan ekonomi petani dan peningkatan akses pembiayaan modal • Pengembangan riset dsn inovasi teknologi, dengan output: pengembangan model percontohan pertanian modem, peningkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		penerapan teknologi pertanian, termasuk digital farming serta peningkatan penerimaan bantuan pendanaan penelitian *matching fund* (BOPTN penelitian)
2.	Provinsi Papua Selatan	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan artarwilayah, melalui: • Pembangunan dan peningkatan jalan stategis, jalan trans, dan jalan 3TP, dengan output penanganan jalan daerah dan pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (Iwur-Waropko, Merauke-Mappi) . • Pengembangan pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran dengan output peningkatan pelayaran kapal Ro-Ro, penyelenggaraan layanan transportasi laut dan penyeberangan perintis, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Agats di Kab. Asmat, Pengembagan fasilitas Pelabuhan Moor di Kab. Mappi,pembangunan fasilitas Pelabuhan Wowi di Kab. Asmat, pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bade di Kab. Mappi, layanan angkutan laut perintis, serta peningkatan layanan angkutan laut perintis dan layanan penyeberangan printis . • Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output* pengembangan Bandar Udara Ewer di Kab. Asmat, Bandar Udara Tanah Merah di Kab. Boven Digoel, Bandar Udara Mopah di Kab, Merauke, dan Bandar Udara Kepi di Kab. Mappi, pengembangan angkutan udara perintis penumpang, pengembangan angkutan udara perintis kargo, pengembangan angkutan BBM pesawat udara . pemenuhan kebutuhan infrstruktur transformasi dan konektivias perkotaan. • Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan output pengendalian pembnagunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi. • Peningkatan infrastruktur digital dan TIK, dengan output pembangunan BTS

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		4G/lastmile • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, serta perluasan layanan digital
3.	Kabupaten Mappi	Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, politeknik, dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perikanan, perkebunan, ekonomi krratif, serta industri pengolahan) sesuai kebutuhan DUDI
4.	Kabupaten Mappi	Penguatan kawasan potensial swasembada pangan padi dan pangan akuatik/ *bluefood* berbasis perikanan tangkap
5.	Kabupaten Mappi	Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan penguatan infrastruktur ketenagatistrikan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan pada kawasan potensial energi
6.	Kabupaten Mappi	Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang
7.	Kabupaten Mappi	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan
8.	Kabupaten Mappi	Penguatan percepatan pencegahan dan penurunan stunting serta perbaikan gizi laimya
9.	Provinsi Papua Selatan	Peningkatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat,
10.	Provinsi Papua Selatan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bcncana, serta adaptasi perubahan iklim
11.	Provinsi Papua Selatan	Peningkatan *smart government*, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung

Sumber: Lampiran IV, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

3.4.3 Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan daerah merupakan rumusan strategis yang menjabarkan cara-cara untuk mencapai setiap misi pembangunan yang telah ditetapkan. Bagian ini berfungsi sebagai jembatan antara pernyataan misi yang bersifat umum dengan program prioritas yang lebih konkret. Perumusan arah kebijakan ini didasarkan pada strategi pembangunan, isu-isu strategis, serta potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Mappi.

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, arah kebijakan disajikan dalam dua format. Pertama, merinci arah kebijakan yang diturunkan langsung dari setiap 15 misi awal Bupati dan Wakil Bupati. Kedua, menyajikan arah kebijakan yang telah dikelompokkan ulang ke dalam 6 (enam) pilar transformasi misi yang lebih fokus dan strategis, yaitu Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Ekonomi, Tata Kelola, Sosial Budaya, dan Lingkungan. Pengelompokan ini bertujuan untuk memastikan sinergi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang.

Rincian arah kebijakan daerah yang dijabarkan dari setiap misi pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Daerah Kabupaten Mappi

No	Misi	Arah Kebijakan
1	**Misi 1** Menata kelembagaan pemerintah dan aparatur Daerah untuk menuju pemerintah yang baik (*Good Governace*), Aparatur yang bersih (*Good Goverment*)	• Mengoptimalkan struktur organisasi; • Mengefisienkan proses kerja; • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas; • Penguatan partisipasi publik; • Peningkatan kompetensi dan profesionalisme; • Penguatan integritas dan budaya Anti-KKN; • Pengembangan budaya pelayanan prima;
2	**Misi 2** Mempercepat laju pembangunan untuk mendorong percepatan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;	• Pemetaan potensi investasi daerah; • Peningkatan promosi investasi daerah; • Peningkatan produktivitas pertanian; • Penerapan teknologi tepat guna pertanian; • Perluasan akses pasar bagi komoditas unggulan daerah; • Peningkatan daya tarik destinasi wisata daerah; • Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja daerah; dan • Peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa daerah.
3	**Misi 3** Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan efisien	• Mengembangkan layanan publik yang terintegrasi dan terpusat; • Melaksanakan layanan proaktif dan jemput bola melalui unit layanan keliling; • Mendigitalisasi proses pelayanan; • Menciptakan standar pelayanan publik sesuai prosedur; dan • Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur;

No	Misi	Arah Kebijakan
4	**Misi 4** Peningkatan kualitas mutu pendidikan dan pengingkatan derajat kesehatan masyarakat Mappi	• Pemerataan distribusi guru; • Pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan; • Pembangunan infrastruktur yang mendukung akses ke sekolah sesuai standar; • Penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya); • Pengembangan dan penerapan kurikulum muatan lokal sesuai konteks Kabupaten Mappi; • Penyediaan tenaga kesehatan secara merata sesuai standar berdasarkan kebijakan afirmatif; • Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan sesuai standar dan terakreditasi; • Pengendalian prevalensi penyakit tidak menular dan penyakit menular; • Kampanye dan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan PHBS; • Kampanye dan edukasi pola asuh dan makan bergizi; • Peningkatan dan pemerataan cakupan layanan kesehatan maternal dan neonatal pada fasilitas kesehatan Tingkat distrik dan kampung; dan • Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN).
5	**Misi 5** Mendorong percepatan terwujudnya Kabupaten Admi Korbay dan Muara Digoel serta Propinsi Papua Selatan	• Peningkatan kualitas dan kelengkapan kajian akademis; • Peningkatan pemenuhan seluruh syarat kewilayahan dan kependudukan; • Peningkatan kualitas dan validitas dokumen usulan; • Peningkatan komunikasi dan konsensus dengan masyarakat; dan • Peningkatan efektivitas koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten terkait.
6	**Misi 6** Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya Aparatur Sipil dan sumber daya manusia Mappi yang bermartabat	• Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur; • Peningkatan integritas dan etos kerja aparatur yang bersih dan melayani; • Meningkatkan kebutuhan jumlah aparatur

No	Misi	Arah Kebijakan
		sesuai formasi yang tepat; dan • Menjamin perlakuan yang adil dan kesempatan yang setara bagi semua.
7	**Misi 7** Perbaikan dan peningkatan sarana Ibadah serta komunikasi antar umat beragama di Kabupaten Mappi;	• Peningkatan sarana dan prasarana pendukung ibadah tingkat distrik dan kampung; • Pemerataan pembangunan rumah ibadah; • Peningkatan rehabilitasi rumah ibadah eksisting secara terukur; • Penguatan peran masyarakat secara komunal melalui penyelenggaraan kegiatan lintas agama; • Peningkatan fasilitasi dialog dan pertemuan lintas agama secara rutin; • Peningkatan kapasitas organisasi keagamaan; • Fasilitasi pelatihan pengelolaan rumah ibadah; dan • Peningkatan peran rumah ibadah dalam pendidikan keagamaan dan pelayanan sosial.
8	**Misi 8** Meningkatkan Infrastruktur dan pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat	• Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas layanan kesehatan di daerah terpencil; • Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung-kampung; • Peningkatan standar kelayakan bangunan dan fasilitas kesehatan; • Penyediaan ambulans, alat kesehatan (alkes), air bersih, dan sanitasi yang layak di fasilitas Kesehatan; • Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi kesehatan sesuai karakteristik wilayah; • Penguatan sistem infrastruktur logistik kesehatan; • Peningkatan efisiensi distribusi dan manajemen rantai pasok obat serta vaksin di seluruh fasilitas kesehatan; • Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; dan • Peningkatan ketersediaan sistem pembuangan limbah rumah tangga yang layak.
9	**Misi 9**	• Pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung;

No	Misi	Arah Kebijakan
	Menciptakan kawasan pengembangan ekonomi mandiri berbasis masyarakat kampung	• Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat kampung melalui koperasi dan badan usaha milik kampung; • Penataan kawasan kampung; dan • Peningkatan konektivitas wilayah kampung di daerah.
10	**Misi 10** Meningkatkan kepedulian dan keberpihakan serta pemberdayaan terhadap peran perempuan papua dan generasi muda papua dalam pembangunan	• Pendampingan dan Pemberdayaan perempuan OAP; • Membangun kemitraan dengan berbagai stakeholders dalam peningkatan ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak; dan • Membangun pola pengasuhan yang baik dan sesuai dengan budaya lokal.
11	**Misi 11** Pemberdayaan masyarakat kampung mandiri.	• Peningkatan keterampilan masyarakat kampung; • Peningkatan akses permodalan bagi usaha masyarakat kampung; dan • Peningkatan akses pasar bagi komoditas produksi masyarakat kampung.
12	**Misi 12** Peningkatan kualitas layanan kelistrikan dan penyediaan air bersih bagi masyarakat	• Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah; • Peningkatan pemerataan layanan kelistrikan pada wilayah yang belum terlayani; • Peningkatan kualitas jaringan listrik eksisting; • Pemeliharaan infrastruktur air baku secara terukur; • Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya air; • Peningkatan pemerataan layanan air bersih layak dan aman pada level rumah tangga; • Pengembangan SPAM perpipaan dan non perpipaan secara merata di tingkat kampung; • Peningkatan akses air bersih pada fasilitas layanan dasar; • Pengelolaan dan perlindungan kawasan lindung sumber air baku berbasis masyarakat; • Peningkatan pengelolaan dan perlindungan ekosistem lahan basah; • Perlindungan kelestarian tutupan lahan hijau pada sumber mata air; dan • Pemulihan ekosistem darat, perairan darat,

No	Misi	Arah Kebijakan
		dan ekosistem kawasan pesisir terdegradasi.
13	**Misi 13** Penguatan kelembagaan dan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	• Penataan ulang struktur lembaga agar lebih lincah dan efisien; • Meningkatkan pembinaan aparatur yang meritokrasi; • Optimalisasi penggunaan teknologi digital dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan; • Peningkatan pengawasan internal pemerintahan; dan • Menetapkan target kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap lembaga.
14	**Misi 14** Meningkatkan sarana prasarana dan infrastruktur transportasi guna menunjang percepatan pengembangan kawasan	• Penguatan konektivitas dasar antar distrik dan kampung; • Peningkatan sarana dan prasarana transportasi multimoda berbasis kawasan strategis; • Pengembangan pelabuhan dan dermaga sungai sebagai simpul logistik lokal; • Peningkatan kualitas infrastruktur transportasi dasar; • Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi darat dan perairan secara terukur; dan • Pembangunan jembatan penghubung antar kampung yang terpisah oleh sungai.
15	**Misi 15** Menjaga identitas budaya dan kearifan lokal sebagai bagian penguatan persatuan kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	• Penguatan pelestarian nilai-nilai budaya dan warisan adat istiadat; • Pemberdayaan pelaku seni dan budaya lokal; • Penguatan peran lembaga adat; • Penguatan pemanfaatan budaya lokal; • Penguatan identitas kebangsaan melalui pendekatan budaya; dan • Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga adat, tokoh masyarakat, serta komunitas budaya.

Selanjutnya, untuk mempertajam fokus dan sinergi pelaksanaan, berbagai arah kebijakan tersebut dikelompokkan ke dalam enam pilar transformasi misi sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Daerah Kabupaten Mappi sesuai Transformasi Misi

No	Transformasi Misi	Arah Kebijakan
1	**MISI 1 (*SUMBER DAYA MANUSIA*):** MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS	• Pemerataan distribusi guru; • Program 1000 sarjana untuk putra putri asli daerah Kabupaten Mappi; • Pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan; • Penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya); • Pengembangan dan penerapan kurikulum muatan lokal sesuai konteks Kabupaten Mappi; • Penyediaan tenaga kesehatan secara merata sesuai standar berdasarkan kebijakan afirmatif; • Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan sesuai standar dan terakreditasi; • Pengendalian prevalensi penyakit tidak menular dan penyakit menular; • Kampanye dan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan PHBS; • Kampanye dan edukasi pola asuh dan makan bergizi; • Peningkatan dan pemerataan cakupan layanan kesehatan maternal dan neonatal pada fasilitas kesehatan Tingkat distrik dan kampung; dan • Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN).
2	**MISI 2 (*INFRASTRUKTUR*):** MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERKUALITAS	• Pembangunan infrastruktur yang mendukung akses ke sekolah sesuai standar; • Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas layanan kesehatan di daerah terpencil; • Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung-kampung; • Peningkatan standar kelayakan bangunan dan fasilitas kesehatan; • Penyediaan ambulans, alat kesehatan (alkes), air bersih, dan sanitasi yang layak di fasilitas kesehatan; • Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi kesehatan sesuai karakteristik wilayah; • Penguatan sistem infrastruktur logistik kesehatan; • Peningkatan efisiensi distribusi dan manajemen rantai pasok obat serta vaksin di seluruh

No	Transformasi Misi	Arah Kebijakan
		fasilitas kesehatan; • Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; • Peningkatan ketersediaan sistem pembuangan limbah rumah tangga yang layak; • Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah; • Peningkatan pemerataan layanan kelistrikan pada wilayah yang belum terlayani; • Peningkatan kualitas jaringan listrik eksisting; • Peningkatan pemerataan layanan air bersih layak dan aman pada level rumah tangga; • Pengembangan SPAM perpipaan dan non perpipaan secara merata di tingkat kampung; • Peningkatan akses air bersih pada fasilitas layanan dasar; • Penguatan konektivitas dasar antar distrik dan kampung; • Peningkatan sarana dan prasarana transportasi multimoda berbasis kawasan strategis; • Pengembangan pelabuhan dan dermaga sungai sebagai simpul logistik lokal; • Peningkatan kualitas infrastruktur transportasi dasar; • Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi darat dan perairan secara terukur; dan • Pembangunan jembatan penghubung antar kampung yang terpisah oleh sungai.
3	**MISI 3 (*EKONOMI*):** MEWUJUDKAN EKONOMI YANG PRODUKTIF DAN INKLUSIF BERBASIS POTENSI LOKAL	• Pemetaan potensi investasi daerah; • Peningkatan promosi investasi daerah; • Peningkatan produktivitas pertanian; • Penerapan teknologi tepat guna pertanian; • Perluasan akses pasar bagi komoditas unggulan daerah; • Peningkatan daya tarik destinasi wisata daerah; • Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja daerah; • Peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa daerah; • Pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung; • Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat kampung melalui koperasi dan badan usaha milik kampung; • Penataan kawasan kampung; • Peningkatan konektivitas wilayah kampung di daerah;

No	Transformasi Misi	Arah Kebijakan
		• Peningkatan keterampilan masyarakat kampung; • Peningkatan akses permodalan bagi usaha masyarakat kampung; dan • Peningkatan akses pasar bagi komoditas produksi masyarakat kampung.
4	**MISI 4 (*TATA KELOLA*):** MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	• Mengoptimalkan struktur organisasi; • Mengefisienkan proses kerja; • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas; • Penguatan partisipasi publik; • Pengembangan budaya pelayanan prima; • Mengembangkan layanan publik yang terintegrasi dan terpusat; • Melaksanakan layanan proaktif dan jemput bola melalui unit layanan keliling; • Mendigitalisasi proses pelayanan; • Menciptakan standar pelayanan publik sesuai prosedur; • Peningkatan kualitas dan kelengkapan kajian akademis; • Peningkatan pemenuhan seluruh syarat kewilayahan dan kependudukan; • Peningkatan kualitas dan validitas dokumen usulan; • Peningkatan komunikasi dan konsensus dengan masyarakat; • Peningkatan efektivitas koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten terkait; • Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur; • Peningkatan integritas dan etos kerja aparatur yang bersih dan melayani; • Meningkatkan kebutuhan jumlah aparatur sesuai formasi yang tepat; • Menjamin perlakuan yang adil dan kesempatan yang setara bagi semua; • Penataan ulang struktur lembaga agar lebih lincah dan efisien; • Meningkatkan pembinaan aparatur yang meritokrasi; • Optimalisasi penggunaan teknologi digital dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan; • Peningkatan pengawasan internal pemerintahan; dan • Menetapkan target kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap lembaga.

No	Transformasi Misi	Arah Kebijakan
5	**MISI 5 (*SOSIAL BUDAYA*):** MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG HARMONIS, RELIGIUS, DAN BERBUDAYA	• Peningkatan sarana dan prasarana pendukung ibadah tingkat distrik dan kampung; • Pemerataan pembangunan rumah ibadah; • Peningkatan rehabilitasi rumah ibadah eksisting secara terukur; • Penguatan peran masyarakat secara komunal melalui penyelenggaraan kegiatan lintas agama; • Peningkatan fasilitasi dialog dan pertemuan lintas agama secara rutin; • Peningkatan kapasitas organisasi keagamaan; • Fasilitasi pelatihan pengelolaan rumah ibadah; • Peningkatan peran rumah ibadah dalam pendidikan keagamaan dan pelayanan sosial; • Pendampingan dan Pemberdayaan perempuan OAP; • Membangun kemitraan dengan berbagai stakeholders dalam peningkatan ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak; • Membangun pola pengasuhan yang baik dan sesuai dengan budaya lokal; • Penguatan pelestarian nilai-nilai budaya dan warisan adat istiadat; • Pemberdayaan pelaku seni dan budaya lokal; • Penguatan peran lembaga adat; • Penguatan pemanfaatan budaya lokal; • Penguatan identitas kebangsaan melalui pendekatan budaya; dan • Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga adat, tokoh masyarakat, serta komunitas budaya.
6	**MISI 6 (*LINGKUNGAN*):** MEWUJUDKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	• Pemeliharaan infrastruktur air baku secara terukur; • Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya air; • Pengelolaan dan perlindungan kawasan lindung sumber air baku berbasis masyarakat; • Peningkatan pengelolaan dan perlindungan ekosistem lahan basah; • Perlindungan kelestarian tutupan lahan hijau pada sumber mata air; dan • Pemulihan ekosistem darat, perairan darat, dan ekosistem kawasan pesisir terdegradasi.

Secara keseluruhan, arah kebijakan yang telah dirumuskan mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Mappi untuk melaksanakan pembangunan secara terencana, terpadu, dan berorientasi pada hasil. Setiap kebijakan diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, penguatan tata kelola pemerintahan, hingga menjunjung tinggi kearifan budaya dan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Arah kebijakan ini akan menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan visi besar Kabupaten Mappi, sehingga setiap langkah pembangunan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

3.4.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program strategis yang disusun melalui pendekatan politik dan teknokratik. Program ini harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah guna mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih. Secara politik, program prioritas mencakup program unggulan yang sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Berbagai program tersebut merupakan bagian dari janji politik yang harus direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang integrasi ke dalam dokumen perencanaan. Kemudian secara teknokratik, program prioritas disusun berdasarkan analisis terhadap isu serta permasalahan relevan yang dihadapi daerah. Oleh karena itu, program ini diharapkan memiliki relevansi yang tinggi dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan daerah. Berikut adalah program prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 5 Penyandingan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati dengan Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri

TRANSFORMASI MISI	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	Penjabaran/Rincian Program Unggulan	Program Prioritas Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
MISI 1 (*SUMBER DAYA MANUSIA*): **MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS**	Program Peningkatan Kapasitas Keluarga melalui Kesehatan Terjamin, SDM Unggul, dan Peran Perempuan yang Berdaya	Peningkatan akses dan penguatan kualitas pendidikan yang merata pada jenjang pra sekolah, dasar, dan menengah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		Program 1000 sarjana untuk putra putri asli daerah Kabupaten Mappi	
		Penyediaan akses, fasilitas, serta pembiayaan bagi pendidikan tingkat tinggi	
		Peningkatan serta penguatan pendidikan, pelatihan, pembinaan pemuda dalam bidang olahraga, seni budaya, dan keagamaan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		Pengembangan sarpras, alkes, obat dan SDM RSUD Mappi kualitas tipe B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKP UKM)
		Pembangunan gedung administrasi, gedung instalasi maternal perinatal – pediatrik terpadu, gedung isolasi A-B-C, gedung rehap medik, gedung rawat inap kelas I, II, II, VIP, dan alkes seperti ct-scan, MRI, ipal	
		Pengembangan sarpras alkes, obat serta SDM di puskesmas, pembangunan gedung utama di 7 lokasi puskesmas, pengembangan di 17 puskesmas dan pengembangan	

TRANSFORMASI MISI	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	Penjabaran/Rincian Program Unggulan	Program Prioritas Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
		puskesmas pembantu biasa	
		Pembangunan RS tipe D pratama di Senggo dan Bade	
		Peningkatan akses magang/pelatihan SDM kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta pemenuhaan dokter spesialis dalam rangka menuju Mappi sebagai destinasi wisata layanan kesehatan di Provinsi Papua Selatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
MISI 2 (*INFRASTRUKTUR*): **MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERKUALITAS**	Program Pembangunan Infrastruktur Inklusif untuk Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Hidup	Pembangunan gedung sarana pemerintahan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		Pembangunan infrastruktur perhubungan darat	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		Pembangunan infrastruktur perhubungan laut dan sungai	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
		Pembangunan infrastruktur perhubungan udara	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
		Pembangunan infrastruktur air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		Pembangunan sanitasi rumah tangga yang layak	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

TRANSFORMASI MISI	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	Penjabaran/Rincian Program Unggulan	Program Prioritas Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
		Pembangunan perumahan rakyat layak huni	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
MISI 3 (*EKONOMI*): **MEWUJUDKAN EKONOMI YANG PRODUKTIF DAN INKLUSIF BERBASIS POTENSI LOKAL**	Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Masyarakat	Penataan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
		Peningkatan dan pengembangan usaha peternakan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
		Intensifikasi dan eksentifikasi pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		Pengembangan sentra produksi perkebunan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		Pembinaan dan pola kemitraan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan agrobisnis	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
			PROGRAM PENINGKATAN

TRANSFORMASI MISI	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	Penjabaran/Rincian Program Unggulan	Program Prioritas Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
			DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
		Penataan dan pengembangan manajemen koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
		Peningkatan produktivitas tenaga kerja	PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
MISI 4 (*TATA KELOLA*): **MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS**	Program Transformasi serta Restrukturisasi Birokrasi untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Profesional, dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola dan optimalisasi potensi keuangan daerah untuk mendorong kemandirian fiskal dan pembangunan ekonomi berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Penguatan pemberian layanan publik yang optimal bagi masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
		Penguatan kinerja profesional melalui peningkatan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

TRANSFORMASI MISI	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	Penjabaran/Rincian Program Unggulan	Program Prioritas Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
		kompetensi dan penegakan etos kerja pegawai	
		Penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
		Melakukan audit terhadap kecurigaan adanya penyimpangan	
		Membantu menanggulangi kasus pelanggaran HAM	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
MISI 5 (*SOSIAL BUDAYA*): **MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG HARMONIS, RELIGIUS, DAN BERBUDAYA**	Program Pemantapan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui Harmonisasi Sosial dan Penegakan Hukum	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		Peningkatan pendidikan dan literasi politik untuk warga yang cerdas dan bertanggung jawab	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
		Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk kesiapsiagaan aparat keamanan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		Penguatan peran PKK dalam membangun kemandirian dan ketahanan keluarga sejahtera	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		Sosialisasi dan penyuluhan hukum ke masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN

TRANSFORMASI MISI	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	Penjabaran/Rincian Program Unggulan	Program Prioritas Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
			NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
		Pemenuhan hak-hak perempuan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
MISI 6 (*LINGKUNGAN*): **MEWUJUDKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**	Program Peningkatan Ketahanan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan	Pengawasan terhadap pengrusakan dan pembakaran hutan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		Pembinaan kepada masyarakat tentang pelestarian lingkungan dan dampaknya terhadap ekosistem	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
		Merencanakan tata ruang yang berwawasan lingkungan hidup	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		Peningkatan sosialisasi wawasan lingkungan bersih dan sehat, terutama kamar mandi, cuci dan wc	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Tabel 3. 5 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
VISI: **"Percepatan Pembangunan untuk perubahan Mappi lebih Religi, Mandiri, Bermartabat, Adil dan Makmur, Berkesinambungan dan Terintegrasi, serta Berkelanjutan guna menunjang terwujudnya kawasan baru ketahanan pangan di Provinsi Papua Selatan"** **MISI:** **Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**	***(SUMBER DAYA MANUSIA)*** ***MENINGKATNYA KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA***			Indeks Pembangunan Manusia (IPM) [*Indeks*]	
		Meningkatnya akses, kualitas, dan daya saing pendidikan		Harapan Lama Sekolah [*Tahun*]	
				Rata-Rata Lama Sekolah [*Tahun*]	
			Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	APK PAUD (*Persentase*)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Persentase Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Sekolah Dasar/Madra sah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertarma/ Madrasah Tsanawiyah) (SPM) (%)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata dan Berkualitas **Misi 3: Mewujudkan Ekonomi Yang Produktif dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal** **Misi 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas**				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun Jenjang SD/ SMP (*Persentase*)	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun Jenjang SMA/SMK (*Persentase*)	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 17-18 Tahun Jenjang Kesetaraan (*Persentase*)	
				Persentase SD yang terakreditasi (*Persentase*)	
				Persentase SMP yang terakreditasi (*Persentase*)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
Misi 5: Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis, Religius, Dan Berbudaya **Misi 6: Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup**				Persentase Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Sekolah Dasar/Madra sah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertarma/ Madrasah Tsanawiyah) (SPM) (%)	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 17-18 Tahun Jenjang Kesetaraan (*Persentase*)	
				Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaika n pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
				kesetaraan (SPM) (%)	
				Indeks literasi siswa SD (*Angka*)	
				Indeks literasi siswa SMP (*Angka*)	
				Indeks Numerasi Siswa SD (*Angka*)	
				Indeks Numerasi Siswa SMP (*Angka*)	
			Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase guru PAUD, SD dan SMP yang bersertifikasi pendidik (%)	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH) [*Tahun*]	
				Prevalensi Stunting [%]	
			Tercapainya Masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil, dan Terjangkau	Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKP UKM)
				Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (%)	
				Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan (%)	
				Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
				Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	
				Persentase balita gizi kurang (%)	
				Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	
				Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar (%)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
				Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar (%)	
				Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (SPM) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (%)	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	
				Rasio Daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk (Rasio)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
			Meningkatnya Kualitas, Kuantitas dan Pemerataan SDM Kesehatan	Persentase puskesmas dengan minimal 9 jenis tenaga kesehatan (%)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
				Persentase tenaga kesehatan RSUD yang bersertifikat khusus (%)	
	(INFRASTRUKTUR) ***MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH***			Indeks Infrastruktur Daerah [*Indeks*]	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung perekonomian		Rasio Konektivitas Kab/Kota [%]	
				Kapasitas Air Baku [%]	
			Meningkatnya Bangunan Gedung yang berkepastian hukum	Persentase bangunan dengan IMB (%)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
			Meningkatnya pengelolaan jalan dan jembatan kabupaten	Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang ditingkatkan kualitasnya (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
				Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				Persentase kepemilikan KIR (%)	
				Persentase Fasilitas Kantong Parkir yang disediakan (%)	
				Cakupan layanan angkutan umum (%)	
			Terwujudnya Sistem Transportasi Laut yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Persentasi Fasilitas Pelabuhan Pengumpan dan Dermaga Rakyat dalam kondisi baik (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
				Persentase angkutan laut yang memiliki izin operasi (%)	
			Terwujudnya Sistem Transportasi Laut yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Persentase Konektivitas tranportasi Udara dari ibu kota distrik menuju ibu kota kabupaten (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
		Meningkatnya kualitas permukiman		Rasio Kawasan Layak Huni [%]	
			Terwujudnya pemenuhan air minum yang layak dan aman bagi setiap rumah tangga	Persentase Rumah Tangga memiliki akses SPAM (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
			Terwujudnya Pemenuhan Akses Sanitasi yang layak dan Aman	Persentase rumah Tangga yang memiliki akses SPALD (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
			Meningkatnya akses rumah layak huni	Persentase ketersediaan rumah layak huni (%)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
				Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani (%)	
	(EKONOMI) ***MENINGKATNYA PEREKONOMIAN YANG MENYEJAHTERAKAN DAN BERDAYA SAING***			Indeks Daya Saing Daerah [*Angka*]	
				Tingkat Kemiskinan [%]	
		Menurunnya ketimpangan dan pengangguran		Indeks Gini [*Indeks*]	
				Tingkat Pengangguran Terbuka [%*]*	
			Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan Permintaan Pasar	Persentase Tenaga Kerja Lokal yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan Permintaan Pasar (%)	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
			Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (*Persentase*)	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
			Meningkatnya kapasitas UMKM	Persentase usaha mikro yang	PROGRAM PEMBERDAYAAN

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
			yang tangguh dan mandiri	meningkat kapasitasnya (%)	USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas produksinya (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
				Persentase produk usaha mikro yang bersertifikat (%)	
		Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi [%]	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana penangkapan yang sesuai standar (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
				Persentase kelompok nelayan terlatih (%)	
				Persentase kelompok nelayan yang meningkat kelasnya (%)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Presentase kelompok yang mendapat bantuan sarana (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
				Persentase kelompok perikanan budidaya yang memiliki ketersediaan bibit unggul sesuai standar (%)	
				Persentase kelompok perikanan budidaya yang menguasai penggunaan IPTEK (%)	
				Persentase kelompok perikanan budidaya yang menggunakan metode budidaya berorientasi agribisnis (%)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
				Persentase kelompok perikanan budidaya yang naik kelas (%)	
			Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Perikanan	Persentase produk perikanan yang ditangani sesuai standar prosedur yang sertifikasi (%)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
				Angka Konsumsi Ikan (AKI)/Kapita/tahun	
				Persentase produk perikanan yang ditangani sesuai standar prosedur yang sertifikasi (%)	
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat kematian ternak akibat penyakit ternak (%)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
				Tingkat kejadian Penyakit Zoonosis	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
				Tingkat kematian ternak akibat penyakit ternak (%)	
			Terselenggaranya layanan perizinan dan pendaftaran pelaku usaha perdagangan yang cepat, transparan, dan terintegrasi guna mendorong pertumbuhan usaha perdagangan dan kepatuhan pelaku usaha di daerah	Persentase kepatuhan pelaku usaha (%)	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
			Meningkatnya luas lahan pertanian tanaman pangan yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk , Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya)	Persentase luas lahan pertanian tanaman pangan yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk, Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
				Persentase luas lahan pertanian Hortikultura yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya)	
				Persentase luas lahan pertanian Perkebunan yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya) (%)	
				Persentase kelompok peternak yang memiliki bibit unggul sesuai standar (%)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
				Persentase kelompok peternak yang memiliki pakan sesuai standar (%)	
				Presentase Ketersediaan Prasarana Pertanian Sesuai Peruntukkan	
			Meningkatnya Kelompok petani yang menerapkan metode pertanian berorientasi agribisnis	Persentase Kelompok petani yang menerapkan metode pertanian berorientasi agribisnis (%)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
			Meningkatnya SDM petani yang terlatih	Persentase SDM petani yang terlatih (%)	
			Meningkatnya kelompok tani yang naik kelas	Persentase kelompok tani yang naik kelas (%)	
			Meningkatnya SDM kelompok peternak terlatih	Persentase SDM kelompok peternak terlatih (%)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
			Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya	
			Meningkatnya Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Harga Barang Penting	Tingkat stabilitas harga barang pokok (%)	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
				Tingkat stabilitas harga barang penting (%)	
				Tingkat stabilitas Ketersediaan barang pokok dan barang penting (%)	
				Tingkat stabilitas harga barang penting (%)	
		Meningkatnya ketahahan pangan daerah		PDRB per Kapita [*Juta Rp*]	
				Indeks Ketahanan Pangan [*Indeks*]	
			Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase lumbung pangan yang memiliki	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
			kemandirian pangan	sarana yang berkondisi baik (%)	EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
			Meningkatnya diversifikasi pangan non-beras	Persentase peningkatan diversifikasi pangan non-beras (%)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			Meningkatnya Stok cadangan pangan daerah	Stok cadangan pangan daerah (*Ton*)	
			Menurunnya daerah rentan rawan pangan	Persentase desa/kelurahan yang masuk kedalam kategori sulit untuk pendistribusian pangan (%)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
			Berkurangnya desa/kelurah an yang tidak bisa Mengakses Informasi Pangan	Persentase desa/kelurah an yang tidak bisa Mengakses Informasi Pangan (%)	
	(TATA KELOLA)			Indeks Reformasi Birokrasi [*Nilai*]	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien		Nilai SAKIP [*Nilai*]	
				Indeks Persepsi Anti Korupsi [*Indeks*]	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
				Presentase Penerbitan SP2D tepat waktu setelah berkas lengkap (%)	
				Presentase OPD yang menyerahkan SPJ tepat waktu (%)	
				Presentase keterpenuhan Mandatory Spending terhadap APBD (%)	
				Persentase Realisasi Belanja terhadap Total Belanja Daerah (%)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
			Meningkatnya Keterpenuhan Kebutuhan Pegawai	Persentase keterpenuhan kebutuhan pegawai (%)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
			Meningkatnya Pegawai Yang Memiliki Nilai SKP minimal Baik	Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal "Baik" (%)	
			Meningkatnya Layanan Pegawai Sesuai Standar	Persentase layanan pegawai sesuai Standar Pelayanan (SP) (%)	
			Meningkatnya Kedisplinan Pegawai	Persentase pegawai yang disiplin (%)	
			Meningkatnya Kebutuhan Pegawai	Persentase kebutuhan pegawai (%)	
			Meningkatnya TLHP Internal dan Eksternal	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksanaan (TLHP)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
			Meningkatnya Pengawasan yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai regulasi	Persentase Pengawasan yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai regulasi (%)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
			Meningkatnya Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	Persentase Aduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan (%)	
			Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadapa regulasi berdasarkan hasil pemeriksanaan	Persentase perangkat daerah dengan tingkat kepatuhan tinggi terhadap regulasi (berdasarkan hasil pengawasan) (%)	
		Meningkatnya birokrasi yang melayani secara profesional		Indeks Pelayanan Publik [*Indeks*]	
			Meningkatnya masyarakat DTSEN yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Masyarakat dalam DTKS/DTSEN yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuasi ketentuan	Persentase pelayanan publik Kecamatan/Distrik sesuai standar pelayanan (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				Indeks Pembangunan Kebudayaan [%]	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
	(SOSIAL BUDAYA) ***MENINGKATNYA NILAI RELIGI, HARMONI SOSIAL, DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN***	Meningkatnya nilai religi		Indeks Kerukunan Umat Beragama [*skor*]	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman, Ketertiban, dan Keindahan (K3) (%)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Menurunnya potensi konflik sosial	Persentase penurunan potensi konflik sosial (%)	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
		Meningkatnya Kualitas Keluarga		Indeks Kualitas Keluarga [%]	
			Meningkatnya jumlah perempuan korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
		Meningkatnya pemajuan kebudayaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan [%]	
			Meningkatnya keaktifan lembaga masyarakat desa	Persentase lembaga kemasyarakat an desa yang aktif (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
			Meningkatnya keaktifan lembaga masyarakat hukum adat	Persentase lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang aktif (%)	
			Meningkatnya pendidikan politik masyarakat melalui pendidikan partai politik	Persentase partai politik yang terlibat aktif dalam pendidikan politik masyarakat (%)	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
			Meningkatnya pendidikan politik masyarakat melalui lembaga pendidikan	Persentase lembaga pendidikan yang terlibat aktif dalam pendidikan politik masyarakat (%)	
	LINGKUNGAN) ***MENINGKATNYA***			Persentase Penurunan Emisi GRK [*Presentase*]	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
	RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM	Meningkatnya adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim		Indeks Risiko Bencana [*Poin*]	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Dalam Lingkungan Hidup	Persentase Kapasitas SDM Dalam Lingkungan Hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup [*Indeks*]	
				Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah [%]	
			Meningkatnya kualitas sungai yang memenuhi baku mutu	Persentase Sungai yang memenuhi baku mutu (%)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan adminitratif dan teknis pencegahan	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR
				pencemaran air (%)	
			Meningkatnya kualitas air, udara, dan lahan secara terukur dan berkelanjutan	Persentase udara ambien yang memenuhi baku mutu (%)	
			Meningkatnya Resiliensi masyarakat terhadap perubahan iklim	Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ion CO2eq) (*Predikat*)	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata ruang	Persentase dokumen RDTR yang tersedia (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjabarkan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Mappi untuk lima tahun ke depan. Gambaran program dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Seluruh program yang tercantum dalam bab ini merupakan rangkaian rencana program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama periode lima tahun mendatang. Penyusunan program dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah wajib mengacu dan selaras rumusan program, outcome dan indikator outcome yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, setiap program yang dirancang memiliki keterpaduan, kesinambungan, serta kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Berikut ini merupakan tabel rincian program perangkat daerah Kabupaten Mappi tahun 2025-2029.

Tabel 4. 1 Program, Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					236.537.229.391,00		251.124.479.663,00		262.846.714.495,00		273.436.717.547,00		287.631.477.539,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					185.443.235.891,00		189.171.606.488,00		191.100.384.661,00		194.942.964.341,00		198.862.952.774,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	70.00	75.00	80.00	185.443.235.891,00	85.00	189.171.606.488,00	90.00	191.100.384.661,00	95.00	194.942.964.341,00	100.00	198.862.952.774,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					47.593.993.500,00		57.452.873.175,00		66.246.329.834,00		71.993.753.206,00		81.268.524.765,00	
Outcome: Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Pada Satuan	APK PAUD (Persentase)	6.09	6.46	6.85	5.730.902.000,00	7.26	5.814.547.100,00	7.70	5.902.374.455,00	8.16	5.994.593.178,00	8.65	6.091.422.837,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertarma/ Madrasah Tsanawiyah) (SPM) (%)	31.22	34.08	36.94	1.740.000.000,00	39.81	2.910.000.000,00	42.67	3.380.000.000,00	45.54	3.650.000.000,00	48.40	3.920.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun Jenjang SD/ SMP (Persentase)	89.55	90.53	91.51	10.000.000.000,00	92.49	12.000.000.000,00	93.47	14.000.000.000,00	94.45	16.000.000.000,00	95.44	18.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun Jenjang SMA/SMK (Persentase)	65.87	66.60	67.32	15.000.000.000,00	68.04	20.000.000.000,00	68.77	25.000.000.000,00	69.49	27.160.000.000,00	70.22	32.410.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 17-18 Tahun Jenjang Kesetaraan (Persentase)	6.91	7.22	7.53	996.691.500,00	7.85	1.046.526.075,00	8.16	1.098.852.379,00	8.47	1.153.794.998,00	8.78	1.211.484.748,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase SD yang terakreditasi (Persentase)	81.33	84.43	87.50	1.000.000.000,00	90.53	1.020.100.000,00	93.53	1.030.301.000,00	96.49	1.040.604.010,00	99.42	1.051.010.050,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase SMP yang terakreditasi (Persentase)	96.43	90.32	90.63	1.230.000.000,00	90.91	1.355.100.000,00	91.18	1.537.600.000,00	97.14	1.806.551.000,00	100.00	2.204.979.010,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertarma/ Madrasah Tsanawiyah) (SPM) (%)	97.96	98.00	98.05	2.000.000.000,00	98.10	2.030.100.000,00	98.15	2.050.401.000,00	98.20	2.070.905.010,00	98.25	2.091.614.060,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 17-18 Tahun Jenjang Kesetaraan (Persentase)	19.70	19.90	20.15	1.896.400.000,00	20.40	1.916.500.000,00	20.65	1.926.701.000,00	20.90	1.937.004.010,00	21.15	1.947.410.050,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) (%)	19.70	19.90	20.15	1.500.000.000,00	20.40	1.500.000.000,00	20.65	1.500.000.000,00	20.90	1.500.000.000,00	21.15	1.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Skor literasi siswa SD (Angka)	34.17	36.67	39.17	1.000.000.000,00	41.67	1.500.000.000,00	44.17	2.000.000.000,00	46.67	2.500.000.000,00	49.17	3.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Skor literasi siswa SMP (Angka)	49.77	50.87	51.97	2.500.000.000,00	53.07	3.000.000.000,00	54.17	3.300.000.000,00	55.27	3.500.000.000,00	56.37	4.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Skor Numerasi Siswa SD (Angka)	37.01	39.91	42.81	1.000.000.000,00	45.71	1.010.000.000,00	48.61	1.020.100.000,00	51.51	1.030.301.000,00	54.41	1.040.604.010,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Skor Numerasi Siswa SMP (Angka)	52.20	53.70	55.20	2.000.000.000,00	56.70	2.350.000.000,00	57.20	2.500.000.000,00	59.70	2.650.000.000,00	61.20	2.800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Akses dan Kualitas Pembelajaran Muatan Lokal yang Dikembangkan pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP,	Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang dikembangkan (%)	40.00	40.00	60.00	750.000.000,00	60.00	750.000.000,00	80.00	750.000.000,00	80.00	750.000.000,00	80.00	750.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase kurikulum muatan lokal PAUD dan pendidikan non formal yang	20.00	40.00	40.00	250.000.000,00	60.00	250.000.000,00	60.00	250.000.000,00	80.00	250.000.000,00	80.00	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
SMA/SMK dan Pendidikan Non Formal/Keseteraan	dikembangkan (%)													
	Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan SMA dan SMK yang dikembangkan (%)	20.00	40.00	40.00	250.000.000,00	60.00	250.000.000,00	60.00	250.000.000,00	80.00	250.000.000,00	80.00	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					2.000.000.000,00		3.000.000.000,00		4.000.000.000,00		5.000.000.000,00		6.000.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal/Keseteraan	Persentase guru PAUD, SD dan SMP yang bersertifikasi pendidik (%)	19.39	29.53	39.66	2.000.000.000,00	49.80	3.000.000.000,00	59.93	4.000.000.000,00	70.07	5.000.000.000,00	80.20	6.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM BAHASA DAN SASTRA					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Keterampilan Bahasa dan Sastra Daerah Pada Siswa di Satuan Pendidikan	Persentase bahasa dan sastra daerah yang dikembangkan (%)	16,67	16,67	33,33	250.000.000,00	50.00	250.000.000,00	66.66	250.000.000,00	83,33	250.000.000,00	100.00	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Dasar, PAUD dan Non Formal/Kesetaraan serta SMA/SMK														
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					103.386.418.666,00		107.892.887.133,00		115.375.517.546,00		123.309.902.700,00		132.953.138.070,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					53.110.634.666,00		57.170.974.133,00		62.903.771.546,00		68.837.998.700,00		76.630.498.070,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	70.00	75.00	80.00	53.110.634.666,00	85.00	57.170.974.133,00	90.00	62.903.771.546,00	95.00	68.837.998.700,00	100.00	76.630.498.070,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					42.525.784.000,00		43.371.913.000,00		44.321.746.000,00		45.321.904.000,00		46.372.640.000,00	
Outcome: Tercapainya Masyarakat yang Sehat	Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Pelayanan	19.26	23.01	26.76	1.800.000.000,00	30.51	1.980.000.000,00	34.27	2.178.000.000,00	38.02	2.395.800.000,00	41.77	2.635.380.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil, dan Terjangkau	Kesehatan Ibu Hamil (%)													Kesehatan
	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (%)	68.85	70.80	72.74	1.000.000.000,00	74.69	1.100.000.000,00	76.64	1.210.000.000,00	78.58	1.331.000.000,00	80.53	1.464.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan (%)	16.07	21.07	26.07	290.000.000,00	31.07	319.000.000,00	36.07	350.900.000,00	41.07	385.990.000,00	46.07	424.589.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	23.92	24.23	24.53	350.000.000,00	32.03	350.000.000,00	39.53	350.000.000,00	47.03	350.000.000,00	54.53	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	87.12	89.30	90.80	50.000.000,00	92.30	55.000.000,00	93.80	60.500.000,00	95.30	66.550.000,00	96.80	73.205.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	67.96	69.88	71.80	350.000.000,00	73.72	350.000.000,00	75.65	350.000.000,00	77.57	350.000.000,00	79.49	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase balita gizi kurang (%)	8.42	7.17	5.92	1.000.000.000,00	4.67	1.000.000.000,00	3.42	1.000.000.000,00	2.17	1.000.000.000,00	2.00	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	22.70	32.70	41.70	250.000.000,00	49.70	275.000.000,00	56.70	302.500.000,00	62.70	332.750.000,00	67.70	366.025.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	41.36	55.56	65.56	751.384.000,00	73.56	676.413.000,00	79.56	623.246.000,00	83.56	583.114.000,00	85.56	552.541.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar (%)	4.96	11.96	18.96	250.000.000,00	25.96	250.000.000,00	25.96	250.000.000,00	32.96	250.000.000,00	39.96	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar (%)	9.11	19.11	29.11	250.000.000,00	39.11	250.000.000,00	49.11	250.000.000,00	59.11	250.000.000,00	69.11	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (SPM) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (%)	13.84	18.84	23.84	250.000.000,00	28.84	250.000.000,00	33.84	250.000.000,00	38.84	250.000.000,00	43.84	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa	60.87	63.37	65.87	250.000.000,00	68.37	250.000.000,00	70.87	250.000.000,00	73.37	250.000.000,00	75.87	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	sesuai standar (%)													
	Rasio Daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk (Rasio)	1.18:1.18	1.32:1.32	1.47:1.47	35.684.400.000,00	1.62:1.62	36.266.500.000,00	1.77:1.77	36.896.600.000,00	1.92:1.92	37.526.700.000,00	2.07:2.07	38.156.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					5.000.000.000,00		6.000.000.000,00		7.000.000.000,00		8.000.000.000,00		9.000.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas, Kuantitas dan Pemerataan SDM Kesehatan	Persentase puskesmas dengan minimal 9 jenis tenaga kesehatan (%)	5.88	17.65	29.41	5.000.000.000,00	38.89	6.000.000.000,00	50.00	7.000.000.000,00	57.89	8.000.000.000,00	68.42	9.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tenaga kesehatan RSUD yang bersertifikat khusus (%)	4.29	4.73	9.73	145.000.000,00	14.73	200.000.000,00	19.73	250.000.000,00	24.73	300.000.000,00	29.73	145.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase peserta penyuluh keamanan pangan yang mendapat sertifikat (%)	30.00	35.00	40.00	250.000.000,00	45.00	250.000.000,00	50.00	250.000.000,00	55.00	250.000.000,00	60.00	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang sesuai standar (%)	30.00	35.00	40.00	250.000.000,00	45.00	250.000.000,00	50.00	250.000.000,00	55.00	250.000.000,00	60.00	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS (%)	30.00	35.00	40.00	250.000.000,00	45.00	250.000.000,00	50.00	250.000.000,00	55.00	250.000.000,00	60.00	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.07 - PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN					2.000.000.000,00		600.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		200.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) terakreditasi (%)	88.24	100.00	100.00	2.000.000.000,00	100.00	600.000.000,00	100.00	400.000.000,00	100.00	400.000.000,00	100.00	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					111.669.347.823,00		112.095.577.823,00		113.383.547.823,00		142.434.797.823,00		136.470.237.823,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					9.633.837.823,00		9.653.837.823,00		9.669.087.823,00		9.308.837.823,00		9.328.837.823,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	70.00	75.00	80.00	9.633.837.823,00	85.00	9.653.837.823,00	90.00	9.669.087.823,00	95.00	9.308.837.823,00	100.00	9.328.837.823,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					9.793.110.000,00		12.171.340.000,00		4.591.060.000,00		25.641.560.000,00		18.811.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (Persentase)	49.70	50.70	51.71	4.614.260.000,00	52.47	1.824.010.000,00	53.22	1.315.010.000,00	67.04	22.365.510.000,00	69.56	7.332.220.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase luas kawasan permukiman rawan abrasi dan banjir yang terlindungi bangunan	5.08	9.14	14.15	5.178.850.000,00	17.26	10.347.330.000,00	20.36	3.276.050.000,00	25.37	3.276.050.000,00	25.37	11.478.780.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	pengaman pantai (%)													Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					10.040.000.000,00		10.109.000.000,00		11.028.000.000,00		12.217.000.000,00		11.606.000.000,00	
Outcome: Terwujudnya pemenuhan air minum yang layak dan aman bagi setiap rumah tangga	Persentase Rumah Tangga memiliki akses SPAM (%)	6.33	7.47	8.00	10.040.000.000,00	8.54	10.109.000.000,00	9.07	11.028.000.000,00	9.61	12.217.000.000,00	19.35	11.606.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					2.320.000.000,00		2.552.000.000,00		2.784.000.000,00		3.016.000.000,00		3.248.000.000,00	
Outcome: Terwujudnya Pemenuhan Akses Sanitasi yang layak dan Aman	Persentase rumah Tangga yang memiliki akses SPALD (%)	2.97	3.31	3.39	2.320.000.000,00	3.46	2.552.000.000,00	3.35	2.784.000.000,00	3.60	3.016.000.000,00	3.50	3.248.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					2.320.000.000,00		2.552.000.000,00		2.784.000.000,00		3.016.000.000,00		3.248.000.000,00	
Outcome: Terwujudnya kawasan permukiman bebas banjir	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir (%)	11.45	14.74	18.03	2.320.000.000,00	21.32	2.552.000.000,00	24.61	2.784.000.000,00	27.89	3.016.000.000,00	27.89	3.248.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					220.000.000,00		240.000.000,00		260.000.000,00		280.000.000,00		300.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Bangunan Gedung yang berkepastian hukum	Persentase bangunan dengan IMB (%)	0.26	0.27	0.27	220.000.000,00	0.28	240.000.000,00	0.28	260.000.000,00	0.29	280.000.000,00	0.29	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					70.470.400.000,00		70.470.400.000,00		77.920.400.000,00		85.370.400.000,00		87.105.400.000,00	
Outcome: Meningkatnya pengelolaan jalan dan jembatan kabupaten	Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang ditingkatkan kualitasnya (%)	79.37	79.11	79.20	5.575.400.000,00	79.39	5.575.400.000,00	79.61	5.575.400.000,00	79.93	5.575.400.000,00	79.93	7.310.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Penataan Ruang
	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	16.93	17.87	18.94	64.895.000.000,00	20.28	64.895.000.000,00	21.75	72.345.000.000,00	23.35	79.795.000.000,00	23.35	79.795.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					6.872.000.000,00		4.347.000.000,00		4.347.000.000,00		3.585.000.000,00		2.823.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata ruang	Persentase dokumen RDTR yang tersedia (%)	5.38	10.05	12.43	6.872.000.000,00	14.55	4.347.000.000,00	16.19	4.347.000.000,00	17.46	3.585.000.000,00	17.47	2.823.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					79.535.000.000,00		81.550.000.000,00		83.571.250.000,00		85.641.062.500,00		87.811.865.625,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	70.00	75.00	80.00	10.000.000.000,00	85.00	10.000.000.000,00	90.00	10.000.000.000,00	95.00	10.000.000.000,00	100.00	10.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					20.380.000.000,00		20.380.000.000,00		20.380.000.000,00		20.380.000.000,00		20.380.000.000,00	
Outcome: Terpenuhi Rumah Layak Huni bagi warga negara Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban terdampak relokasi program pemerintah (%)	0.00	0.00	20,00	5.500.000.000,00	40,00	5.500.000.000,00	60,00	5.500.000.000,00	80,00	5.500.000.000,00	100,00	5.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase unit rumah korban bencana yang dibangun kembali (%)	0.00	35.00	45,00	5.500.000.000,00	55,00	5.500.000.000,00	66,00	5.500.000.000,00	75,00	5.500.000.000,00	80,00	5.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemeritah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	0.00	0.00	35.00	9.380.000.000,00	45.00	9.380.000.000,00	55.00	9.380.000.000,00	65.00	9.380.000.000,00	75.00	9.380.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					16.210.000.000,00		17.300.000.000,00		18.350.000.000,00		19.400.000.000,00		20.500.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya akses rumah layak huni	Persentase ketersediaan rumah layak huni (%)	23.20	23.40	23.60	15.000.000.000,00	23.80	16.000.000.000,00	24.00	17.000.000.000,00	24.20	18.000.000.000,00	24.40	19.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani (%)	5.20	5.20	5.20	1.210.000.000,00	5.70	1.300.000.000,00	5.90	1.350.000.000,00	7.00	1.400.000.000,00	9.00	1.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					14.445.000.000,00		14.445.000.000,00		14.445.000.000,00		14.445.000.000,00		14.445.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh yang ditangani (%)	23.20	23.40	23.60	14.445.000.000,00	23.80	14.445.000.000,00	24.00	14.445.000.000,00	24.20	14.445.000.000,00	24.40	14.445.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					18.500.000.000,00		19.425.000.000,00		20.396.250.000,00		21.416.062.500,00		22.486.865.625,00	
Outcome: Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase kawasan kumuh yang ditangani (%)	5.20	5.20	5.20	18.500.000.000,00	5.70	19.425.000.000,00	5.90	20.396.250.000,00	7.00	21.416.062.500,00	9.00	22.486.865.625,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					31.300.000.000,00		33.300.000.000,00		35.500.000.000,00		39.500.000.000,00		45.500.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					7.900.000.000,00		8.900.000.000,00		10.000.000.000,00		12.000.000.000,00		15.000.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	50.25	55.00	60.00	7.900.000.000,00	70.00	8.900.000.000,00	84.50	10.000.000.000,00	84.80	12.000.000.000,00	90.00	15.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman, Ketertiban, dan Keindahan (K3) (%)	83.72	83.90	84.00	1.500.000.000,00	84.20	1.500.000.000,00	84.50	1.500.000.000,00	84.80	1.500.000.000,00	85.00	1.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					7.900.000.000,00		8.900.000.000,00		10.000.000.000,00		12.000.000.000,00		15.000.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	50.25	55.00	60.00	7.900.000.000,00	70.00	8.900.000.000,00	84.50	10.000.000.000,00	84.80	12.000.000.000,00	90.00	15.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					7.875.000.000,00		7.875.000.000,00		7.875.000.000,00		7.875.000.000,00		7.875.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Kesiapsiagaan warga negara dalam menghadapi bencana	Persentase masyarakat yang memperoleh pelatihan mitigasi (%)	0.02	0.01	0.85	500.000.000,00	1.01	500.000.000,00	1.17	500.000.000,00	1.32	500.000.000,00	1.46	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase masyarakat yang memperoleh informasi kebencanaan (%)	0.53	51.59	59.81	500.000.000,00	67.51	500.000.000,00	75.01	500.000.000,00	82.31	500.000.000,00	89.42	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Desa Tangguh Bencana (%)	3.66	6.10	12.20	500.000.000,00	18.29	500.000.000,00	24.39	500.000.000,00	30.49	500.000.000,00	36.59	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana (%)	10.00	20.00	30.00	6.375.000.000,00	40.00	6.375.000.000,00	50.00	6.375.000.000,00	60.00	6.375.000.000,00	70.00	6.375.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					6.125.000.000,00		6.125.000.000,00		6.125.000.000,00		6.125.000.000,00		6.125.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase waktu respon penanganan kebakaran kurang dari 15 menit (%)	25.00	30.00	35.00	6.125.000.000,00	40.00	6.125.000.000,00	45.00	6.125.000.000,00	50.00	6.125.000.000,00	55.00	6.125.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentaraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					23.000.000.000,00		23.840.000.000,00		24.235.000.000,00		24.505.000.000,00		24.900.000.005,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.000.000.000,00		5.100.000.000,00		5.150.000.000,00		5.150.000.000,00		5.200.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang	50.25	55.00	60.00	5.000.000.000,00	70.00	5.100.000.000,00	84.50	5.150.000.000,00	84.80	5.150.000.000,00	90.00	5.200.000.000,00	Dinas/Badan yang menanga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penunjang Perangkat Daerah	Sesuai Standar Regulasi													ni Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					1.700.000.000,00		1.850.000.000,00		2.000.000.000,00		2.150.000.000,00		2.300.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya tenaga kesejahteraan Sosial Yang Bersertifikat	Persentase tenaga kesejahteraan sosial yang bersertifikat (%)	33.33	50.00	56.67	750.000.000,00	60.00	800.000.000,00	66.67	850.000.000,00	75.00	900.000.000,00	83.33	950.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
Outcome: Meningkatnya Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melakukan Pelayanan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam Panti Rehabilitasi Sosial (%)	11.00	10.00	9.50	950.000.000,00	7.50	1.050.000.000,00	6.50	1.150.000.000,00	5.50	1.250.000.000,00	4.50	1.350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					3.650.000.000,00		3.840.000.000,00		3.935.000.000,00		3.955.000.000,00		4.100.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dasar	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial Yang Meningkat Dalam Pelayanan Sosial (%)	47.00	44.00	44.00	500.000.000,00	48.00	500.000.000,00	52.00	500.000.000,00	56.00	500.000.000,00	60.00	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (%)	46.30	56.30	59.30	500.000.000,00	62.30	500.000.000,00	65.30	500.000.000,00	68.30	500.000.000,00	71.30	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (%)	15.00	25.00	35.00	500.000.000,00	45.00	500.000.000,00	55.00	500.000.000,00	65.00	500.000.000,00	75.00	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (%)	50.00	53.00	56.00	500.000.000,00	59.00	500.000.000,00	62.00	500.000.000,00	65.00	500.000.000,00	68.00	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (%)	14.29	19.29	24.29	150.000.000,00	29.29	200.000.000,00	34.29	200.000.000,00	39.39	200.000.000,00	44.29	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	13.29	18.29	23.29	1.500.000.000,00	28.29	1.640.000.000,00	33.29	1.735.000.000,00	38.39	1.755.000.000,00	43.29	1.900.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					10.150.000.000,00		10.550.000.000,00		10.650.000.000,00		10.750.000.000,00		10.800.000.005,00	
Outcome: Meningkatnya masyarakat DTSEN yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Masyarakat dalam DTKS/DTSEN yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (%)	74.59	73.39	72.19	10.150.000.000,00	70.99	10.550.000.000,00	69.79	10.650.000.000,00	68.59	10.750.000.000,00	67.39	10.800.000.005,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Jumlah Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial saat dan setelah masa tanggap darurat (%)	7.30	7.53	17.53	2.500.000.000,00	27.53	2.500.000.000,00	37.53	2.500.000.000,00	47.53	2.500.000.000,00	57.53	2.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					15.503.277.648,00	0,00	9.848.901.561,00	0,00	9.977.675.223,00	0,00	10.096.451.009,00	0,00	10.226.675.671,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					11.161.302.873,00		5.206.701.562,00		5.234.650.000,00		5.252.400.562,00		5.281.600.000,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	80.31	80.50	81.00	11.161.302.873,00	81.50	5.206.701.562,00	82.00	5.234.650.000,00	82.50	5.252.400.562,00	83.00	5.281.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro (%)	00.00	00.00	0.50	300.000.000,00	0.70	350.000.000,00	0.80	400.000.000,00	0.90	450.000.000,00	2.90	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					2.783.174.775,00	-	2.783.199.999,00	-	2.783.225.223,00	-	2.783.250.447,00	-	2.783.275.671,00	
Outcome: Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan Permintaan Pasar	Persentase Tenaga Kerja Lokal yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan Permintaan Pasar (%)	00.00	0.50	0.50	2.783.174.775,00	1.00	2.783.199.999,00	1.00	2.783.225.223,00	2.00	2.783.250.447,00	5.00	2.783.275.671,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan Permintaan Pasar	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (%)	00.00	00.00	0.50	150.000.000,00	1.00	200.000.000,00	1.00	250.000.000,00	2.00	300.000.000,00	4.50	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM					1.108.800.000,00	-	1.309.000.000,00	-	1.309.800.000,00	-	1.310.800.000,00	-	1.311.800.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
HUBUNGAN INDUSTRIAL														
Outcome: Meningkatnya perusahaan yang mematuhi regulasi ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang mematuhi regulasi ketenagakerjaan (%)	0.86	0.86	0.88	1.108.800.000,00	0.88	1.309.000.000,00	0.90	1.309.800.000,00	0.94	1.310.800.000,00	4.46	1.311.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					10.528.908.719,52		10.528.908.719,52		10.528.908.719,52		10.528.908.719,52		10.528.908.719,52	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					4.603.908.719,52		4.603.908.719,52		4.603.908.719,52		4.603.908.719,52		4.603.908.719,52	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	50.25	55.00	60.00	4.603.908.719,52	70.00	4.603.908.719,52	84.50	4.603.908.719,52	84.80	4.603.908.719,52	90.00	4.603.908.719,52	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN					1.475.000.000,00		1.475.000.000,00		1.475.000.000,00		1.475.000.000,00		1.475.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
Outcome: Meningkatnya jumlah OPD penyelenggara pengarusutamaan gender	Persentase perempuan pengambil keputusan publik (%)	0.01	0.02	0.03	1.475.000.000,00	0.04	1.475.000.000,00	0.05	1.475.000.000,00	0.06	1.475.000.000,00	0.07	1.475.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya jumlah perempuan korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani (%)	2.50	15.86	25.29	1.500.000.000,00	32.31	1.500.000.000,00	37.73	1.500.000.000,00	42.04	1.500.000.000,00	45.56	1.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya jumlah desa layak anak yang sesuai standar dan kriteria	Persentase fasilitas publik layak anak (%)	7.69	8.69	9.69	1.450.000.000,00	10.69	1.450.000.000,00	11.69	1.450.000.000,00	12.69	1.450.000.000,00	13.69	1.450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya jumlah desa layak anak yang sesuai standar dan kriteria	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani (%)	4.17	8.00	11.54	1.500.000.000,00	14.81	1.500.000.000,00	17.86	1.500.000.000,00	20.69	1.500.000.000,00	23.33	1.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					19.555.929.170,00		25.156.445.388,00		25.683.371.927,00		28.147.373.478,00		25.668.191.914,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.427.738.170,00		6.067.961.988,00		6.721.534.187,00		7.432.667.605,00		8.207.118.365,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	95.00	95.00	95.00	5.427.738.170,00	95.00	6.067.961.988,00	95.00	6.721.534.187,00	95.00	7.432.667.605,00	95.00	8.207.118.365,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					3.732.562.000,00		4.832.562.000,00		4.132.562.000,00		4.132.562.000,00		4.132.562.000,00	
Outcome: Meningkatnya kualitas infrastruktur kemandirian pangan	Persentase lumbung pangan yang memiliki sarana yang berkondisi baik (%)	80.00	80.00	80.00	3.732.562.000,00	80.00	4.832.562.000,00	80.00	4.132.562.000,00	80.00	4.132.562.000,00	80.00	4.132.562.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					7.052.955.000,00		8.215.352.000,00	-	8.055.264.000,00		9.797.159.600,00		11.235.775.290,00	
Outcome: Meningkatnya diversifikasi pangan non-beras	Persentase peningkatan diversifikasi pangan non-beras (%)	46.24	51.24	56.24	4.666.355.000,00	61.24	5.560.952.000,00	66.24	5.112.464.000,00	71.24	6.524.759.600,00	76.24	7.592.575.290,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
Outcome: Meningkatnya Stok cadangan pangan daerah	Stok cadangan pangan daerah (Ton)	50.00	85.00	111	2.386.600.000,00	124	2.654.400.000,00	138	2.942.800.000,00	154	3.272.400.000,00	172	3.643.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN					3.150.000.000,00		5.150.000.000,00		5.430.000.000,00		5.710.000.000,00		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KERAWANAN PANGAN														
Outcome: Menurunnya daerah rentan rawan pangan	Persentase desa/kelurahan yang masuk kedalam kategori sulit untuk pendistribusian pangan (%)	46.00	44.00	42.00	3.000.000.000,00	40.00	5.000.000.000,00	38.00	5.260.000.000,00	36.00	5.520.000.000,00	34.00	5.780.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
Outcome: Berkurangnya desa/kelurahan yang tidak bisa Mengakses Informasi Pangan	Persentase desa/kelurahan yang tidak bisa Mengakses Informasi Pangan (%)	6.00	5.00	4.00	150.000.000,00	3.00	150.000.000,00	2.00	170.000.000,00	1.00	190.000.000,00	0.00	210.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					192.674.000,00		890.569.400,00		1.344.011.740,00		1.074.984.273,00		2.092.736.259,00	
Outcome: Meningkatnya Pangan Aman /bebas Zat kimia berbahaya	Persentase Pangan Aman /bebas Zat kimia berbahaya (%)	80.00	80.00	80.00	192.674.000,00	85.00	890.569.400,00	85.00	1.344.011.740,00	90.00	1.074.984.273,00	90.00	2.092.736.259,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					10.200.000.000,00		10.200.000.000,00		10.200.000.000,00		10.200.000.000,00		10.200.000.000,00	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN					10.200.000.000,00		10.200.000.000,00		10.200.000.000,00		10.200.000.000,00		10.200.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN														
Outcome: Meningkatnya penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	12.90	12.90	14.10	10.200.000.000,00	14.20	10.200.000.000,00	16.30	10.200.000.000,00	18.40	10.200.000.000,00	20.50	10.200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					13.234.930.234,00		12.757.250.234,00		13.270.270.234,00		17.052.729.234,00		13.853.433.234,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					4.222.050.234,00		4.180.050.234,00		4.180.050.234,00		4.180.687.234,00		4.180.687.234,00	
Outcome: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	95.00	95.00	95.00	4.222.050.234,00	95.00	4.180.050.234,00	95.00	4.180.050.234,00	95.00	4.180.687.234,00	95.00	4.180.687.234,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					1.350.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Akurat dan Terintegrasi untuk Mendukung Kepatuhan Terhadap Peraturan Lingkungan	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang diimplementasikan (%)	60.00	27.00	81.00	1.350.000.000,00	81.00	150.000.000,00	81.00	150.000.000,00	81.00	150.000.000,00	81.00	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					2.017.880.000,00		2.067.000.000,00		2.402.000.000,00		4.015.500.000,00		2.587.050.000,00	
Outcome: Meningkatnya kualitas sungai yang memenuhi baku mutu	Persentase Sungai yang memenuhi baku mutu (%)	25.00	50.00	50.00	504.470.000,00	50.00	516.750.000,00	75.00	600.500.000,00	100.00	1.003.875.000,00	100.00	646.762.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Outcome: Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan adminitratif dan teknis pencegahan pencemaran air (%)	0.00	10.00	12.00	504.470.000,00	13.00	516.750.000,00	15.00	600.500.000,00	17.00	1.003.875.000,00	17.00	646.762.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya kualitas air, udara, dan lahan secara terukur dan berkelanjutan	Persentase udara ambien yang memenuhi baku mutu (%)	50.00	50.00	50.00	504.470.000,00	50.00	516.750.000,00	50.00	600.500.000,00	50.00	1.003.875.000,00	50.00	646.762.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Outcome: Meningkatnya Resiliensi masyarakat terhadap perubahan iklim	Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ion CO2eq) (Predikat)	57.18	59.28	61.38	504.470.000,00	63.48	516.750.000,00	65.58	600.500.000,00	67.68	1.003.875.000,00	69.78	646.762.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					100.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.	Persentase Ruang terbuka Hijau yang terkelola (%)	0.00	9.00	9.00	100.000.000,00	10.00	110.000.000,00	10.00	115.000.000,00	10.00	120.000.000,00	10.00	120.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					100.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya penanganan Limbah B3	Persentase pelaku usaha yang taat dalam pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (%)	0.00	5.00	7.00	100.000.000,00	8.00	110.000.000,00	9.00	115.000.000,00	10.00	120.000.000,00	10.00	120.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					440.000.000,00		440.000.000,00		505.000.000,00		525.000.000,00		590.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan	Persentase Pelaku Usaha yang Taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	25.00	25.00	29.00	440.000.000,00	35.00	440.000.000,00	40.00	505.000.000,00	46.00	525.000.000,00	46.00	590.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA),					110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		161.051.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH														
Outcome: Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan tradisional dan Hak MHA yang Terkait PPLH	Persentase Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Yang Terkait PPLH	10.00	10.00	20.00	110.000.000,00	30.00	121.000.000,00	40.00	133.100.000,00	50.00	146.410.000,00	60.00	161.051.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					253.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		366.025.000,00	
Outcome: Meningkatnya Kapasitas SDM Dalam Lingkungan Hidup	Persentase Kapasitas SDM Dalam Lingkungan Hidup	10.00	10.00	20.00	253.000.000,00	25.00	275.000.000,00	30.00	302.500.000,00	35.00	332.750.000,00	40.00	366.025.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN					150.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
LINGKUNGAN HIDUP														
Outcome: Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana (%)	10.00	10.00	20.00	150.000.000,00	25.00	160.000.000,00	30.00	170.000.000,00	35.00	170.000.000,00	40.00	180.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					4.492.000.000,00		5.144.200.000,00		5.197.620.000,00		7.292.382.000,00		5.398.620.000,00	
Outcome: Meningkatnya Penanganan persampahan Regional	Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R (%)	0.00	7.00	9.00	4.492.000.000,00	12.00	5.144.200.000,00	15.00	5.197.620.000,00	17.00	7.292.382.000,00	17.00	5.398.620.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					18.520.167.533,50		20.187.582.408,81		19.792.579.350,66		20.901.983.837,39		21.935.026.137,67	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.337.167.533,50		10.785.582.408,81		10.720.579.350,66		10.573.983.837,39		10.882.026.137,67	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan yang Sesuai Standar Regulasi	70.00	75.00	80.00	10.337.167.533,50	85.00	10.785.582.408,81	90.00	10.720.579.350,66	95.00	10.573.983.837,39	100	10.882.026.137,67	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					4.730.000.000,00		5.240.000.000,00		4.785.000.000,00		5.895.000.000,00		6.390.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya kepemilihan e-KTP	Persentase kepemilikan e-KTP (%)	94.39	97.37	98.82	1.955.000.000,00	99.21	2.160.000.000,00	99.61	2.320.000.000,00	100.00	2.495.000.000,00	100.00	2.750.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Outcome: Meningkatnya kepemilihan dokumen KIA	Persentase kepemilikan dokumen KIA (%)	9.58	10.85	12.13	2.200.000.000,00	13.41	2.460.000.000,00	14.68	1.735.000.000,00	15.96	2.590.000.000,00	17.24	2.795.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Outcome: Meningkatnya kepemilihan dokumen KK ber-barcode	Persentase kepemilikan dokumen KK Ber-barcode (%)	53.88	58.88	78.88	575.000.000,00	95.88	620.000.000,00	98.88	730.000.000,00	100.00	810.000.000,00	100.00	845.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					2.453.000.000,00		2.562.000.000,00		2.737.000.000,00		2.933.000.000,00		3.113.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya kepemilihan dokumen akta kelahiran	Persentase kepemilikan dokumen akta kelahiran (%)	56.85	58.75	60.64	1.750.000.000,00	62.53	1.860.000.000,00	64.42	2.010.000.000,00	66.32	2.170.000.000,00	68.21	2.320.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Outcome: Meningkatnya kepemilihan akta kematian yang terlayani	Persentase Pengajuan akta Kematian yang terlayani (%)	99.13	99.50	99.85	530.000.000,00	100.00	530.000.000,00	100.00	550.000.000,00	100.00	580.000.000,00	100.00	600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Outcome: Meningkatnya kepemilikan dokumen akta perkawinan	Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Perkawinan (%)	35.42	45.42	55.42	173.000.000,00	65.42	172.000.000,00	75.42	177.000.000,00	85.42	183.000.000,00	95.42	193.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					800.000.000,00		1.400.000.000,00		1.350.000.000,00		1.300.000.000,00		1.350.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya dokumen kependudukan yang dimutahirkan	Persentase peningkatan data kependudukan yang dimutakhirkan (%)	3.38	4.93	6.48	100.000.000,00	8.02	200.000.000,00	9.57	250.000.000,00	11.12	200.000.000,00	12.66	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Outcome: Meningkatnya pemanfaatan dokumen kependudukan oleh OPD/Instansi sesuai ketentuan regulasi	Persentase OPD/instansi pemerintah yang memanfaatkan data kependudukan sesuai ketentuan regulasi (%)	16.22	50.00	75.00	700.000.000,00	100.00	1.200.000.000,00	100.00	1.100.000.000,00	100.00	1.100.000.000,00	100.00	1.150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya pemenuhan profil kependudukan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	70.00	80.00	85.00	200.000.000,00	87.00	200.000.000,00	90.00	200.000.000,00	93.00	200.000.000,00	95.00	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					16.098.566.195,00		16.545.566.195,00		17.039.266.195,00		18.201.566.195,00		19.033.566.195,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.998.566.195,00		6.963.566.195,00		7.048.566.195,00		6.783.566.195,00		7.383.566.195,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	70.00	75.00	80.00	6.998.566.195,00	85.00	6.963.566.195,00	90.00	7.048.566.195,00	95.00	6.783.566.195,00	100	7.383.566.195,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					2.050.000.000,00		2.000.000.000,00		1.650.000.000,00		2.400.000.000,00		2.000.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Penataan Desa Sesuai Regulasi	Persentase desa yang melakukan penataan desa sesuai ketentuan regulasi	10.00	10.00	20.00	2.050.000.000,00	30.00	2.000.000.000,00	40.00	1.650.000.000,00	50.00	2.400.000.000,00	60.00	2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														at Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					350.000.000,00		300.000.000,00		650.000.000,00		350.000.000,00		650.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase desa yang menjalin kerjasama desa dan pihak ketiga (%)	10.00	10.00	20.00	350.000.000,00	30.00	300.000.000,00	40.00	650.000.000,00	50.00	350.000.000,00	60.00	650.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					3.500.000.000,00		3.700.000.000,00		4.000.000.000,00		4.200.000.000,00		4.500.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menjalankan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan regulasi (%)	43.21	49.38	55.56	3.500.000.000,00	61.73	3.700.000.000,00	67.90	4.000.000.000,00	74.07	4.200.000.000,00	80.25	4.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN					3.200.000.000,00		3.582.000.000,00		3.690.700.000,00		4.468.000.000,00		4.500.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
MASYARAKAT HUKUM ADAT														
Outcome: Meningkatnya keaktifan lembaga masyarakat desa	Persentase lembaga kemasyarakat an desa yang aktif (%)	42.86	47.86	52.86	1.700.000.000,00	57.86	2.082.000.000,00	62.86	2.190.700.000,00	67.86	2.468.000.000,00	72.86	2.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Outcome: Meningkatnya keaktifan lembaga masyarakat hukum adat	Persentase lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang aktif (%)	40.75	45.25	49.75	1.500.000.000,00	54.25	1.500.000.000,00	58.75	1.500.000.000,00	63.25	2.000.000.000,00	67.75	2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya Pengendalian Pertambahan Jumlah Penduduk	Persentase Sektor yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	10.00	15.00	20.00	1.000.000.000,00	25.00	1.000.000.000,00	30.00	1.000.000.000,00	35.00	1.000.000.000,00	40.00	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya peserta KB aktif	Persentase peserta KB aktif (%)	100.00	96.00	92.00	375.000.000,00	88.00	375.000.000,00	85.00	375.000.000,00	82.00	375.000.000,00	79.00	375.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Outcome: Meningkatnya cakupan usia subur yang ingin ber-KB	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (%)	0.08	0.08	0.08	375.000.000,00	0.08	375.000.000,00	0.08	375.000.000,00	0.08	375.000.000,00	0.08	375.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya penggunaan kontrasepsi jangka panjang	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (%)	5.48	5.88	6.28	375.000.000,00	6.68	375.000.000,00	7.08	375.000.000,00	7.48	375.000.000,00	7.88	375.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Outcome: Meningkatnya ketersediaan dan distribusi alat kontrasepsi masyarakat	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat kontrasepsi masyarakat (%)	10.00	10.00	15.00	375.000.000,00	20.00	375.000.000,00	25	375.000.000,00	30.00	375.000.000,00	35.00	375.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan/Distrik yang aktif (%)	10.00	15.00	20.00	300.000.000,00	25.00	300.000.000,00	30.00	300.000.000,00	35.00	300.000.000,00	40.00	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Rata-rata usia kawin pertama wanita (Tahun)	10.00	15.00	20.00	300.000.000,00	25.00	300.000.000,00	30.00	300.000.000,00	35.00	300.000.000,00	40.00	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Cakupan anggota bina keluarga balita ber-KB (%)	10.00	15.00	20.00	300.000.000,00	25.00	300.000.000,00	30.00	300.000.000,00	35.00	300.000.000,00	40.00	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB (%)	10.00	15.00	20.00	300.000.000,00	25.00	300.000.000,00	30.00	300.000.000,00	35.00	300.000.000,00	40.00	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Cakupan anggota bina keluarga lansia ber-KB (%)	10.00	15.00	20.00	300.000.000,00	25.00	300.000.000,00	30.00	300.000.000,00	35.00	300.000.000,00	40.00	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					60.020.000.000,00		59.002.500.000,00		64.867.700.000,00		67.792.000.000,00		70.744.500.000,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					23.770.000.000,00		25.252.500.000,00		23.617.700.000,00		22.942.000.000,00		23.494.500.000,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	70.00	75.00	80.00	23.770.000.000,00	85.00	25.252.500.000,00	90.00	23.617.700.000,00	95.00	22.942.000.000,00	100	23.494.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik (%)	15.00	20.00	25.00	2.500.000.000,00	30.00	2.500.000.000,00	50.00	2.500.000.000,00	60.00	2.500.000.000,00	75.00	2.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase kepemilikan KIR (%)	15.00	20.00	25.00	2.500.000.000,00	30.00	2.500.000.000,00	50.00	2.500.000.000,00	60.00	2.500.000.000,00	75.00	2.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Fasilitas Kantong Parkir yang disediakan (%)	4.00	20.00	25.00	2.500.000.000,00	30.00	2.500.000.000,00	50.00	2.500.000.000,00	60.00	2.500.000.000,00	70.00	2.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Cakupan layanan angkutan umum (%)	40.00	45.00	58.62	2.500.000.000,00	68.96	2.500.000.000,00	79.31	2.500.000.000,00	89.65	2.500.000.000,00	100.00	2.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					15.250.000.000,00		15.250.000.000,00		15.250.000.000,00		15.250.000.000,00		15.250.000.000,00	
Outcome: Terwujudnya Sistem Transportasi Laut yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Persentasi Fasilitas Pelabuhan Pengumpan dan Dermaga Rakyat dalam kondisi baik (%)	53.33	60.00	73.33	15.000.000.000,00	80.00	15.000.000.000,00	93.33	15.000.000.000,00	100.00	15.000.000.000,00	100.00	15.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase angkutan laut yang memiliki izin operasi (%)	30.00	55.00	60.00	250.000.000,00	65.00	250.000.000,00	70.00	250.000.000,00	75.00	250.000.000,00	78.00	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN					11.000.000.000,00		8.500.000.000,00		16.000.000.000,00		19.600.000.000,00		22.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Terwujudnya Sistem Transportasi Udara yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Persentase Konektivitas tranportasi Udara dari ibu kota distrik menuju ibu kota kabupaten (%)	70.00	75.00	78.00	11.000.000.000,00	80.00	8.500.000.000,00	82.00	16.000.000.000,00	83.00	19.600.000.000,00	85.00	22.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					20.007.487.684,00		20.589.474.856,00		22.227.476.455,00		27.796.678.534,00		28.638.658.649,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					6.196.814.322,00		6.311.523.247,00		6.311.523.247,00		6.518.434.207,00		6.518.434.207,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	70.00	75.00	80.00	6.196.814.322,00	85.00	6.311.523.247,00	90.00	6.311.523.247,00	95.00	6.518.434.207,00	100	6.518.434.207,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					3.948.840.000,00		4.067.651.200,00		4.875.862.400,00		5.384.373.600,00		5.892.884.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan kemitraan media	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) (%)	62.00	64.00	65.00	1.966.920.000,00	67.00	1.787.975.600,00	70.00	2.298.431.200,00	74.00	2.509.186.800,00	78.00	2.719.942.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase OPD yang memiliki PPID pembantu aktif (%)	10.63	14.89	17.02	1.981.920.000,00	21.27	2.279.675.600,00	25.53	2.577.431.200,00	27.65	2.875.186.800,00	28.00	3.172.942.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					9.861.833.362,00		10.210.300.409,00		11.040.090.808,00		15.893.870.727,00		16.227.339.642,00	
Outcome: Meningkatnya implementasi penggunaan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	0.00	60.00	65.00	8.726.393.362,00	70.00	9.048.860.409,00	77.00	9.628.650.808,00	85.00	12.232.430.727,00	90.00	12.565.899.642,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi (%)	0.00	20.00	35.00	1.135.440.000,00	55.00	1.161.440.000,00	70.00	1.411.440.000,00	80.00	3.661.440.000,00	90.00	3.661.440.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					13.246.508.624,00		13.939.223.247,00		14.264.773.247,00		15.196.734.207,00		15.412.284.207,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					6.196.814.322,00		6.311.523.247,00		6.311.523.247,00		6.518.434.207,00		6.518.434.207,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	70.00	75.00	80.00	6.196.814.322,00	85.00	6.311.523.247,00	90.00	6.311.523.247,00	95.00	6.518.434.207,00	100	6.518.434.207,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Koperasi simpan pinjam yang merugikan masyarakat (%)	0.00	0.00	0.05	150.000.000,00	0.05	200.000.000,00	0.08	250.000.000,00	0.09	300.000.000,00	2.25	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN					707.643.759,00		707.700.000,00		707.750.000,00		707.800.000,00		707.850.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PERKOPERASIAN														
Outcome: Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	0.50	1.00	1.50	707.643.759,00	2.00	707.700.000,00	3.50	707.750.000,00	4.00	707.800.000,00	4.50	707.850.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					423.220.000,00		440.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Koperasi yang memiliki SDM terlatih (%)	1.00	1.00	3.00	173.220.000,00	3.00	190.000.000,00	5.00	200.000.000,00	5.00	237.500.000,00	17.00	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Koperasi yang difasilitasi Permodalan (%)	0.00	8.00	8.00	250.000.000,00	8.00	250.000.000,00	10.00	300.000.000,00	10.00	312.500.000,00	44.00	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA					948.876.543,00		950.000.000,00		965.500.000,00		970.000.000,00		985.500.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
MIKRO (UMKM)														
Outcome: Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitasnya (%)	2.30	2.30	4.20	948.876.543,00	4.30	950.000.000,00	6.50	965.500.000,00	8.20	970.000.000,00	25.50	985.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					4.819.954.000,00		5.330.000.000,00		5.530.000.000,00		6.150.500.000,00		6.200.500.000,00	
Outcome: Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas produksinya (%)	7.30	7.30	8.20	3.819.954.000,00	6.30	3.830.000.000,00	8.60	4.030.000.000,00	7.20	4.150.500.000,00	37.60	4.200.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase produk usaha mikro yang bersertifikat (%)	0.00	0.00	0.00	1.000.000.000,00	0.10	1.500.000.000,00	0.50	1.500.000.000,00	0.80	2.000.000.000,00	1.40	2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					9.290.908.708,00		8.469.518.708,00		8.509.518.708,00		8.349.518.708,00		9.003.908.708,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					5.284.908.708,00		4.560.518.708,00		4.600.518.708,00		4.440.518.708,00		5.094.908.708,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	50.00	55.00	60.00	5.284.908.708,00	65.00	4.560.518.708,00	70.00	4.600.518.708,00	75.00	4.440.518.708,00	80.00	5.094.908.708,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					1.404.000.000,00		1.404.000.000,00		1.404.000.000,00		1.404.000.000,00		1.404.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi	Persentase Realisasi Nilai Investasi (%)	25.00	30.00	35.00	1.404.000.000,00	40.00	1.404.000.000,00	45.00	1.404.000.000,00	50.00	1.404.000.000,00	60.00	1.404.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					747.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya potensi investasi yang dipromosikan	Persentase potensi investasi yang dipromosikan (%)	25.00	30.00	35.00	747.000.000,00	40.00	650.000.000,00	45.00	650.000.000,00	50.00	650.000.000,00	60.00	650.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					1.105.000.000,00		1.105.000.000,00		1.105.000.000,00		1.105.000.000,00		1.105.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya pelayanan perizinan yang dijalankan sesuai SOP	Persentase pelayanan perizinan yang dijalankan sesuai SOP (%)	45.00	50.00	55.00	1.105.000.000,00	60.00	1.105.000.000,00	65.00	1.105.000.000,00	70.00	1.105.000.000,00	75.00	1.105.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku (%)	50.00	55.00	60.00	350.000.000,00	65.00	350.000.000,00	70.00	350.000.000,00	75.00	350.000.000,00	80.00	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya calon investor yang terlayani kebutuhan datanya dan informasi perizinan	Persentase calon investor yang terlayani kebutuhan datanya dan informasi perizinan (%)	0.00	25.00	30.00	400.000.000,00	35.00	400.000.000,00	40.00	400.000.000,00	45.00	400.000.000,00	50.00	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAA					40.935.578.937,00		42.554.238.090,00		37.477.928.090,00		38.074.838.090,00		38.772.488.090,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
N DAN OLAHRAGA														
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					5.821.433.937,00		11.344.238.090,00		5.682.928.090,00		5.694.838.090,00		5.767.488.090,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	50.00	55.00	60.00	5.821.433.937,00	65.00	11.344.238.090,00	70.00	5.682.928.090,00	75.00	5.694.838.090,00	80.00	5.767.488.090,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					4.915.000.000,00		5.250.000.000,00		5.575.000.000,00		5.900.000.000,00		6.275.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya kepemudaan yang berdaya saing	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	40.74	40.74	44.44	4.915.000.000,00	48.15	5.250.000.000,00	55.56	5.575.000.000,00	62.96	5.900.000.000,00	74.07	6.275.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					28.399.145.000,00		24.960.000.000,00		25.020.000.000,00		25.080.000.000,00		25.130.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya keolahragaan yang berprestasi	Cakupan fasilitas olahraga dalam kondisi baik (Buah)	10.00	15.00	18.00	700.000.000,00	20.00	800.000.000,00	23.00	850.000.000,00	25.00	900.000.000,00	30.00	950.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Cakupan pelatih yang tersertifikasi (Orang)	130	383	385	1.368.955.000,00	387	1.400.000.000,00	389	1.400.000.000,00	391	1.400.000.000,00	393	1.400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Cakupan Atlet muda yang dibina (Orang)	200	612	614	26.330.190.000,00	616	22.760.000.000,00	618	22.770.000.000,00	620	22.780.000.000,00	622	22.780.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1.800.000.000,00		1.000.000.000,00		1.200.000.000,00		1.400.000.000,00		1.600.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya kelompok pramuka yang aktif	Persentase kelompok pramuka aktif (%)	33.33	40.00	46.67	1.800.000.000,00	53.33	1.000.000.000,00	60.00	1.200.000.000,00	80.00	1.400.000.000,00	100.00	1.600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					360.840.000,00		438.140.000,00		458.140.000,00		488.140.000,00		508.140.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					360.840.000,00		438.140.000,00		458.140.000,00		488.140.000,00		508.140.000,00	
Outcome: Meningkatnya Ketersediaan Data sesuai Standart Data	Persentase PD yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan (%)	0.00	25.00	30.00	360.840.000,00	40.00	438.140.000,00	50.00	458.140.000,00	60.00	488.140.000,00	70.00	508.140.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					1.520.264.000,00		1.570.264.000,00		1.570.264.000,00		1.620.264.000,00		1.620.264.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					1.520.264.000,00		1.570.264.000,00		1.570.264.000,00		1.620.264.000,00		1.620.264.000,00	
Outcome: Meningkatnya Keamanan Sandi dan Informasi Daerah	Tingkat Keamanan informasi pemerintah (%)	0.00	50.00	50.00	250.000.000,00	60.00	250.000.000,00	65.00	250.000.000,00	70.00	250.000.000,00	75.00	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
	Persentase aplikasi persandian yang diterapkan dalam SPBE (%)	0.00	40.00	42.00	1.270.264.000,00	45.00	1.320.264.000,00	50.00	1.320.264.000,00	55.00	1.370.264.000,00	60.00	1.370.264.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAH					9.991.020.000,00		10.972.000.000,00		4.350.000.000,00		4.350.000.000,00		4.350.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
AN BIDANG KEBUDAYAAN														
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					9.629.020.000,00		10.610.000.000,00		3.988.000.000,00		3.724.000.000,00		3.724.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya budaya lokal yang dikembangkan	Persentase budaya lokal yang dikembangkan (%)	50.00	60.00	75.00	9.629.020.000,00	95.00	10.610.000.000,00	100.00	3.988.000.000,00	100.00	3.724.000.000,00	100.00	3.724.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya kesenian daerah yang dikelola dengan baik	Persentase kesenian daerah yang dikelola dengan baik (%)	50.00	55.00	65.00	150.000.000,00	75.00	150.000.000,00	85.00	150.000.000,00	95.00	150.000.000,00	100.00	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya warisan sejarah yang dilestarikan	Persentase warisan sejarah yang dilestarikan (%)	41.67	50.00	55.00	100.000.000,00	60.00	100.000.000,00	65.00	100.000.000,00	70.00	100.000.000,00	75.00	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAA					112.000.000,00		112.000.000,00		112.000.000,00		376.000.000,00		376.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
N CAGAR BUDAYA														
Outcome: Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	66.67	68.67	70.67	112.000.000,00	72.67	112.000.000,00	74.67	112.000.000,00	76.67	376.000.000,00	78.67	376.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					11.990.533.937,00		17.513.338.090,00		11.852.028.090,00		11.863.938.090,00		11.936.588.090,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					5.821.433.937,00		11.344.238.090,00		5.682.928.090,00		5.694.838.090,00		5.767.488.090,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	50.00	55.00	60.00	5.821.433.937,00	65.00	11.344.238.090,00	70.00	5.682.928.090,00	75.00	5.694.838.090,00	80.00	5.767.488.090,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					6.169.100.000,00		6.169.100.000,00		6.169.100.000,00		6.169.100.000,00		6.169.100.000,00	
Outcome: Meningkatnya layanan Perpustakaan sesuai standar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan (Nilai)	0.25	0.30	0.35	1.400.000.000,00	0.40	1.400.000.000,00	0.45	1.400.000.000,00	0.50	1.400.000.000,00	0.55	1.400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Nasional Perpustakaan	Rasio Perpustakaan per satuan penduduk (Rasio)	0.00:2.56	0.06:5.06	2.56:7.56	4.769.100.000,00	5.06:10.06	4.769.100.000,00	7.56:12.56	4.769.100.000,00	10.06:15.06	4.769.100.000,00	15.06:20.56	4.769.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					840.000.000,00		840.000.000,00		840.000.000,00		840.000.000,00		840.000.000,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya tata kelola Arsip Dinamis dan Statis	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	20.00	25.50	31.00	250.000.000,00	36.50	250.000.000,00	42.00	250.000.000,00	47.50	250.000.000,00	53.00	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
	Persentase pengelola Arsip bersertifikat (%)	20.00	25.50	31.00	250.000.000,00	36.50	250.000.000,00	42.00	250.000.000,00	47.50	250.000.000,00	53.00	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan (%)	20.00	25.50	31.00	250.000.000,00	36.50	250.000.000,00	42.00	250.000.000,00	47.50	250.000.000,00	53.00	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya tata kelola Arsip Dinamis dan Statis	Persentase Penggunaan Arsip	20.00	25.50	31.00	90.000.000,00	36.50	90.000.000,00	42.00	90.000.000,00	47.50	90.000.000,00	53.00	90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					24.561.524.489,00		23.802.529.625,00		25.283.639.825,00		28.650.094.445,00		31.311.872.398,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					6.891.918.189,00		7.082.590.647,00		7.254.889.825,00		7.339.219.445,00		7.438.822.398,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	40.00	45.00	50.00	6.891.918.189,00	55.00	7.082.590.647,00	60.00	7.254.889.825,00	65.00	7.339.219.445,00	70.00	7.438.822.398,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					9.719.606.300,00		8.769.938.978,00		10.078.750.000,00		13.360.875.000,00		15.923.050.000,00	
Outcome: Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana penangkapan yang sesuai standar (%)	6.00	10.00	8.00	8.750.000.000,00	9.00	7.700.000.000,00	11.00	9.528.750.000,00	12.00	12.810.875.000,00	50.00	15.373.050.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase kelompok nelayan terlatih (%)	4.00	5.00	5.00	484.803.150,00	4.00	562.469.490,00	4.00	300.000.000,00	4.00	300.000.000,00	22.00	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Persentase kelompok nelayan yang meningkat kelasnya (%)	4.00	5.00	5.00	484.803.150,00	4.00	507.469.488,00	4.00	250.000.000,00	4.00	250.000.000,00	4.00	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					7.500.000.000,00		7.500.000.000,00		7.500.000.000,00		7.500.000.000,00		7.500.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Presentase kelompok yang mendapat bantuan sarana (%)	14.00	14.00	14.00	1.500.000.000,00	14.00	1.500.000.000,00	14.00	1.500.000.000,00	14.00	1.500.000.000,00	70.00	1.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Persentase kelompok perikanan budidaya yang memiliki ketersediaan bibit unggul sesuai standar (%)	14.00	14.00	14.00	1.500.000.000,00	14.00	1.500.000.000,00	14.00	1.500.000.000,00	14.00	1.500.000.000,00	70.00	1.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Persentase kelompok perikanan budidaya yang menguasai penggunaan IPTEK (%)	17.00	17.00	17.00	1.500.000.000,00	17.00	1.500.000.000,00	17.00	1.500.000.000,00	17.00	1.500.000.000,00	85.00	1.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase kelompok perikanan budidaya yang menggunakan metode budidaya berorientasi agribisnis (%)	14.00	14.00	14.00	1.500.000.000,00	14.00	1.500.000.000,00	14.00	1.500.000.000,00	14.00	1.500.000.000,00	70.00	1.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Persentase kelompok perikanan budidaya yang naik kelas (%)	17.00	17.00	17.00	1.500.000.000,00	17.00	1.500.000.000,00	17.00	1.500.000.000,00	17.00	1.500.000.000,00	85.00	1.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Perikanan	Persentase produk perikanan yang ditangani sesuai standar prosedur yang sertifikasi (%)	20.00	20.00	20.00	150.000.000,00	20.00	150.000.000,00	20.00	150.000.000,00	20.00	150.000.000,00	100.00	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Angka Konsumsi Ikan (AKI)/Kapita/tahun	21.00	21.17	21.65	150.000.000,00	21.94	150.000.000,00	22.37	150.000.000,00	22.71	150.000.000,00	23.12	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Persentase produk perikanan yang ditangani sesuai standar prosedur yang sertifikasi (%)	20.00	20.00	20.00	150.000.000,00	20.00	150.000.000,00	20.00	150.000.000,00	20.00	150.000.000,00	20.00	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					2.694.600.000,00		2.779.600.000,00		2.814.600.000,00		2.849.600.000,00		2.884.600.000,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					634.600.000,00		644.600.000,00		654.600.000,00		664.600.000,00		674.600.000,00	
Outcome: Meningkatnya destinasi wisata yang ditingkatkan daya tariknya	Persentase destinasi wisata yang ditingkatkan daya tariknya (%)	60.00	63.00	66.00	235.000.000,00	69.00	245.000.000,00	72.00	255.000.000,00	75.00	265.000.000,00	78.00	275.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
Outcome: Meningkatnya destinasi wisata baru yang dikembangkan	Persentase destinasi wisata baru yang dikembangkan (%)	16.67	16.67	33.33	399.600.000,00	33.33	399.600.000,00	50.00	399.600.000,00	66.67	399.600.000,00	83.33	399.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					860.000.000,00		910.000.000,00		910.000.000,00		910.000.000,00		910.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya destinasi wisata yang dipasarkan secara digital	Persentase destinasi wisata yang dipasarkan secara digital (%)	3.35	9.67	16.67	860.000.000,00	33.33	910.000.000,00	50.00	910.000.000,00	66.67	910.000.000,00	83.33	910.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAAT					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
AN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
Outcome: Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual	0.00	0.00	0.00	250.000.000,00	10.00	250.000.000,00	20.00	250.000.000,00	30.00	250.000.000,00	40.00	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					950.000.000,00		975.000.000,00		1.000.000.000,00		1.025.000.000,00		1.050.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	10.00	10.00	10.00	950.000.000,00	20.00	975.000.000,00	30.00	1.000.000.000,00	40.00	1.025.000.000,00	50.00	1.050.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					59.899.272.818,23		56.706.919.729,00		55.167.664.406,00		59.103.669.729,00		57.717.969.729,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					9.769.714.443,23		10.062.672.334,00		10.062.672.334,00		10.255.872.334,00		10.062.672.334,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KABUPATEN/ KOTA														
Outcome: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	50.00	55.00	60.00	9.769.714.443,23	65.00	10.062.672.334,00	70.00	10.062.672.334,00	75.00	10.255.872.334,00	80.00	10.062.672.334,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					9.552.750.000,00		8.220.780.000,00		6.790.500.000,00		7.790.600.000,00		7.790.600.000,00	
Outcome: Meningkatnya luas lahan pertanian tanaman pangan yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk , Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya)	Persentase luas lahan pertanian tanaman pangan yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk , Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya)	21.05	36.84	31.58	1.500.000.000,00	26.32	1.500.000.000,00	26.32	1.500.000.000,00	26.32	2.000.000.000,00	40.00	2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase luas lahan pertanian Hortikultura yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk Obat - obatan dan sarana	26.32	52.63	52.63	1.500.000.000,00	37.89	1.500.000.000,00	57.89	1.243.500.000,00	57.89	1.243.550.000,00	65.50	1.243.550.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	penunjang lainnya)													
	Persentase luas lahan pertanian Perkebunan yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya) (%)	0.19	0.20	0.20	60.000.000,00	0.20	60.000.000,00	0.21	60.000.000,00	0.21	60.000.000,00	0.30	60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase kelompok peternak yang memiliki bibit unggul sesuai standar (%)	26.32	52.63	52.63	1.500.000.000,00	37.89	1.500.000.000,00	57.89	1.243.500.000,00	57.89	1.243.550.000,00	65.50	1.243.550.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase kelompok peternak yang memiliki pakan sesuai standar (%)	21.05	36.84	31.58	1.500.000.000,00	26.32	1.500.000.000,00	26.32	1.500.000.000,00	26.32	2.000.000.000,00	40.00	2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Presentase Ketersediaan Prasarana Pertanian Sesuai Peruntukkan	20.00	20.00	20.00	3.492.750.000,00	30.00	2.160.780.000,00	40.00	1.243.500.000,00	50.00	1.243.500.000,00	60.00	1.243.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN					20.361.564.677,00		18.742.310.000,00		20.437.294.677,00		18.981.040.000,00		17.788.540.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
GAN PRASARANA PERTANIAN														
Outcome: Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pengembang an Jaringan irigasi dan sumbersumber air dalam kondisi baik (%)	61.90	68.25	71.43	1.500.000.000,00	79.37	1.500.000.000,00	82.54	1.500.000.000,00	87.30	2.000.000.000,00	90.00	2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha)	188.87	188.87	500	1.500.000.000,00	1000	1.500.000.000,00	1500	1.500.000.000,00	2000	2.000.000.000,00	2500	2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Luas lahan pertanian LP2B yang tidak beralih fungsi (Ha)	187.87	375.74	563.61	1.500.000.000,00	751.48	1.500.000.000,00	939.35	1.500.000.000,00	1.125	2.000.000.000,00	1.150	2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase jalan usaha tani berkondisi baik (%)	18.00	35.29	47.06	1.500.000.000,00	58.82	1.500.000.000,00	70.59	1.500.000.000,00	82.35	2.000.000.000,00	85.00	2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Presentase Ketersediaan Prasarana Pertanian Sesuai PeruntukkanPeruntukkan	20.00	20.00	20.00	14.361.564.677,00	30.00	12.742.310.000,00	40.00	14.437.294.677,00	50.00	10.981.040.000,00	60.00	9.788.540.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN					3.205.000.000,00		3.205.000.000,00		3.205.000.000,00		4.205.000.000,00		4.205.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER														
Outcome: Meningkatnya Pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat kematian ternak akibat penyakit ternak (%)	8.33	6.67	85.83	1.500.000.000,00	5.42	1.500.000.000,00	5.00	1.500.000.000,00	4.58	2.000.000.000,00	5.30	2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Tingkat kejadian Penyakit Zoonosis	8.33	6.67	85.83	1.500.000.000,00	5.42	1.500.000.000,00	5.00	1.500.000.000,00	4.58	2.000.000.000,00	5.30	2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Tingkat kematian ternak akibat penyakit ternak (%)	8.33	8.33	6.67	205.000.000,00	5.83	205.000.000,00	5.42	205.000.000,00	5.00	205.000.000,00	4.58	205.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.000.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Luas Lahan Pertanian Yang Terlindungi Akibat Serangan Hama dan Bencana Perubahan Iklim	Persentase Luas lahan pertanian yang terserang hama penyakit yang dapat dikendalikan (Ha) (%)	36.00	42.86	50.00	1.000.000.000,00	57.14	1.000.000.000,00	64.29	500.000.000,00	71.00	500.000.000,00	73.00	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Luas lahan pertanian yang ditanggulangi akibat perubahan iklim dan bencana (Ha) (%)	30.00	50.00	31.25	1.500.000.000,00	33.33	1.500.000.000,00	38.89	1.500.000.000,00	45.00	1.000.000.000,00	47.10	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					14.510.243.698,00		13.976.157.395,00		12.672.197.395,00		16.371.157.395,00		16.371.157.395,00	
Outcome: Meningkatnya Kelompok petani yang menerapkan metode pertanian berorientasi agribisnis	Persentase Kelompok petani yang menerapkan metode pertanian berorientasi agribisnis (%)	2.36	5.90	9.43	1.500.000.000,00	12.97	1.500.000.000,00	16.51	1.500.000.000,00	21.23	2.000.000.000,00	25.00	2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Outcome: Meningkatnya SDM petani yang terlatih	Persentase SDM petani yang terlatih (%)	0.39	0.47	0.59	1.500.000.000,00	0.67	1.500.000.000,00	0.79	1.500.000.000,00	0.94	2.000.000.000,00	1.00	2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Outcome: Meningkatnya kelompok tani yang naik kelas	Persentase kelompok tani yang naik kelas (%)	2.12	2.35	2.73	1.500.000.000,00	3.04	1.500.000.000,00	3.33	1.500.000.000,00	3.60	2.000.000.000,00	3.68	2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Outcome: Meningkatnya SDM kelompok peternak terlatih	Persentase SDM kelompok peternak terlatih (%)	42.11	47.62	48.00	1.500.000.000,00	56.00	1.500.000.000,00	64.00	1.000.000.000,00	66.67	2.000.000.000,00	69.50	2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Outcome: Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya	42.11	47.62	48.00	8.510.243.698,00	56.00	7.976.157.395,00	64.00	7.172.197.395,00	66.67	8.371.157.395,00	69.50	8.371.157.395,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					22.230.534.443,23		21.808.492.334,00		22.413.492.334,00		17.811.692.334,00		17.623.492.334,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PERDAGANGAN														
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.769.714.443,23		10.062.672.334,00		10.062.672.334,00		10.255.872.334,00		10.062.672.334,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	50.00	55.00	60.00	9.769.714.443,23	65.00	10.062.672.334,00	70.00	10.062.672.334,00	75.00	10.255.872.334,00	80.00	10.062.672.334,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00	
Outcome: Terselenggaranya layanan perizinan dan pendaftaran pelaku usaha perdagangan yang cepat, transparan, dan terintegrasi guna mendorong pertumbuhan usaha perdagangan dan kepatuhan	Persentase kepatuhan pelaku usaha. (%)	0.00	0.00	100.00	130.000.000,00	100.00	130.000.000,00	100.00	130.000.000,00	100.00	130.000.000,00	100.00	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
pelaku usaha di daerah														
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					8.220.000.000,00		7.400.000.000,00		7.900.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya pasar tradisional yang memiliki sarana sesuai standar	Persentase pasar tradisional yang memiliki sarana sesuai standar (%)	66.70	66.71	87.50	1.000.000.000,00	88.20	1.000.000.000,00	94.10	1.000.000.000,00	94.40	1.000.000.000,00	94.40	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
Outcome: Meningkatnya kelompok pedagang yang terlatih	Persentase kelompok pedagang yang terlatih	66.70	66.71	87.51	1.000.000.000,00	88.21	1.000.000.000,00	94.11	1.000.000.000,00	94.41	1.000.000.000,00	94.41	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
Outcome: Meningkatnya pedagang pasar yang difasilitasi permodalan	Persentase pedagang pasar yang difasilitasi permodalan	66.70	66.71	87.52	1.000.000.000,00	88.22	1.000.000.000,00	94.12	1.000.000.000,00	94.42	1.000.000.000,00	94.42	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
Outcome: Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan dan efisiensi perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasaran yang dibangun (Unit)	1	1	2	5.220.000.000,00	2	4.400.000.000,00	2	4.900.000.000,00	1	2.200.000.000,00	1	2.200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					4.030.000.000,00		4.135.000.000,00		4.240.000.000,00		4.345.000.000,00		4.350.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Harga Barang Penting	Tingkat stabilitas harga barang pokok (%)	50.00	53.00	56.00	500.000.000,00	59.00	500.000.000,00	62.00	500.000.000,00	65.00	500.000.000,00	67.00	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Tingkat stabilitas harga barang penting (%)	50.00	53.00	56.00	500.000.000,00	59.00	500.000.000,00	62.00	500.000.000,00	65.00	500.000.000,00	66.00	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Tingkat stabilitas Ketersediaan barang pokok dan barang penting (%)	50.00	53.00	56.00	500.000.000,00	59.00	500.000.000,00	62.00	500.000.000,00	65.00	500.000.000,00	66.50	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Tingkat stabilitas harga barang penting (%)	4.30	1.20	4.30	2.530.000.000,00	4.30	2.635.000.000,00	4.30	2.740.000.000,00	4.30	2.845.000.000,00	4.30	2.850.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					80.820.000,00		80.820.000,00		80.820.000,00		80.820.000,00		80.820.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya pasar tradisional yang berstatus pasar tertib ukur	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan (%)	0.00	0.00	26.70	80.820.000,00	26.70	80.820.000,00	26.70	80.820.000,00	26.70	80.820.000,00	26.70	80.820.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					7.012.000.000,00		6.032.000.000,00		6.072.000.000,00		6.432.000.000,00		6.732.000.000,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					6.730.000.000,00		5.750.000.000,00		5.790.000.000,00		6.150.000.000,00		6.450.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya pelaku IKM terlatih	Persentase IKM yang bahan baku produksi yang tersedia secara kontinu (%)	6.84	9.59	12.30	1.000.000.000,00	15.06	1.000.000.000,00	17.80	1.000.000.000,00	20.54	1.000.000.000,00	20.54	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
Outcome: Meningkatnya pelaku IKM yang memiliki sarana produksi sesuai standar	Persentase pelaku IKM terlatih (%)	6.84	9.59	12.50	1.000.000.000,00	15.60	1.000.000.000,00	17.80	1.000.000.000,00	20.54	1.000.000.000,00	20.54	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
Outcome: Meningkatnya IKM yang difasilitasi permodalan	Persentase pelaku IKM yang memiliki sarana produksi sesuai standar (%)	4.11	6.84	9.59	1.000.000.000,00	12.30	1.000.000.000,00	15.06	1.000.000.000,00	17.80	1.000.000.000,00	18.00	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya Permodalan IKM	Persentase IKM yang difasilitasi permodalan (%)	4.11	6.84	9.59	1.000.000.000,00	12.30	1.000.000.000,00	15.06	1.000.000.000,00	17.80	1.000.000.000,00	18.00	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
Outcome: Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	0.00	0.00	0.05	2.730.000.000,00	0.15	1.750.000.000,00	0.22	1.790.000.000,00	0.29	2.150.000.000,00	0.40	2.450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					282.000.000,00		282.000.000,00		282.000.000,00		282.000.000,00		282.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya IKM Yang Memiliki NIB	Persentase IKM yang memiliki NIB (%)	38.35	41.09	43.80	200.000.000,00	47.94	200.000.000,00	52.00	200.000.000,00	56.16	200.000.000,00	56.16	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
Outcome: Meningkatnya kualitas perizinan sektor perindustrian	Persentase jumlah izin usaha, izin perluasan ikm dan izin usaha ki dan perluasan ki yang diterbitkan (%)	0.00	3.00	6.00	82.000.000,00	9.00	82.000.000,00	12.00	82.000.000,00	15.00	82.000.000,00	18.00	82.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					58.582.978.190,00		60.382.973.419,00		63.067.981.565,00		64.369.042.431,00		66.248.963.887,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					52.089.624.086,00		53.674.451.610,00		56.124.783.667,00		58.541.943.678,00		59.062.820.089,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	60.00	65.00	70.00	52.089.624.086,00	75.00	53.674.451.610,00	80.00	56.124.783.667,00	85.00	58.541.943.678,00	90.00	59.062.820.089,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					2.895.430.550,00		2.969.702.078,00		3.056.437.181,00		1.785.000.000,00		3.144.045.045,00	
Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan melayani	Persentase Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan yang tersedia sesuai standar (%)	2.61	2.66	2.71	150.000.000,00	2.76	150.000.000,00	2.81	150.000.000,00	2.86	150.000.000,00	2.91	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Rata-rata Nilai SPM Perangkat Daerah (%)	55.00	60.00	65.00	250.000.000,00	70.00	250.000.000,00	75.00	250.000.000,00	80.00	250.000.000,00	85.00	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	titik batas wilayah yang diselesaikan (%)	50.00	55.00	60.00	175.000.000,00	65.00	175.000.000,00	70.00	175.000.000,00	75.00	175.000.000,00	80.00	175.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase kerjasama pemerintah daerah yang berjalan (%)	13.33	21.83	30.33	1.135.000.000,00	38.33	1.160.000.000,00	47.33	1.185.000.000,00	55.83	1.210.000.000,00	64.33	1.235.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan (%)	50.00	54.00	58.00	1.185.430.550,00	62.00	1.234.702.078,00	66.00	1.296.437.181,00	70.00	1.334.045,000,00	74.00	1.334.045.045,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					3.597.923.554,00		3.738.819.731,00		3.886.760.717,00		4.042.098.753,00		4.042.098.753,00	
Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan melayani	Persentase penyediaan dokumen administrasi pembangunan (%)	80.00	85.00	90.00	780.000.000,00	95.00	780.000.000,00	100.00	780.000.000,00	100.00	780.000.000,00	100.00	780.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase penggunaan EProcurement terhadap belanja pengadaan (%)	8.92	10.42	14.42	2.817.923.554,00	18.42	2.958.819.731,00	22.42	3.106.760.717,00	26.42	3.262.098.753,00	30.42	3.262.098.753,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					56.109.215.029,00		55.236.511.029,00		57.118.603.029,00		57.249.103.029,00		57.249.103.029,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.440.593.029,00		26.612.593.029,00		26.472.093.029,00		26.505.593.029,00		26.505.593.029,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	51.23	54.82	58.65	28.440.593.029,00	62.76	26.612.593.029,00	67.15	26.472.093.029,00	71.85	26.505.593.029,00	75.45	26.505.593.029,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					27.668.622.000,00		28.623.918.000,00		30.646.510.000,00		30.743.510.000,00		30.743.510.000,00	
Outcome: Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	Persentase layanan dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar (%)	49.32	54.32	59.32	27.668.622.000,00	64.32	28.623.918.000,00	69.32	30.646.510.000,00	74.32	30.743.510.000,00	79.32	30.743.510.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					21.182.796.732,00		21.239.136.732,00		21.442.796.732,00		23.926.360.122,00		26.620.020.122,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.529.502.710,00		7.679.502.710,00		7.739.502.710,00		7.751.726.100,00		7.801.726.100,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	88.00	89.00	90.00	7.529.502.710,00	91.00	7.679.502.710,00	92.00	7.739.502.710,00	93.00	7.751.726.100,00	94.00	7.801.726.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					7.648.294.022,00		7.554.634.022,00		7.698.294.022,00		8.654.634.022,00		9.798.294.022,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi target program RPJMD (%)	70.00	75.00	80.00	1.500.000.000,00	82.00	1.500.000.000,00	85.00	1.500.000.000,00	87.00	2.000.000.000,00	88.00	2.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Hasil Musrenbang Yang Ditindaklanjuti	Persentase hasil musrenbang yang ditindaklanjuti dalam penganggaran daerah (%)	70.00	72.00	74.00	1.500.000.000,00	76.00	1.500.000.000,00	78.00	1.500.000.000,00	80.00	2.000.000.000,00	82.00	2.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Outcome: Meningkatnya Standarisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase Dokumen Perencanaan yang sesuai standar (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENTRA OPD) (%)	75.00	76.00	77.00	4.648.294.022,00	78.00	4.554.634.022,00	79.00	4.698.294.022,00	80.00	4.654.634.022,00	81.00	4.798.294.022,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					6.005.000.000,00		6.005.000.000,00		6.005.000.000,00		7.520.000.000,00		9.020.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya keselarasan RPJMD dengan Renstra	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra (%)	80.00	90.00	91.00	1.500.000.000,00	92.00	1.500.000.000,00	93.00	1.500.000.000,00	94.00	2.000.000.000,00	95.00	2.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Outcome: Meningkatnya keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	80.00	90.00	91.00	1.500.000.000,00	92.00	1.500.000.000,00	93.00	1.500.000.000,00	94.00	2.000.000.000,00	95.00	2.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Perencanaan
Outcome: Meningkatnya keselarasan Renja dengan RKPD	Persentase keselarasan Renja dengan RKPD (%)	80.00	90.00	91.00	1.500.000.000,00	92.00	1.500.000.000,00	93.00	1.500.000.000,00	94.00	2.000.000.000,00	95.00	2.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Outcome: Tersusunnya dokumen perencanaan yang terkoordinasi secara tematik, holistik, integratif dan spasial	Jumah Dokumen Perencanaan yang disusun melalui forum koordinasi atau musrenbang lintas sektor (Dokumen)	4	4	2	1.505.000.000,00	2	1.505.000.000,00	2	1.505.000.000,00	4	1.520.000.000,00	4	1.520.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					284.034.014.198,00		313.424.415.617,00		345.882.857.179,00		380.543.892.896,00		419.282.494.686,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.542.761.636,00		18.794.037.799,00		20.824.441.579,00		22.209.635.737,00		24.539.811.811,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	100.00	100.00	100.00	17.542.761.636,00	100.00	18.794.037.799,00	100.00	20.824.441.579,00	100.00	22.209.635.737,00	100.00	24.539.811.811,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					261.792.412.562,00		289.371.653.818,00		319.193.819.200,00		351.813.201.119,00		387.509.521.231,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100.00	100.00	100.00	2.672.635.082,00	100.00	3.319.898.590,00	100.00	3.791.888.449,00	100.00	4.291.077.294,00	100.00	4.820.185.023,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Presentase Penerbitan SP2D tepat waktu setelah berkas lengkap (%)	98.00	98.00	98.00	944.601.080,00	99.00	1.429.061.188,00	98.00	1.916.967.307,00	99.00	2.408.664.037,00	100.00	2.904.530.441,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Presentase OPD yang menyerahkan SPJ tepat waktu (%)	80.00	80.00	80.00	300.000.000,00	85.00	250.000.000,00	90.00	200.000.000,00	95.00	150.000.000,00	100.00	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Presentase keterpenuhan Mandatory Spending terhadap APBD (%)	90.00	90.00	90.00	256.450.303.400,00	92.00	282.765.333.740,00	92.00	311.481.867.114,00	96.00	342.950.053.825,00	100.00	377.445.059.208,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Realisasi Belanja terhadap Total Belanja Daerah (%)	100.00	100.00	100.00	1.424.873.000,00	100.00	1.607.360.300,00	100.00	1.803.096.330,00	100.00	2.013.405.963,00	100.00	2.239.746.559,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					2.068.840.000,00		2.365.724.000,00		2.682.296.400,00		3.020.526.040,00		3.382.578.644,00	
Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan rekonsiliasi aset tetap tepat waktu (%)	20.00	25.00	30.00	500.000.000,00	35.00	550.000.000,00	40.00	605.000.000,00	45.00	665.500.000,00	50.00	732.050.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Presentase OPD yang melaksanakan rekonsiliasi	30.00	40.00	50.00	600.000.000,00	60.00	660.000.000,00	70.00	726.000.000,00	80.00	798.600.000,00	90.00	878.460.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	persediaan tepat waktu (%)													
	Presentase pemanfaatan barang milik daerah (%)	30.00	40.00	50.00	968.840.000,00	60.00	1.155.724.000,00	70.00	1.351.296.400,00	80.00	1.556.426.040,00	90.00	1.772.068.644,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.630.000.000,00		2.893.000.000,00		3.182.300.000,00		3.500.530.000,00		3.850.583.000,00	
Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah (%)	4.65	4.65	4.77	800.000.000,00	4.90	880.000.000,00	5.02	968.000.000,00	5.15	1.064.800.000,00	24.49	1.171.280.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Pertumbuhan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan (%)	4.65	4.65	4.77	650.000.000,00	4.90	715.000.000,00	5.02	786.500.000,00	5.15	865.150.000,00	24.49	951.665.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah (%)	4.65	4.65	4.77	650.000.000,00	4.90	715.000.000,00	5.02	786.500.000,00	5.15	865.150.000,00	24.49	951.665.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah lainnya (%)	4.65	4.65	4.77	530.000.000,00	4.90	583.000.000,00	5.02	641.300.000,00	5.15	705.430.000,00	24.49	775.973.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					16.345.180.000,00		16.455.180.000,00		17.355.180.000,00		18.074.180.000,00		18.753.180.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					8.000.000.000,00		8.500.000.000,00		9.000.000.000,00		9.500.000.000,00		10.000.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	65.00	70.00	75.00	8.000.000.000,00	80.00	8.500.000.000,00	85.00	9.000.000.000,00	90.00	9.500.000.000,00	95.00	10.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					8.345.180.000,00		7.955.180.000,00		8.355.180.000,00		8.574.180.000,00		8.753.180.000,00	
Outcome: Meningkatnya Keterpenuhan Kebutuhan Pegawai	Persentase keterpenuhan kebutuhan pegawai (%)	83.05	85.05	87.05	1.000.000.000,00	89.05	920.000.000,00	91.05	920.000.000,00	93.05	1.489.000.000,00	95.05	1.658.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Outcome: Meningkatnya Pegawai Yang Memiliki Nilai SKP minimal Baik	Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal "Baik" (%)	63.29	68.29	73.29	650.000.000,00	78.29	300.000.000,00	83.29	650.000.000,00	88.29	300.000.000,00	93.29	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Outcome: Meningkatnya Layanan Pegawai Sesuai Standar	Persentase layanan pegawai sesuai Standar Pelayanan (SP) (%)	80.00	82.00	84.00	1.000.000.000,00	86.00	1.000.000.000,00	88.00	1.000.000.000,00	90.00	1.000.000.000,00	92.00	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Outcome: Meningkatnya Kedisplinan Pegawai	Persentase pegawai yang disiplin (%)	63.29	68.29	73.29	250.000.000,00	78.29	290.000.000,00	83.29	340.000.000,00	88.29	340.000.000,00	93.29	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya Kebutuhan Pegawai	Persentase kebutuhan pegawai (%)	85.00	88.00	90.00	5.445.180.000,00	93.00	5.445.180.000,00	94.00	5.445.180.000,00	96.00	5.445.180.000,00	100.00	5.445.180.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentasi jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	30.00	35.00	40.00	1.000.000.000,00	45.00	1.000.000.000,00	50.00	1.000.000.000,00	55.00	1.000.000.000,00	60.00	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase jabatan struktural yang telah lulus diklat Pim Tk 2, PKA, PKP (%)	39.92	42.02	47.27	1.000.000.000,00	52.52	1.000.000.000,00	57.77	1.000.000.000,00	63.03	1.000.000.000,00	68.28	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase jabatan struktural yang telah lulus diklat Pim Tk 2, PKA, PKP (%)	75.00	80.00	84.00	1.000.000.000,00	88.00	1.000.000.000,00	92.00	1.000.000.000,00	96.00	1.000.000.000,00	100.00	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN					6.137.432.000,00		7.437.432.000,00		7.437.432.000,00		8.737.432.000,00		8.637.432.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PENGEMBANGAN														
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					6.137.432.000,00		7.437.432.000,00		7.437.432.000,00		8.737.432.000,00		8.637.432.000,00	
Outcome: Meningkatnya Hasil Riset	Persentase riset yang dihasilkan (%)	10.00	10.00	15.00	1.500.000.000,00	20.00	1.500.000.000,00	25.00	1.500.000.000,00	30.00	2.000.000.000,00	35.00	2.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset	Persentase Hasil Riset yang dimanfaatkan (%)	10.00	10.00	15.00	500.000.000,00	20.00	600.000.000,00	25.00	700.000.000,00	30.00	800.000.000,00	35.00	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi Daerah yang dimanfaatkan (%)	25.00	30.00	32.00	1.500.000.000,00	35.00	1.500.000.000,00	37.00	1.500.000.000,00	38.00	2.000.000.000,00	40.00	2.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Outcome: Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Penelitian dan	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di	79.00	80.00	81.00	2.637.432.000,00	82.00	3.837.432.000,00	83.00	3.737.432.000,00	84.00	3.937.432.000,00	85.00	2.637.432.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pengembangan	Daerah (Persentase)													
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					19.422.964.563,00		19.554.112.790,43		20.531.818.430,77		21.558.409.352,17		22.636.329.819,88	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.414.430.319,00		10.095.151.834,95		10.599.909.426,71		11.129.904.897,96		11.686.400.142,95	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	100.00	100.00	100.00	10.414.430.319,00	100.00	10.095.151.834,95	100.00	10.599.909.426,71	100.00	11.129.904.897,96	100.00	11.686.400.142,95	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					7.558.418.446,00		7.936.339.368,30		8.333.156.336,76		8.749.814.153,56		9.187.304.861,22	
Outcome: Meningkatnya TLHP Internal dan Eksternal	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksanaan (TLHP)	100.00	100.00	100.00	672.987.056,00	100.00	706.636.408,80	100.00	741.968.229,24	100.00	779.066.640,70	100.00	818.019.972,74	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Outcome: Meningkatnya Pengawasan yang dilaksanakan tepat waktu	Persentase Pengawasan yang dilaksanakan tepat waktu dan	100.00	100.00	100.00	2.805.321.732,00	100.00	2.945.587.818,60	100.00	3.092.867.209,55	100.00	3.247.510.570,01	100.00	3.409.886.098,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
dan sesuai regulasi	sesuai regulasi (%)													
Outcome: Meningkatnya Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	Persentase Aduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan (%)	100.00	100.00	100.00	300.900.435,00	100.00	315.945.456,75	100.00	331.742.729,59	100.00	348.329.866,07	100.00	365.746.359,37	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Outcome: Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadapa regulasi berdasarkan hasil pemeriksaan	Persentase perangkat daerah dengan tingkat kepatuhan tinggi terhadap regulasi (berdasarkan hasil pengawasan) (%)	100.00	100.00	100.00	3.779.209.223,00	100.00	3.968.169.684,15	100.00	4.166.578.168,38	100.00	4.374.907.076,78	100.00	4.593.652.430,61	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.450.115.798,00		1.522.621.587,18		1.598.752.667,30		1.678.690.300,65		1.762.624.815,71	
Outcome: Meningkatnya OPD yang Menjalankan Wilayah Bebas Korupsi-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Persentase OPD yang menjalankan Wilayah Bebas Korupsi- Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM)	47.00	49.00	51.00	184.172.618,00	53.00	193.381.248,54	56.00	203.050.311,35	59.00	213.202.826,91	65.00	223.862.968,26	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	59.39	59.90	60.50	184.172.618,00	62.50	193.381.248,54	65.50	203.050.311,35	70.50	213.202.826,91	80.00	223.862.968,26	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Outcome: Meningkatnya Persentase Unit Kerja/Perangkat Daerah yang menerima asistensi dan mengalami peningkatan kapasitas	Persentase unit kerja/perangkat daerah yang menerima asistensi dan mengalami peningkatan kapasitas (%)	100.00	100.00	100.00	1.081.770.562,00	100.00	1.135.859.090,10	100.00	1.192.652.044,61	100.00	1.252.284.646,83	100.00	1.314.898.879,19	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					71.848.933.001,27		75.664.591.530,27		79.673.178.321,27		84.173.700.943,27		89.390.243.113,09	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					54.698.682.896,12		56.888.923.680,12		58.867.170.666,12		61.660.371.268,12		64.415.680.962,79	
Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Kecamatan/Distrik	IKM OPD atau persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	40.00	50.00	55.00	3.356.121.785,00	60.00	3.501.221.114,00	65.00	3.633.762.739,00	70.00	3.782.235.331,00	80.00	3.981.795.345,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Kecamatan/Distrik	IKM OPD atau persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	40.00	50.00	55.00	1.993.778.184,00	60.00	2.093.467.093,00	65.00	2.025.796.503,00	70.00	2.292.844.911,00	80.00	2.392.533.821,00	Dinas/Badan yang menangani Kecamatan/Distrik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Kecamatan/Distrik	IKM OPD atau persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	40.00	50.00	55.00	2.299.400.000,00	60.00	2.352.900.000,00	65.00	2.415.700.000,00	70.00	2.524.700.000,00	80.00	2.677.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Kecamatan/Distrik	IKM OPD atau persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	40.00	50.00	55.00	6.325.798.229,00	60.00	6.687.630.640,00	65.00	7.066.391.172,00	70.00	7.452.676.230,00	80.00	7.867.012.041,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Kecamatan/Distrik	IKM OPD atau persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	40.00	50.00	55.00	3.161.000.000,00	60.00	3.449.000.000,00	65.00	3.342.500.000,00	70.00	3.292.000.000,00	80.00	3.311.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Kecamatan/Distrik	IKM OPD atau persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	40.00	50.00	55.00	2.829.685.675,00	60.00	3.457.722.810,00	65.00	4.186.544.229,00	70.00	4.915.365.648,00	80.00	5.644.187.066,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Kecamatan/Distrik	IKM OPD atau persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	40.00	50.00	55.00	4.518.000.000,00	60.00	4.488.000.000,00	65.00	4.488.000.000,00	70.00	4.488.000.000,00	80.00	4.888.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Kecamatan/Distrik	IKM OPD atau persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	40.00	50.00	55.00	5.326.596.488,00	60.00	5.301.596.488,00	65.00	5.301.596.488,00	70.00	5.306.596.488,00	80.00	5.306.596.488,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Kecamatan/Distrik	IKM OPD atau persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	40.00	50.00	55.00	4.498.500.000,00	60.00	4.580.500.000,00	65.00	4.698.500.000,00	70.00	4.903.000.000,00	80.00	5.198.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Kecamatan/Distrik	IKM OPD atau persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	40.00	50.00	55.00	2.717.833.418,00	60.00	2.920.333.418,00	65.00	3.131.833.418,00	70.00	3.363.333.418,00	80.00	3.494.833.418,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Kecamatan/Distrik	IKM OPD atau persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	40.00	50.00	55.00	3.686.594.117,12	60.00	3.647.802.117,12	65.00	3.659.696.117,12	70.00	3.794.319.242,12	80.00	3.679.922.783,79	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Kecamatan/Distrik	IKM OPD atau persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	40.00	50.00	55.00	5.484.175.000,00	60.00	5.645.000.000,00	65.00	5.893.000.000,00	70.00	6.148.000.000,00	80.00	6.293.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Kecamatan/Distrik	IKM OPD atau persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	40.00	50.00	55.00	2.248.200.000,00	60.00	2.255.250.000,00	65.00	2.264.850.000,00	70.00	2.272.800.000,00	80.00	2.280.900.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Kecamatan/Distrik	IKM OPD atau persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	40.00	50.00	55.00	2.190.000.000,00	60.00	2.465.500.000,00	65.00	2.736.000.000,00	70.00	3.016.500.000,00	80.00	3.312.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Kecamatan/Distrik	IKM OPD atau persentase komponen pelayanan penunjang yang sesuai standar regulasi (%)	40.00	50.00	55.00	4.063.000.000,00	60.00	4.043.000.000,00	65.00	4.023.000.000,00	70.00	4.108.000.000,00	80.00	4.088.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					3.795.000.105,15		3.660.148.350,15		3.766.001.655,15		3.791.679.675,15		4.461.309.150,15	
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuasi ketentuan	Persentase pelayanan publik kecamatan/distrik sesuai standar pelayanan (%)	40.00	45.00	50.00	253.000.000,01	55.00	244.009.890,01	60.00	251.066.777,01	70.00	252.778.645,01	80.00	297.420.610,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuasi ketentuan	Persentase pelayanan publik kecamatan/distrik sesuai standar pelayanan (%)	20.00	40.00	50.00	253.000.001,01	55.00	244.009.890,01	60.00	251.066.777,01	65.00	252.778.645,01	70.00	297.420.610,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan publik kecamatan/distrik sesuai standar pelayanan (%)	40.00	40.00	50.00	253.000.002,01	55.00	244.009.890,01	60.00	251.066.777,01	65.00	252.778.645,01	70.00	297.420.610,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
sesuasi ketentuan														
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuasi ketentuan	Persentase pelayanan publik kecamatan/distrik sesuai standar pelayanan (%)	40.00	50.00	55.00	253.000.003,01	60.00	244.009.890,01	65.00	251.066.777,01	70.00	252.778.645,01	75.00	297.420.610,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuasi ketentuan	Persentase pelayanan publik kecamatan/distrik sesuai standar pelayanan (%)	60.00	65.00	70.00	253.000.004,01	75.00	244.009.890,01	80.00	251.066.777,01	85.00	252.778.645,01	85.00	297.420.610,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuasi ketentuan	Persentase pelayanan publik kecamatan/distrik sesuai standar pelayanan (%)	60.00	65.00	70.00	253.000.005,01	75.00	244.009.890,01	80.00	251.066.777,01	85.00	252.778.645,01	85.00	297.420.610,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan publik kecamatan/distrik sesuai standar pelayanan (%)	20.00	30.00	40.00	253.000.006,01	50.00	244.009.890,01	60.00	251.066.777,01	70.00	252.778.645,01	75.00	297.420.610,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
sesuasi ketentuan														
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuasi ketentuan	Persentase pelayanan publik kecamatan/distrik sesuai standar pelayanan (%)	20.00	30.00	40.00	253.000.007,01	50.00	244.009.890,01	60.00	251.066.777,01	70.00	252.778.645,01	75.00	297.420.610,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuasi ketentuan	Persentase pelayanan publik kecamatan/distrik sesuai standar pelayanan (%)	20.00	30.00	40.00	253.000.008,01	50.00	244.009.890,01	60.00	251.066.777,01	70.00	252.778.645,01	75.00	297.420.610,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuasi ketentuan	Persentase pelayanan publik kecamatan/distrik sesuai standar pelayanan (%)	20.00	30.00	40.00	253.000.009,01	50.00	244.009.890,01	60.00	251.066.777,01	70.00	252.778.645,01	75.00	297.420.610,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan publik kecamatan/distrik sesuai standar pelayanan (%)	40.00	50.00	55.00	253.000.010,01	65.00	244.009.890,01	70.00	251.066.777,01	80.00	252.778.645,01	85.00	297.420.610,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
sesuasi ketentuan														
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuasi ketentuan	Persentase pelayanan publik kecamatan/distrik sesuai standar pelayanan (%)	50.00	55.00	60.00	253.000.011,01	65.00	244.009.890,01	70.00	251.066.777,01	80.00	252.778.645,01	85.00	297.420.610,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuasi ketentuan	Persentase pelayanan publik kecamatan/distrik sesuai standar pelayanan (%)	20.00	30.00	40.00	253.000.012,01	50.00	244.009.890,01	60.00	251.066.777,01	70.00	252.778.645,01	75.00	297.420.610,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuasi ketentuan	Persentase pelayanan publik kecamatan/distrik sesuai standar pelayanan (%)	40.00	50.00	55.00	253.000.013,01	65.00	244.009.890,01	70.00	251.066.777,01	80.00	252.778.645,01	85.00	297.420.610,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan publik kecamatan/distrik sesuai standar pelayanan (%)	50.00	55.00	60.00	253.000.014,01	65.00	244.009.890,01	70.00	251.066.777,01	80.00	252.778.645,01	85.00	297.420.610,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
sesuasi ketentuan														
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.839.000.000,00		5.312.644.500,00		5.704.506.000,00		6.144.000.000,00		6.748.503.000,15	
Outcome: Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat desa yang aktif dalam pembangunan (%)	71.43	76.14	80.86	322.600.000,00	85.57	354.176.300,00	90.29	380.300.400,00	93.50	409.600.000,00	95.00	449.900.200,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat desa yang aktif dalam pembangunan (%)	57.14	64.71	72.29	322.600.000,00	79.86	354.176.300,00	87.43	380.300.400,00	93.50	409.600.000,00	95.00	449.900.200,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat desa yang aktif dalam pembangunan (%)	85.71	87.57	89.43	322.600.000,00	91.29	354.176.300,00	93.14	380.300.400,00	93.50	409.600.000,00	95.00	449.900.200,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat desa yang aktif dalam pembangunan (%)	85.71	87.57	89.43	322.600.000,00	91.29	354.176.300,00	93.14	380.300.400,00	93.50	409.600.000,00	95.00	449.900.200,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaa	Persentase kelembagaan masyarakat desa yang aktif dalam	50.00	55.00	60.00	322.600.000,00	65.00	354.176.300,00	70.00	380.300.400,00	80.00	409.600.000,00	85.00	449.900.200,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
n Masyarakat Desa dan Kelurahan	pembangunan (%)													Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat desa yang aktif dalam pembangunan (%)	85.71	87.57	89.43	322.600.000,00	91.29	354.176.300,00	93.14	380.300.400,00	93.14	409.600.000,00	95.00	449.900.200,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat desa yang aktif dalam pembangunan (%)	100.00	100.00	100.00	322.600.000,00	100.00	354.176.300,00	100.00	380.300.400,00	100.00	409.600.000,00	100.00	449.900.200,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat desa yang aktif dalam pembangunan (%)	60.00	64.71	72.29	322.600.000,00	79.86	354.176.300,00	87.43	380.300.400,00	93.50	409.600.000,00	95.00	449.900.200,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat desa yang aktif dalam pembangunan (%)	60.00	64.71	72.29	322.600.000,00	79.86	354.176.300,00	87.43	380.300.400,00	93.50	409.600.000,00	95.00	449.900.200,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat desa yang aktif dalam pembangunan (%)	60.00	64.71	72.29	322.600.000,00	79.86	354.176.300,00	87.43	380.300.400,00	93.50	409.600.000,00	95.00	449.900.200,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaa	Persentase kelembagaan masyarakat desa yang aktif dalam	50.00	55.00	60.00	322.600.000,00	65.00	354.176.300,00	70.00	380.300.400,00	90.00	409.600.000,00	95.00	449.900.200,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
n Masyarakat Desa dan Kelurahan	pembangunan (%)													Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat desa yang aktif dalam pembangunan (%)	85.71	87.76	89.81	322.600.000,00	91.86	354.176.300,00	93.90	380.300.400,00	95.95	409.600.000,00	98.00	449.900.200,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat desa yang aktif dalam pembangunan (%)	71.43	76.14	80.86	322.600.000,00	85.57	354.176.300,00	90.29	380.300.400,00	93.50	409.600.000,00	95.00	449.900.200,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat desa yang aktif dalam pembangunan (%)	50.00	55.00	65.00	322.600.000,00	75.00	354.176.300,00	85.00	380.300.400,00	90.00	409.600.000,00	95.00	449.900.200,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat desa yang aktif dalam pembangunan (%)	50.00	55.00	65.00	322.600.000,00	75.00	354.176.300,00	85.00	380.300.400,00	90.00	409.600.000,00	95.00	449.900.200,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.664.000.000,00		2.832.000.000,00		3.448.500.000,00		3.763.500.000,00		4.068.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenteraman	50.00	55.00	60.00	177.600.000,00	65.00	188.800.000,00	70.00	229.900.000,00	85.00	250.900.000,00	100.00	271.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Ketertibaan Umum	dan Ketertiban Umum (%)													Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	45.00	55.00	65.00	177.600.000,00	75.00	188.800.000,00	85.00	229.900.000,00	95.00	250.900.000,00	100.00	271.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	60.00	65.00	70.00	177.600.000,00	80.00	188.800.000,00	90.00	229.900.000,00	100.00	250.900.000,00	100.00	271.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	60.00	65.00	70.00	177.600.000,00	80.00	188.800.000,00	90.00	229.900.000,00	100.00	250.900.000,00	100.00	271.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	60.00	65.00	70.00	177.600.000,00	75.00	188.800.000,00	80.00	229.900.000,00	85.00	250.900.000,00	95.00	271.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	45.00	50.00	55.00	177.600.000,00	60.00	188.800.000,00	65.00	229.900.000,00	70.00	250.900.000,00	77.00	271.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	20.00	35.00	50.00	177.600.000,00	65.00	188.800.000,00	70.00	229.900.000,00	75.00	250.900.000,00	80.00	271.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	40.00	45.00	50.00	177.600.000,00	55.00	188.800.000,00	60.00	229.900.000,00	65.00	250.900.000,00	70.00	271.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	45.00	50.00	55.00	177.600.000,00	60.00	188.800.000,00	65.00	229.900.000,00	70.00	250.900.000,00	75.00	271.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	45.00	50.00	55.00	177.600.000,00	60.00	188.800.000,00	65.00	229.900.000,00	70.00	250.900.000,00	75.00	271.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	45.00	50.00	55.00	177.600.000,00	60.00	188.800.000,00	65.00	229.900.000,00	70.00	250.900.000,00	75.00	271.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	60.00	65.00	70.00	177.600.000,00	75.00	188.800.000,00	80.00	229.900.000,00	90.00	250.900.000,00	95.00	271.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100.00	100.00	100.00	177.600.000,00	100.00	188.800.000,00	100.00	229.900.000,00	100.00	250.900.000,00	100.00	271.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	50.00	55.00	60.00	177.600.000,00	65.00	188.800.000,00	70.00	229.900.000,00	75.00	250.900.000,00	80.00	271.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	50.00	55.00	60.00	177.600.000,00	65.00	188.800.000,00	70.00	229.900.000,00	75.00	250.900.000,00	80.00	271.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.500.000.000,00		1.800.000.000,00		1.950.000.000,00		2.100.000.000,00		2.250.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara (%)	70.00	75.00	80.00	100.000.000,00	85.00	120.000.000,00	88.00	130.000.000,00	90.00	140.000.000,00	95.00	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara (%)	50.00	55.00	60.00	100.000.000,00	65.00	120.000.000,00	75.00	130.000.000,00	80.00	140.000.000,00	90.00	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara (%)	60.00	65.00	70.00	100.000.000,00	75.00	120.000.000,00	80.00	130.000.000,00	90.00	140.000.000,00	95.00	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara (%)	50.00	55.00	60.00	100.000.000,00	65.00	120.000.000,00	70.00	130.000.000,00	75.00	140.000.000,00	80.00	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara (%)	60.00	65.00	70.00	100.000.000,00	75.00	120.000.000,00	80.00	130.000.000,00	85.00	140.000.000,00	90.00	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara (%)	70.00	75.00	80.00	100.000.000,00	85.00	120.000.000,00	88.00	130.000.000,00	90.00	140.000.000,00	95.00	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara (%)	60.00	65.00	70.00	100.000.000,00	75.00	120.000.000,00	80.00	130.000.000,00	90.00	140.000.000,00	95.00	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara (%)	60.00	65.00	70.00	100.000.000,00	75.00	120.000.000,00	80.00	130.000.000,00	85.00	140.000.000,00	90.00	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara (%)	50.00	55.00	60.00	100.000.000,00	65.00	120.000.000,00	75.00	130.000.000,00	80.00	140.000.000,00	90.00	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara (%)	50.00	55.00	60.00	100.000.000,00	65.00	120.000.000,00	75.00	130.000.000,00	80.00	140.000.000,00	85.00	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara (%)	50.00	55.00	60.00	100.000.000,00	65.00	120.000.000,00	75.00	130.000.000,00	80.00	140.000.000,00	85.00	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara (%)	40.00	50.00	55.00	100.000.000,00	65.00	120.000.000,00	70.00	130.000.000,00	80.00	140.000.000,00	85.00	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara (%)	60.00	65.00	70.00	100.000.000,00	75.00	120.000.000,00	80.00	130.000.000,00	90.00	140.000.000,00	95.00	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara (%)	60.00	65.00	70.00	100.000.000,00	75.00	120.000.000,00	80.00	130.000.000,00	90.00	140.000.000,00	95.00	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertibaan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara (%)	60.00	65.00	70.00	100.000.000,00	75.00	120.000.000,00	80.00	130.000.000,00	90.00	140.000.000,00	95.00	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					4.352.250.000,00		5.170.875.000,00		5.937.000.000,00		6.714.150.000,00		7.446.750.000,00	
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah umum	Persentase desa di wilayah kecamatan/distrik yang tertib menjalankan kalender pembangunan (%)	50.00	55.00	60.00	290.150.000,00	65.00	344.725.000,00	70.00	395.800.000,00	75.00	447.610.000,00	80.00	496.450.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah umum	Persentase desa di wilayah kecamatan/distrik yang tertib menjalankan kalender pembangunan (%)	50.00	55.00	60.00	290.150.000,00	65.00	344.725.000,00	70.00	395.800.000,00	80.00	447.610.000,00	85.00	496.450.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah umum	Persentase desa di wilayah kecamatan/distrik yang tertib menjalankan kalender pembangunan (%)	50.00	55.00	60.00	290.150.000,00	65.00	344.725.000,00	70.00	395.800.000,00	75.00	447.610.000,00	80.00	496.450.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah umum	Persentase desa di wilayah kecamatan/distrik yang tertib menjalankan kalender pembangunan (%)	50.00	55.00	60.00	290.150.000,00	65.00	344.725.000,00	70.00	395.800.000,00	75.00	447.610.000,00	80.00	496.450.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah umum	Persentase desa di wilayah kecamatan/distrik yang tertib menjalankan kalender pembangunan (%)	50.00	55.00	60.00	290.150.000,00	65.00	344.725.000,00	70.00	395.800.000,00	75.00	447.610.000,00	80.00	496.450.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah umum	Persentase desa di wilayah kecamatan/distrik yang tertib menjalankan kalender pembangunan (%)	50.00	55.00	60.00	290.150.000,00	65.00	344.725.000,00	70.00	395.800.000,00	75.00	447.610.000,00	80.00	496.450.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah umum	Persentase desa di wilayah kecamatan/distrik yang tertib menjalankan kalender pembangunan (%)	50.00	55.00	60.00	290.150.000,00	65.00	344.725.000,00	70.00	395.800.000,00	75.00	447.610.000,00	80.00	496.450.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah umum	Persentase desa di wilayah kecamatan/distrik yang tertib menjalankan kalender pembangunan (%)	50.00	55.00	60.00	290.150.000,00	65.00	344.725.000,00	70.00	395.800.000,00	75.00	447.610.000,00	80.00	496.450.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah umum	Persentase desa di wilayah kecamatan/distrik yang tertib menjalankan kalender pembangunan (%)	50.00	55.00	60.00	290.150.000,00	65.00	344.725.000,00	70.00	395.800.000,00	75.00	447.610.000,00	80.00	496.450.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah umum	Persentase desa di wilayah kecamatan/distrik yang tertib menjalankan kalender pembangunan (%)	50.00	55.00	60.00	290.150.000,00	65.00	344.725.000,00	70.00	395.800.000,00	75.00	447.610.000,00	80.00	496.450.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah umum	Persentase desa di wilayah kecamatan/distrik yang tertib menjalankan kalender pembangunan (%)	50.00	55.00	60.00	290.150.000,00	65.00	344.725.000,00	70.00	395.800.000,00	75.00	447.610.000,00	80.00	496.450.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah umum	Persentase desa di wilayah kecamatan/distrik yang tertib menjalankan kalender pembangunan (%)	50.00	55.00	60.00	290.150.000,00	65.00	344.725.000,00	70.00	395.800.000,00	75.00	447.610.000,00	80.00	496.450.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah umum	Persentase desa di wilayah kecamatan/distrik yang tertib menjalankan kalender pembangunan (%)	50.00	55.00	60.00	290.150.000,00	65.00	344.725.000,00	70.00	395.800.000,00	75.00	447.610.000,00	80.00	496.450.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah umum	Persentase desa di wilayah kecamatan/distrik yang tertib menjalankan kalender pembangunan (%)	50.00	55.00	60.00	290.150.000,00	65.00	344.725.000,00	70.00	395.800.000,00	75.00	447.610.000,00	80.00	496.450.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah umum	Persentase desa di wilayah kecamatan/distrik yang tertib menjalankan kalender pembangunan (%)	50.00	55.00	60.00	290.150.000,00	65.00	344.725.000,00	70.00	395.800.000,00	75.00	447.610.000,00	80.00	496.450.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan/Distrik
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					15.580.360.463,00		16.408.976.713,00		16.558.636.713,00		17.809.836.713,00		21.094.336.713,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.250.360.463,00		7.908.976.713,00		8.058.636.713,00		7.809.836.713,00		8.344.336.713,00	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Komponen Pelayanan Penunjang yang Sesuai Standar Regulasi	65.00	70.00	75.00	7.250.360.463,00	80.00	7.908.976.713,00	85.00	8.058.636.713,00	90.00	7.809.836.713,00	95.00	8.344.336.713,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		2.000.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya karakter kebangsaan masyarakat desa berdasarkan budaya lokal	Persentase desa yang berkarakter kebangsaan berdasarkan budaya lokal (%)	20.00	23.00	25.00	1.500.000.000,00	27.00	1.500.000.000,00	29.00	1.500.000.000,00	31.00	1.500.000.000,00	33.00	2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		3.250.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya pendidikan politik masyarakat melalui pendidikan partai politik	Persentase partai politik yang terlibat aktif dalam pendidikan politik masyarakat (%)	60.00	62.00	65.00	1.500.000.000,00	68.00	1.500.000.000,00	70.00	1.500.000.000,00	73.00	1.500.000.000,00	75.00	2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Outcome: Meningkatnya pendidikan politik masyarakat melalui lembaga pendidikan	Persentase lembaga pendidikan yang terlibat aktif dalam pendidikan politik masyarakat (%)	30.00	32.00	34.00	1.000.000.000,00	37.00	1.000.000.000,00	40.00	1.000.000.000,00	43.00	1.000.000.000,00	45.00	1.250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		2.000.000.000,00		2.500.000.000,00	
Outcome: Meningkatnya organisasi masyarakat yang diberdayakan dan diawasi serta dibina	Persentase organisasi masyarakat yang diberdayakan dan diawasi serta dibina (%)	30.00	32.00	34.00	1.500.000.000,00	37.00	1.500.000.000,00	40.00	1.500.000.000,00	43.00	2.000.000.000,00	45.00	2.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		2.000.000.000,00		2.500.000.000,00	
Outcome: Menurunnya potensi konflik sara	Persentase Potensi Konflik sara yang diselesaikan (%)	30.00	33.00	35.00	1.500.000.000,00	40.00	1.500.000.000,00	43.00	1.500.000.000,00	47.00	2.000.000.000,00	50.00	2.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.330.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		2.000.000.000,00		2.500.000.000,00	
Outcome: Menurunnya potensi konflik sosial	Persentase penurunan potensi konflik sosial (%)	30.00	28.00	25.00	1.330.000.000,00	22.00	1.500.000.000,00	20.00	1.500.000.000,00	17.00	2.000.000.000,00	15.00	2.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Sub bab ini menyajikan tentang gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Mappi untuk lima tahun ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. IKU tersebut ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk satu periode ke depan. Berikut ini disajikan tabel Indikator Kinerja Utama dari Kabupaten Mappi tahun 2025-2029.

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	60.71	62.37	63.37	64.38	65.38	66.39	67.39	**67.39**
2	Prevalensi Stunting	Persen	15.08	15.33	14.60	13.87	13.18	12.52	11.89	**11.89**
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	1.98	4.52	4.65	4.77	4.90	5.02	5.15	**5.15**
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	25.7	25.72	23.37	21.03	18.68	16.34	13.99	**13.99**
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.10	3.85	3.73	3.62	3.50	3.39	3.27	**3.27**
6	Indeks Gini	Indeks	0.42	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	**0.38**
7	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	18,040	18,370	18,602	18,834	19,066	19,298	19,530	**19,530**
8	Tingkat Inflasi	Nilai	1.78	3.45	3.30	3.15	2.99	2.84	2.69	**2.69**
9	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	2.70	2.73	2.76	2.80	2.83	2.87	2.90	**2.90**
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	40.50	46.30	47.15	48.01	48.89	49.79	50.70	**51.63**

No	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Nilai SAKIP	Nilai	53.13	55.79	58.58	61.50	64.58	67.81	71.20	**74.76**
12	Rasio konektivitas	Nilai	35.00	36.10	38.00	39.90	41.90	43.99	46.19	**48.50**
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	46.32	80.85	81.30	81.75	82.20	82.65	83.10	**83.10**
14	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	28.00	50.00	51.07	52.13	53.20	54.26	55.33	**55.33**

4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Indeks Kinerja Daerah (IKD) merupakan alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan, bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian visi dan misi kepala daerah. Berikut adalah target kinerja daerah Kabupaten Mappi periode 2025-2029.

Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	37.00	37,92	40,58	43,42	46,45	49,71	52,19	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	46,32	41,32	36,32	31,32	26,32	21,32	16,32	
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	35,58	36,02	36,45	36,88	37,31	37,74	38,17	
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH	80,39	80.85	81.30	81.75	82.20	82.65	83.10	
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Liter/Kg	3,65	4,15	4,65	5,15	5,65	6,15	6,65	
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	00,00	00,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	57,18	59,28	61,38	63,48	65,58	67,68	69,78	
10	Indeks Risiko Bencana	poin	126,40	126,40	126,40	126,40	126,40	126,40	126,40	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	0.7	
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3,55	4,48	6,13	7,41	8,70	9,99	11,28	
13	Rasio Penduduk	%	106,76	106,78	106,79	106,81	106,82	106,84	106,85	
14	Kepadatan Penduduk	Orang/m2	4,46	4,51	4,57	4,63	4,69	4,74	4,80	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	0,00	4,52	4,65	4,77	4,90	5,02	5,15	
2	Tingkat Kemiskinan	%	25.72	25,72	23,37	21,03	18,68	16,34	13,99	
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	0	18,370	18,602	18,834	19,066	19,298	19,530	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	0,00	3,85	3,73	3,62	3,50	3,39	3,26	
5	Indeks Gini	indeks	0,00	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	
6	Indeks Pembangunan Manusia	angka	60,71	62,37	63,37	64,38	65,38	66,39	67,39	
7	Usia Harapan Hidup	tahun	66.34	66.84	67.34	67.84	68.34	68.84	69.34	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Indeks Keluarga Sehat	indeks	50	55	56	60	70	75	75	
9	Prevalensi Stunting	%	15,80	15,50	15,20	15,00	14,80	14,50	14,00	
10	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,16	7,39	7,63	7,87	8,12	8,39	8,65	
11	Harapan Lama Sekolah	tahun	11,29	11,48	11,68	11,88	12,08	12,29	12,50	
12	Angka Literasi/Numerasi	%	46,10	47,48	48,85	50,23	51,60	52,98	54,35	
13	Angka Numerasi	%	45,72	47,77	49,82	51,87	53,92	55,97	58,02	
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	53,47	57,97	62,47	66,97	71,47	75,95	80,47	
15	Indeks Literasi Digital	angka	46.10	47.48	48.85	50.23	51.60	52.98	54.35	
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	0,13	0,12	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	76,47	76,97	77,47	77,97	78,47	78,97	79,47	
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	28,00	50,00	51,07	52,13	53,20	54,26	55.33	
19	Indeks Perlindungan Anak	angka	2.50	3.33	3.75	4.16	4.99	5.41	5.83	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	0-100	50	55	56	60	70	75	75	
21	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0	
22	Indeks Pembangunan Pemuda	angka	16,70	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Angka Ketergantungan	%								
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	0,50	0,50	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0.71	0.71	0.80	0.95	1.18	1.57	2.08	
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%								
5	Rasio Kewirausahaan	%	0.5	0.5	0,5	0,5	1	1	2	
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	61,16	61,96	62,76	63,56	64,36	65,16	65,96	
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka	12.50	12.60	12.70	12.80	12.90	13.10	13.20	
8	Indeks Ekonomi Hijau	Rupiah/	50.23	50.24	50.28	50.31	50.33	50.36	50.41	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	skor	16.22	16.25	16.29	16.31	16.35	16.38	16.42	
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%								
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0-10	0,00	3,00	3,50	3,80	4,10	4,50	5,00	
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	50,16	50,86	51,56	52,26	52,96	53,66	54,36	
13	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB								
14	Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	angka	46.05	46.55	47.05	47.55	48.05	48.55	46.05	
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	
16	Persentase Desa Mandiri	%	0,00	0,62	1,23	1,23	1,85	1,85	2,47	
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	6,96	6,96	7,96	8,96	9,96	10,96	11,96	
18	Tingkat Inflasi	%	1,78	3,45	3,30	3,15	2,99	2,84	2,69	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Reformasi Hukum	nilai	60.00	68.00	72.00	75.00	78.00	82.00	85.00	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	1,73	1,90,	2,10	2,30	2,50	2,60	2,70	
3	Indeks Pelayanan Publik	indeks	81,60	82,70	83,80	84,90	86,00	87,10	88,20	
4	Indeks Integritas Nasional	angka	59.39	61.00	63.00	64.00	66.00	67.00	69.00	
5	Persentase Penegakan Perda	%	33,33	33,50	33,80	34,10	34,40	34,80	35,00	
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	65.00	70.00	75.00	78.00	80.00	85.00	85.00	
7	Indeks Demokrasi Indonesia	%	67,15	67,65	68,15	68,65	69,15	69,65	70,15	
8	Indeks Rasa Aman	angka	3,25	3,45	3,65	3,85	4,05	4,25	4,45	
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	angka	83,72	83,90	84,00	84,20	84,50	84,80	85,00	
10	Indeks Daya Saing Daerah	nilai	2.67	2.73	2.76	2.80	2.83	2.87	2.90	

4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun IKK Kabupaten Mappi disajikan sebagai berikut.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
INDIKATOR KINERJA KUNCI										
A	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan									
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	31,22	34,08	36,94	39,81	42,67	45,56	48,40	
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen	89,55	90,53	91,51	92,49	93,47	94,45	95,44	
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persen	19,70	19,90	20,15	20,40	20,65	20,90	21,15	
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	34,17	36,67	39,17	41,67	44,17	46,67	49,17	
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	37,01	39,91	42,81	45,71	48,61	51,51	54,41	
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	49,77	50,87	51,97	53,07	54,`17	55,27	56,37	
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	52,20	53,70	55,20	56,70	58,20	59,70	61,20	
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persen	8,00	8,41	8,82	9,23	9,64	10,06	10,47	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	Persen	21,58	31,49	32,49	33,49	34,49	35,49	36,49	
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	66,50	67,40	68,30	69,20	70,10	71,00	71,90	
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	62,71	64,21	65,71	67,21	68,71	70,21	71,71	
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	65,93	66,93	67,93	68,93	69,93	70,93	71,93	
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	67,82	68,82	69,82	70,82	71,82	72,82	73,82	
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	52,81	55,31	57,81	60,31	62,81	65,31	67,81	
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	53,04	55,44	57,84	60,24	62,64	65,04	67,44	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang	4	2	0	0	0	0	0	
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	15,80	15,50	15,20	15,00	14,80	14,50	14,00	
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persen	19,26	23,01	26,76	30,51	34,27	38,02	41,77	
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Persen	68,25	70,80	72,74	74,69	76,64	78,58	80,53	
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	67,96	69,88	71,80	73,72	75,65	77,57	79,49	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	22,70	32,70	41,70	49,70	56,70	62,70	67,70	
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Persen	16,07	21,07	26,07	31,07	36,07	41,07	46,07	
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Persen	23,92	24,23	24,53	32,03	39,53	47,03	54,53	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	87,12	89,30	90,80	92,30	93,80	95,30	96,80	
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Persen	9,11	19,11	29,11	39,11	49,11	59,11	69,11	
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Persen	4,96	11,96	18,96	25,96	29,96	36,96	43,96	
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Persen	60,87	63,37	65,87	68,37	70,87	73,37	75,87	
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	Persen	41,36	55,56	65,56	73,56	79,56	83,56	85,56	
14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) sesuai standar	Persen	13,84	18,84	23,84	28,84	33,84	38,84	43,84	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	Persen	11,45	11,45	14,74	18,03	21,32	24,61	27,89	
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	5,08	5,08	9,14	14,15	17,26	20,36	25,37	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	Nilai	49,70	49,70	51,71	52,47	53,22	67,04	69,56	
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	Persen	49,70	49,70	51,71	52,47	53,22	67,04	69,56	
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Persen	6,33	6,93	7,47	8,00	8,54	9,07	9,61	
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	2,97	3,24	3,31	3,39	3,46	3,35	3,60	
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persen	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	20,62	21,00	21,42	22,23	23,89	23,43	23,97	
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	Persen								
10	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen								
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Layanan	159	6	30	30	30	30	30	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	Persen	00,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Persen	00,00	00,00	17,00	34,10	51,00	68,00	85,30	
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	00,00	00,00	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00	
3	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	5,20	5,20	5,20	5,70	5,90	7,00	9,00	
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Persen	23,00	23,20	23,40	23,60	23,80	24,00	24,20	
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	8,72	12,50	17,40	26,10	34,80	43,50	52,2	
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Persen	58,53	58,60	58,70	58,80	59,00	59,50	60,00	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Persen	75,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	2	2	3	3	4	4	7	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Persen	64,28	65,00	65,75	66,00	67,00	68,00	69,00	
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	Persen	3,00	5,00	5,00	10.00	13,00	15,00	20,00	
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	0,53	51,91	59,81	67,51	75,01	82,31	89,42	
8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	0,53	51,91	59,81	67,51	75,01	82,31	89,42	
9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	6,50	7,53	12,53	17,53	22,53	27,53	32,53	
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persen	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71	100,00	100,00	
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	14,29	19,29	24,29	29,29	34,29	39,29	44,29	
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	46.30	56.30	59.30	62.30	65.30	68.30	71.30	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	15.00	25.00	35.00	45.00	55.00	65.00	75.00	
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	50.00	53.00	56.00	59.00	62.00	65.00	68.00	
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	Persen	29.17	35.71	40.63	41.67	42.50	43.18	50.00	
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	Persen	33.33	50.00	56.67	60.00	66.67	75.00	83.33	
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Persen	7,30	7,53	17,53	27,53	37,53	47,53	57,53	
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	Persen	33,33	34,53	35,73	36,93	38,13	39,33	40,53	
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Persen	7.30	7.53	17.53	27.53	37.53	47.53	57.53	
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDSyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	72,76	73,26	73,76	74,26	74,76	75,26	75,76	
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan	Persen	33,33	50,00	56,67	60,00	66,67	75,00	83,33	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar									
12	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	26,61	27,61	28,61	29,61	30,61	31,61	32,61	
13	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persen	26,61	27,61	28,61	29,61	30,61	31,61	32,61	
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Persen	25,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	0	0	0	0,50	0,70	0,80	0,90	
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	28.828.452	29.282.998	29.804.582	30.169.660	30.534.738	30.899.816	31.264.894	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	0	0	0	0,50	1,00	1,00	2,00	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	84.11	84.26	84.41	84.58	84.75	84.92	85.09	
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0	
3	Persentase ARG Daerah	Persen	57.14	66.67	66.67	66.67	77.78	85.71	91.67	
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	4.17	8.00	11.54	14.81	17.86	20.69	23.33	
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	2.50	3.08	3.57	4.00	4.38	4.71	5.00	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan									
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	10	10	10	10	10	18	10	
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai	59	65,8	72,7	79,5	86,3	93,2	100	
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	10	30	40	50	60	80	100	
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan									

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	Persen	45.00	55.00	55.00	60.00	65.00	70.00	72.00	
2	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	Persen	00,00	38,57	38,57	38,57	38,57	38,57	38,57	
3	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	Persen	00,00	20,00	30,00	50,00	70,00	80,00	100,00	
4	Jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	Persen	45.00	55.00	55.00	60.00	65.00	70.00	72.00	
5	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	Persen	00,00	0,35	0,22	2,23	0,24	0,25	0,26	
6	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	Persen	35.47	35,47	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	
7	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Persen	45.00	55.00	55.00	60.00	65.00	70.00	72.00	
8	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	45.00	55.00	55.00	60.00	65.00	70.00	72.00	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	Persen	35.47	35,47	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	80,39	80.85	81.30	81.75	82.20	82.65	83.10	
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persen	00,00	24,50	32,00	42,00	42,00	45,00	45,00	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	4,00	5,00	12,00	19,00	26,00	32,00	40,00	
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	99,13	99,50	99,85	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	35,42	45,42	55,42	65,42	75,42	85,42	95,42	
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	22,45	27,45	32,45	37,45	42,45	47,45	52,45	
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	Persen	56,85	61,85	66,85	71,85	76,85	81,85	86,85	
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	11,49	36,00	39,00	44,00	48,00	53,00	55,00	
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	Persen	72,00	80,00	88,00	96,00	100,00	100,00	100,00	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	3,35	9,35	15,35	21,35	27,35	33,35	39,35	
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa									
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	0,00	0,62	1,23	1,23	1,85	1,85	2,47	
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persen	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persen	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	80,00	
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	14.29	15.29	16.29	17.29	18.29	19.29	20.29	
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Persen	3.71	3.71	3.71	3.80	3.80	3.80	3.85	
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	0.85	1.15	1.45	1.75	2.04	2.33	2.62	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	34.95	34.95	35.56	36.16	36.75	37.33	37.90	
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	70.69	66.54	62.40	58.25	54.10	49.95	45.80	
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	58.20	60.20	62.20	64.20	66.20	68.20	70.20	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan									
1	Konektivitas	Rasio	64,67	48,89	51,11	53,33	55,56	57,78	60,00	
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	Persen	15,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Persen	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	00,00	63,00	63,00	70,00	78,00	80,00	82,00	
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	00,00	17,00	17,00	21,00	23,00	27,00	31,00	
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen	00,00	19,00	19,00	21,00	25,00	26,00	27,00	
11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	3,2	3,2	6,3	7,2	10,3	11,3	12,5	
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	6,2	6,2	8,2	9,3	10,4	12,4	13,6	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Pertumbuhan Wirausaha	Persen	0	0	0,5	0,5	1	1	2	
12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal									
1	Persentase peningkatan investasi	Persen	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	
13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga									
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	Persen	8,45	9,28	9,43	9,62	9,84	10,05	10,26	
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	Persen	1,00	10,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	
14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	0,00	1,2	1,5	1,7	1,9	2,20	2,50	
15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian									
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Persen	30,00	32,00	35,00	37,00	40,00	42,00	45,00	
16	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan									
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	53,47	55,27	56,25	58,37	59,45	60,28	60,78	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	53,47	57,97	62,47	66,97	71,47	75,97	80,47	
3.	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Persen	6,94	8,79	10,28	12,35	14,43	16,57	18,60	
4.	Rasio Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Persen	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	
5.	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	Persen	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	
17	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	15,00	19,50	24,00	28,50	33,00	37,50	42,00	
2.	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Bangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0,40	0,75	0,96	7,63	31,75	61,68	79,78	
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan									
	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	Persen	50,00	60,00	75,00	95,00	100,00	100,00	100,00	
	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	Persen	0,00	0,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	
	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan	Persen	0,00	0,00	4,22	6,33	7,94	9,36	10,64	
3	Urusan Pemerintahan Pilihan									

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan									
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	85	90	90	90	90	90	90	
2	Produksi Perikanan Budi Daya	Ton	50	75	75	75	75	75	75	
2	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata									
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	0.71	0.71	0.80	0.95	1.18	1.57	2.08	
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	Persen	0,71	0,71	0,80	0,95	1,18	1,57	2,08	
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	0,00	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian									
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	0,00	0,26	4,00	0,50	0,13	0,11	0,13	
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	0,20	0,22	0,24	0,25	0,35	0,38	0,40	
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	Persen	0,00	0,00	5,53	0,01	0,18	0,09	0,05	
4	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	Persen	58,18	16,8	17,8	18,8	19,8	19,8	20	
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persen	0,00	36,00	42,86	50,00	57,14	4,29	71	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	0,00	8,33	6,67	5,83	5,42	5,00	4,58	
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan									
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah	Persen	12,5	13,58	14,65	15,73	16,80	17,88	18,95	
2	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian									
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Persen	46,41	55,52	45,52	67,71	70,13	70,13	70,13	
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Persen	0	0	0	0	0	0	0	
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah	Persen	0	0	0	0	0	0	0	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.									
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	Persen	0	0	0	0	0	0	0	
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Persen	0	0	0	0	0	0	0	
4	Urusan Penunjang Pemerintahan									
1	Perencanaan									
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Persen	80	85	88	90	92	94	95	
2	Keuangan									
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	Persen	16	17	18	19	20	21	22	
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	1,71	1,41	1,64	1,67	1,72	1,75	1,79	
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	28,15	30,97	34.06	37,47	41,22	45,34	49,97	
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	6,89	16,34	17,98	19,77	21,75	23,93	26,32	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	40	30,99	34,09	37,50	40,00	40,00	40,00	
6	Persentase Besaran SILPA	Persen	90	90,25	91,50	92,00	93,00	94,50	96,00	
3	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan									
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	41,44	46,44	51,44	56,44	61,44	66,44	71,44	
4	Penelitian dan Pengembangan									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00	72,00	74,00	
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	35	40	45	50	52	60	63	
5	Pengawasan									
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori/Opini	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai (1-5)	1	1	1	1	2	2	2	
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai (2-5)	2	2	2	2	3	3	3	
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai (1-5)	1	2	2	2	2	3	3	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	63,36	65	66	67	69	70	71	
6	Pengadaan									
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	8.92	10.42	14.42	18.42	22.42	26.42	30.42	
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	0	0	5	5	6	9	11	
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	2/9	3/9	3/9	4/9	4/9	5/9	5/9	
7	Hubungan dengan Perwakilan Daerah									
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	Persen	80.00	85.00	85.00	88.00	88.00	92.00	95.00	
8	Pelayanan Publik									
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	8,60	82,40	83,20	84,00	84,80	85,50	86,40	

BAB V
PENUTUP

Bab penutup memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

5.2 KESIMPULAN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 memegang peran strategis sebagai pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan selama lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis yang selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Mappi.

Penyusunan RPJMD ini mengadopsi pendekatan teknokratik yang mengandalkan analisis berbasis data dan metode ilmiah. Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek krusial, mulai dari kondisi umum daerah, kinerja pembangunan, hingga kerangka pendanaan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dirumuskan tidak hanya didasarkan pada kajian yang objektif dan terukur, tetapi juga secara terarah menjawab visi pembangunan daerah, yaitu:

"***Percepatan Pembangunan untuk perubahan Mappi lebih Religi, Mandiri, Bermartabat, Adil dan Makmur, Berkesinambungan dan Terintegrasi, serta Berkelanjutan guna menunjang terwujudnya kawasan baru ketahanan pangan di Provinsi Papua Selatan*".**

Sebagai bagian dari proses perencanaan yang komprehensif, dokumen ini juga mengidentifikasi berbagai permasalahan utama serta isu-isu strategis yang menjadi tantangan sekaligus peluang. Isu strategis yang dirumuskan merupakan

persoalan mendesak dan berdampak luas yang memerlukan respons kebijakan yang cepat dan tepat. Seluruh isu strategis yang telah diidentifikasi menjadi fondasi utama dalam merumuskan enam pilar transformasi yang tertuang dalam misi pembangunan: peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur merata, pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi lokal, reformasi tata kelola pemerintahan, penguatan sosial budaya, serta penjaminan kelestarian lingkungan hidup. Setiap program prioritas yang dirancang di bawah pilar-pilar ini dilengkapi dengan indikator keberhasilan yang terukur, sehingga capaian pembangunan dapat dievaluasi secara berkala dan menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan di masa mendatang.

Pada hakikatnya, RPJMD ini adalah sebuah cetak biru transformasi untuk membawa Kabupaten Mappi keluar dari tantangan fundamental seperti ketergantungan fiskal dan status daerah tertinggal menuju kemandirian ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal dan kelestarian lingkungan. Melalui dokumen perencanaan ini, pembangunan di Kabupaten Mappi diharapkan dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing daerah, yang pada puncaknya akan memantapkan peran strategis Mappi sebagai kawasan ketahanan pangan baru di Provinsi Papua Selatan.

RPJMD ini dirancang untuk menjadi pedoman yang solid bagi seluruh pemangku kepentingan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan berkolaborasi secara sinergis. Dengan demikian, dokumen RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 ini diharapkan menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat dalam mewujudkan Mappi yang lebih maju dan sejahtera.

5.3 KAIDAH PELAKSANAAN

Keberhasilan pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025–2029 sangat bergantung pada komitmen, kolaborasi, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan serangkaian kaidah

pelaksanaan yang berfungsi sebagai pedoman umum dalam setiap tahap implementasi RPJMD. Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mappi tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Dokumen RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen pembangunan 5 tahun yang harus dipedomani bersama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta wajib memedomani dan mendukung seluruh kebijakan yang termuat dalam dokumen tersebut, seperti visi, misi, arah kebijakan, dan program prioritas sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing pihak;
2) Setiap Perangkat Daerah (PD) atau unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi wajib memedomani dalam setiap perumusan kebijakan, seperti RKPD, Renstra, Renja, dan kebijakan lainnya;
3) Peningkatan sinkronisasi substansi antara RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029, RPJMN 2025-2029, dan dokumen lainnya;
4) Peningkatan konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen RPJMD dengan kebijakan pendanaan harus dilakukan dalam rangka meningkatkan perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran;
5) Pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan APBD semata, namun dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan pembiayaan alternatif-inovatif melalui perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pembiayaan yang baru, peningkatan kelembagaan pembiayaan yang adaptif, pemanfaatan TIK dalam proses bisnis, dan optimalisasi peran sektor keuangan daerah;
6) Penerapan kaidah pelaksanaan ini harus didukung oleh pemanfaatan TIK melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh siklus pembangunan;
7) Dokumen RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 didesain secara adaptif. Oleh karena itu, memuat mekanisme perubahan yang memastikan adanya ruang penyesuaian terhadap berbagai faktor yang tidak dapat dikendalikan. Mekanisme perubahan dilakukan dengan

mempertimbangkan *force majeure*, yaitu perubahan geopolitik, geoekonomi, bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Setiap penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 harus dengan prinsip, yaitu akuntabel, transparan, efektif, dan efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi; dan

8) Untuk memastikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2025-2029 dapat berjalan baik, maka dibutuhkan penerapan manajemen risiko pembangunan daerah mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

5.4 PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1) Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah; dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
2) Perangkat Daerah yang mengampu urusan perencanaan bertanggungjawab melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD tahun 2025-2029;
3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJMD tahun 2025-2029 dilakukan setiap tahun;
4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan tingkat Perangkat Daerah, dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan dikoordinir oleh unit kerja bidang perencanaan; dan
5) Untuk mengantisipasi potensi hambatan, manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan dan terintegrasi dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah
Kabupaten Mappi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi

Tahun 2025 - 2029